REKONSTRUKSI HAK KORBAN PERSEORANGAN DALAM PENUNTUTAN TERDAKWA BERBASIS NILAI KEADILAN DAN KEMANFAATAN

DISERTASI

IKHWALUDDIN SIMATUPANG
10302000433

Promotor
Prof . Dr.H. Mahmutarom HR., S.H., M.H

Co – Promotor
Prof.Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum



Program Doktor Ilmu Hukum
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
2021

LEMBAR PENGESAHAN

REKONSTRUKSI HAK KORBAN PERSEORANGAN DALAM PENUNTUTAN TERDAKWA BERBASIS NILAI KEADILAN DAN KEMANFAATAN

Oleh

IKHWALUDDIN SIMATUPANG
10302000433

Telah Disetujui

Untuk Memenuhi Syarat Ujian Terbuka Disertasi
Yang Telah Disetujui oleh *Promotor* dan *Co-Promotor* di bawah ini

Semarang, April 2021

PROMOTOR	CO-PROMOTOR
Prof . Dr.H. Mahmutarom HR., S.H., M.H	Prof.Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN: 0618035901	NIDN: 0628046401

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Fakults Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Prof .Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

NIDN: 0621057002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ikhwaluddin Simatupang,SH.,M.Hum.**

NIM : **10302000433**

Alamat : **Jl. Harapan Pasti No.30 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan**

Asal Instansi : **Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Benar karya disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana, Magister dan/atau Doktor di universitas/perguruan tinggi manapun).
2. Benar karya disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan *Promotor* dan *Co-Promotor.*
3. Benar dalam karya disertasi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkannya sebagai acuan dan menuliskan sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka.
4. Benar pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena disertasi ini, serta sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Semarang, April 2021

Yang Membuat Pernyataan

Ikhwaluddin Simatupang,SH.,M.Hum.

NIM: **10302000433**

MOTTO

"Sesungguhnya Allah Memerintahkan Untuk Berlaku Adil dan Berbuat Baik"
(Q.S An-Nahl : 90)

"Sebaik-baiknya Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Sesama"
(HR.Thabrani)

Keadilan Adalah Kompas, Kemanfaatan Merupakan Layar dan Kapal Sebuah Kepastian Hukum.
(Ikhwaluddin Simatupang)

PERSEMBAHAN

Disertasi ini dipersembahkan kepada :

1. Nusa dan Bangsa Indonesia.
2. Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
3. Civitas Akademika Universitas Sumatera Utara (USU).
4. Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Abstrak

Pengaturan hak korban penuntutan terdakwa beberapa tahun terakhir menjadi permasalahan yang memerlukan kajian untuk menemukan penyelesaiannya. Reaksi korban / keluarga korban atas tuntutan jaksa dalam persidangan di pengadilan negeri menjadi perhatian penting. Tujuan dalam penelitian disertasi ini Untuk menjelaskan dan menganalisis kedudukan korban perseorangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Untuk menganalisis penyebab hak korban perseorangan dalam penuntutan terdakwa saat ini belum berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan. Untuk menemukan rekonstruksi hak korban perseorangan dalam penuntutan terdakwa yang berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan.

Grand Theori (tujuan hukum dan teori keadilan hukum menurut islam), *Middle Theori* (sistem hukum), *Appliet Theori* (hukum *Progresif* dan ***Restoratif)*** serta perbandingan beberapa negara. Paradigma penelitian ini adalah konstruktuvisme. Di dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data pada penulisan yang digunakan adalah model studi pustaka . Data dianalisis dengan metode analisis *normative kualitatif*, yang berupa taraf sinkronasi dan penemuan asas hukum. Selain itu juga akan dilakukan prosedur verifikasi data dan penafsiran data dengan metode *hermeuneutik*.

Hak- hak korban dalam penuntutan terdakwa saat ini belum berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan disebabkan oleh substansi hukum, kultur hukum dan struktur hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini rekonstruksi dibagi atas Rekonstruksi Nilai Rekonstruksi Norma. Adapun tujuan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama. Harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya dan terakhir baru kepastian hukumnya. Pasal 75, Pasal 284 (3) KUHP serta Pasal 14, Pasal 72, Pasal 244 KUHAP direkonstruksi serta hak korban atas informasi pemeriksa perkara sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (2) UULPSK diletakkan Bab VI KUHAP Pasal 68 KUHAP sehingga Korban Perseorangan memilki hak dalam penuntutan terdakwa berdasarkan nilai keadilan dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Hak Korban Perseorangan, Penuntutan.

Abstract

The regulation of the rights of the victim to the prosecution of the accused in recent years has become a problem that requires a study to find a solution. The reaction of the victim / victim's family to the prosecutor's demands during the trial at the district court is an important concern. The purpose of this dissertation research is to explain and analyze the position of individual victims in the criminal justice system in Indonesia. To analyze the causes of the rights of individual victims in the prosecution of the defendants, it is not currently based on the values of justice and benefit. To find the reconstruction of the rights of individual victims in the prosecution of the accused based on the values of justice and benefit.

Grand Theori (legal objectives), Middle Theori (legal system), Appliet Theori (Progressive and Restorative law) and a comparison of several countries. The paradigm of this research is constructivism. In this study using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique in writing used is the literature study model. The data were analyzed by using qualitative normative analysis method, in the form of synchronization level and the discovery of legal principles. In addition, data verification and data interpretation procedures will also be carried out using the hermeneutic method.

The rights of the victim in the prosecution of the defendant are currently not based on the value of justice and benefit due to the substance of the law, the culture of law and the structure of the law in Indonesia. In this study, the reconstruction is divided into the Reconstruction of Norms Reconstruction. The objectives of the law of justice, benefit and legal certainty are expected to be realized together. Justice must be prioritized first, then its usefulness and finally legal certainty. Article 75, Article 284 (3) of the Criminal Code and Article 14, Article 72, Article 244 of the Criminal Procedure Code were reconstructed and the victim's right to information on case examiners as stipulated in Article 5 paragraph (2) of the UULPSK is put in Chapter VI of the Criminal Procedure Code Article 68 of the Criminal Procedure Code so that Individual Victims have the right to prosecution the defendant based on the value of justice and benefit.

Keywords: Reconstruction, Individual Victim Rights, Prosecution.

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 156 Ayat (1) dan (2) KUHAP memberikan hak kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk menanggapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum. KUHAP tidak memberikan hak bagi terdakwa untuk aktif dalam penyusunan dakwaan oleh JPU. Bahkan Jika hakim menyatakan keberatan terdakwa atau penasihat hukum diterima sehingga perkara tidak diperiksa lebih lanjut, perlawanan terhadap perkara dimaksud hanya dapat dilakukan JPU. Ketidakseimbangan antara hak terdakwa dan korban dalam dakwaan merupakan suatu ketidakadilan.

Dalam Putusan MARI Nomor 296.K/Pid/1987 korban tidak dapat mengajukan keberatan hukum kepada pengadilan atas keteledoran jaksa penuntut umum, karena mengubah surat dakwaan yang mengakibatkan dakwaan batal demi hukum. Mahkamah Agung berpendapat bahwa korban kejahatan tidak memiliki hak hukum terhadap perbuatan jaksa dan oleh karenanya tertutup kemungkinan korban melakukan upaya hukum menurut pertanggungjawaban hukum terhadap jaksa tersebut.

Putusan yang berisi pembebasan atau pelepasan terdakwa atau dakwaan jaksa dinyatakan batal demi hukum yang bersumber dari kekurangcermatan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan atau dalam penyusunan rekuisitor, bukan disebabkan tidak cukup bukti atau ada keragu-raguan dalam pernbuktian dapat merugikan korban kejahatan sebagai pancari keadilan, yakni Putusan MARI yang memuat kekurangcermatan jaksa penuntut umum yang menyebabkan terdakwa dibebaskan, antara lain : putusan MARI Nomor 26.K/Pid/1988, 8 Februari 1980, putusan MARI Nomor 321/K/Pid/1983,tanggal 26 Mei 1984, putusan MARI Nornor 162.K/Pid/1986. Tanggal 26 September 1987, putusan MARI Nomor 1677.K/Pid/1987, tanggal 7 Februari 1990.

Pasal 13, Pasal 14 huruf g dan Pasal 137 KUHAP tidak memberi hak bagi korban untuk mengajukan tuntutan pidana. Hak untuk mengajukan tuntutan pidana hanya diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum, Pasal 140 ayat (2) KUHAP bahkan memberikan kewenangan mutlak bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan terhadap suatu tindak pidana.

Putusan MARI Nomor 1457.K/Pid/1991 menentukan bahwa korban kejahatan sebagai pihak yang dirugikan tidak dapat mengajukan gugatan hukum ke pengadilan atas kecerobohan jaksa atau hakim yang merugikan kepentingan korban.

Pengaturan hak korban dalam penuntutan terdakwa beberapa tahun terakhir menjadi permasalahan yang memerlukan kajian untuk menemukan penyelesaiannya. Reaksi korban/keluarga korban atas tuntutan jaksa dalam persidangan di pengadilan negeri. menjadi perhatian penting untuk diberikannya hak kepada korban dalam menentukan besar-kecilnya tuntutan pidana atau bahkan tidak mengajukan tuntutan pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan negeri.

Keadaan-keadaan di atas merupakan suatu fakta bahwa adanya kesenjangan antara hak-hak korban berdasarkan hukum positif di Indonesia dengan keadilan dan kemanfaatan hukum yang diharapkan korban. Reaksi-reaksi korban terhadap dakwaan dan tuntutan JPU sebagaimana diuraikan di atas merupakan fakta adanya kebutuhan pemenuhan hak korban dalam mendakwa dan menuntutterdakwa. Dalam hal ini Mahmutarom dan Sri Endah Wahyuningsih mengemukakan:

"…Jika kepentingan korban tidak mendapat perhatian yang semestinya, maka akan mudah pihak korban atau pihak lain yang berkepentingan melakukan perbuatan main hakim sendiri."

"…berdasarkan aturan dalam KUHP selama ini, perhatian terhadap pihak korban dan ahli waris/ keluarganya akibat tindak pidana yang merupakan hak adami seperti tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan belumlah memadai karena orientasi pemidanaan menurut KUHP adalah pembalasan atau perbuatan (daad-strafrecht) yang dilakukan kepada si pelaku tanpa memperhatikan pihak korban atau ahli waris."

Dalam Q.S. An Nisa'/4:58, Allah Subhanahu Wata'la berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Pada Q.S. An-Nahl/16:90Allah Subhanahu Wata'la berfirman:"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Pada kasus penipuan dan penggelapan terdakwa Ismayati, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) melalui Putusan Nomor : 1600 K/ Pid/ 2009 mengabulkan permohonan pencabutan Pengaduan korban Emiwati agar terdakwa tidak dihukum.

Muhammad Alim mengemukakan bahwa asas manfaat merupakan salah satu asas hukum dalam Al Quran. Asas kemanfaatan tersirat dari Q.S. Al Baqarah/2:178:"Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang dimaafkan) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu ada korban lah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.Dan barang siapa melanggr batas maka baginya siksa yang pedih".

B. Rumusan Masalah:

Adapun permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan korban perseorangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Mengapa hak korban perseorangan dalam penuntutan terdakwa saat ini belum berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan?
3. Bagaimana rekonstruksi hak korban perseorangan dalam penuntutan terdakwa yang berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis kedudukan korban perseorangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis penyebab hak korban perseorangan dalam penuntutan terdakwa saat ini belum berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan.
3. Untuk menemukan rekonstruksi hak korban perseorangan dalam penuntutan terdakwa yang berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitan ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran, manfaat, dan kontribusi di bidang ilmu hukum baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan sumbangsih pemikiran tehadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan lebih khusus lagi bidang hukum acara pidana. Penelitian ini bermanfaat untuk menemukan materi hukum baru tentang hak korban dalam mengajukan tuntutan pidana.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)dalam merumuskan aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum acara pidana pada perancangan peraturan perundang-undangan baik yang baru maupun perubahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kepada peneliti lain yang meneliti masalah sejenis serta menambah *literatur/referensi* ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya hukum acara pidana dan lebih khusus lagi mengenai hak korban dalam mengajukan tuntutan pidana.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam tulisan ini memberikan pengertian atau penjelasan berkaitan dengan judul disertasi, yakni: 1.Rekonstruksi, 2.Hak, 3.Korban, 4.Perseorangan, 5.Penuntutan, 6.Terdakwa,7.Nilai, 8.Keadilan dan 9. Kemanfaatan.

Rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pembaharuan sistem atau bentuk berupa hak korban perseorangan dalam penuntutan terdakwa yang lama digantikan dengan aturan yang baru.

Hak diartikan sebagai wewenang menurut hukum. Korban dalam penelitian ini ialah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Terdakwa sebagai orang yang didakwa (dituntut,dituduh) telah melakukan tindak pidana dan adanya cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. Terdakwa menurut KUHAP merupakan seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Nilai diartikan sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan dan sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Keadilan adalah perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil. Kemanfaatan dimaknai bermanfaat; kegunaan

F. Kerangka Teori

.

1. *Grand Theory* (Teori Tujuan Hukum dan Teori Keadilan Hukum Islam)

Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut *uasas prioritas*. Teori ini menyebut bahwa tujuan hukum pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, baru kemudian kemanfaatannya, dan terakhir kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-intern yang dapat menghancurkannya.

Kata ”adil” dalam Bahasa Arab adalah *nomina augentie* (*Ism Fail*-Bahasa Arab) yang berasak dari kata benda “adala” yang mempunyai arti:

1. Tegak lurus atau meluruskan;
2. Atau duduk lurus atau langsung;
3. Untuk menjadi sama atau menyamankan; atau
4. Untuk menyeimbangkan atau bobot pengimbang;

Allah Subhanahu wata’ala memerintahkan untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. As Syuura/42 Ayat 15, yang artinya: "Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintakan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: Aku beriman kepadan semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal/ kamu. Tidak ada pertengkaran

antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).”

Dalam Q.S. Shadd/38:26, Allah berfirman:”Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Eko Soponyono, dalam pidato pengukuhan guru beşar mengemukakan konsep Adil dan Hikmah Al-Qur'an adalah dalam semua urusan, Al-Qur'an mendistribusikan kewajiban sikap adil dalam beberapa hal seperti:

1. Menetapkan Hükum (QS. An- Nisa/4: 58)
2. Memberi hak orang lain (QS. An Nahl/16: 90)
3. Adil dalam berbicara (QS. Al-An'am/6:152)
4. Adil dalam kesaksian (Q.S. An-Nisaa/4:135)
5. Adil dalam pencatatan hutang pihutang (QS. Al- Baqarah/2: 282)
6. Adil dalam mendamaikan perselisihan (QS. Al-Hujarat/49:9)
7. Adil dalam menghadapi orang yang tidak disukai (QS. Al-Maidah/5:8)
8. Adil dalam pemberian balasan (Q.S. Al-Maidah/5:95)

Dalam menentukan keadilan itu tidak semua harus ditangani oleh ahli agama saja, tetapi dapat diserahkan kepada lembaga atau pemerintah yang baik yang berdasarkan lima prinsip dasar, yaitu (1) prinsip Keesaan Tuhan (*ketauhidan*), (2) prinsip semua berdasar pada hukum (*Al 'Adalah*/ persamaan), (3) prinsip janji dan peringatan *(Al-wa 'd wa ala waid*) yang dapat dipahami dengan prinsip legisme, (4) prinsip kesamaan keseimbangan (*al manzila byan al minzalatayn*), (5) prinsip menegakkan kebaikan dan mencegah/ menindak hal- hal yang tidak benar (*amar ma 'ruf nahi mungkar*). Di samping teori dan aliran mengenai keadilan tersebut, didalam Islam juga dikenal adanya keadilan legal atau keadilan menurut undang-undang.

Kemanfaatan dalam Hukum Islam ditemukan padaQ.S. Al-Maidah/5:45,yang artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Pada Q.S. Al-Baqarah/2:219, Allah berfirman:”Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.

Tujuan pidana yang berkembang dahulu sampai kini telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Tujuan yang juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) atau tetribusi (*retribution*), yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan kesimbangan antara yang hak dan batil. Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.

2. *Middle* Theory (Teori Sistem Hukum)

Menurut L. M. Friedman ada tiga elemen dari sistem hukum, yaitu:

a. Structure;

b. Substance;

c. *Legal culture*.

Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Aspek kedua, adalah substansi, yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan, dan aspek ketiga dari sistem hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka. Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur yang baik. Selanjutnya struktur dan substansi kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat dengan baik pula. Dengan kata lain, hukum akan berperan dengan baik manakalah ketiga aspek subsistem yang struktur, substansi dan budaya hukum itu saling berinteraksi dan memainkan peran sesuai fungsinya, sehingga hukum akan berjalan secara serasi dan seimbang, sesuai dengan fungsinya. Ibarat seekor ikan, ia akan hidup dengan baik manakala ditunjang oleh kualitas air kolam yang baik dan makanan yang baik pula. Apabila ketiga subsistem hukum tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul problem dalam upaya memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.

3. *Applied Theory*(Teori Hukum Progresif dan Teori *Restorative Justice*)

3.1. Teori Hukum Progresif

Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukum sendiri.

Teori hukum progresif pertama kali dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo sejalan dengan teori hukum pembangunan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat, tetapi perbedaan yang signifikan adalah teori hukum pembangunan memandang hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat, sedangkan teori hukum progresif berpandangan bahwa hukum bukan sekedar sarana, bahkan tumbuh berkembang bersama perkembangan masyarakat.

Teori hukum progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.

Adapun karakteristik dari hukum progresif dapat ditandai dengan pernyataan sebagai berikut:

a. Hukum ada untuk mengabdi pada manusia
b. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final, sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
c. Dalam hubungan progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdi pada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya.

Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkrit, karena undang-undang tidak meliputi segala kejadian yang timbul dalam masyarakat. Bagi hükum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hükum mengaktualisasikan hükum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hükum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*).

Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hükum progresif unluk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interprestasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hükum harus

dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hükum positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hükum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hükum yang kreatif menterjemahkan hükum itü dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

4. Teori *Restorative Justice*

Menurut Agustinus Pohan, apa yang dimaksud dengan *restorative justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam Sistern Hukum Pidana Indonesia yang bersifat *retributive*. *Restorative justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative Justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positifdan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak-asasi manusia. Prinsip-prinsip *resorative justice* adalah membuat pelaku bertanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.

Beberapa ahli memberikan pendapat tentang *restorative justice*, sebagaimana disebut di bawah ini:

1. Howard Zehr: keadilan *restoratif* adalah proses untuk melibatkan, dengan pihak menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
2. Tony Marshall : peradilan *restoratif* ialah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan.
3. Douglas,Yrn: keadilan *restoratif* adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Model keadilan *restoratif* memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung, antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban-pelaku.
4. Dignan: keadilan *restoratif* adalah kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang saat secara cepat dapat diterima dan didukung oleh pendidik, juris, pekerja sosial dan konseling sosial serta kelompok masyarakat.

Martin Wright mendeskripsikannya perspektif keadilan *restoratif* dalam beberapa hal:

1. Respon terhadap kejahatan hendak dibangun atas dasar pertanggungjawaban pelanggar dalam kualitas yang lebih baik yaitu

menumbuhkan tanggung jawab dan penerimaan kembali dalam masyarakat.

2. Kebijakan pencegahan kejahatan akan diintegrasikan dalam kebijakan sosial.
3. Adanya pengakuan bahwa peri!aku orang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, tetapi bukan ketakutan, misalnya pemberian insentif insentif, membangun estimasi diri. Sejauh orang dipengaruhi oleh sistem, mereka akan memiliki kesempatan untuk merespon pada keadilannya dari pada mereaksi terhadap kekerasannya.
4. Respon negara secara etik akan diterima, yaitu dalam batas-batas apa yang disyaratkan oleh masyarakat.
5. Korban akan diberi kesernpatan langsung terlibat dalam prosest tetapi tidak dibebani tanggung jawab untuk suatu keputusan dalam pemidanaan.
6. Pelanggar akan terlibat secara aktif, daripada menjadi objek pemidanaan yang pasif.
7. Keterlibatan masyarakat diperlukan dan diberdayakan, misalnya dengan membawa bersama kelompok mediator-mediator sukarela yang terlatih.

Di bawah ini disajikan dengan tabel mengenai pokok-pokok pikiran dari *restorative justice*.

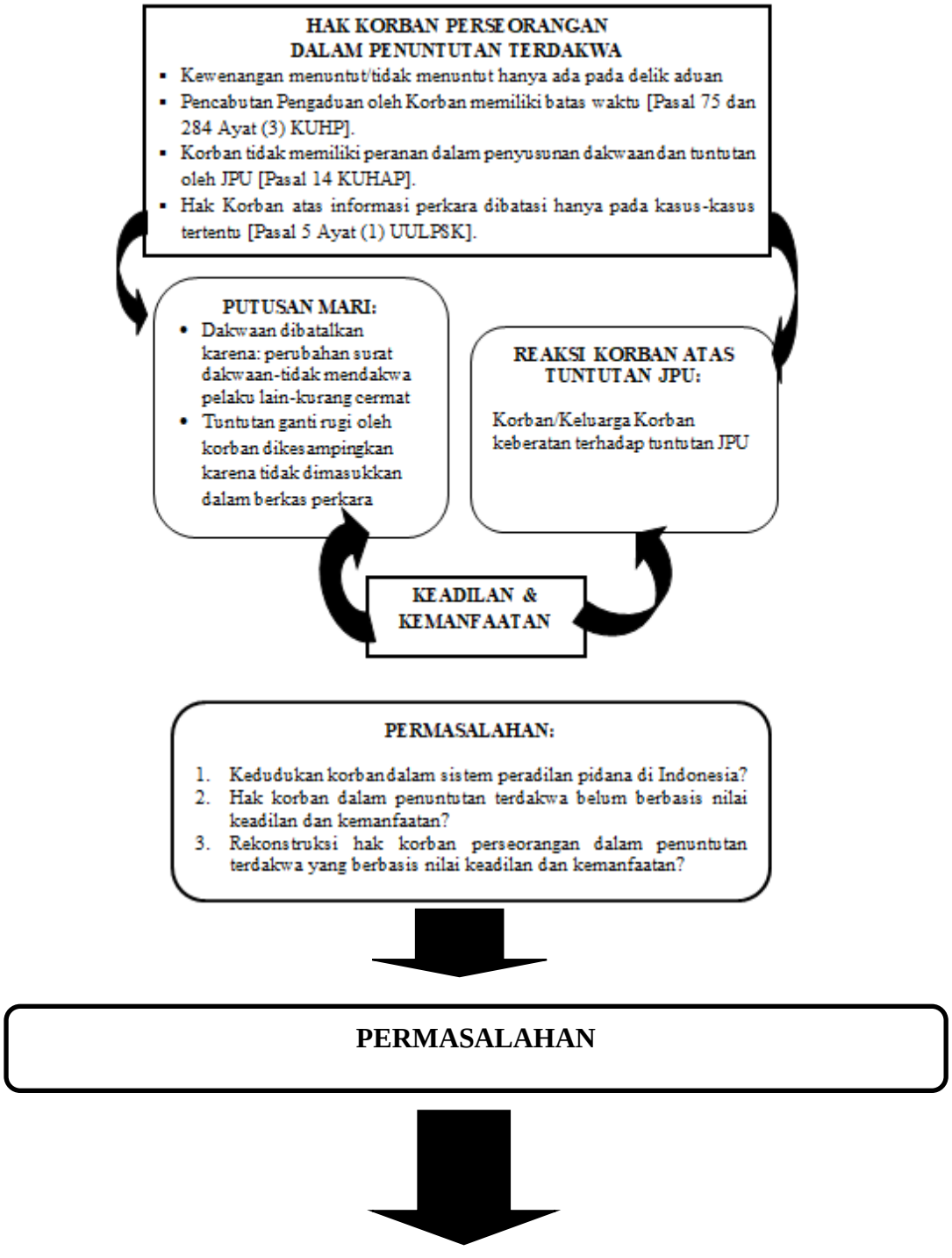
Tabel Pokok-pokok Gagasan Desain Pemidanaan Perspektif *Restoratif Justice*

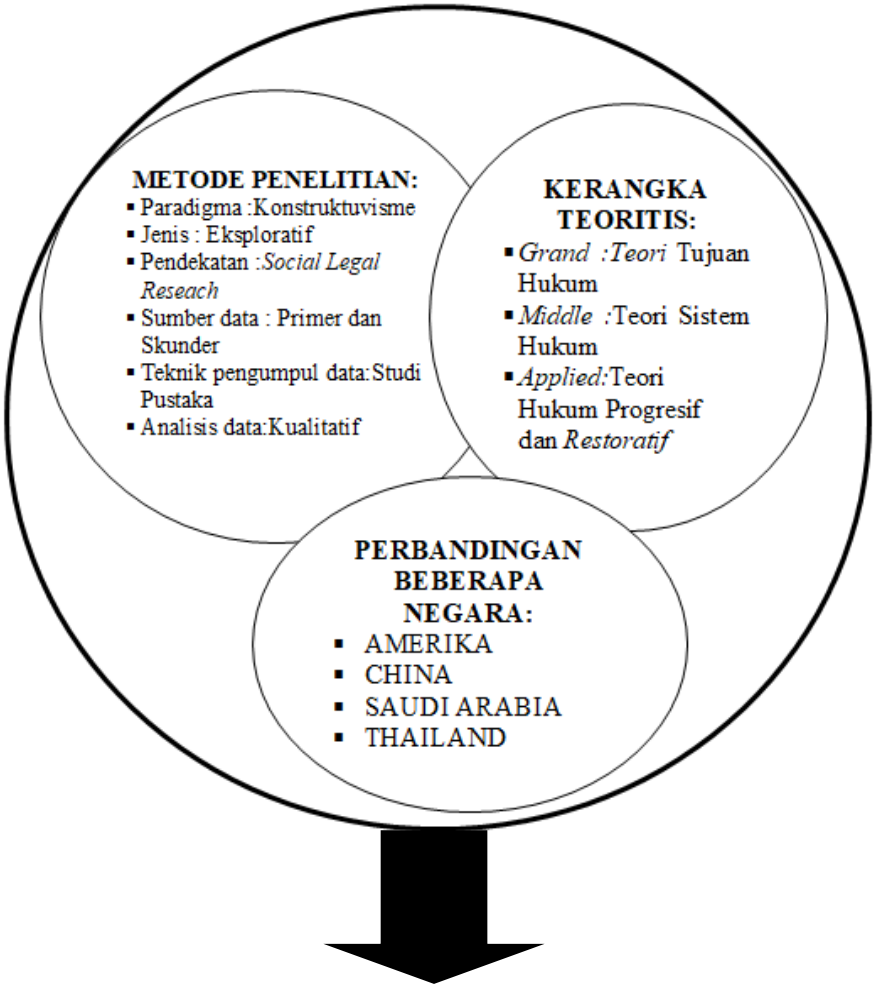
NO.	TEMA POKOK	KONSEP DASAR
1	Adanya Pidana(penjara)	Pidana (penjara) tidak penting / tidak perlu
2	Tujuan pidana	1. Pertanggung jawaban perbuatan 2. Menyelesaikan konflik 3. Mendamaikan
3	Pertanggungjawaban	1. Pertanggung jawaban terhadap dampak/ akibat kejahatan 2. Dasarnya kerugian, membahayakan dan menderitakan 3. Tidak dibatasi dalam bentuk pidana tetapi di pahami konteksnya secara keseluruhan
4	Bentuk pidana	1. Kewajiban merestorasi akibat kejahatan dalam bentuk restitusi

		atau kompensasi 2. Rekonsiliasi dan penyatuan sosial 3. Lamanya pidana tergantung kepada besarnya kerugian yang terjadi
5	Efek	1. Tanggung jawab social 2. Preventif 3. Menghindari stigmatisasi 4. Kehidupan di masa yang akan datang

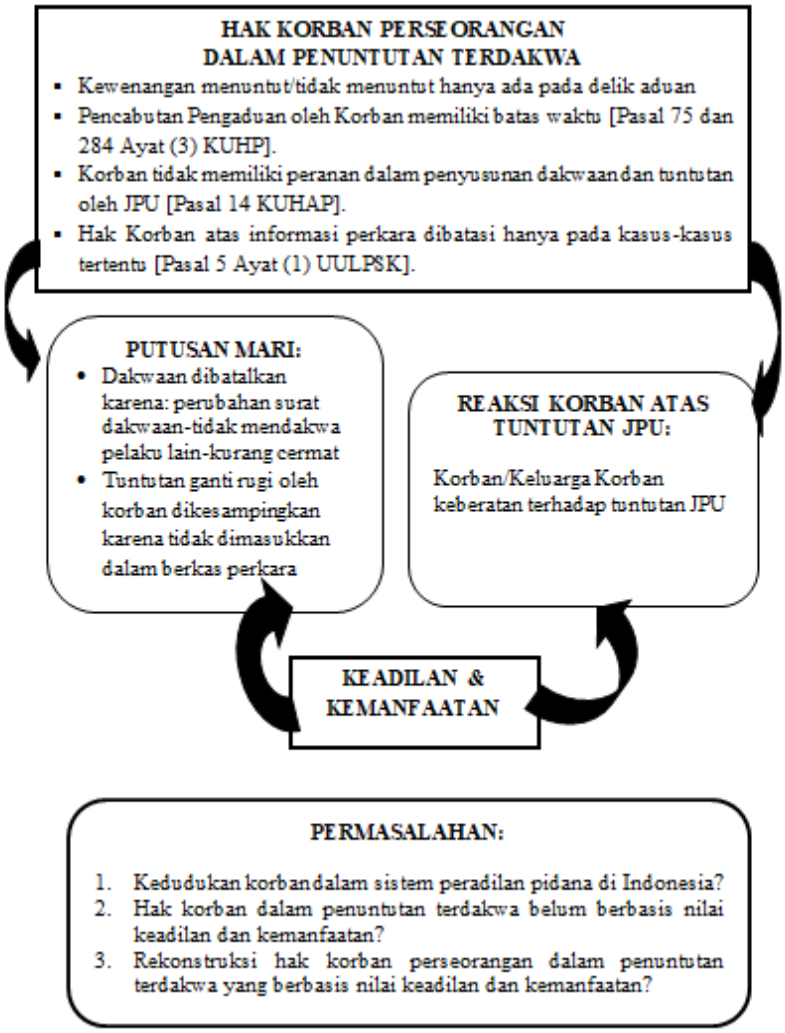
G. Kerangka Pemikiran

Skema alur pemikiran penelitian disertasi Hak Korban Perseorangan Dalam Penuntutan Terdakwa Berbasis Nilai Kedadialan dan Kemanfaatan adalah sebagaimana di bawah ini:


HAK KORBAN PERSEORANGAN
DALAM PENUNTUTAN TERDAKWA
Kewenangan menuntut/tidak menuntut hanya ada pada delik aduan
Pencabutan Pengaduan oleh Korban memiliki batas waktu [Pasal 75 dan 284 Ayat (3) KUHP].
Korban tidak memiliki peranan dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan oleh JPU [Pasal 14 KUHAP].
Hak Korban atas informasi perkara dibatasi hanya pada kasus-kasus tertentu [Pasal 5 Ayat (1) UULPSK].
PUTUSAN MARI:
Dakwaan dibatalkan karena: perubahan surat dakwaan-tidak mendakwa pelaku lain-kurang cermat
Tuntutan ganti rugi oleh korban dikesampingkan karena tidak dimasukkan dalam berkas perkara
REAKSI KORBAN ATAS TUNTUTAN JPU:
Korban/Keluarga Korban keberatan terhadap tuntutan JPU
KEADILAN & KEMANFAATAN
PERMASALAHAN:
1. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Hak korban dalam penuntutan terdakwa belum berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan?
3. Rekonstruksi hak korban perseorangan dalam penuntutan terdakwa yang berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan?
PERMASALAHAN



REKONSTRUKSI HAK-HAK KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN DAN KEMANFAATAN



H. Metode Penelitian

1. Paradigma penelitian

Paradigma penelitian ini adalah *konstruktuvisme*. Aspek-aspek dalam paradigma Konstrutukvisme menurut Guba dan Lincoln adalah sebagai berikut:

a. Aspek *Ontologis* (*relativisme* dan *realitas*);
b. Aspek *Epistemologis* (*transaksionalis*/ *subjektivis*);
c. Aspek *Metodologis* (*hermeneutikal/ dialektikal*).

Aspek *ontologis* berupa *relativisme* dan realitas merupakan kontruksi sosial. Kebenaran sosial bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Aspek Epistemologis berupa *transaksionalis*/ *subjektivis* berupa pemahaman suatu tentang realitas atau temuan suatu realitas atau temuan sesuatu penelitian merupakan produk

interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. Aspek Metodologi berupa *hermeneutikal/ dialektikal*merupakan penelusuran kontruksi melalui interaksi antar sesama penganut/ pemegang dan objek observasi/ investigasi, dengan tehnik *hermenneutikal* dan pertukaran dialektikal kontruksi tersebut diinterpretasi, dibandingkan; tujuan; distilasi kontruksi *consensus* atau *resultante* kontruksi.

2. Jenis penelitian

Jenis Penelitian berisi pemilihan promovendus dalam melakukan penelitian apakah memakai jenis penelitian hukum deskriptip analatis atau penelitian eksploratif atau eksplanatoris. Jenis Penelitian disertasi ini adalah eksploratif.

Menurut Kotler penelitian ekploratif adalah penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis. Menurut Kuncoro penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru dan untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya. Tujuan utama dari jenis penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi situasi penelitian dan tujuan khusus atau data yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian eksploratif sangat bermanfaat untuk pemahaman situasi yang lebih baik atau mengidentifikasi alternatif keputusan.

3. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian berkerjaanya sistem hukum (*law in action*) di masyarakat.

Dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas peneiliti adalah mengkaji tentang apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis sosiologis pada penelitian ini adalah penelitian tehadap efektifitas hukum. Menurut Bambang Waluyo sebagaimana dilutip Ediwarman, penelitan efektifitas hukum,meliputi:

1. Penelitian berlakunya hukum positif;
2. Penelitian berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat;
3. Penelitian terhadap faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan hukum positif; dan
4. Penelitian pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan hukum positif.

4. Sumber data

Sumber data penelitian berisi data primer (data yang diperoleh dari praktek hukum/ hukum empirik) dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen, guna mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sesuai kajian penelitian disertasi *promovendus*.

4.1 Bahan hukum primer

Data primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan.

4.2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, di mana bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hasil karya sarjana yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, baik dalam bentuk buku maupun jurnal atau makalah.

4.3 Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahwa hukum sekunder, seperti kamus (hukum, Inggris dan Indonesia), ensiklopedia dan lain-lain.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penulisan yang digunakan adalah model studi pustaka (*library research*). Studi kepustakaaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan disertasi ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

6. Analisis data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi/ interpretasi, komparasi dan sejenis itu. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan

dan datanya menunjang) Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

SIMPULAN

1. **Kedudukan Korban Perseorangan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

   Kedudukan korban dalam penyelidikan/penyidikan, penuntutan dan pengadilan berdasarkan KUHAP, tidak lebih hanya sebagai alat bukti (keterangan saksi).Ketika keterangan yang diberikan oleh korban dianggap telah mencukupi, maka selesai juga kedudukan dan peranan korban dalam mekanisme peradilan pidana.Korban tidak lagi berhak untuk ikut campur dalam menentukan sanksi yang setimpal yang akan dituntutkan atau dijatuhkan kepada pelaku, karena semua itu telah menjadi monopoli birokrasi pengadilan, bahkan ketika sanksi telah dijatuhkan dan harus dijalankan oleh pelaku, kewenangan untuk menentukan cara bagaimana sanksi itu dijalankan oleh pelaku, diputuskan tanpa meminta pendapat korban.Kedudukan korban kejahatan dalam praktek hukum acara pidana di Indonesia merupakan pihak yang paling tidak diuntungkan karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. KUHAP lebih menitikberartkan perlindungan atas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa dibandingkan kedudukan dan hak-hak korban sehinga tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap korban kejahatan. Hukum Islam mengakui sistem pengampunan (hak korban dalam memberikan pengampunan), prinsip ini diakui oleh hukum modern pada masa kini sehingga hukum Islam tetap lebih unggul daripada hukum konvensional karena memilih logika penerapan pengampunan tersebut dengan baik.Korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni hukuman *qishash*. Apabila ia memaafkannya, gugurlah hukuman *qishash* tersebut.*Restorative justice* adalah wahana untuk memperbaiki korban, pelaku dan masyarakat akibat adanya kejahatan paralel dengan Model Hak-hak Prosedural (*The Procedural Rights*). Model Hak-hak Prosedural penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan yang kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pernasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Pendekatan semacam ini melihat si korban sebagai seorang subjek harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

2. **Hak Korban Perseorangan Dalam Penuntutan Terdakwa Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan dan Kemanfaatan**

   Hak korban dalam penuntutan terdakwa saat ini belum berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan disebabkan oleh substansi hukum, kultur hukum dan struktur hukum yang ada di Indonesia.

Substansi hukum positif menentukan bahwa posisi korban kejahatan hanya sebagai saksi (Pasal 108 Ayat (1) KUHAP *Jo* Pasal 184 KUHAP) dan sebagai penuntut atau penggugat ganti-kerugian (perdata) yang digabungkan dalam prosedur pidana (Pasal 98-101 KUHAP).Kewenangan membuat surat dakwan dan melakukan penuntutan berdasarkan Pasal 14 KUHAP hanya dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum.KUHAP.Pencabutan pengaduan dalam hukum positif yang memiliki batas waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP),dikecualikan untuk delik aduan zina (Pasal 284 KUHP) yang pencabutan pengaduannya sebelum dimulainya pemeriksaan perkara di persidangan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan tidak memiliki manfaat hukum.

Kultur Positivisme pada penegakan hukum telah melahirkan hukum dalam skesta matematika, menyelesaikan hukum yang terjadi dalam masyarakat berdasar apa yang tertulis dalam teks undang-undangHukum bukan hanya bangunan peraturan biasa, namun disadari juga sebagai bangunan ide, kultur dan cita-citaHukum bukan hanya bangunan peraturan biasa, Keterpurukan hukum di Indonesia lebih dikarenakan penyingkatan hukum sebagai *rule of law* tanpa melihat sebagai *rule of morality*. Akibatnya hukum hanya dilihat sebagai peraturan prosedur yang lekat dengan kekuasaan. Padahal di balik hukum juga sarat dengan nilai, gagasan untuk membangun kultur baru yang lebih kontekstual pada rasa keadilan masyarakat.

Kelemahan struktur hukum pada pemenuhan hak korban perseorangan dalam penuntutan terdakwa adalah ketiadaan sarana teknologi elektronik yang dapat merekam seluruh kegiatan persidangan dalam bentuk suara yang dapat langsung diubah menjadi tulisan. Hal ini merupakan penghambat bagi korban untuk secara lengkap dancepat mengetahui jalannya persidangan berikut fakta-faktanya yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi korban dalam mengajukan berat/ringannya tuntutan kepada terdakwa.

3. Rekonstruksi Hak Korban Perseorangan Dalam Penuntutan Terdakwa Yang Berbasis Nilai Keadilan dan Kemanfaatan

Rekonstruksi hak korban perseorangan dalam penuntutan terdakwa berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma. Dalam rekonstruksinilai disimpulkan bahwa apabila kepastian hukum ditempatkan sebagai nilai yang diutamakan, maka kepastian hukum ini akan menggeser nilai kegunaan dan nila keadilan ke samping karena yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan memiliki kegunaan bagi masyarakatnya, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Ketiga nilai dasar tujuan hukum diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya, dan terakhir baru kepastian hukumnya.

Rekonstruksi norma dalam hal ini adalah pembaharuan beberapa ketentuan dalam hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan hak korban dalam penentuan tuntutan/hukuman terdakwa. Ketentuan-ketentuan dimaksud adalah mengenai: hak korban perseorangan mencabut pengaduan, peran korban dalam

membuat surat dakwaan dan tuntutan serta hak korban atas iniformasi pemeriksaan perkara.

Tabel Rekonstruksi Ketentuan KUHP tentang Pencabutan Pengaduan

KUHP	NORMA	
	Hukum Positif	**Rekonstruksi**
Pasal 75	Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.	**Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali selama putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap.**
Pasal 284	(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 2.a.seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.	1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 2.a.seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
	(2).Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan	(2).Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan

	bercerai atau pisah-meja dan ranjang arena alasan itu juga.	bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
	(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.	(3)**Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72 dan 73.**
	(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.	**Dihapus**
	(5)Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.	(4) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Rekonstruksi Ketentuan KUHAP tentang Kewenangan Penuntut Umum (Pasal 14 KUHAP)

NORMA		**PENJELASAN**
Hukum Positif	**Rekonstruksi**	
Penuntut umum mempunyai wewenang: a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;	(1). Penuntut umum memiliki wewenang: a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;	1. Pasal 14 KUHAP yang semulatanpa ayat ditambah satu ayat sehingga menjadi tiga ayat (Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)). 2. Rekonstruksi dalam bentuk penambahan materi pasal, pada ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan hak bagi korban perseorangan atau ahli warisnya untuk terlibat dalam proses

c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; d. membuat surat dakwaan; e. melimpahkan perkara ke pengadilan; f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; g. melakukan penuntutan; h. menutup perkara demi kepentingan hukum; i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurutketentuan undang-undang ini; j. melaksanakan penetapan hakim.;	c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; d. membuat surat dakwaan; e. melimpahkan perkara ke pengadilan; f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; g. melakukan penuntutan; h. menutup perkara demi kepentingan hukum; i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurutketentuan undang-undang ini; j. melaksanakan penetapan hakim.; (2). Apabila korban tindak pidana merupakan korban perseorangan, maka dalam hal penuntut umum membuat surat dakwaan terlebih dahulu penuntut umum memberikan hak	penyusunan dakwaan. 3. Rekonstruksi dalam bentuk penambahan materi pasal, pada ayat (3) dimaksudkan untuk memberikan hak bagi korban perseorangan atau ahli warisnya untuk terlibat dalam menentukan tuntutan hukuman kepada terdakwa

	kepada korban atau ahli warisnya untuk menyampaikan pendapat atau saran. (3). Apabila korban tindak pidana merupakan korban perseorangan, maka dalam hal penuntut umum mengajukan tuntutan hukum, jumlah hukuman yang dituntut kepada terdakwa adalah sama dengan yang diinginkan korban perseorangan atau ahli warisnya.	

Rekonstruksi Ketentuan KUHAP tentang Hak Menerima Turunan Berita Acara Pemeriksaan Kewenangan Penuntut Umum (Pasal 72 KUHAP)

NORMA		**PENJELASAN**
Hukum Positif	**Rekonstruksi**	
Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.	(1). Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan. (2). Dalam hal koban perseorangan, atas permintaan korban atau atau ahli warisnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan.	1. Pasal 72 KUHAP yang semula tanpa ayat ditambah satu ayat sehingga menjadi tiga ayat (Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)). 2. Rekonstruksi dalam bentuk penambahan hak korban perseorangan atau ahli warisnya atas penerimaan turunan berita acara pemeriksaan.. 3. Rekonstruksi dimaksudkan dalam

		hubungan rekonstruksi Pasal 14 KUHAP yakni peranan korban perseorangan atau ahli warisnya dalam penyusunan dakwaan oleh JPU (Tabel 13).

Rekonstruksi Ketentuan KUHAP tentang Hak Mengajukan Banding (Pasal 67 KUHAP)

NORMA		**PENJELASAN**
Hukum Positif	**Rekonstruksi**	
Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.	(1). Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. (2). Dalam hal koban perseorangan,korban perseorangan atau ahli warisnyaberhak untukminta banding terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).	1. Pasal 67 KUHAP yang semula tanpa ayat ditambah satu ayat sehingga menjadi dua ayat (Ayat (1) dan (2)) 2. Rekonstruksi dalam bentuk penambahan hak korban perseorangan atau ahli warisnya dalam mengajukan banding. 3. Rekonstruksi dimaksudkan dalam hubungan rekonstruksi Pasal 14 KUHAP yakni peranan korban perseorangan atau ahli warisnya dalam mengajukan tuntutan hukum terhadap terdakwa (Tabel 13).

Rekonstruksi Ketentuan KUHAP tentang Hak Mengajukan Kasasi (Pasal 244 KUHAP)

NORMA		PENJELASAN
Hukum Positif	**Rekonstruksi**	
Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.	(1). Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. (2). Dalam hal koban perseorangan, korban perseorangan atau ahli warisnya berhak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.	1. Pasal .,.. KUHAP yang semula tanpa ayat ditambah satu ayat sehingga menjadi dua ayat (Ayat (1) dan (2)) 2. Rekonstruksi dalam bentuk penambahan hak korban perseorangan atau ahli warisnya dalam mengajukan kasasi. 3. Rekonstruksi dimaksudkan dalam hubungan rekonstruksi Pasal 14 KUHAP yakni peranan korban perseorangan atau ahli warisnya dalam mengajukan tuntutan hukum terhadap terdakwa (Tabel 13).

.

Hak korban atas iniformasi pemeriksaan perkara sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (2) UULPSKdimasukan dalam Bab VI setelah Pasal 68 KUHAP,**sehingga Bab VI KUHAP** yang semula memiliki judul bab ”Tersangka dan Terdakwa” **diubah menjadi ”Tersangka,Terdakwa dan Korban.”Ketentuan tambahan tentang hak korban dalam pasal setelah Pasal 68 KUHAP, adalah sebagai berikut**:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Memperoleh dokumen hukum terkait perkara;
g. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan proses pemeriksaan perkara;
h. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
i. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
j. Dirahasiakan identitasnya;
k. Mendapat identitas baru;
l. Mendapat tempat kediaman sementara;
m. Mendapat tempat kediaman baru;
n. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
o. Mendapat nasihat hukum;
p. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
q. Mendapat pendampingan.

4. Rekomendasi

1. Kentuan tentang Pencabutan Pengaduan Pasal 75 dan Pasal 284 KUHP harus diubah sehingga pencabutan pengaduan oleh korban untuk seluruh delik aduan daluarsa waktunya adalah setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
2. KUHAP yang berlaku pada saat ini harus dilakukan perubahan karena kedudukan dan hak-hak korban kejahatan sangat sedikit diatur dibandingkan hak-hak dari pada pelaku tindak pidana. Dalam KUHAP yang baru nanti diharapkan terdapat keseimbangan antara hak-hak korban dengan hak-hak pelaku tindak pidana. Ketentuan yang disarankan diubah adalah Pasal 14 KUHAP dan penambahan norma hak-hak korban atas informasi perkara.
3. PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme harus diubah dikarenakan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantas Tindak Pidana Teroris Menjadi Undang-undang yang dijadikan konsiderans"Mengingat" angka 2 pada PP No. 24 Tahun 2003, telah diubah oleh UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003. PP No. 24 Tahun 2003 harus menyesuaikan tambahan/perubahan ketentuan yang ada pada UU Nomor 5 Tahun 2018.

4. PP No.44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban harus diubah dikarenakan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dijadikan konsiderans"Mengingat" angka 2 pada PP No.44 Tahun 2008 telah diubah oleh UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006. PP No.44 Tahun 2008 harus menyesuaikan tambahan/perubahan ketentuan yang ada pada UU Nomor 31 Tahun 2014.

SUMMARY OF DISSERTATION

A. Background

The provisions of Article 156 Paragraph (1) and (2) of the Criminal Procedure Code give the accused or legal adviser the right to respond to the indictment of the Public Prosecutor. The Criminal Procedure Code does not give a defendant the right to be active in the preparation of an indictment by the prosecutor. Even if the judge declares the objection of the defendant or the legal adviser to be accepted so that the case is not examined further, the prosecution can only fight the case in question. The imbalance between the rights of the accused and the victim in the indictment is an injustice.

In MARI Decision Number 296.K / Pid / 1987 the victim cannot file a legal objection to the court for the negligence of the public prosecutor, because he changed the indictment so that the indictment is null and void. The Supreme Court is of the opinion that the crime victim does not have legal rights to the prosecutor's actions and therefore it is impossible for the victim to take legal action according to the legal accountability of the prosecutor.

Decisions containing the acquittal or release of the accused or the prosecutor's indictment are declared null and void by law stemming from the inaccuracy of the public prosecutor in making the indictment or in preparing the prosecutor, not because there is insufficient evidence or doubt in the evidence that it can harm the crime victim as a ray of justice namely the MARI Decision which contained the inaccuracy of the public prosecutor which led to the release of the defendant, among others: MARI decision Number 26.K / Pid / 1988, February 8, 1980, MARI decision Number 321 / K / Pid / 1983, May 26, 1984, MARI decision Nornor 162.K / Pid / 1986. September 26, 1987, MARI decision Number 1677.K / Pid / 1987, dated February 7, 1990.

Article 13, Article 14 letter g and Article 137 of the Criminal Procedure Code do not give victims the right to file criminal charges. The right to file a criminal charge is only given to the public prosecutor, Article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code even gives absolute authority to the public prosecutor to stop prosecuting a crime.

MARI Decision Number 1457.K / Pid / 1991 determines that a crime victim, as an aggrieved party, cannot file a lawsuit against the court for the negligence of the prosecutor or judge that is detrimental to the interests of the victim.

The regulation of the victim's rights in the prosecution of the defendant in recent years has become a problem that requires a study to find a solution. The reaction of the victim / victim's family to the prosecutor's demands during the trial at the district court. It is an important concern to give the right to victims in

determining the size of the criminal charges or even not to file charges during the case examination at the district court.

The above circumstances constitute a fact that there is a gap between the rights of victims based on positive law in Indonesia and the justice and legal benefits that victims expect. The reactions of the victims to the charges and demands of the prosecutor as described above are a fact of the need to fulfill the rights of the victims in accusing and prosecuting the accused. In this case Mahmutarom and Sri Endah Wahyuningsih stated:

"... If the interests of the victims do not get the proper attention, it will be easy for the victim or other interested parties to commit the act of taking justice into their own hands."

"... based on the rules in the Criminal Code so far, attention to the victim and his / her family due to criminal acts which are human rights such as murder and maltreatment is not sufficient because the orientation of punishment according to the Criminal Code is retaliation or acts (daad-strafrecht) the perpetrator without paying attention to the victim or the beneficiary. "

In Q.S. An Nisa '/ 4: 58, Allah Subhanahu Wata'la said: "Verily, Allah told you to convey the message to those who are entitled to receive it, and (ordered you) when establishing laws among humans so that you determine it fairly. Indeed, Allah gives the best teaching to you. Allah is All-Hearing, All-Seeing. "

On Q.S. An-Nahl / 16: 90 Allah Subhanahu Wata'la said: "Verily, Allah commands (you) to be just and do good, give to your relatives, and Allah forbids you from evil deeds, evil and enmity. He teaches you so that you can take lessons. "

In the case of fraud and embezzlement of the defendant Ismayati, the Supreme Court of the Republic of Indonesia (MARI) through Decision Number: 1600 K / Pid / 2009 granted the request to withdraw Emiwati's complaint so that the defendant would not be punished.

Muhammad Alim stated that the principle of benefit is one of the principles of law in the Al Quran. The principle of implied benefit from Q.S. Al Baqarah / 2: 178: "O you who believe, it is obligatory for you to qishash regarding those who were killed; free man and free man, slave and slave, woman and woman. So whoever gets forgiveness from his brother, let (who forgives) follow in a good way, and let (who is forgiven) pay (diat) to those who forgive in a good way (too). In this way there is a sacrifice, a relief from your Lord and a mercy. And whoever transgresses the limit will be for him a painful torment.

B. Problem Formulation:

The problems that will be the limitation for the discussion in this study are:

1. What is the position of individual victims in the criminal justice system in Indonesia?

2. Why is the right of the individual victim in prosecuting the defendant not currently based on the values of justice and benefit?

3. How was the reconstruction of the rights of individual victims in prosecution based on the values of justice and benefit?

C. Research Objectives

The objectives of this research are:

1. To explain and analyze the position of individual victims in the criminal justice system in Indonesia.

2. To analyze the causes of the individual victim's rights in the prosecution of the defendant at this time has not been based on the values of justice and benefit.

3. To find the reconstruction of the rights of individual victims in the prosecution of the accused based on the values of justice and benefit.

D. Usefulness of Research

This research is expected to provide suggestions, benefits, and contributions in the field of legal science, both theoretical and practical, are as follows:

1. The theoretical benefit

Theoretically, the findings in this study will contribute to the development of legal science, especially criminal law and more specifically the field of criminal procedural law. This research is useful for finding new legal material regarding the rights of victims in filing criminal charges.

2. Practical benefits

It is hoped that the results of this study will be useful for the government and the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) in formulating rules related to criminal procedural law in drafting both new and amended laws and regulations. The results of this study are expected to provide information to other researchers who research similar issues and add literature / references to criminal law science, especially criminal procedural

law and more specifically regarding the rights of victims in filing criminal charges.

E. Conceptual Framework

The conceptual framework in this paper provides an understanding or explanation regarding the title of the dissertation, namely: 1. Reconstruction, 2. Rights, 3. Victims, 4. Individuals, 5. Prosecution, 6. Defendants, 7. Value, 8. Justice and 9. Benefit.

The reconstruction in this research is the reform of the system or form in the form of the rights of individual victims in the prosecution of the old defendant, replaced by new regulations.

Rights are defined as authority according to law. The victim in this research is someone who has suffered physical, mental, and / or economic loss as a result of a criminal act. Individual is related to an individual person.

Prosecution is an act of a public prosecutor to delegate a criminal case to the competent district court in matters and according to the manner stipulated in the Criminal Procedure Code by requesting that it be examined and decided by a judge in court.

The accused as a person who is accused (charged, accused) of having committed a criminal act and there is sufficient reason to conduct an examination before a trial. According to the Criminal Procedure Code, a defendant is a suspect who is prosecuted, examined and tried in court.

Value is defined as characteristics (things) that are important or useful for humanity and something that perfects humans according to their essence. Justice is an act, treatment, and so on that are just. Benefit is defined as useful; usability.

F. Theoretical Framework

.

1. Grand Theory (Theory of Legal Purposes and Theory of Legal Justice Islam)

Gustav Radbruch put forward three basic values of legal objectives called priority areas. This theory states that the purpose of law is first to prioritize justice, then benefit and finally legal certainty. Ideally, the three basic objectives of the law should be endeavored so that in every legal decision, whether made by judges, prosecutors, lawyers or other legal officials. The three basic values of legal objectives are expected to be realized together, but if this is not possible, then justice must be prioritized first, then its usefulness, and finally legal

certainty. Only by applying this principle of priority can our laws stay in motion and avoid internal conflicts that can destroy them.

The word "fair" in Arabic is the noun augentie (Ism Fail-Arabic) which comes from the noun "adala" which means:

1. Perpendicular or straightening;

2. Or sitting straight or straight;

3. To be equal or comfortable; or

4. To balance or offset weight;

Allah Subhanahu wata'ala commands to be fair or enforce justice in applying the law regardless of religious differences, as emphasized in the Q.S. As Syuura / 42 Verse 15, which means: "Therefore, call (them to that religion) and remain as told to you and do not follow their lusts and say: I have faith in all the books that Allah sent down and I am commanded to be fair in between you. For us our deeds and for you deeds / you. There is no quarrel between us and you Allah collects between us and to Him (our) return. "

In Q.S. Shadd / 38: 26, Allah said: "O David, Verily We make you caliph (ruler) on the face of the earth, so give judgment (case) among humans with justice and do not follow lust, because he will lead you astray from the path. God. Indeed, those who go astray from the way of Allah will receive a heavy punishment, because they forget the day of reckoning ".

Eko Soponyono, in his teacher's inauguration speech, stated that the concept of Adil and Wisdom of the Qur'an is that in all matters, the Qur'an distributes the obligation to be fair in several ways such as:

1. Establish Law (QS. An-Nisa / 4: 58)

2. Give the rights of others (QS. An Nahl / 16: 90)

3. Fair in speaking (Surah Al-An'am / 6: 152)

4. Fair in testimony (Surah An-Nisaa / 4: 135)

5. Fair in recording debts and debts (QS. Al-Baqarah / 2: 282)

6. Fair in reconciling disputes (QS. Al-Hujarat / 49: 9)

7. Fairness in dealing with people who are not liked (QS. Al-Maidah / 5: 8)

8. Fair in giving replies (Surah Al-Maidah / 5: 95)

In determining justice, not all must be handled by religious experts alone, but can be submitted to a good institution or government based on five basic

principles, namely (1) the principle of Oneness of God (unity of God), (2) the principle of all being based on law (Al ' Is / equality), (3) the principle of promise and warning (Al-wa 'd wa ala waid) which can be understood with the principle of legism, (4) the principle of equality (al manzila byan al minzalatayn), (5) the principle of upholding kindness and prevent / take action against things that are not right (amar ma 'ruf nahi mungkar). In addition to these theories and schools of justice, in Islam there is also legal justice or justice according to the law.

The benefits in Islamic law are found in Q.S. Al-Maidah / 5: 45, which means: "O you who believe, qishaash is obliged upon you regarding those who were killed; free people with free people, servants with servants, and women with women. So whoever gets an forgiveness from his brother, let (who forgives) follow it in a good way, and let (who is given forgiveness) pay (diat) to those who give forgiveness in a good way (too) . in this way it is a relief from your Lord and a mercy. Whoever transgresses after that, Then for him a very painful torment.
On Q.S. Al-Baqarah / 2: 219, Allah says: "They ask you (Muhammad) about wine and gambling. Say, "In both of them there are great sins and some benefit to mankind. But the sins outweigh the benefits. And they ask you (about) what they (should) give them. Say," The excess (of what is required). In this way Allah will explain His verses to you so that you will think about it.

The criminal objectives that were developed in the past until now have led to a more rational direction. The oldest is revenge (revenge) or for the purpose of satisfying the revenge party, both the community itself and those who have been injured or become victims of crime. The goal which is also considered ancient is the elimination of sins (expiation) or retribution (retribution), which is to release lawbreakers from evil deeds or create a balance between rights and vanity. What is considered the current objective is a variety of forms: deterrent, both aimed at lawbreakers themselves and to those who have the potential to become criminals; protection of society from evil deeds; repair (reform) to criminals. The latter are the most modern and popular today. It is not only aimed at improving the conditions of imprisonment but also looking for other, non-criminal alternatives in fostering lawbreakers.

2. Middle Theory (Legal System Theory)

According to L. M. Friedman there are three elements of the legal system, namely:

a. Structure;

b. Substance;

c. Legal culture.

Structure refers to the institutions that are authorized to make and implement laws (court institutions and legislative bodies). The second aspect is substance, namely the material or form of legislation, and the third aspect of the legal system is what is known as people's attitudes towards the law and the legal system, which concerns their belief in their values, thoughts or ideas and expectations. A good legal structure will not run well if it is not supported by a good legal substance. Likewise, the benefits of a good legal substance will not be felt if it is not supported by a good structure. Furthermore, the structure and substance if they are not well supported by the legal culture of the community. In other words, law will play a good role when the three aspects of the subsystem which are structure, substance and legal culture interact and play roles according to their function, so that the law will run harmoniously and in balance, according to its function. Like a fish, it will live well if it is supported by good quality pond water and good food. If the three legal subsystems do not function properly, then problems will arise in an effort to make the law function as a means of reform and development of society itself.

3. Applied Theory (Progressive Law Theory and Restorative Justice Theory)

3.1. Progressive Theory of Law

Progressive comes from the word progress which means progress. Law should be able to keep up with the times, be able to answer problems that develop in society, and be able to serve the community by relying on the moral aspects of the law enforcement apparatus' own resources.

The theory of progressive law was first put forward by Satjipto Rahardjo in line with the legal theory of development which focuses on the interests of society, but a significant difference is that the legal theory of development views law as a means of community development, whereas progressive legal theory holds that law is not just a means, it even grows together. community development.

The theory of progressive law was proposed by Satjipto Rahardjo where it was stated that legal thought needed to return to its basic philosophy, namely law for humans, not the other way around so that humans became the determinant and point of legal orientation. This is because in addition to legal certainty and justice, it also functions for the welfare of human life or provides benefits to the community. So it can be said that law is a field and human struggle in the context of finding happiness in life.

The characteristics of progressive law can be indicated by the following statement:

a. The law exists to serve mankind

b. Progressive law will remain alive because law is always in its status as law in the making and is never final, as long as humans exist, progressive law will continue to live in organizing people's lives.

c. In a progressive relationship there is always a very strong human ethic and morality that will respond to human development and needs and serve justice, prosperity, prosperity, and care for humans in general.

Judges must adjust laws with concrete things, because laws do not cover all events that occur in society. For progressive law, the process of change is no longer centered on regulations, but on the creativity of law actors to actualize the law in the right time and space. Progressive legal actors can make changes by making creative interpretations of existing regulations, without having to wait for changing the law.

Bad regulations do not have to be a barrier for progressive law actors to bring justice to the people and justice seekers, because they can make new interpretations every time against a regulation, at this point according to Satjipto Rahardjo law must be allowed to flow simply shifting the positivism legal paradigm to find its own goal. In order for the benefits of law to be felt, the services of creative law actors are needed to translate the law into social interests which it must serve.

4. Restorative Justice Theory

According to Agustinus Pohan, what is meant by restorative justice is a concept of justice that is very different from what we know today in the Indonesian Criminal Law System which is retributive in nature. Restorative justice is an approach to make transfers and institutionalization in accordance with justice. Restorative Justice is built on the basis of positive traditional community values and sanctions that respect human rights. The principles of resortative justice are to make the perpetrator responsible for repairing the damage caused by his crime, giving the perpetrator the opportunity to prove his capacity and quality as well as overcoming his guilt in a constructive way, involving the victim, parents, family, school or playmates, making cooperation forum, also in crime-related issues to solve it.

Some experts provide opinions on restorative justice, as mentioned below:

1. Howard Zehr: restorative justice is a process to engage, with parties using all possible means, all related parties and certain violations and to identify and explain threats, needs and obligations in order to cure and place them as appropriate as possible.

2. Tony Marshall: restorative justice is a process in which all parties fighting in a certain offense come together to solve the problem collectively how to

make an agreement regarding the (bad) consequences of an offense and its implications in the future.
3. Douglas, Yrn: Restorative justice is the concept of criminal justice which views criminal acts as crimes against society not crimes against the state and for that creates an obligation for victims and society to correct them. The restorative justice model provides appropriate dialogue, directly or indirectly, between victims and perpetrators of crime in the form of victim-perpetrator mediation.
4. Dignan: Restorative justice is a new framework against offense and conflict, which is rapidly becoming accepted and supported by educators, jurists, social workers and social counseling and community groups.
Martin Wright describes his perspective of restorative justice in several ways:

1. The response to crime is to be built on the basis of the accountability of the offender in a better quality, namely fostering responsibility and re-acceptance in society.
2. Crime prevention policies will be integrated into social policies.
3. Recognition that people are influenced by other factors, but not fear, such as providing incentives, builds self-esteem. As long as people are affected by the system, they will have the opportunity to respond to its justice rather than react to its violence.
4. Ethical state responses will be accepted, that is, within the limits required by the community.
5. The victim will be given the opportunity to be directly involved in the proceedings but will not be held responsible for a decision in conviction.
6. Offenders will be actively involved, rather than being a passive object of punishment.
7. Community involvement is needed and empowered, for example by bringing together a group of trained voluntary mediators.
Below is presented with a table regarding the main ideas of restorative justice.

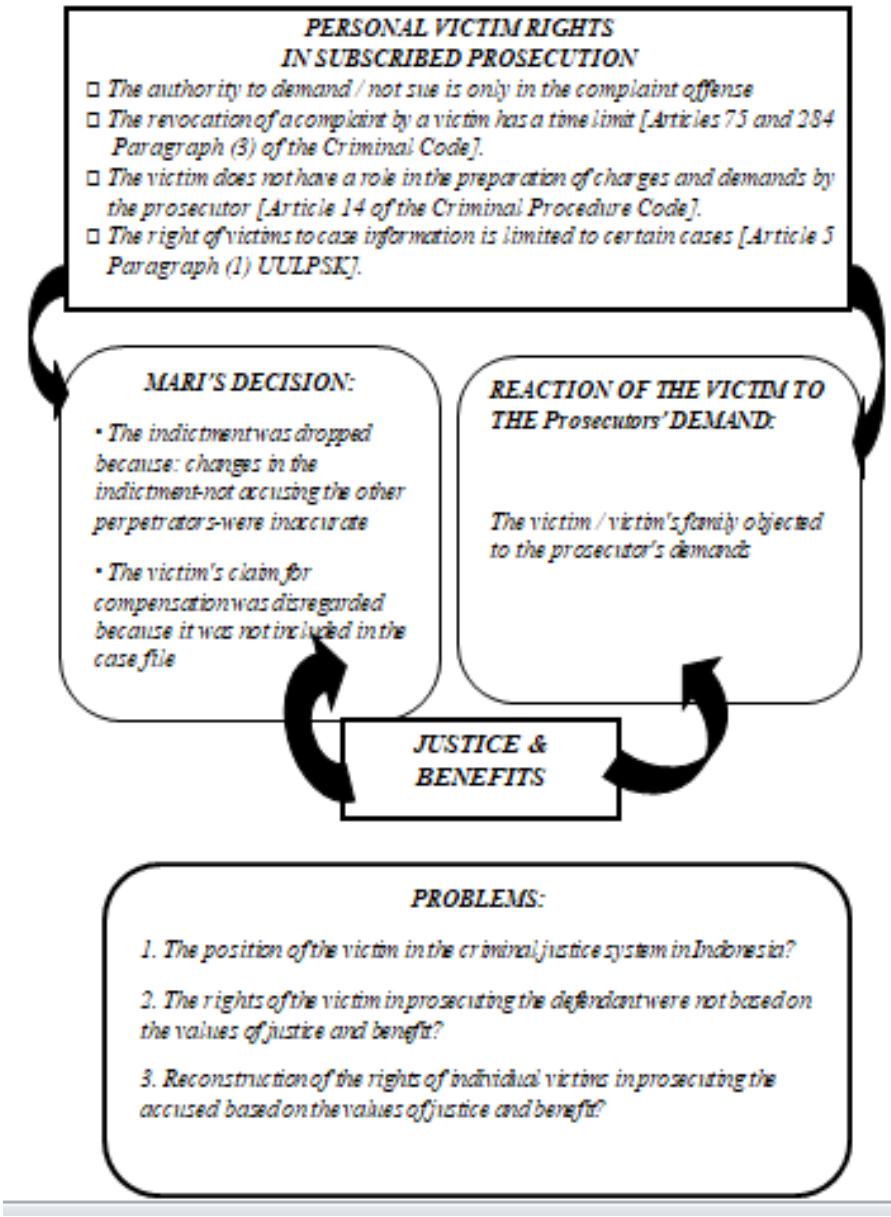
Tables of Criminal Design Ideas from the Perspective of Restorative Justice

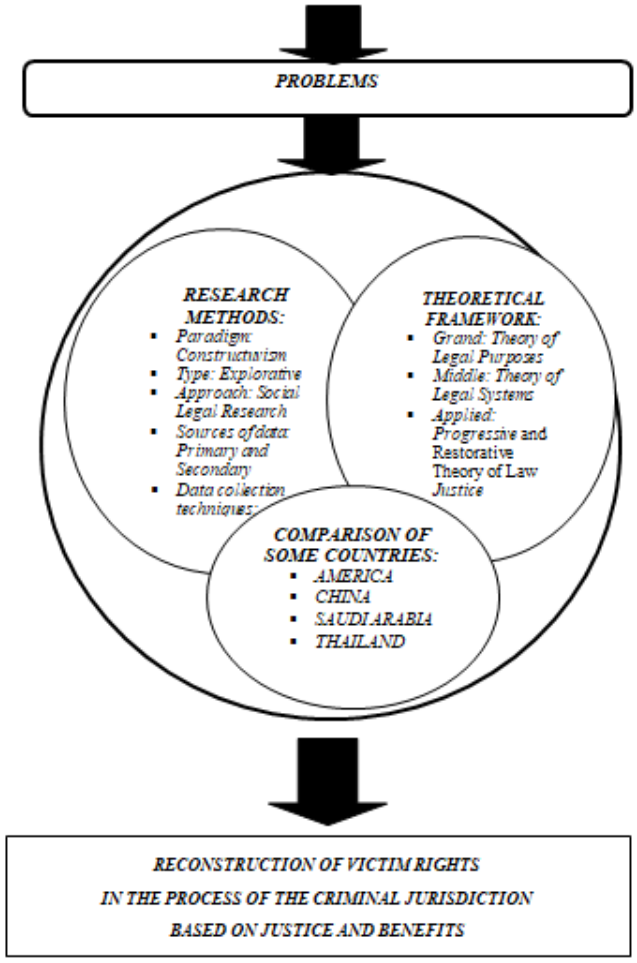
NO.	*MAIN THEMES*	*BASIC CONCEPTS*
1	*The existence of a Criminal (prison)*	*Criminal (prison) is not important / unnecessary*
2	*Criminal purpose*	*1. Accountability for deeds* *2. Resolve conflicts*

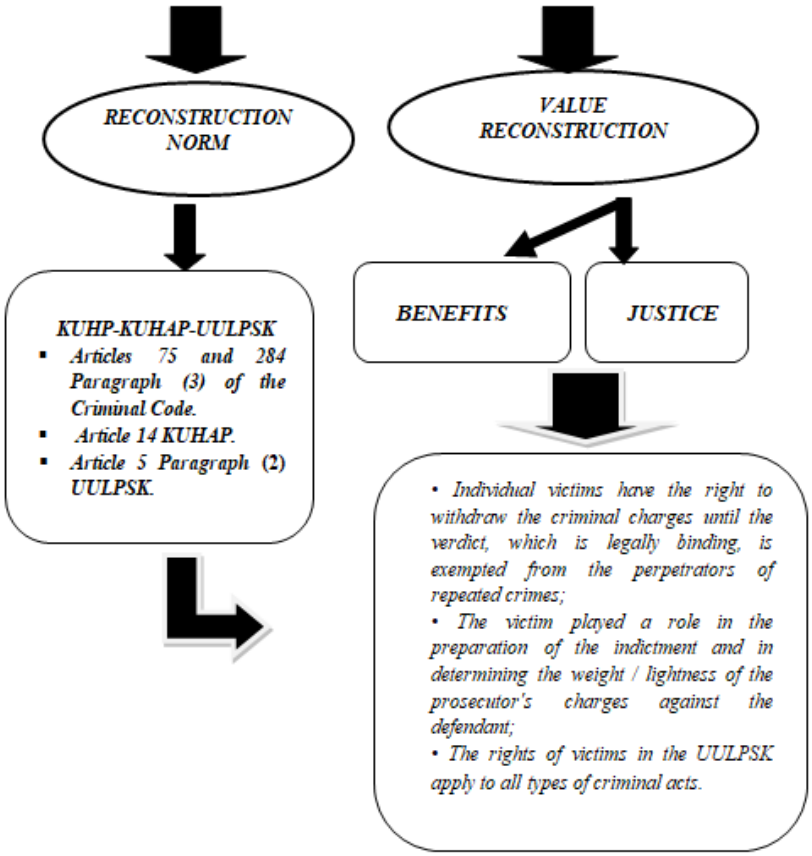
		3. Reconcile
3	*Accountability*	*1. Responsibility for the impact / consequences of crime* *2. The basis for loss, harm and misery* *3. Not limited in the form of a criminal but understood the context as a whole*
4	*Criminal form*	*1. Obligation to restore due to crime in the form of restitution or compensation* *2. Reconciliation and social unification* *3. The duration of the sentence depends on the amount of loss incurred*
5	*Effect*	*1. Social responsibility* *2. Preventive* *3. Avoiding stigmatization* *4. Future life*

G. Framework

The schematic of the research flow of the dissertation on the Rights of Individual Victims in the Prosecution of the Defendant based on the values of justice and usefulness is as follows:


PERSONAL VICTIM RIGHTS
IN SUBSCRIBED PROSECUTION
The authority to demand / not sue is only in the complaint offense
The revocation of a complaint by a victim has a time limit [Articles 75 and 284 Paragraph (3) of the Criminal Code].
The victim does not have a role in the preparation of charges and demands by the prosecutor [Article 14 of the Criminal Procedure Code].
The right of victims to case information is limited to certain cases [Article 5 Paragraph (1) UULPSK].
MARI'S DECISION:
• The indictment was dropped because: changes in the indictment-not accusing the other perpetrators-were inaccurate
• The victim's claim for compensation was disregarded because it was not included in the case file
REACTION OF THE VICTIM TO THE Prosecutors' DEMAND:
The victim / victim's family objected to the prosecutor's demands
JUSTICE & BENEFITS
PROBLEMS:
1. The position of the victim in the criminal justice system in Indonesia?
2. The rights of the victim in prosecuting the defendant were not based on the values of justice and benefit?
3. Reconstruction of the rights of individual victims in prosecuting the accused based on the values of justice and benefit?


PROBLEMS
RESEARCH METHODS:
Paradigm: Constructivism
Type: Explorative
Approach: Social Legal Research
Sources of data: Primary and Secondary
Data collection techniques:
THEORETICAL FRAMEWORK:
Grand: Theory of Legal Purposes
Middle: Theory of Legal Systems
Applied: Progressive and Restorative Theory of Law Justice
COMPARISON OF SOME COUNTRIES:
AMERICA
CHINA
SAUDI ARABIA
THAILAND
RECONSTRUCTION OF VICTIM RIGHTS
IN THE PROCESS OF THE CRIMINAL JURISDICTION
BASED ON JUSTICE AND BENEFITS



H. Research Methods

1. Research paradigm

The paradigm of this research is constructivism. The aspects of the constructivist paradigm according to Guba and Lincoln are as follows:

a. Ontological aspects (relativism and reality);

b. Epistemological aspects (transactionalist / subjectivist);

c. Methodological aspects (hermeneutical / dialectical).

The ontological aspect is relativism and reality is a social construction. Social truth is relative in nature, applies in accordance with a specific context that is considered relevant by social actors. Epistemological aspects in the form of transactional / subjectivist in the form of an understanding of the reality or findings of a reality or the findings of a research is a product of interaction between the researcher and the one being studied. The methodological aspect in the form of hermeneutical / dialectical is the tracing of construction through interaction between adherents / holders and objects of observation / investigation, with hermenneutical techniques and dialectical

exchange of the construction interpreted, compared; destination; distillation of consensus construction or construction resultant.

2. Type of research

This type of research contains the selection of promovendus in conducting research whether to use analytical descriptive legal research or exploratory or explanatory research. The type of research in this dissertation is exploratory.

According to Kotler, exploratory research is research that aims to gather initial information that will help efforts to determine problems and formulate hypotheses. According to Kuncoro, explorative research is research that aims to develop new knowledge or conjectures and to provide direction for further research. The main objective of this type of research is to identify the research situation and specific objectives or data required for further research. Exploratory research is very useful for better understanding of situations or identifying alternative decisions.

3. Method of approach

The approach method in this research is a sociological juridical approach. Legal research as sociological research can be realized through research on the effectiveness of the current law or research on legal identification. This research is often referred to as research on the work of the legal system (law in action) in society.

In sociological juridical research, the task of the researcher is to examine what is behind the appearance of the application of laws and regulations. Sociological juridical research in this study is research on the effectiveness of law. According to Bambang Waluyo, as quoted by Ediwarman, research on legal effectiveness includes:

1. Research into the application of positive law;
2. Research on the application of positive law to people's lives;
3. Research on non-legal factors towards the formation of positive legal provisions; and
4. Research on the influence of non-legal factors on the enactment of positive legal provisions.

4. Source of data

Sources of research data contain primary data (data obtained from legal practice / empirical law) and secondary data obtained from literature studies and document studies, in order to obtain primary legal material, secondary legal

material and tertiary legal material according to the research study of the Promovendus dissertation.

4.1 Primary legal materials

Primary data is legal material that is binding in the form of applicable laws and regulations and has something to do with the problem.

4.2 Secondary legal material

Secondary legal material is legal material that describes primary legal material, where secondary legal material is in the form of literature from undergraduate work related to research problems, either in the form of books or journals or papers.

4.3 Tertiary legal materials

Tertiary legal materials are legal materials that provide guidance and explanation for primary and secondary legal materials, such as dictionaries (law, English and Indonesian), encyclopedias and others.

5. Data collection techniques

The data collection technique in writing used is a library research model. Literature study is the study of written information about law that comes from various sources and is widely published and required in normative legal research, namely writing based on data that is used as the object of research, such as laws and regulations, library books, magazines, articles, newspapers, newsletters on all issues in accordance with this dissertation which will be compiled and studied comprehensively.

6. Data analysis

The analytical method used in this research is qualitative analysis, namely the method of analysis which basically uses logical thinking, analysis by logic, by induction, analogy / interpretation, comparison and the like. The method of thinking used is the inductive method, which is from data / facts leading to a higher level of abstraction, including synthesizing and developing theory (if necessary and the data to support). From this analysis, conclusions will be drawn as an answer to the existing problems.

CONCLUSION

1. Position of Individual Victims in the Criminal Justice System in Indonesia

The position of the victim in investigations / investigations, prosecutions and trials based on the Criminal Procedure Code, is not only as evidence (witness testimony). When the information provided by the victim is deemed sufficient, then the position and role of the victim in the criminal justice mechanism is also completed. to intervene in determining the sanctions that are commensurate with the prosecution or imposition of the perpetrators, because all of these have become the monopoly of the court bureaucracy, even when sanctions have been imposed and must be implemented by the perpetrators, the authority to determine how the sanctions are carried out by the perpetrators, is decided without asking the victim's opinion. The position of the victim of crime in the practice of criminal procedure law in Indonesia is the party that is most disadvantaged because it does not receive as much protection as provided by law to the perpetrator of the crime. The Criminal Procedure Code focuses more on protecting the dignity of a suspect or defendant compared to the position and rights of the victim so that it does not reflect a sense of justice for the crime victim. Islamic law recognizes the system of forgiveness (the victim's right to provide forgiveness), this principle is recognized by modern law today so that Islamic law is still superior to conventional law because it chooses the logic of applying the forgiveness properly. The victim or his guardian is given the authority to forgive the punishment qishash. If he forgives him, the qishash sentence will be annulled. Restorative justice is a vehicle to correct victims, perpetrators and society due to parallel crimes with the Procedural Rights Model. The procedural rights model emphasizes enabling the victim to play an active role in the criminal process or in the running of the judicial process. In this case the crime victim is given the right to bring criminal charges or to assist the prosecutor or the right to be presented and heard at every level of court proceedings whose interests are related to it, including the right to be asked for consultation by the correctional institution before being granted conditional release and ultimately the right to holding peace or civil justice. This kind of approach sees the victim as a subject who must be given broad juridical rights to claim and pursue his interests.

2. The Rights of Individual Victims in the Prosecution of the Defendant are not currently based on the values of justice and benefit

The right of the victim in the prosecution of the defendant is currently not based on the value of justice and benefit due to the substance of the law, the culture of law and the legal structure in Indonesia.

The substance of the positive law determines that the position of a crime victim is only as a witness (Article 108 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 184 of the Criminal Procedure Code) and as a claimant or claimant for damages (civil) who are incorporated in criminal procedures (Articles 98-101 of the Criminal Procedure Code). Dakwan letters and prosecution based on Article 14 of the Criminal Procedure Code are only owned by the Public Prosecutor. KUHAP. Revocation of complaints in positive law which has a time limit of three months after the complaint is filed (Article 75 KUHP), is exempted for adultery complaints (Article 284 KUHP) which is revoked his complaint before the start of the case examination at trial did not fulfill a sense of justice for the victim and had no legal benefit.

The culture of positivism in law enforcement has given birth to laws in mathematics, completing laws that occur in society based on what is written in the legal text. Law is not just an ordinary rule building, but is also recognized as building ideas, culture and ideals Law is not just an ordinary rule building , The deterioration of the law in Indonesia is more due to the shortening of the law as a rule of law without seeing it as a rule of morality. As a result, law is only seen as a procedural rule that is closely related to power. Whereas behind the law it is also full of values, the idea of building a new culture that is more contextual to the sense of justice in society.

The weakness of the legal structure in fulfilling the rights of individual victims in prosecuting the accused is the absence of electronic technology that can record all trial activities in the form of a voice which can be immediately converted into writing. This is an obstacle for the victim to fully and quickly understand the proceedings of the trial and the facts that can be used as consideration for the victim in submitting the weight / lightness of the charges against the accused.

3. Reconstruction of the Rights of Individual Victims in Prosecution of the Defendant based on the values of justice and benefit

The reconstruction of the rights of individual victims in prosecuting the accused based on the values of justice and benefit consists of reconstructing values and reconstructing norms. In the reconstruction of the values it is concluded that if legal certainty is placed as the priority value, then this legal certainty will shift the value of utility and value of justice aside because the main thing for legal certainty is the existence of the regulation itself.

Regarding whether the regulation should be fair and have a use for the community is beyond the value of legal certainty. The three basic values of legal objectives are expected to be realized together, but if this is not possible, then justice must be prioritized first, then its usefulness, and finally legal certainty.

Reconstruction of norms in this case is the renewal of several provisions in Indonesian positive law relating to the rights of victims in determining the charges / sentences of the accused. The provisions referred to are regarding: the right of the individual victim to withdraw the complaint, the role of the victim in making the indictment and indictment and the right of the victim to information on the case examination.

Table of Reconstruction of Criminal Code Provisions on Withdrawal of Complaints

KUHP	***NORM***	
	Positive Law	***Reconstruction***
Art 75	*The person who filed a complaint has the right to withdraw it within three months after the complaint is filed .*	***The person who filed the complaint has the right to withdraw it as long as the court decision is not legally binding.***
Art 284	*(1) By a maximum imprisonment of nine months:* *l. a. a man who has been married who commits an overspel, even though it is known that Article 27 BW applies to him,* *b. a married woman who commits arbitration, even though it is known that Article 27 BW applies to her;* *2.a. A man who participated in the act, even though he knew that the guilty party was married;* *b. a married woman who participates in the act, even though it is known to her that the one who is guilty of*	*1) By a maximum imprisonment of nine months:* *l. a. a man who has been married who commits an overspel, even though it is known that Article 27 BW applies to him,* *b. a married woman who commits arbitration, even though it is known that Article 27 BW applies to her;* *2.a. A man who participated in the act, even though he knew that the guilty party was married;* *b. a married woman who participates in the act, even though it is known to her that the one who is guilty of*

	being married and Article 27 BW applies to her.	*being married and Article 27 BW applies to her.*
	(2) Prosecution is not carried out but on complaints from husband / wife who are tainted, and if for them Article 27 BW applies, within a grace period of three months followed by requests for divorce or separation from table and bed for that reason as well..	*(2) Prosecution is not carried out but on complaints from husband / wife who are tainted, and if for them Article 27 BW applies, a three-month grace period will be followed by requests for divorce or separation from table and bed for that very reason.*
	(3) Articles 72, 73 and 75 do not apply to this complaint.	*(3) Articles 72 and 73 do not apply to this complaint.*
	(4) Complaints may be withdrawn as long as the examination in court proceedings has not yet started.	***Deleted***
	(5) If for husband and wife article 27 BW applies, the complaint is not heeded as long as the marriage has not been decided because of divorce or before the decision stating the separation of table and bed becomes permanent.	*(4) If for husband and wife article 27 BW applies, the complaint is not heeded as long as the marriage has not been decided because of divorce or before the decision stating the separation of table and bed becomes permanent.*

Reconstruction of KUHAP Provisions on the Authority of Public Prosecutors (Article 14 KUHAP)

NORM		***EXPLANATION***
Positive Law	***Reconstruction***	
The public prosecutor has the authority: *b. receive and examine investigation case files from investigators or assistant investigators;* *c. conduct a pre-prosecution if*	*(1). The public prosecutor has the authority:* *a. receive and examine investigation case files from investigators or assistant investigators* *b. conduct a pre-prosecution if*	*1. Article 14 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), which is added without a paragraph, so that it becomes three paragraphs (paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3)).* *2. Reconstruction in the form of adding material to*

there is a deficiency in the investigation by taking into account the provisions of Article 110 paragraph (3) and paragraph (4), by providing instructions in the framework of completing the investigation of the investigator; *d. provide extended detention, carry out detention or further detention and or change the status of the detainee after the case is transferred by the investigator;* *e. make an indictment;* *f. adelegate cases to court* *g. Submit notification to the defendant regarding the stipulations on the day and time the case is being heard, accompanied by a summons, both to the accused and to witnesses, to appear at the trial that has been determined;;* *h. prosecute;* *i. close cases for legal purposes;* *j. take other actions within the scope of his duties and responsibilities as a public prosecutor according to the provisions of this law;* *k. carry out the order of the judge;*	*there is a deficiency in the investigation by taking into account the provisions of Article 110 paragraph (3) and paragraph (4), by providing instructions in the framework of completing the investigation of the investigator;* *c. provide extended detention, carry out detention or further detention and or change the status of the detainee after the case is transferred by the investigator;* *d. make an indictment;* *e. delegate cases to court;* *f. Submit notification to the defendant regarding the stipulations on the day and time the case is being heard, accompanied by a summons, both to the accused and to witnesses, to appear at the trial that has been determined;* *g. prosecute;* *h. close cases for legal purposes;* *i. take other actions within the scope of his duties and responsibilities as a public prosecutor according to the provisions of this law;* *j. carry out the order of the judge;* *(2) If the victim of a crime is an individual victim, then in the event that the public*	*the article, in paragraph (2) is intended to give individual victims or their heirs the right to be involved in the indictment process.* *3. Reconstruction in the form of adding material to the article, in paragraph (3) is intended to give the right for individual victims or their heirs to be involved in determining charges of punishment against the accused.*

	prosecutor makes an indictment, the public prosecutor shall first give the victim or his heirs the right to convey an opinion or suggestion. *(3). If the victim of a criminal act is an individual victim, then in the case of a public prosecutor filing a lawsuit, the number of sentences charged against the defendant is the same as that desired by the individual victim or his heir.*	

Reconstruction of KUHAP Provisions regarding the Right to Receive Derivatives of an Examination of the Authority of the Public Prosecutor (Article 72 of the Criminal Procedure Code)

NORM		***EXPLANATION***
Positive Law	***Reconstruction***	
At the request of the suspect or his legal adviser, the official concerned will provide a derivative of the examination report for the benefit of his defense.	*(1). At the request of the suspect or his legal adviser, the official concerned will provide a derivative of the examination report.* *(2). In the case of an individual koban, at the request of the victim or his / her heir, the official concerned provides a derivative of the examination report.*	*4. Article 72 of the Criminal Procedure Code, which was originally without a paragraph, is added by one paragraph so that it becomes three paragraphs (paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3)).* *5. Reconstruction in the form of adding the rights of individual victims or their heirs to receiving*

		derivative examination reports. 6. *Reconstruction is meant in relation to the reconstruction of Article 14 of the Criminal Procedure Code, namely the role of individual victims or their heirs in the preparation of charges by the prosecutor (Table 13).*

Reconstruction of KUHAP Provisions on the Right to Appeal (Article 67 KUHAP)

NORM		***EXPLANATION***
Positive Law	***Reconstruction***	
The defendant or public prosecutor has the right to appeal against the decision of the court of first instance except for an acquittal, apart from all lawsuits concerning the problem of inaccurate application of the law and court decisions in rapid proceedings.	*(1). The defendant or public prosecutor has the right to appeal against the decision of the court of first instance except for an acquittal, apart from all lawsuits concerning the problem of inaccurate application of the law and court decisions in rapid proceedings.* *(2). In the case of individual koban, individual victims or their heirs, the right to appeal against the decision as referred*	4. *Article 67 of the Criminal Procedure Code which was originally added without a paragraph to make two paragraphs (Paragraph (1) and (2)).* 5. *Reconstruction in the form of additional rights for individual victims or their heirs in filing an appeal.* 6. *Reconstruction*

	to in paragraph (1).	*is meant in relation to the reconstruction of Article 14 of the Criminal Procedure Code, namely the role of individual victims or their heirs in filing lawsuits against the accused (Table 13).*

Reconstruction of KUHAP Provisions on the Right to File Cassation (Article 244 KUHAP)

NORM		***EXPLANATION***
Positive Law	***Reconstruction***	
With respect to a criminal case decision given at the last level by a court other than the Supreme Court, the defendant or public prosecutor may submit a request for a cassation examination to the Supreme Court except for an acquittal.	*(1) With regard to a decision in a criminal case given at the last level by a court other than the Supreme Court, the defendant or public prosecutor may submit a request for a cassation examination to the Supreme Court except for an acquittal.* *(2) In the case of an individual koban, an individual victim or his heir has the right to submit a request for a cassation examination to the Supreme Court, except for an acquittal.*	*5. Article, .. Criminal Procedure Code which was originally without a paragraph is added by one paragraph so that it becomes two paragraphs (Paragraph (1) and (2))* *6. Reconstruction in the form of additional rights for individual victims or their heirs in filing an appeal.* *7. Reconstruction is meant in relation to the reconstruction of Article 14 of the Criminal Procedure Code, namely the*

		role of individual victims or their heirs in filing lawsuits against the accused (Table 13).

The right of victims to information on case examination as stipulated in Article 5 paragraph (2) UULPSK was included in Chapter VI after Article 68 of the Criminal Procedure Code, ***so that Chapter VI of the Criminal Procedure Code*** *which originally had the chapter title "Suspects and Defendants"* ***was changed to "Suspects, Defendants and Victims." The rights of victims in articles after Article 68 of the Criminal Procedure Code are as follows:***

a. Receive protection for the safety of his personal, family, and property, and are free from threats regarding the testimony he will, is being, or has given;

b. Participate in the process of selecting and determining the form of security protection and support;

c. Provide information without pressure;

d. Got a translator;

e. Free from entangled questions;

f. Obtain legal documents related to cases;

g. Receive information regarding the progress of the case and the process of case examination;

h. Receive information about court decisions;

i. Obtain information in the event that the convict is released;

j. Anonymity withheld;

k. Got a new identity;

l. Obtained temporary residence;

m. Got a new residence;

n. obtain reimbursement of transportation costs as needed;

o. Get legal advice;

p. Receive temporary living expenses assistance until the protection period ends; and / or

q. Get assistance.

4. Recommendations

1. Provisions regarding the Withdrawal of Complaints Article 75 and Article 284 of the Criminal Code must be amended so that the withdrawal of complaints by victims for all complaint offenses has expired after the court's decision is legally binding.

2. The current Criminal Procedure Code must be changed because the position and rights of crime victims are very little regulated compared to the rights of the perpetrators of criminal acts. In the new KUHAP, it is hoped that there will be a balance between the rights of victims and the rights of perpetrators of criminal acts. The provisions that are suggested to be amended are Article 14 of the Criminal Procedure Code and the addition of norms for the rights of victims to case information.

3. PP No. 24 of 2003 concerning Protection Procedures for Witnesses, Investigators, Public Prosecutors and Judges in Terrorism Crime Cases must be amended due to Law Number 15 of 2003 concerning Stipulation of Perpu Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Terrorist Crimes Becomes a Law which is made into consideration. "Number 2 in PP. 24 of 2003, has been amended by Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003. PP. 24 of 2003 must adjust the additions / changes to the provisions in Law Number 5 of 2018.

4. PP No.44 of 2008 concerning Compensation, Restitution, and Assistance to Witnesses and Victims must be amended because Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims which is made into consideration "Given" point 2 in PP No.44 of 2008 has been amended by Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006. PP No.44 of 2008 must adjust the additions / changes to the existing provisions of Law Number 31 of 2014.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadlirat Allah SWT atas Rahmat, Taufik, Hidayah Dan Innayah-Nya, sehingga penulisan disertasi dengan judul "**Rekonstruksi Hak Korban Perseorangan dalam Penuntutan Terdakwa Berdasarkan Nilai Keadilan dan Kemanfaatan**"telah dapat diselesaikan guna memenuhi sebagai persyaratan mencapai derajat doktor pada program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Shalawat dan salam tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW teladan umat sepanjang masa yang kelak dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Melalui kata pengantar disertasi ini, penulis dan atau peneliti menyadari penulisan dan atau penelitian disertasi ini pasti mempunyai kekurangan-kekurangan. Melalui kekurangan tersebut penulis dan atau peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan disertasi nantinya.

Penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Bedjo Santoso, MT,Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan kesempatan untuk mengenyam Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof.Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA yang selalu memberikan motivasi dan dukungan yang sangat berarti, penulis tidak dapat membalas dengan suatu apapun, hanya dengan ucapan terima kasih , semoga beliau beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT.

4. Prof . Dr.H. Mahmutarom HR., S.H., M.H selaku *Promotor* yang yang selalu memberikan masukan, arahan, motivasi dan dukungan yang sangat berarti, dalam menyusun disertasi ini penulis tidak dapat membalas apapun, hanya dengan ucapan terima kasih , semoga beliau beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Prof.Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Humselaku *Co-Promotor*, yang dengan kecerdasan intelektual dan spiritualnya, syarat pengalamannya dan kesabarannya telah membantu penulis untuk menajamkan pada tiap analisa pemecahan permasalahan dari hasil penelitian sehingga disertasi ini pada akhirnya selesai disusun.
6. Segenap Dewan Penguji disertasi yang telah meluangkan waktu untuk menilai dan menguji Disertasi dalam rangka menyelesaikan studi di Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Seluruh dosen pengampu, segenap karyawan, staf administrasi serta para petugas di Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah banyak membantu selama studi di Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
8. Mas Iluk, Mas Azis, Staf Bagian Administrasi Pogram Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan cepat, ramah, kekeluargaan, menyenangkan dan memuaskan.
9. Dr. Agussani, M.AP. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, beserta seluruh para Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas, yang telah mendukung penulis penulis untuk melanjutkan pendidikan Program Doktor di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
10. Dr. Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Dr. Zainudin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UMSU Terima kasih atas dukungannya.
11. Ayahanda Alm.Sori Muda Simatupang dan Ibunda Hj.Achwani Tanjung yang telah membesarkan Penulis.

12. Istri tersayang, Eka Herawaty.,S.H.M.Kn.yang dengan penuh ketulusan kasih, kesabaran, pengertian dan pengorbanan yang sangat besar baik terhadap waktu dan segala hal telah mendampingi serta selalu berdo'a kepada Allah SWT untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di UNISSULA Semarang, ditambah dengan keberadaan anak-anak Ahmad Syahmuddin Rahmatul Ula Simatupang dan Miftahul Jannah Rahmatusani Simatupang yang menjadikan kebanggaan tersendiri bagi penulis.
13. Para sahabat seangkatan Program Doktor Ilmu Hukum di UNISSULA, terima kasih atas persahabatan selama proses perkuliahan dan selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan pendidikan.
14. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung turut mendukung dan membantu hingga penulis dapat menyelaikan disertasi ini.

Semarang, April 2021,

Penulis

Ikhwaluddin Simatupang,SH.,M.Hum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN..... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... v

ABSTRACT vi

KATA PENGANTAR lix

DAFTAR ISI lxviii

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR..... lxxii

DAFTAR RAGAAN lxxiii

DAFTAR SINGKATAN lxxiv

GLOSSARY lxxvi

BAB I PENDAHULUAN……..... 1

1.1. Latar Belakang.....……...1

1.2. Rumusan Masalah…….....13

1.3. Tujuan Penelitian…….....13

1.4. Manfaat Penelitian…….....14

1.4.1. Manfaat teoritis…… 14

1.4.2. Manfaat praktis…….....14

1.5. Kerangka Koseptual…….....15

1.6. Kerangka Teoritis …….. 20

1.6.1. *Grand theory*(Teori Tujuan Hukum dan Teori Keadilan Hukum Islam)…….....20

1.6.2. *Middle theory* (Teori Sistem Hukum) 34

1.6.3. *Applied Theory* (Teori Hukum Progresif dan Teori *Restorative Justice*)..... 39

1.7. Kerangka Pemikiran…… 52

1.8. Metode Penelitian…….....55

1.8.1. Paradigma penelitian…….....55

1.8.2. Jenis penelitian…… 57

1.8.3. Metode pendekatan…… 58

1.8.4. Sumber data …….....59

1.8.5. Teknik pengumpulan data…… 62
1.8.6. Analisis data …….. 63
1.9. Sistematika Penulisan 64
1.10. Keaslian Penelitian 67

BAB II KAJIAN PUSTAKA ……..……. 71
2.1. Pengelompokan Korban …… .....…….71
2.2. Hak-Hak Korban dalam Hukum Positif Indonesia……..…. .....……..…83
2.2.1. Hak-hak Korban di dalam KUHP…… .……..…87
2.2.2. Hak-hak Korban di dalam KUHAP… 98
2.2.3. Hak-hak Korban di dalam UULPSK.....102
2.3. Hak-Hak Korban dalam Hukum Islam 114
2.4. Hak-Hak Korban dalam Instrumen Hukum Internasional.....127
2.5. Model Pemberdayaan Korban 157
2.6. Pemeriksaan Perkara Pidana pada Persidangan PN.....160
2.7. Peraturan/Keputusan POLRI,Kejagung dan MARI tentang Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Pidana 170
2.7.1. Keadilan *Retributif* dan *Restoratif*.....170
2.7.2. Surat Edaran Kepolisian Republik Indoesia Nomor SE/8VII/2018…..…… .....……177
2.7.3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 186
2.7.4. Putusan MARI Nomor 1600 K/Pid/2009 198
2.7.4.1. Deskripsi Singkat Perkara ……198
2.7.4.2. Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung .....…202
2.7.4.3. Tujuan Hukum dan Keadilan Restoratif dalam Putusan 203

BAB III KEDUDUKAN KORBAN PERSEORANGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA 205
3.1. Sistem Peradilan Pidana.....……205
3.1.1. Peradilan Pidana Sebagai Sistem…… 205
3.1.2. Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Hukum .....……215
3.2. Pihak-pihak dalam Proses Peradilan Pidana……255
3.2.1. POLRI sebagai Penyelidik/Penyidik……..…255
3.2.2. Kejaksaan sebagai Penuntut…..……...…...231
3.2.3. Hakim Sebagai Pemeriksa Yang Mengadili dan Pemutus Perkara…….……..……237
3.2.4. Advokat Sebagai Penasahat Hukum/Pembela.....240
3.2.5. Tedakwa, Saksi/Korban dan Ahli..... 243

3.3. Kedudukan Korban Perseorangan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....250

BAB IV PENYEBAB HAK KORBAN DALAM PENUNTUTAN TERDAKWA BELUM BERBASIS KEADILAN DAN KEMANFAATAN.....292

4.1. Tata Cara Penuntutan Terdakwa dan Pemenuhan Hak Korban.....292
4.1.1. Tatacara Penuntutan Terdakwa dan Pemenuhan Hak Ganti Rugi ...293
4.1.2. Tata Cara Pemenuhan Hak Korban dalam Peraturan Pemerintah.....313
4.2. Penyebab Hak Korban dalam Penuntutan Terdakwa Belum Berbasis Nilai Keadilan dan Kemanfaatan.....364
4.2.1. Substansi Hukum.....364
4.2.2. Kultur Hukum 373
4.2.3. Struktur Hukum.....392

BAB V REKONSTRUKSI HAK KORBAN PERSEORANGANDALAM PENUNTUTAN TERDAKWA BERBASIS NILAI KEADILAN DANKEMANFAATAN 396

5.1. Hak Korban dan Tata Cara Pemenuhannya di BeberapaNegara 396
5.1.1. Hak Korban dan Tata Cara Pemenuhannya di Amerika 396
5.1.2. Hak Korban dan Tata Cara Pemenuhannya di China 402
5.1.3. Hak Korban dan Tatacara Pemenuhannya di Saudi Arabia.....415
5.1.4. Hak Korban dan Tata Cara Pemenuhannya di Thailand.....422
5.2. Rekonstruksi Hak Korban Perseorangan dalam Penuntutan Terdakwa Berbasis Nilai Keadilan dan Kemanfaatan.....435
5.2.1. Rekonstruksi Nilai.....439
5.2.2. Rekonstruksi Norma.....453
5.2.3. Rekonstruksi Hak Korban Perseorangan Mencabut Pengaduan.....455
5.2.3.1. Rekonstruksi Hak Korban dalam Pembuatan Surat Dakwaan dan Tuntutan 464
5.2.3.2. Rekonstruksi Hak Korban Atas Informasi Pemeriksaan Perkara 492

BAB VI PENUTUP 496

6.1. Simpulan 496
6.2. Implikasi Teoritis dan Praktis 504
6.2.1. Implikasi Teoritis.....504
6.2.2. Implikasi Praktis.....505
6.3. Saran.....505

DAFTAR PUSTAKA.....511

BIODATA PENULIS 529

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Pokok-pokok Gagasan Desain Pemidanaan Perspektif *Rdafestoratif Justice* 58
2. Tabel 2. Penelitian-penelitian Terdahulu Terkait tentang Hak-hak Korban …74
3. Tabel 3. Ketentuan dalam KUHP tentang Delik Aduan Absolut 97
4. Tabel 4. Ketentuan KUHP tentang Delik Aduan Relatif 101
5. Tabel 5. Ketentuan tentang Memasukkan dan Mencabut Pengaduan 103
6. Tabel 6. Hak-hak Korban dalam UULPSK 111
7. Tabel 7. Konsep *Retributive Justice* dan *Restorative Justice* 193
8. Tabel 8 Pengaturan Penuntutan dalam KUHAP 258
9. Tabel 9. Tema Pokok Keadilan *Retributif* dan Keadilan *Restoratif* 296
10. Tabel 10. Hak-hak Korban dalam Pasal 98-101 KUHAP 332
11. Tabel 11. Rekonstruksi Ketentuan KUHP tentang Pencabutan Pengaduan.. 507
12. Tabel 12. Rekonstruksi Ketentuan KUHAP tentang Kewenangan Penuntut Umum (Pasal 14 KUHAP) 526
13. Tabel 13. Rekonstruksi Ketentuan KUHAP tentang Hak Menerima Turunan Berita Acara Pemeriksaan Kewenangan Penuntut Umum (Pasal 72 KUHAP) 528

14. Tabel 14 Rekonstruksi Ketentuan KUHAP tentang Hak Mengajukan Banding (Pasal 67 KUHAP) 530
15. Tabel 15 Rekonstruksi Ketentuan KUHAP tentang Hak Mengajukan Kasasi (Pasal 244 KUHAP) 531

DAFTAR RAGAAN

KERANGKA PEMIKIRAN 53

DAFTAR SINGKATAN

- ANC = African National Congress (Kongres Nasional Afrika)
- ASEAN = *Association of Southeast Asian Nations*
- BAP = Berita Acara Pemeriksaan
- CCM = *Crime Control Model*
- DPM = *Due Process Model*
- DPR RI = Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- FM = *Family Model*
- HAKI = Hak atas kekayaan intelektual
- Hlm = halaman
- ICJS = *Integrated Criminal Justice System*
- ILO = *International Labour Organization,*
- JPU = Jaksa Penuntut Umum
- KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia
- KDRT = Kekerasan dsalam Rumah Tangga
- KTUN = Keputusan Tata Usaha Negara
- KUHAP = Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- LPSK = Lembaga Perlindugan Saksi dan Korban
- MARI = Mahkamah Agung Republik Indonesia
- MK = Mahkamah Konstitusi

- MPRS = Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
- PH = Penasihat Hukum
- PBB = Perserikatan Bangsa-bangsa
- PLO = *Palestine Liberation Organisation*
- PN = Pengadilan Negeri
- POLRI = Kepolisian Republik Indonesia
- PP = Peraturan Pemerintah
- PPNS = Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- PPKI = Panitia Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia
- Q.S = Qur'an Surat
- SOP = Standard Operasional Prosedur
- SPP = Sistem Peradilan Pidana
- SP3 = Surat Penghentian Penyidikan

- SWAPO = *South West Africa People's Organisation*
- UU = Undang-undang
- UUD = Undang-undang Dasar
- UUKDRT = Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga
- UU LPSK = Undang-undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- UU Pengadilan HAM = Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- WHO = *World Health Organization*

GLOSARIUM

Afdoening Buiten Process

Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan

Ahli

Seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Abstractvictims

Korban kejahatan bersifat abstrak

Al 'Adalah

Persamaan atau prinsip semua berdasar pada hukum

Alcohol And Drugs Abuse

Alkohol dan penyalahgunaan obat bius

Al Manzila Byan Al Minzalatayn

Prinsip kesamaan keseimbangan

Al- Wa'd Wa Ala Waid

Prinsip janji dan peringatan.

Amar Ma' ruf Nahi Mungkar

Menegakkan kebaikan dan mencegah/ menindak hal-hal yang tidak

Biologically Weak Victim

Kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak – anak, dan manusia lanjut usia (manusia) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerinah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

Collective Victims

Korban yang merupakankorporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara

Conflict Solution

Penyelesaian konflik

Delik Aduan Absolut

Tap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya.

Delik Aduan Relatif

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan.

Deponering perkara

Pembekuan atau pengesampingan perkara

External Legal Culture

Budaya hukum dari masyarakat pada umumnya/ masyarakat luas

Equality Before The Law

Persamaan di muka hukum

False Victims

Mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri

Ishlah

Perdamaian

Hak

Wewenang menurut hukum

***Individual Victims* (korban kejahatan)**

Perorangan atau individu yang mejadi korban kejahatan

Internal Legal Culture

Budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, misalnya pengacara, polisi, jaksa dan hakim

Keadilan(*Gerechtigkeit*)

Perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adilperbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil

Keadilan Restoratif

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan Retributif

Keadilan yang berkaitan dengan terjadinya kesalahan.

Kemanfaatan(*Zweckmasigkeit*)

dimaknai bermanfaat atau kegunaan.

Korban

Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban Institusi

Setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam

Korban KejahatanKonvensional

Korban yang diakibatkan oleh tindak pidana biasa atau kejahatan biasa misalnya, pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan lain- lain

Korban Kejahatan (*victims of crime*)

Akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*)terhadap hak asasi alat penguasa termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan sebagainya.

Korban Lingkungan Hidup

Setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab

Korban Masyarakat Bangsa Dan Negara

Masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun

Korban non konvensional

Korban kejahatan yang diakibatkan oleh tindak pidana berat seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika secara tidak sah, kejahatan terorganisir dan kejahatan komputer.

Latent Or Predisposed Victims

Mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu

Legal Structure

Sub sistem struktur hukum

Legal Subtance

Substansi hukum

Legal System

Sistem hukum

Locus Delicti

Lokasi terjadinya peristiwa pidana

Nebis In Idem

Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama

Nilai

Sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.

No Victimization

Korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

Non Participating Victims

Mereka yang menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.

Order*Participating Victims*

KetertibanMereka yang tidak perduli atau perilaku lain yang memudahkan dirinya sendiri menjadi korban

Peace

Perdamaian

Penuntutan

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan

Perseorangan

yang berkaitan dengan orang secara pribadi

Political Victims

Korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Primary Victims

Korban primer, mereka yang menderita secara langsung sebagai akibat dari sebuah kejahatan

Primary Victimization

Yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok)

Provocative Victims

Korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan

Quasi Yudisial

Badan – badan semi peradilan

Real Victim

Korban yang nyata

Rechtssicherheit

Kepastian hukum

Rekonstruksi

Pembaharuan sistem atau bentuk berupa hak korban perseorangan dalam penuntutan terdakwa yang lama digantikan dengan aturan yang baru

Safety

Rasa Aman

Saksi

Orang yang dapat memberikan keteragan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri , ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.(281)

Secondary Victimization

Yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum.

***Secondary victims*(Korban Sekunder)**

Orang-orang yang merupakan saksi sebuah kejahatan, anggota keluarga, teman, tetangga, dan seluruh masyarakat, yang mungkin juga menderita trauma

Self Victimizing Victims

Korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan

Socially Weak Victims

Mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban, misalnya korban perdagangan perempuan

Surat Dakwaan

Surat dakwaan yang tidak berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Tempos Delicti

Waktu terjadinya peristiwa pidana

Terdakwa

Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Tertiary Victimization

Korban masyarakat luas.

The Living Law

Penekanannya pada hukum yang hidup

***The Procedural Rights* (Model hak – hak prosedural)**

Model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan.

***The Servis Model* (Model pelayanan)**

Penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku hagi pembinaan korban kejahatan

Unrelated Victims

Mereka yang tidak ada hubungan dengan sipelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban

Victims by act

orang yang secara indivual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan

Victims by omission

Orang yang secara indivual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena kelalaian

Viktimisasi Primair

Korban orang perorangan atau korban individual

Viktimisasi Sekunder

Korban yang bukan perorangan

Vindication

Pemulihan nama baik

Vonis

Keputusan pengadilan

Westernized

Kebarat – baratan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Demikian Pasal 28 Huruf D Undang-undang Dasar Tahun 1945(UUD 1945) memberikan jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).Keberadaan pasal ini tentunya dalam maksud untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[1] UUD 1945 dibentuk dan disusun berdasarkan Pancasila, yakni: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.[2]

Menurut Hamid S. Attamimi, dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara maka Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaruannya. Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara

[1] Pembukan UUD 1945.
[2] Pembukan UUD 1945.

hierarkis dan bersumber darinya, sedangkan Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya dan karenanya juga harus bersumber dari Pancasila.[3]

Paton sebagaimana dikutip Mumpuni Moelatiningsi mengemukakan bahwa bagi bangsa Indonesia Pancasila telah disepakati sebagai *core ofphilosophy* yang merupakan *local genius* dan *local wisdom*bagi bangsa Indonesia. Posisi Pancasila yang sedemikian strategisnya inilah yang menegaskan Pancasila sebagai *grundnorm* atau *Basic norm* (norma tertinggi) bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah asas norma yang sekaligus menjadi sumber bagi semua asas hukum, norma hukum dan hukum yang berlaku di Indonesia, karena itulah bagi bangsa Indonesia,[4] Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup, ideologi bangsa dan juga sebagai dasar negara.[5]

Pancasila sebagai falsafah negara maupun dasar negara Indonesia membawa konsekuensi bahwa dalam segala peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dan penegakannya seharusnya mendasarkan pada Pancasila.[6]

Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang menciptakan konstitusi, yang juga menentukan isi dan bentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang seluruhnya tersusun secara hierarkis. Jika norma hukum yang lebih rendah bertentangan atau tidak sesuai dengan Pancasila maka terjadi

---

[3] Moh. Mahfudz MD,2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, hlm.51.

[4] Mumpuni Moelatiningsi, Desember 2013,*Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum UNDIP*,Semarang, hlm.14-16.

[5]WP Djatmiko,2019, Dikonstruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok di MasyarakatMadura Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 114.

[6] Siti Malikhatun Badriyah, 2016, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 44

*inkonstitusional*dan ketidaklegalan (*illegality*) dan karenanya norma hukum yang lebih rendah itu menjadi batal dan harus dibatalkan demi hukum.[7]

Kelima Sila Pancasila sebagaimana diuraikan di atas merupakan salah salah satu dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).[8]

Pasal 156 ayat 1 KUHAP menentukan:"Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama ditentukan bahwa jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan.

Ketentuan Pasal 156 Ayat (1) dan (2) KUHAP memberikan hak kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk menanggapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum. KUHAP tidak memberikan hak bagi terdakwa untuk aktif dalam penyusunan dakwaan oleh JPU. Bahkan Jika hakim menyatakan keberatan terdakwa atau penasihat hukum diterima sehingga perkara tidak diperiksa lebih

---

[7]Moh. Mahfudz MD,2006, *Op.Cit*,hlm.54-55.

[8] Konsiderans KUHAP pada bagian ”Menimbang” Huruf a, menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

lanjut, perlawanan terhadap perkara dimaksud hanya dapat dilakukan JPU.[9]Ketidakseimbangan antara hak terdakwa dan korban dalam dakwaan merupakan suatu ketidakadilan.

Dalam Putusan MARI Nomor 296.K/Pid/1987 korban tidak dapat mengajukan keberatan hukum kepada pengadilan atas keteledoran jaksa penuntut umum, karena mengubah surat dakwaan yang mengakibatkan dakwaan batal demi hukum. Mahkamah Agung berpendapat bahwa korban kejahatan tidak memiliki hak hukum terhadap perbuatan jaksa dan oleh karenanya tertutup kemungkinan korban melakukan upaya hukum menurut pertanggungjawaban hukum terhadap jaksa tersebut.[10]

Putusan yang berisi pembebasan atau pelepasan terdakwa atau dakwaan jaksa dinyatakan batal demi hukum yang bersumber dari kekurangcermatan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan atau dalam penyusunan rekuisitor, bukan disebabkan tidak cukup bukti atau ada keragu-raguan dalam pernbuktian dapat merugikan korban kejahatan sebagai pancari keadilan, yakni:

1. Putusan MARI yang memuat kekurangcermatan jaksa penuntut umum yang menyebabkan terdakwa dibebaskan, antara lain Putusan MARI Nomor 26.K/Pid/1988, 8 Februari 1980, dalam kasus perkosaan, karena tidak memberkas surat aduan yang benar.[11]
2. Putusan MARI Nomor 321/K/Pid/1983,tanggal 26 Mei 1984, dalam kasus penganiayaan delik penyertaan yang menyebabkan matinya orang, karena

[9] Pasal 156 Ayat (3) KUHAP
[10]Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pasacasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.hlm.107-108.
[11] *Ibid*,hlm.108.

jaksa tidak mendakwa pelaku peserta (terdakwa II) dengan dakwaan melakukan penganiayaan seperti pada pelaku utama (terdakwa I).[12]

3. Putusan MARI Nornor 162.K/Pid/1986. Tanggal 26 September 1987, dalam kasus karena kealpaannya mengakibatkan luka-luka berat orang lain, karena jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai luka berat (Pasal 90 KUHP).[13]
4. Putusan MARI Nomor 1677.K/Pid/1987,tanggal 7 Februari 1990, dalam kasus perzinahan,karena pelaku perzinahan tidak ikut diajukan sebagai terdakwa.[14] Putusan MARI Nomor 296.K/Pid/1987, tanggal 15 Mei 1991 dalam kasus pendudukan atau menyerobot tanah orang lain,karena jaksa mengubah surat dakwaan, maka dakwaan jaksa dinyatakan batal demi hukum yang mengakibatkan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban juga ditolak.[15]

KUHAP menentukan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.[16] Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.[17]Pada ketentuan KUHAP ini tidak berimbang antara hak korban dengan hak terdakwa. Terdakwa tetap diberikan hak mengajukan pembelaan

[12] *Ibid*.
[13]*Ibid*,hlm.108-109.
[14]*Ibid*,hlm.109.
[15]*Ibid*.
[16] Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP.
[17] Pasal 182 Ayat (1) huruf b KUHAP.

bersama dengan penasihat hukum terdakwa, namun korban tidak terlibat sama sekali pada penuntutan terdakwa.

Pasal 13, Pasal 14 huruf g dan Pasal 137 KUHAP tidak memberi hak bagi korban untuk mengajukan tuntutan pidana. Hak untuk mengajukan tuntutan pidana hanya diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum, Pasal 140 ayat (2) KUHAP bahkan memberikan kewenangan mutlak bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan terhadap suatu tindak pidana.

Putusan MARI Nomor 1457.K/Pid/1991 menentukan bahwa korban kejahatan sebagai pihak ` yang dirugikan tidak dapat mengajukan gugatan hukum ke pengadilan atas kecerobohan jaksa atau hakim yang merugikan kepentingan korban. Kasus posisinya, korban kejahatan mengajukan tuntutan ganti kerugian secara lisan tetapi oleh jaksa atau hakim (Pengadilan Negeri) tidak dimasukkan dalam berkas perkara, padahal hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan ganti kerugian. Tergugat (terpidana) mengajukan banding/kasasi dengan dalih hukum bahwa ia keberatan terhadap keteledoran jaksa/hakim yang tidak memuat permohonan korban tersebut dan Mahkamah Agung akhirnya menyetujui keberatan terdakwa dan kemudian membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dengan alasan "tidak jelas kapan tuntutan tersebut diajukan dan bukti biaya yang dikeluarkan tidak dijelaskan penggunaannya.”[18]

KUHAP tidak pula memberikan keseimbangan hak antara korban dengan hak terdakwa dalam pembuatan dakwaan dan penuntutan terhadap terdakwa.

[18] Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan,Op.Cit.*,hlm.106-107.

Kehadiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UULPSK) sebagaimana diubah oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak memberi hak bagi korban untuk terlibat dalam pembuatan dakwaan dan penuntutan oleh JPU.[19]Hak-hak Korban dalam UULPSK di atas belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban untuk seluruh kasus tindak pidana, karena dibatasi hanya dalam kasus-kasus tertentu.[20] Terkait

[19]Pasal 5 Ayat (2) UULPSK memberikan hak kepada korban untuk:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
i. Dirahasiakan identitasnya;
j. Mendapat identitas baru;
k. Mendapat tempat kediaman sementara;
l. Mendapat tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
m. Mendapat nasihat hukum;
n. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/ atau
o. Mendapat pendampingan.

Khusus Kasus Pelanggaran HAM Berat dan Tindak Pidana Terorisme, korban juga diberikan hak bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.(Pasal 6 Ayat (1) UULPSK).

[20]Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) UULPSK menerangkan bahwa hak-hak sebagaimana dimaksud diberikan kepada korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu,antara lain dalam kasus:[20]

1. Pelanggaran HAM Berat;
2. Tindak Pidana Korupsi;
3. Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Tindak Pidana Terorisme;
5. Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Tindak Pidana Narkotika;
7. Tindak Pidana Psikotropika;
8. Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak;
9. Tindak Pidana lain yang mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya;

tentang hak korban dalam pembuatan dakwaan dan penuntutan, ketentuan Pasal 5 ayat (2) UULPSK yang memberikan hak bagi korban memperoleh informasi perkembangan kasus sangat baik bila diberikan kepada korban untuk seluruh kasus tindak pidana.

Pengaturan hak korban dalam penuntutan terdakwa beberapa tahun terakhir menjadi permasalahan yang memerlukan kajian untuk menemukan penyelesaiannya. Reaksi korban/keluarga korban atas tuntutan jaksa dalam persidangan di pengadilan negeri[21] menjadi perhatian penting untuk diberikannya hak kepada korban dalam menentukan besar-kecilnya tuntutan pidana atau bahkan tidak mengajukan tuntutan pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan negeri.

Pada sidang kasus pembunuhan Rezky Eviena Syamsul di Pengadilan Negeri (PN) Makasar, 30 April 2018, pada saat pembacaan tuntutan terhadap terdakwa keluarga korban tidak keberatan terdakwa dituntut hukuman 1 tahun 4 bulan dengan salah satu dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU), bahwa orang tua korban telah mencabut laporan dan adanya pernyataan damai. Dalam persidangan Kasus Pembunuhan Hanpriandi di PN. Bengkulu, 13 Mei 2014,

[21]Reaksi korban/keluarga korban atas tuntutan jaksa dalam persidangan di pengadilan nageri dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sidang kasus pembunuhan Rezky Eviena Syamsul di PN.Makasar,30 April 2018,http://news. rakyatku. com/ read/ 99044/ 2018/04/30/alasan-jpu-tuntut-ringan-tiga-terdakwa-kematian-rezky-evienia-syamsul, dibaca : tanggal 25 November 2018, Pukul. 20. 16 WIB.
2. Sidang kasus pembunuhan Hanpriandi di PN.Bengkulu,13Mei 2014, https://bengkulueksprress. com/ keluarga-minta-pembunuh-adik-dihukum-ringan/, dibaca : tanggal 25 November 2018, Pukul. 20. 20 WIB.
3. Sidang kasus pembunuhan Anang Tri Hidayat di PN. Purwodadi, 24 April 2018,https://grobogannews. com/2018/04/sidang-kasus-pembunuhan-jl-mt-haryono. html,dibaca : tanggal 10 Juli 2018, Pukul. 10. 20 WIB.
4. Pemeriksaan perkara penipuan penggelapan terdakwa Ismayati pada PN. Yogyakarta No. 317/ PID. B/ 2008/ PN. YK Tahun 2008, https:// kepaniteraan. mahkamahagung. go. id/ index. php/ statistik-perkara/ 35-landmark-decision/ perkara-pidana23/ 141-nomor-1600-kpid2009-restorative-justice.

keluarga terdakwa yang juga keluarga korban meminta agar hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mempertimbangkan nasib kedua orangtuanya. Keluarga korban yang sekaligus merupakan keluarga terdakwa meminta agar anaknya dapat dihukum seringan-ringannya dan diberi kesempatan untuk berkumpul kembali. Keadaan sebaliknya, terjadi pada saat pembacaan tuntutan terdakwa kasus pembunuhan di PN. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada tanggal 24 April 2018 yang berakhir ricuh. Keluarga korban menilai tuntutan jaksa terlalu ringan langsung mengamuk. Sidang yang mendudukkan DY (23) warga Tambirejo, UP (23) warga Tunggak dan DA (25) warga Pilang Payung sebagai terdakwa atas kasus pembunuhan terhadap Anang Tri Hidayat (24) dengan agenda pembacaan tuntutan JPU awalnya berjalan lancar, namun setelah mendengar tuntutan JPU yang menuntut terdakwa 8 tahun penjara, keluarga korban langsung protes dan berusaha menorobos pengamanan polisi.

Dalam kasus pencurian mesin bulu ayam di Ruli Danau Merah, Batuaji, Batam,Tahun 2013, Korban Taufik meminta kepada majelis hakim agar terdakwa AS dibebaskan, dengan alasan pelaku bukanlah pelaku utama dan AS telah mengakui perbuatannya sebelum kasus ini diproses.[22]Begitupula dalam pemeriksaan Terdakwa Iwan Adranacus Ayah korban Eko Prasetyo. Suharto memohon kepada Majelis Hakim PN. Kota Solo agar membebaskan terdakwa Iwan Adranacus yang dituntut hukuman pidana selama lima tahun oleh JPU karena didakwa melanggar Pasal 338 tentang pembunuhan.[23]

---

[22] https://batampos.co.id/2020/01/ 17/ korban-minta-terdakwa-pencurian-dibebaskan-oleh-majelis-hakim/,diakses 18 April 2020 Pkl 11. 55.

[23]https://timlo. net/ baca/ 18471/ ayah-korban-minta-iwan-adranacus-dibebaskan/,diakses pada tanggal 18 April 2020 Pkl 12. 05.

Keadaan-keadaan di atas merupakan suatu fakta bahwa adanya kesenjangan antara hak-hak korban berdasarkan hukum positif di Indonesia dengan keadilan dan kemanfaatan hukum yang diharapkan korban. Reaksi-reaksi korban terhadap dakwaan dan tuntutan JPU sebagaimana diuraikan di atas merupakan fakta adanya kebutuhan pemenuhan hak korban dalam mendakwa dan menuntutterdakwa. Dalam hal ini Mahmutarom dan Sri Endah Wahyuningsih mengemukakan:

> ”…Jika kepentingan korban tidak mendapat perhatian yang semestinya, maka akan mudah pihak korban atau pihak lain yang berkepentingan melakukan perbuatan main hakim sendiri.”[24]

> ”…berdasarkan aturan dalam KUHP selama ini, perhatian terhadap pihak korban dan ahli waris/ keluarganya akibat tindak pidana yang merupakan hak adami seperti tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan belumlah memadai karena orientasi pemidanaan menurut KUHP adalah pembalasan atau perbuatan (*daad-strafrecht*) yang dilakukan kepada si pelaku tanpa memperhatikan pihak korban atau ahli waris.”[25]

Dalam Q.S. An Nisa’/4:58, Allah Subhanahu Wata’la berfirman: ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

---

[24] Mahmutarom, HR. , 2009, *Rekokonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tidak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 135.
Mahmutarom mengemukakan bahwa korban dan terdakwa merupakan subjek penting dalam pemeriksaan perkara pidana sejak tingkat penyidikan, penuntutan hingga sidang di pengadilan. Mahmutarom mengemukakan bahwa ada 3 pihak yang harus diperhatikan dan dilindungi secara proporsional dan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana, yaitu:1.Korban tindak pidana dan/atau keluarganya.2.Pihak pelaku dan 3.Masyarakat luas, termasuk negara. (Mahmutarom, HR., 2009, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi tentang Perlindungan Korban Tidak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)*,Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.135).

[25] Sri Endah Wahyuningsih,2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Semarang:Fastindo, hlm.133.

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Pada Q.S. An-Nahl/16:90Allah Subhanahu Wata'la berfirman:"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Pada kasus penipuan dan penggelapan terdakwa Ismayati, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) melalui Putusan Nomor : 1600 K/ Pid/ 2009 mengabulkan permohonan pencabutan Pengaduan korban Emiwati agar terdakwa tidak dihukum.

Pertimbangan hukum Putusan MARI Nomor : 1600 K/ Pid/ 2009, menyatakan bahwa walaupun pencabutan pengaduan telah lewat waktu[26],namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih. Pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh pelapor yang *nota bene* mertua terdakwa, adalah merupakan tindakan untuk memaafkan menantu yang dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara ini diteruskan.

Walaupun perkara antara Korban Emiwati dengan Terdakwa Ismayawati perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor

[26]Penarikan kembali pengaduan oleh korban, baik dalam delik aduan relatif maupun absolut ditentukan dalam Pasal 75 KUHP, yang berbunyi: "Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan." Ketentuan Pasal 75 KUHP ini tidak berlaku dalam pengaduan tindak pidana Pasal 284 KUHP (delik zina), yang dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai (Pasal 284 Ayat (3) KUHP).

.

mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan.

Muhammad Alim mengemukakan bahwa asas manfaat merupakan salah satu asas hukum dalam Al Quran.[27]Asas kemanfaatan tersirat dari Q.S. Al Baqarah/2:178:"Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang dimaafkan) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu ada korban lah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.Dan barang siapa melanggr batas maka baginya siksa yang pedih".

Dalam hukum *qishash*, apabila keluarga memaafkan kepada si pembunuh, mungkin dengan pertimbangan kemanusiaan dan kemanfaatan agar tidak ada rasa dendam secara turun temurun, juga agar keluarga yang ditinggalkan almarhum ada semacam jaminan yang diperolehnya, maka ditempulah pembayaran diat sebagai ganti pidana qishash.[28]

Uraian-uraian di atas memotivasi Penulis untuk meneliti hak korban perseorangandalam penuntutan terdakwa pada disertasi dengan judul: "Rekonstruksi Hak Korban Perseorangan dalam Penuntutan Terdakwa Berbasis Nilai Keadilan dan Kemanfaatan. "

---

[27]Muhammad Alim,Juni 2010,*Asas-asas Hukum Modern dalam Hukum Islam*,Volume 17,Jurnal Media Hukum,hlm.159.

[28] *Ibid*.

1.2.Rumusan Masalah

Fokus penelitian adalah fokus permasalahan yang dipilih untuk diteliti sebagai batasan dari pembahasan. Seiring uraian-uraian dalam bagian Latar Belakang, permasalahan dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan korban perseorangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Mengapa hak korban perseorangan dalam penuntutan terdakwa saat ini belum berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan?
3. Bagaimana rekonstruksi hak korban perseorangan dalam penuntutan terdakwa yang berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan disertasi korban perseorangan adalah untuk :

4. Untuk menjelaskan dan menganalisis kedudukan korban perseorangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
5. Untuk menganalisis penyebab hak korban perseorangan dalam penuntutan terdakwa saat ini belum berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan.
6. Untuk menemukan rekonstruksi hak korban perseorangan dalam penuntutan terdakwa yang berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan.

1.4.Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan disertasi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan memiliki kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan sumbangsih pemikiran tehadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan lebih khusus lagi bidang hukum acara pidana. Penelitian ini bermanfaat untuk menemukan materi hukum baru tentang hak korban dalam mengajukan tuntutan pidana.

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)dalam merumuskan aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum acara pidana pada perancangan peraturan perundang-undangan baik yang baru maupun perubahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kepada peneliti lain yang meneliti masalah sejenis serta menambah *literatur/referensi* ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya hukum acara pidana dan lebih khusus lagi mengenai hak korban dalam mengajukan tuntutan pidana.

1.5.Kerangka Konseptual

Kerangka konsepsional merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.[29]Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan *abtraksi* yang digeneralisasikan dari gejal-gejala tertentu. Misalnya

[29] Amiruddin. , Zainal Asikin, H. ,2016,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo, Jakarta,hlm 47

konsep tentang pencurian, kejahatan demokrasi, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), wanprestasi, birokrasi, pembunuhan, kesewenang-wenangan, ketaatan, kesadarans dan masih banyak konsep-konsep lainnya yang dikenal dalam disiplin ilmu hukum yang tidak mungkin disebut satu-persatu.[30]

Amiruddin dan Zainal Asikin mengemukan bahwa salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak pada referensi. Definisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan.[31]

P. M. Hadjon mengemukakan bahwa definisi yang *relevan* dan popular dalam bidang hukum untuk dipergunakan adalah definisi nominal.[32]Definisi nominal terdiri dari definisi *leksikal*,[33] definisi *presisi*[34]dan definisi *stipulatif*.[35]Ketiga jenis definisi nominal tersebut tidak seluruhnya *relevan*

---

[30]*Ibid*.,hlm.48.

[31]*Ibid*.

[32] Definisi Nominal menurut Departemen Pendidikan Nasional,2008,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Edisi Keempat,Jakarta : Gramedia Pustaka Utama (KBBI), berupa makna kata dengan keterangan turunan dan pemakaian kata itu (KBBI, hlm.303). Definisi nominalis adalah menjelaskan sebuah kata dengan kata lain yang lebih umum dimengerti. Jadi sekedar menjelaskan kata sebagai tanda, bukan menjelaskan hal yang ditandai (http://legalstudies71.blogspot.com/2016/04/pengertian-definisi-dan-macam-macam.html,diakses 21 Juni 2020,Pkl.14.29).

[33] *Leksikal* berkaitan dengan kata/kosa kata (KBBI, hlm.805).

[34] Definisi presisi menurut H. Franken, mengandung unsur leksikal dan spikulatif. Dengan demikian, definisi presisi beranjak dari suatu konsep yang sudah lazim dalam bahasa sehari-hari (leksikal), kemudian ”ditambah”dengan unsur-unsur baru yang sifatnya untuk memberikan makna khusus yang baru (stifulatif-memberikan pengertian baru terhadappengertian yang sudah ada); P. M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Humu Dogmatik (Normative)*, Majalah Yuridika, Fakultas Hukum UNAIR, No. 6 Tahun IX November-Desember, 1994, hlm. 10 dalam Amiruddin dan Zainal Asikin,*Op.Cit*., hlm.57.

[35] Definisi stipulatif berarti pemaknaan istilah tertentu dengan makna atau arti baru. Arti baru disini berarti arti tersebut bukan arti yang terdapat dalam kamus maupun yang lazim dikenal dalam masyarakat (https://www.scribd.com/document/393051269/Definisi-stipulatif, diakses 21 Juni 2020, Pkl.14.26) Definisi stipulatif, yaitu penjelasan dengan cara pemberian nama atas dasar kesepakatan bersama. Definisi stipulatif banyak digunakan dalam lapangan ilmu pengetahuan.

dipergunakan, tetapi menurut Hadjon, hanya definisi *presisi* dan definisi *stipulatif*.[36]

Kerangka Konsepsionil dikemukakan Soerjono Soekanto sebagai berikut:

> ”Suatu kerangka konsepsionil, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Untuk lebih menjelaskannya, maka didalam penelitian biasanya dibedakan antara tiga hak yakni :
>
> 1. *Referens* atau acuan, yakni hal aktual yang menjadi ruang lingkup penelitian. *Referens* atau acuan tersebut mungkin merupakan benda perilaku atau peristiwa, ide, kwalitas, dan lain sebagainya.
> 2. Simbol atau kata atau istilah, yaitu sesuatu yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan *referens* atau acuan.
> 3. Konsep yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah. Dengan demikian, maka konsep sangat penting bagi cara pemikiran maupun komunikasi dalam penelitian.[37]

Kerangka Konseptual dalam tulisan ini memberikan pengertian atau penjelasan berkaitan dengan judul disertasi, yakni: 1.Rekonstruksi, 2.Hak,3.Korban, 4.Perseorangan, 5.Penuntutan, 6.Terdakwa,7.Nilai,8.Keadilan dan 9.Kemanfaatan

KBBI memberikan dua pengertian ”rekonstruksi”, yakni pengembalian seperti semula dan penyusunan (penggambaran) kembali.[38]Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa

---

(http://legalstudies71.blogspot.com/2016/04/pengertian-definisi-dan-macam-macam.html, diakses 21 Juni 2020,Pkl.14.29).

[36] P. M. Hadjon, *Loc..Cit.*dalam Amiruddin. , Zainal Asikin, H,2 *Loc..Cit.*.

[37] Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*,UI-Press, Jakarta, hlm. 132.

[38] KBBI, hlm.1158.

pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.[39]

Berdasarkan uraian diatas maka Peneliti simpulkan maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pembaharuan sistem atau bentuk berupa hak korban perseorangan dalam penuntutan terdakwa yang lama digantikan dengan aturan yang baru. Rekonstruksi tersebut inilah yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan dalam perencanaan pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan.

Perseorangan menurut KBBI adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi.[40]KBBI memberikan tujuh definisi hak, yakni : 1. Benar; 2. Milik; Kepunyaan; 3. Kewenangan; 4. Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya); 5. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; 6. Derajat atau martabat; dan 7. Wewenang menurut hukum.[41] Dalam penelitian ini Hak diartikan sebagai wewenang menurut hukum.

KBBI memberikan dua pengertian dari korban, yakni: 1. pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dsb; 2. orang, binatang, dsb. yang menjadi menderita (mati,dsb).[42]Menurut Pasal 1 angka 2 UULPSK korban adalah

---

[39] Yusuf Qardhawi,2014,*Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd,* Tasikmalaya, dalam *digilib. unila. ac. id,* diakses tanggal 01 Desember 2018.
[40] KBBI,hlm. 987.
[41] KBBI,hlm.474.
[42] KBBI, hlm. 733.

seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban dalam penelitian ini ialah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Apabila korban telah meninggal dunia atau korban tidak cakap lagi bertindak maka keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan korban dapat bertindak atas nama korban.

Hak Korban dalam penilitian ini dimaksudkan seluruh hak korban yang ditentukan dalam hukum di Indonesia, baik dalam hukum positf maupun putusan pengadilan serta hukum yang dicita-citakan.

Menurut KBBI, penuntutan adalah proses,cara,perbuatan menuntut sesuatu.[43]Penuntutan menurut KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.[44]

KBBI mendefenisikan terdakwa sebagai orang yang didakwa (dituntut,dituduh) telah melakukan tindak pidana dan adanya cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan.[45]Terdakwa menurut KUHAP

[43] KBBI, hlm. 1507.
[44] Pasal 1 Angka 7 KUHAP.
[45] KBBI, hlm. 288.

merupakan seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.[46]

KBBI memberikan definisi ”nilai, keadilan dan kemanfaatan.”Nilai diartikan : 1. harga (dalam arti taksiran harga); 2. harga uang (dibandingkan dengan harga uang yang lain): 3. angka kepandaian; biji; ponten; 4. banyak sedikitnya isi; kadar; mutu; 5. sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan; 6. sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.[47]Keadilan adalah perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil.[48] KBBI memberikan tiga makna tentang ”adil”, yaitu: 1. sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; 2. berpihak kepada yang benar; berpegang kepada kebenaran; dan 3. sepatutnya; tidak sewenang-wenang.[49]Kemanfaatan dimaknai bermanfaat; kegunaan.[50]Keadilan dan kemanfaatan dalam penelitian ini merupakan bagian dari tujuan hukum.

1.6.Kerangka Teoritis

Kerangka teori disertasi berisi penjelasan secara rinci yang dipakai dalam penelitian disertasi sebagai pisau analisis menjawab permasalahan diseratsi dengan sistematika Teori Utama dan Teori Pendukung yang sangat tergantung pada judul penelitian disertasinya. Pada masa transisi masih dapat digunakan

[46] Pasal 1 Angka 15 KUHAP.
[47] KBBI, hlm. 963.
[48] KBBI, hlm. 10.
[49] KBBI, hlm. 10.
[50] KBBI, hlm. 873

sistematika teori disertasi dengan pembagian *grand* teori, *middle* teori dan *applied* teori sebagai pisau analisis menjawab permasalahan disertasi.[51]

1.6.1 *Grand Theory* (Teori Tujuan Hukum dan Teori Keadilan Hukum Islam)

Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut *uasas prioritas*. Teori ini menyebut bahwa tujuan hukum pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, baru kemudian kemanfaatannya, dan terakhir kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-intern yang dapat menghancurkannya.[52]

Membicarakan masalah tujuan hukum memang sangat beralasan, mengingat masih ada pertentangan antara fiisafat hukum dan ahli teori hukum. Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:[53]

1. Aliran Etis;

---

[51] Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Unissula,2017, *Buku Pedoman Panduan Penyusunan Disertasi*, Semarang,hlm.5.
[52] Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 74.
[53] *Ibid*.,hlm.73-74.

2. Aliran Utilitis;

3. Aliran Normatif-Dogmatik

Aliran etis yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang mengemukakan[54] bahwa keadilan artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama. Dikatakannya bahwa, "*justice consists in treating equals equally and uneqnal unequally, in proportion to their inequality*". Prinsip ini beranjak dari asumsi "untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Salah satu pembedaan yang dilakukan Aristoteles[55] adalah pembedaan keadilan menjadi keadilan distributif (memberikan bagian) dan keadilan korektif mengadakan perbaikan) atau remedial (memberikan pengobatan). Keadilan distributif, mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum. Adapun bentuk keadilan korektif terutama merupakan suatu ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang menguasai administrasi daripada hukum pelaksanaan undang-undang. Dalam mengatur hubungan hukum perlu ditemukan ukuran umum untuk menanggulangi akibat-akibat perbuatan, tanpa memandang siapa orangnya dan maksudnya baru dapat dinilai menurut suatu ukuran obiektif. Hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus

[54]Aristoteles dalam Agus Yudah Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Prporsionalitas dalam Kontak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, hlm.36.

[55]Aristoteles dalam Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barakatullah,2009, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum,Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Jaman*, Cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 60-61

memperbaiki kesalahan/penyelewengan perdata, pengembalian harus memperbaiki keuntungan yang diperoleh dengan tidak wajar.

John Rawls menyatakan bahwa bagaimanapun keadilan formal yang kini tertuang dalam hukum dan perundang-undangan yang ada, tidak dapat sepenuhnya menjadi jaminan terciptanya suatu masyarakat sejahtera, makmur, dan terbebas dari semua ketidakadilan. Lebih lanjut bagi Rawls, teori keadilan yang benar-benar bisa menjamin keadilan di dalam masyarakat haruslah dibangun berdasarkan sistem kontrak (*Lockian*) yang mampu menjamin kepentingan semua pihak secara fair.[56]

Konsep keadilan menurut John Rawls bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Kata ”adil” dalam Bahasa Arab adalah *nomina augentie* (*Ism Fail*-Bahasa Arab) yang berasak dari kata benda “adala” yang mempunyai arti:

5. Tegak lurus atau meluruskan;
6. Atau duduk lurus atau langsung;
7. Untuk menjadi sama atau menyamankan; atau

[56] Herdis Herdiansyah, 2007, *Kemiskinan dan Distribusi Keadilan* , www. kompas. com diakses tanggal 13 des 2007, dalam Rena Yulia, 2013 *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Edisi Pertama Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.135.

8. Untuk menyeimbangkan atau bobot pengimbang;[57]

Mahmutarom mengemukakan bahwa keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang realitif.[58] Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata adil dari bahasa Arab ”adala” mengadung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, dari kata adala kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasithm* yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.[59] Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang meneyeluruh, hingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itupun menjadi tepat dan benar.[60] Dalam ilmu *fiqh*. adil merupakan sifat yang dituntut dari para saksi dalam pengadilan, sehingga kesaksiannya dapat dipercaya.[61]

Konsep keadilan menurut Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya;

---

[57]Mahmutarom, HR. , 2009, *Op.Cit.*, hlm.32.
[58]Majjid Khadduri,1984,*The Islamic Conception of Justice*,Baltimore and London:The Johns Hopkins Universitry Press, hlm.1 dalam Mahmutarom, HR. , 2009,*Ibid*.,hlm.31
[59]Mahmutarom, HR. , 2009,*Ibid*.
[60]*Ibid.*
[61]*Ibid.*

hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.[62]

Allah Subhanahu wata'ala memerintahkan untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. As Syuura/42 Ayat 15, yang artinya: "Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintakan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: Aku beriman kepadan semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal/ kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)."

Dalam Q.S. Shadd/38:26, Allah berfirman:"Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan".

Eko Soponyono, dalam pidato pengukuhan guru beşar mengemukakan konsep Adil dan Hikmah Al-Qur'an adalah dalam semua urusan, Al-Qur'an mendistribusikan kewajiban sikap adil dalam beberapa hal seperti:[63]

9. Menetapkan Hükum

---

[62]Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, P2U LPPM Unisba, Bandung, 1995, hlm 72 dalam Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 136.

[63]Eko Soponyono, 9 September 2017,*Hikmah Al Qura'n dalam Pembaharuan Hukum PidanaDemi Mewujudkan Keadilan Religius*,Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.30-34.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hükum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. ” (QS. An- Nisa/4: 58).

10. Memberi hak orang lain

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan. "(QS. An Nahl/16: 90).

11. Adil dalam berbicara

"Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu" (QS. Al-An'am/6:152).

12. Adil dalam kesaksian

"Wahai orang- orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa apa yang kamu kerjakan. ” (Q.S. An-Nisaa/4:135).

13. Adil dalam pencatatan hutang pihutang

"Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar (QS. Al- Baqarah/2: 282).

14. Adil dalam mendamaikan perselisihan

"Maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah…" (QS. Al-Hujarat/49:9).

15. Adil dalam menghadapi orang yang tidak disukai

    "Dan janganlah kebenciamu pada suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itü lebih dekat kepada taqwa. " (QS. Al-Maidah/5:8).

16. Adil dalam pemberian balasan.

    "Dan barang siapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil diantara kamu. " (Q.S. Al-Maidah/5:95).

Keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:[64]

1. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan.
2. Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim.
3. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
4. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan.
5. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.

Dalam menentukan keadilan itu tidak semua harus ditangani oleh ahli agama saja, tetapi dapat diserahkan kepada lembaga atau pemerintah yang baik yang berdasarkan lima prinsip dasar, yaitu (1) prinsip Keesaan Tuhan (*ketauhidan*), (2) prinsip semua berdasar pada hukum (*Al 'Adalah*/ persamaan), (3) prinsip janji dan peringatan *(Al-wa 'd wa ala waid*) yang dapat dipahami

[64] Hamka, *Tafsir Al-azhar Jus V*, 1983,Jakarta: Putaka Panji Mas, halaman. 125.

dengan prinsip legisme, (4) prinsip kesamaan keseimbangan (*al manzila byan al minzalatayn*), (5) prinsip menegakkan kebaikan dan mencegah/ menindak hal- hal yang tidak benar (*amar ma 'ruf nahi mungkar*).[65] Di samping teori dan aliran mengenai keadilan tersebut, didalam Islam juga dikenal adanya keadilan legal atau keadilan menurut undang-undang.[66]

Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia. Pandangan keadilan dalam Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", yang menjadi persoalan apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.[67]Nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila, yaitu nilai-nilai ketuhanan (religius), kemanusíaan, persatuan, kerakyatan dan keadílan merupakan nilai- nilai filosofis bangsa dalam membangun hukum Indonesia ke depan.[68]

Aliran utilistis yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini antara Iain dianut Oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham berpendapat, bahwa tujuan hukum

---

[65] Majid Khadduri,1960, *Islamic Jurisprodence*, Baltimoreand London: The Jonns Hopkins University Press, hlm. 49 dalam Ciptono,2018, *Rekontruksi Kebijakan Sanksi Pidana Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan Pancasila*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 31.

[66] Majid Khadduri,1960,*Ibid*.,hlm.135 dalam Ciptono,*Ibid*..

[67] Ciptono,*Ibid*..hlm.35.

[68]Ciptono,*Ibid*.hlm.139..

adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula.[69]

Demikian pula Soebekti menyatakan, bahwa tujuan hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luas dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral idea! atau ajaran moral teoretis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaannya bagi warga masyarakat.[70]

Jeremy Bentham, tokoh utilitarianisme, mendasarkan konsepsi keadilan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kefaedahannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Keadilan mengatur hak-hak atas milik pribadi dan mengandung suatu pengakuan timbal balik akan hak-hak masing-masing orang.[71]

Kemanfaatan dalam Hukum Islam ditemukan padaQ.S. Al-Maidah/5:45,yang artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang

---

[69] Marwan Mas,*Op.Cit.*,hlm.73-74.
[70] *Ibid.*
[71] The Lieang Gie, 1982, *Teori-Teori Keadilan* (Sumbangan Bahan Untuk Peahaman Pancasila), Supersukses, Yogyakarta, hlm. 33, dalam Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm.133.

mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih".

Pada Q.S. Al-Baqarah/2:219, Allah berfirman:"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.

Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada asasnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivistis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.[72]Kepastian hukum mempunyai arti bahwa hukum itu harus pasti. Hukum itu tidak mudah berubah-ubah karena desakan perubahan dalam

[72] Teguh Prasetyo,2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*,Bandung: Nusa Media,hlm. 110.

masyarakat. Ibarat tulisan, maka tulisan itu harus ditulis di atas batu karang, dan tidak ditulis di atas pasir di tepi pantai.[73] Kepastian itu dibutuhkan sebab dengan demikian hukum menunjukkkan kewibawaannya dan menerima pengakuan atau legitimasi dari masyarakat dan individu.[74]

Tiga nilai dasar tujuan hukum sebagai inti ajaran Radbruch seharusnya menjadi dasar di dalam mengoperasikan hukum. Ketiga nilai dasar tujuan hukum dalam konsep *the rule of law* pada negara hukum seperti Indonesia, memang dapat menimbulkan pertentangandalam perwujudannya. Sebab dalam kenyataan, seringkali kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan atau antara keadilan berbenturan dengan kemanfaatan. Bahkan seringkali berbenturan datam mewujudkan antara keadilan dengan kepastian hukum.[75]

Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip M. Muslih mengemukakan:

> ”Gustav Radbruch berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (filsufis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum “ala” Radbruch yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi; keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Gustav Radbruch memulai dengan pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan sebagai dua sisi mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap komunitas (masyarakat) di dalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Untuk mewujudkan ketertiban ini maka dalam masyarakat selalu terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum.”[76]

Fance M. Wantu sebagaimana dikutip Abdul Hakim mengemukakan:

---

[73] *Ibid.*
[74] *Ibid.*

[75] Marwan Mas,*Op.Cit*.,hlm.75
[76] Satjipto Rahardjo,1996, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hlm 13 – 17.

> "Cita hukum (*idee des recht*) yang diajarkan oleh Gustav Radbruch merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Ketiga unsur cita hukum tersebut diwujudkan dalam masyarakat. Kendatipun ketiganya selalu ada dan mendasari dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak berarti bahwa ketiganya selalu dalam keadaan dan hubungan yang harmonis. Dalam menegakan hukum harus diusahakan ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, tetapi dalam praktek tidak selalu mudah dalam mengusahakan kompromi secara proposional seimbang antara ketiga unsur tersebut.[77]

F. Saliger menerangkan bahwa dalam kaitannya dengan konflik kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*), Gustav Radbruch menjelaskan bahwa pilihan dalam menyelesaikan konflik kepastian hukum dan keadilan diberikan kepada hukum sepatutnya diundangkan dan dijamin oleh kekuasaan negara seperti itu, bahkan ketika itu tidak adil dan gagal untuk kepentingan rakyat, kecuali konflik dengan mencapai keadilan jadi tertahankan tingkat undang-undang yang menjadi, dalam efek 'hukum palsu' dan karena itu harus menghasilkan keadilan.[78]

Frank Haldeman mengemukakan bahwa ketika aturan hukum mencapai tingkat ketidakadilan *ekstrim*, sehingga kontradiksi antara hukum positif dan keadilan menjadi tak tertahankan, mereka berhenti menjadi hukum.[79] Ketika terus

---

[77] Fence M. Wantu, 2011, *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Peradilan Perdata*, (Unversitas Gadjah Mada), hlm. 13 dalam Abdul Hakim, *Menakar Rasa Keadilan pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila, Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3, November 2017 : 361 – 378, hlm. 367.

[78] F.Saliger,2004 "*Content and Practical Significance of Radbruch's Formula*," Jurnal Filsafat Hukum Vol. II, hlm. 68 dalam Abdul Hakim. *Ibid*.

[79]Frank Haldemann,2005, "*Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law*," Journal Ratio Juris Vol. 18, no. No. 2, hlm 162. Teks Asli: "*First of all that the conflict of justice andlegal certainty (Rechtssicherheit) could not be solved absolutely, thus allowing only a conditional priority. Secondly, that this conditional priority operates in favor of legal certainty; thirdly, that the primacy of legal certainty is revoked, when injustice becomes intolerable*. " dalam Abdul Hakim,*Ibid*.

terjadi benturan, maka Gustav Radbruch mengungkapkan formula terakhirnya, sebagai berikut: Pertama-tama bahwa konflik keadilan dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) benar-benar tidak dapat diselesaikan, sehingga memungkinkan hanya prioritas bersyarat. Kedua, bahwa prioritas bersyarat ini beroperasi dalam mendukung kepastian hukum; ketiga, bahwa keutamaan kepastian hukum dicabut, ketika ketidakadilan menjadi tak tertahankan.[80]

Gustav Radbruch berpandangan bahwa hukum merupakan suatu unsur kebudayaan, maka seperti unsur-unsur kebudayaan lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia. Nilai tersebut adalah nilai keadilan. Hukum hanya berarti sebagai hukum jika hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan usaha ke arah itu. Pengertian hukum ini menjadi tolak ukur bagi adilnya atau tidak adilnya tata hukum yang dibentuk oleh masyarakat. Akan tetapi bukan hanya itu, bahwa pengertian yang sama menjadi juga dasar hukum sebagai hukum, dalam arti yang sama seperti dalam sistem-sistem *neokantianisme* lain, yakni sebagai pengertian *transendental*-logis, yang mendasari semua pengertian hukum.[81] Demikian pula Brian H. Brix berpendapat dalam menjelaskan teori dari Gustav Radbruch, bahwa hukum positif, dijamin dengan undang-undang dan kekuasaan, diutamakan bahkan ketika isinya tidak adil dan gagal untuk kepentingan rakyat, kecuali

[80]Frank Haldemann, "Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law," Journal Ratio Juris Vol. 18, no. No. 2 (2005): 162. Teks Asli: "First of all that the conflict of justice and legal certainty (Rechtssicherheit) could not be solved absolutely, thus allowing only a conditional priority. Secondly, that this conditional priority operates in favor of legal certainty; thirdly, that the primacy of legal certainty is revoked, when injustice becomes intolerable. " dalam Abdul Hakim,*Ibid*.,hlm.368-369.

[81]Theo Huijbers,2014, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*,Yogyakarta: Kanisius, hlm 162 dalam Abdul Hakim, *Ibid*.,hlm.369

konflik antara undang-undang dan keadilan mencapai seperti tingkat yang ditolerir maka undang-undang adalah sebagai 'hukum yang cacat', harus tunduk pada keadilan.[82]

Untuk menghindari benturan antara ketiga tujuan di atas, maka menjelang akhir abad ke-20 berkembang teori asas prioritas yang kasuistis yaitu asas yang menyatakan bahwa ketiga tujuan hukum harus diprioritaskan sesuai dengan kasus yang dihadapi.[83]

Tujuan pidana yang berkembang dahulu sampai kini telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Tujuan yang juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) atau tetribusi (*retribution*), yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan kesimbangan antara yang hak dan batil. [84]Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa

---

[82]Brian H. Brix, "*Radbruch's Formula and Conceptual Analysis," accessed*, September 30, 2016, http: //tnl. mcmaster. ca/ conference/ papers/ Bix Radbruch's Formula and Conceptual Analysis. pdf . hlm 2 dalam Abdul Hakim,*Ibid*.

[83]Rena Yulia, *Op.Cit.*,hlm. 130.

[84]Andi Hamzah,1993, *Sitem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta:Pradnya Paramita,hlm.24-25.

ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.[85]

4. *Middle* Theory (Teori Sistem Hukum)

Menurut L. M. Friedman ada tiga elemen dari sistem hukum, yaitu:

d. Structure;

e. Substance;

f. *Legal culture*.[86]

Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Aspek kedua, adalah substansi, yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan, dan aspek ketiga dari sistem hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka. Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur yang baik. Selanjutnya struktur dan substansi kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat dengan baik pula.[87]Dengan kata lain, hukum akan berperan dengan baik manakalah ketiga aspek subsistem yang struktur, substansi

---

[85]*Ibid.*

[86] Lawrence M. Friedman,1984, *American Law,*W,W. Norton & Company, New York, hlm 5-6 dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah,2012, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Maju Menuju Masayarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat,* Rajawali Pers, Depok, hlm. 312.

[87]Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah,,*Ibid*.

dan budaya hukum itu saling berinteraksi dan memainkan peran sesuai fungsinya, sehingga hukum akan berjalan secara serasi dan seimbang, sesuai dengan fungsinya. Ibarat seekor ikan, ia akan hidup dengan baik manakala ditunjang oleh kualitas air kolam yang baik dan makanan yang baik pula. Apabila ketiga subsistem hukum tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul problem dalam upaya memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.[88]

L. M. Friedman mengemukakan bahwa struktur adalah salah satu dasar dan elemem nyata dari sistem hukum, substansi adalah elemen lainnya. L. M. Friedman menerangkan bahwa ketika seorang pengamat mencoba untuk menjelaskan sebuah sistem hukum secara menyilang kemungkinan ia akan berbicara tentang dua elemen ini. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh insttusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yuridiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tingi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.[89]

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwaperbincangan mengenai struktur dari suatu sistem yang dikaitkan dengan hukum, kita harus membedakan antara

---

[88] *Ibid*.,hlm.312-313.

[89] Lawrence M. Friedman, 2017, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu* Sosial, Nusa Media, Bandung, hlm. 15-16, terjemahan M. Khozim dari buku Lawrence M. Friedman,1975, *The Legal Systeme A Social Science* Perspective, New York; Russel Sage Foundation.

struktur hukum dan hukum struktural dalam suatu sistem hukum. Pengertian pertama dapat kita sebut sebagai struktur internal sistem hukum, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai dtruktur ekternal sistem hukum.[90]

Sistem dapat dipandang sebagai suatu konsepsi tentang keseluruhanaspekdanelemenyangtersusunsebagaisatukesatuan terpadu baik dalam garis *vertikal*, *horizontal* ataupun *diagonal*. Oleh karena itu, yang kita pahami sebagai sistem hukum tentulah merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Dalam studi ilmu hukum, kebanyakanorangterutamaparasarjanahukumdiIndonesiasangat dipengaruhi oleh pandangan Lawrence Friedmann tentang sistem hukum (*legal system*) yang menurutnya mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu (i) komponen struktur hukum, (ii) substansi hukum, dan (iii) budaya hukum. Pandangan Lawrence Friedmann ini sangat populer di kalangan sarjana hukum Indonesia, sehingga hampir tidak ada sarjana hukum yang tidak pernah mengutip dan menjadikannyarujukanutamadalamsetiaptulisanyangmembahas mengenai sistem hukum.[91]

Secarasederhana,teoriFriedmannitumemangsulitdibantah kebenarannya. Namun, kurang disadari bahwa teori Friedman tersebut sebenarnya didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*). Yang hendak diuraikannya dengan teori tiga subsistem struktur, substansi, dan kultur hukum itu tidak lain adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum. Substansi yangtercermin dalam peraturan perundang-

[90] Jimly Asshiddiqie, ”*Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia*” dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia,2010, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, hlm. 19.
[91] *Ibid.*,hlm.22

undangan atau pun dalam putusan- putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann, budayahukumitulahyangmenjadikomponenutamadalamsetiap sistemhukum.[92]

Teori Wolfgang Friedmann ini cocok untuk dipakai guna menjelaskankeberadaansistemhukumdalamkontekskebudayaan, dalam konteks struktur kehidupan masyarakat. Inilah yang saya namakan sebagai struktur eksternal dari sistem hukum yang bertumpu kepada perspektif sosio-kultural dimana hukum itu hidup,bekerja,danberkembangdalamkenyataanpraktik. Namun, untuk memahami secara mendalam apa saja yang tercakup dalam pengertian kita tentang struktur internal sistem hukum, kita tidak dapat hanya bersandar kepada teori Friedmann. Apa yang kita pahami sebagai substansi hukum di Indonesia dengan tradisi '*civil law*',tentusangatberbedadariapayangdimaksudolehFriedmann yang hidup dan menulis dalam konteks sistem hukum dengan tradisi '*common law*' di AmerikaSerikat.[93]

Sistem hukumIndonesiayangsebaiknyadibangunkedepanmencakuplima aspek atau komponen sekaligus, yaitu (i) komponen instrumental yang mencakup semua jenis dokumen hukum dan hukum tidak tertulis, (ii) komponen kelembagaan yang mencakup juga pengertian sarana dan prasarana dan semua aspekkeorganisasian, (iii) komponen sumber daya manusia dan kepemimpinan,

---

[92]. *Ibid*.,hlm.22-23
[93]*Ibid*.,hlm.23

(iv) komponen sistem informasi dan komunikasi, dan (v) komponen budaya hukum, pendidikan hukumdan sosialisasi hukum.[94]

Nyawa dan realitas pada sistem hukum menurut L. M. Friedman bersumber dari sosial eksternal. Sistem hukum tidak terisolasi atau terasing. Iabergantung secara mutlak pada input-input dari luar. Tanpa ada pihak-pihak yang berperkara, tidak akanada pengadilan. Tanpa masalah dan kehendak untuk menyelesaikannya, tidak akan ada orang yang berperkara. Semua elemen sosial ini mencairkan kebekuan dan menggerakkan sistem.[95]L. M. Friedman selanjutnya menerangkan:

> ”Kekuatan-kekuatan sosial terus-menerus menggerakkan hukum merusak di sini, memperbaharui di sana; menghidupkan di sini, mematikan di sana; memilih bagian mana dari hukum yang akan beroperasi, bagian mana yang tidak; mengganti,memintas, dan melewati apa yang muncul; perubahan-perubahan apa yang akan terjadi secara terbuka atau diam-diam. Karena tidak ada istilah lain yang lebih tepat lagi, kita bias namakan sebagian dari kekuatan-kekauatan itu sebagai kultur hukum. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial.”[96]

Friedman mengemukakan empat fungsi sistem hukum, yaitu:

1. Sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*), yang mengatur perilaku manusia;
2. Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*);
3. Sebagai sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*;
4. Sebagai *social maintenance,* yaitu fungsi yang menekankan penerapan hukum sebagai pemeliharaan ”*status quo”* yang tidak menginginkan perubahan.[97]

---

[94]*Ibid.*,hlm.26
[95]Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, terjemahan M. Khozim hlm.16-17
[96]*Ibid.*,hlm.17.
[97]Lawrence M. Friedman,1984,*Op.Cit.*, dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah,*Op.Cit.*,hlm. 311-312.

5. *Applied Theory*(Teori Hukum Progresif dan Teori *Restorative Justice*)

1.6.5.1.Teori Hukum Progresif

Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukum sendiri.[98]

Teori hukum progresif pertama kali dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo sejalan dengan teori hukum pembangunan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat, tetapi perbedaan yang signifikan adalah teori hukum pembangunan memandang hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat, sedangkan teori hukum progresif berpandangan bahwa hukum bukan sekedar sarana, bahkan tumbuh berkembang bersama perkembangan masyarakat.

Teori hukum progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.[99]

---

[98]Satjipto Rahardjo,2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas,hlm. ix

.

[99]Sabian Usman,2009,*Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar,hlm. 1

Satjipto Rahardjo mengatakan: ”. . . baik faktorperanan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia". Hukum dan bekerjanya hukum seyogyanya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.[100]

Menurutteori hukum progresif, hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Terlihat jelas bahwa teori hukum progresif dan teori hukum pembangunan sama-sama bertolak ukur pada teori *sociological jurisprudence,* tetapi teori hukum pembangunan dicampuri juga oleh pemikiran *analytical jurisprudence* sedangkan teori progresif dicampuri oleh aliran *critical legal studies* yang cenderung apriori terhadap segala keadaan dan bersikap anti-*foundationalism*. Penegakan hukum melalui perspektif teori hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar menurut peraturan tertulis (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (*to the very meaning*) dari suatu undang-undang atau hukum. Ide penegakan hukum dalam teori hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum hukum karena pada hakekatnya hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu serta manusialah yang memiliki peran

[100]Satjipto Rahardjo,2007,*Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas,hlm. ix

lebih penting.[101] Esensi yang tidak kalah signifikan dari hukum progresif adalah membiarkan entitas empirik yang bernama hukum itu seperti apa adanya.[102]

Dasar filosofi dari hukum progresif ialah bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.[103]

Adapun karakteristik dari hukum progresif dapat ditandai dengan pernyataan sebagai berikut:[104]

d. Hukum ada untuk mengabdi pada manusia
e. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final, sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
f. Dalam hubungan progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan

[101]Satjipto Rahardjo,2008,*Loc.Cit.*,
[102] Marwan Effendy. *Op.Cit.*,hlm. 31.

[103]Faisal,*Menggagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis*, Jurnal Ultimatum,Edisi II,September 2008,STIH IBLAM,Jakarta,halaman 17

[104]Satjipto Rahardjo,2008,*Loc.Cit.*

kebutuhan manusia serta mengabdi pada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya.

Penafsiran hukum yang progresif dapat diutarakan dalam dua hal mendasar, yaitu: filsafat subjek progresif (sang penafsir), dan metode penafsiran hukum progresif.[105]Penafsiran hokumprogresif berpegang pada pradigma hukum untuk manusia bukam sebaliknya. Manusia di sini merupakan simbol bagi kenyatan dan dinamika kehidupan hukum itu memandu dan melayani masyarakat.[106]

Hukum progresif berpegang pada komitmen filosofis, hukum untuk manusia bukan sebaliknya. Manusia yang dimaksud tidak difahami dalam arti wujud, tapi esensi dan dimensi manusia dalam arti luas. Hukum progresif menunjukkan cara berhukum yang tidak bisa begitu saja meninggalkan hubungan manusia dengan Tuhan.[107]

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai ”alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampillkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.[108]

---

[105] Faisal,2015, *Pemaknaan Hukum Progresif Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Thafa Media), Yogyakarta, hlm 38.
[106]*Ibid.*,hlm.38-39.
[107]*Ibid.*,hlm.22.
[108]Faisal, 2014, *Memahami Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm 89.

Sisi terpenting hukum progresif memposisikan gerakan pemikirannya pada medan pencarian, pembebasan, dan pencerahan. Mengapa disebut gerakan pemikiran, sebab pencarian itu (perenungan), pembebasan ialah (perlawanan), pencerahan merupakan (pergerakan pemikiran). Berarti tidak statis, bergerak dan dinamis.[109]

Konsep hukum progresif lahir dan berkembang, tidak terlepas dari adanya rasa ketidakpuasan dari kalangan hukum terhadap teori dan praktik hukum tradisional yang berkembang dan mengkritisi akan adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori (*law in books*) dengan hukum dalam kenyataan (*law in action*), serta adanya kegagalan dari hukum dalam memberikan respon terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.[110]

Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya unutk mengabdi kepada manusia. Dalam konteks pemikiran ini, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi dan berkembang. Hukum merupakan institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasikan ke dalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya. Inilah hakekat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as process, law in the*

[109] Faisal,2015,*Op.Cit*.,hlm.25.
[110] Marwan Effendy,*Op.Cit*.,hlm.29.

making). Hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, tetapi hukum itu untuk mengabdi manusia.[111]

Konsep hukum progresif tidak terlepas dari konsep *progresivisme* yang bertitik tolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan berhukum dalam masyarakat.[112]

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi,empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan Iain daripada yang biasa dilakukan.[113]

Penegakan hukum sangatlah erat dengan masyarakat, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, asas tiada pidana tanpa kesalahan, dan tiada kesalahan tanpa ada kemanfaatan.[114] Namun dibalik itu semua, asas kesalahan sesungguhnya sarat kerumitan dan kerentaan. Asas kesalahan dalam praktek sering berujung ketiadaan kesalahan tetapi tetap dipidana, yang disebabkan bukan hanya karena kelalaian aparatur hukum, akan tetapi sering

---

[111] Satjipto Rahardjo,2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1

[112] *Ibid*.,hlm.228

[113] Satjipto Rahardjo,2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing,hlm. xiii

[114] Romli Atmasasmita,2017,*Rekontruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: PT. Gramedia,,hlm. 141

karena kesengajaan aparat hukum, baik karena kepentingannya maupun karena "diperalat" kekuasaan.[115]

Hukum pidana adalah *ultimum remidium* yang berarti suatu upaya terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara, namun pada perkembangannya hukum pidana justru digunakan sebagai upaya pertama dalam menyelesaikan suatu masalah antara orang yang satu dengan yang lain, bahkan ada suatu perkara yang sebenarnya termasuk dalam ranah perdata dipaksanakan menjadi perkara pidana.[116]

Pergeseran fungsi hukum pidana ini menunjukkan bahwa masyarakat telah meninggalkan sedikit demi sedikit budaya berhukum, padahal dalam suatu masyarakat masih mempunyai hukum adat yang berfungsi lebih efektif dalam menyelesaikan suatu masalah. Sejauh mana hükum pidana adat tercakup atau berperan mempengaruhi hükum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hükum masyarakat setempat, masih tidaknya hükum adat diakui oleh undang-undang negara, maupun kepada sejauh mana hükum pidana adat masih dianggap sejalan atau ditolerir oleh falsafah Pancasila dan undang-undang yang berlaku.[117]

Ketergantungan yang disebut terakhir adalah merupakan pembatasan mutlak terhadap penerapan hükum pidana adat. Dengan demikian, sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal

---

[115] *Ibid.*,hlm.188.
[116] Ciptono,*Op.Cit.*,hlm.51.
[117] *Ibid.*,hlm.51-52.

ada pengecualian. Dalam hal terdapat pertentangan antara hükum pidana adat dengan undang-undang yarıg berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu perkara banyak memegang peranan.[118]

Hakim wajib mencari dan menemukan hukum. Hakim memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, karena itü hakim sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang bertanggungjawab kepada Tuhan, negara dan pribadi, tidak boleh menolak memberi keadilan. Sebagaimana yang disampaikan oleh van Apeldoorn, maka hakim harus menyesuaikan (*waarderen*) undang-undang dengan hal-hal yang konkrit yang terjadi di masyarakat dan hakim dapat menambah (*aanvullen*) undang-undang apabila perlu.[119]

Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkrit, karena undang-undang tidak meliputi segala kejadian yang timbul dalam masyarakat.[120] Bagi hükum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hükum mengaktualisasikan hükum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hükum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*).[121]

Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hükum progresif unluk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interprestasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hükum harus dibiarkan

[118] *Ibid.*,hlm.52.
[119] *Ibid.*
[120] E. Utrecht,1962, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, hlm. 230
[121] Ciptono,*Op.Cit.*,hlm.53.

mengalir begitu saja menggeser paradigma hükum positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hükum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hükum yang kreatif menterjemahkan hükum itü dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.[122]

1.6.3.2 Teori *Restorative Justice*

Menurut Agustinus Pohan, apa yang dimaksud dengan *restorative justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam Sistern Hukum Pidana Indonesia yang bersifat *retributive*. *Restorative justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative Justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positifdan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak-asasi manusia. Prinsip-prinsip *resorative justice* adalah membuat pelaku bertanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.[123]

Beberapa ahli memberikan pendapat tentang *restorative justice*, sebagaimana disebut di bawah ini:

---

[122] *Ibid.*

[123]Melani, Oktober 2005, *Membangun Hukum Pidana dari Retributif ke Restroratif,* Litigasi, Volume, 6 Nomor 3, hlm 225

5. Howard Zehr: keadilan *restoratif* adalah proses untuk melibatkan, dengan pihak menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.[124]
6. Tony Marshall : peradilan *restoratif* ialah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan.[125]
7. Douglas,Yrn: keadilan *restoratif* adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Model keadilan *restoratif* memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung, antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban-pelaku.[126]

---

[124] Howard Zehr,2002, *Restorative Justice,* dalam Changing Lenses, hlm. 21, dalam Marwan Effendy,*Op.Cit.*, hlm.131.

[125] John Braithwaite,2002,*Restorative Justice*, Oxford University Press, hlm.11 dalam Marwan Effendy, *Ibid.*, hlm. 131-132.

[126]Douglas Yrn,1999, *Dictionary of Conflict Resolution, compliet and edited*, halaman 381, dalam Achmad Ali. Wiwie Heryani, *Empiris Hukum/ Perspektif Ilmu-ilmu Perilaku Filsafat dan Praktek Psikologi Hukum dan Hukum Restoratif*, Jilid 1 hlm 77 dalam Marwan Effendy, *Ibid.*,hlm.132-133.

8. Dignan: keadilan *restoratif* adalah kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang saat secara cepat dapat diterima dan didukung oleh pendidik, juris, pekerja sosial dan konseling sosial serta kelompok masyarakat.[127]

Martin Wright mendeskripsikannya perspektif keadilan *restoratif* dalam beberapa hal:[128]

8. Respon terhadap kejahatan hendak dibangun atas dasar pertanggungjawaban pelanggar dalam kualitas yang lebih baik yaitu menumbuhkan tanggung jawab dan penerimaan kembali dalam masyarakat.
9. Kebijakan pencegahan kejahatan akan diintegrasikan dalam kebijakan sosial.
10. Adanya pengakuan bahwa peri!aku orang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, tetapi bukan ketakutan, misalnya pemberian insentif insentif, membangun estimasi diri. Sejauh orang dipengaruhi oleh sistem, mereka akan memiliki kesempatan untuk merespon pada keadilannya dari pada mereaksi terhadap kekerasannya.
11. Respon negara secara etik akan diterima, yaitu dalam batas-batas apa yang disyaratkan oleh masyarakat.
12. Korban akan diberi kesernpatan langsung terlibat dalam prosest tetapi tidak dibebani tanggung jawab untuk suatu keputusan dalam pemidanaan.
13. Pelanggar akan terlibat secara aktif, daripada menjadi objek pemidanaan yang pasif.

---

[127]Howard Zehr,*Op.Cit.*,2002, dalam Changing Lenses,*Op.Cit*., hlm. 21, dalam Marwan Effendy, *Ibid*.,hlm.134.

[128] Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan…,Op.Cit.,*hlm.203-204.

14. Keterlibatan masyarakat diperlukan dan diberdayakan, misalnya dengan membawa bersama kelompok mediator-mediator sukarela ang terlatih.

Keadilan *restorative* itu adalah konsep pemikiran yang tidak hanya merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan si pelaku, tetapi juga pelibatan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.[129]

Di bawah filsafat keadilan *restoratif*, kejahatan tidak selalu dibatasi sebagai serangan pada negara, tetapi suatu pelanggaran oleh seseorang terhadap yang lain, akan tetapi ini bukan berarti mengambil kembali wewenang balas dendam dari negara kepada korban kejahatan. Keadilan *restoratif* berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri. Oleh sebab itu, dalam pemidanaan yang bersendikan pada perspektif keadilan *restoratif*, empat unsur yang memainkan peranan, yaitu: korban kejahatan, masyarakat, negara, dan pelanggar.[130]

Menurut konsep keadilan *restoratif*, sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil. Sistem peradilan seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum. Para pendukung keadilan *restoratif* memandang upaya negara untuk menghukum dan mengawasi (sebagaimana pendekatan *retributif*) justru telah memicu orang

[129] Marwan Effendy,*Op.Cit.*,hlm.131.
[130] Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 189.

melakukan kejahatan-kejahatan berikutnya, bukan membuat orang takut melakukan kejahatan. Permasalahan yang mendasar ialah sulitnya konsep keadilan *restoratif* ini diterima karena pandangan terhadap pelaku kejahatan tersebut digenarilisir dan dilandaskan oleh suatu kebencian, dendam atau ketidaksukaan bukan kepada kepentingan yang lebih luas di dalam pemberlakuan hukum pidana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban.[131]

Di bawah ini disajikan dengan tabel mengenai pokok-pokok pikiran dari *restorative justice*.[132]

Tabel 1. Pokok-pokok Gagasan Desain Pemidanaan Perspektif *Restoratif Justice*

NO.	TEMA POKOK	KONSEP DASAR
1	Adanya Pidana(penjara)	Pidana (penjara) tidak penting / tidak perlu
2	Tujuan pidana	4. Pertanggung jawaban perbuatan 5. Menyelesaikan konflik 6. Mendamaikan
3	Pertanggungjawaban	4. Pertanggung jawaban terhadap dampak/ akibat kejahatan 5. Dasarnya kerugian, membahayakan dan menderitakan 6. Tidak dibatasi dalam bentuk pidana tetapi di pahami konteksnya secara keseluruhan
4	Bentuk pidana	4. Kewajiban merestorasi akibat kejahatan dalam bentuk restitusi atau kompensasi

[131]Larry J. Siegel,2009. *Essential of Criminal Justice*,Wadsworth Cengage Learning, Belmont, CA,USA,hlm. 23 dalam Marwan Effendy, *Op.Cit.*,hlm.135.

[132] Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan…,Op.Cit.,*hlm.203.

		5. Rekonsiliasi dan penyatuan sosial 6. Lamanya pidana tergantung kepada besarnya kerugian yang terjadi
5	Efek	5. Tanggung jawab social 6. Preventif 7. Menghindari stigmatisasi 8. Kehidupan di masa yang akan datang

Tabel di atas menggambarkan sebuah konsep *restorative justice* yang didasarkan pada tujuan hukum sebagai upaya menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara pelaku dan korban kejahatan. Pidana penjara bukanlah satu-satunya pidana yang dapat diberikan pada pelaku, melainkan pemulihan kerugian, penderitaan yang dialami korban lah yang utama. Kewajiban me*restorasi* kejahatan dalam bentuk restitusi dan kompensasi serta *rekonsiliasi* dan penyatuan sosial merupakan bentuk pidana dalam konsep *restorative justice*.[133]

1.7. Kerangka Pemikiran

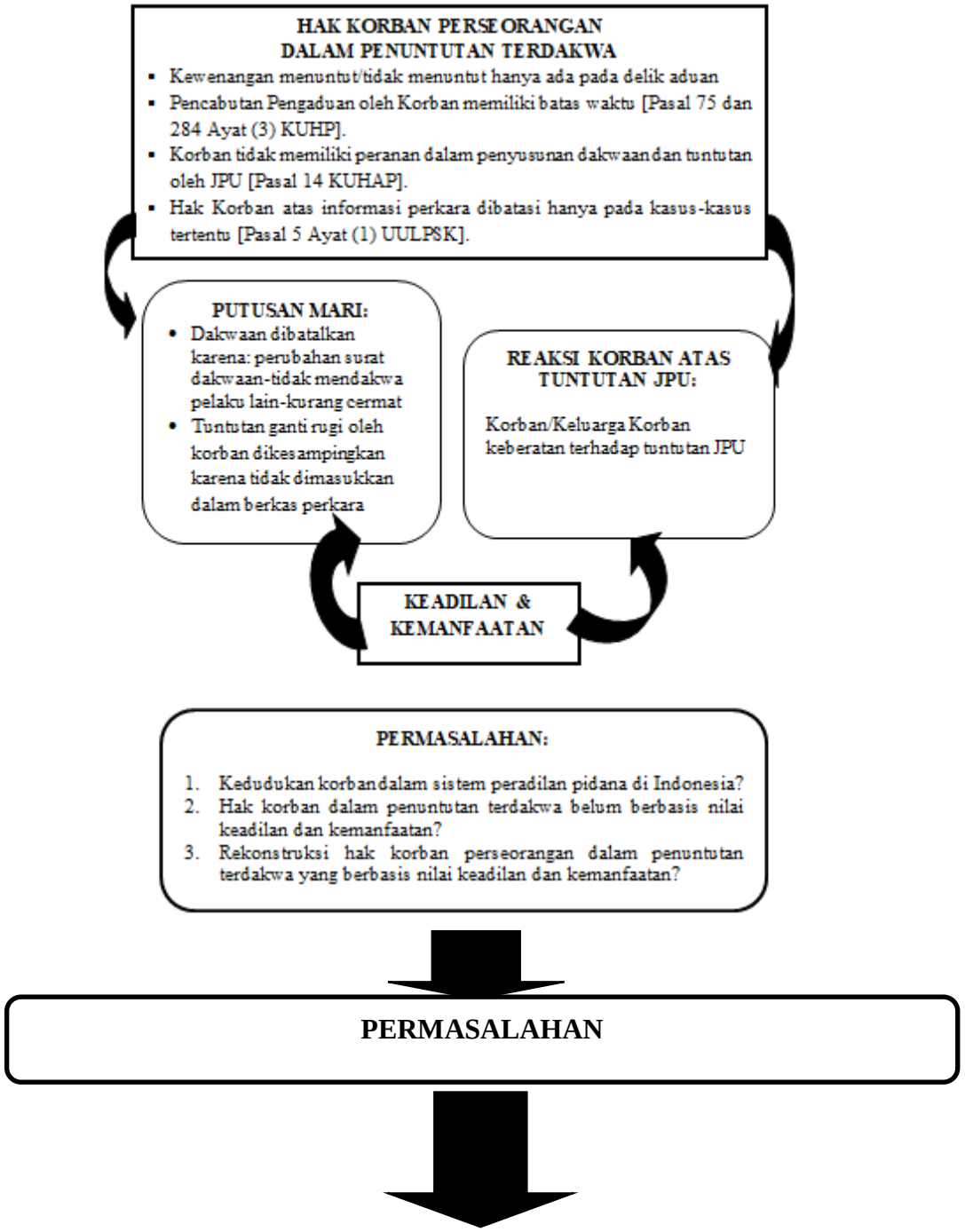
Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari (beberapa) konsep/ teori yang relevan dengan kajian penelitian *promovendus*, sehingga memunculkan asumsi-asumsi atau proposisi atau konsep hukum, yang dapat ditampilkan dalam bentuk bagan/skema alur pemikiran penelitian disertasi *promovendus*.[134]

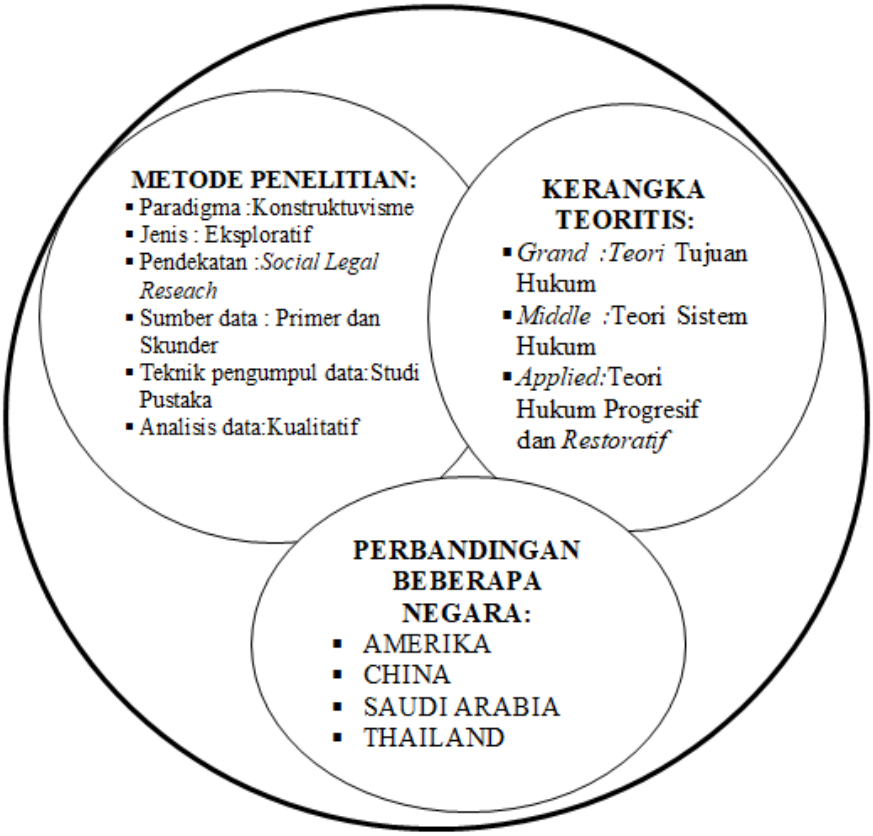
---

[133] Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 167. Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm. 167.

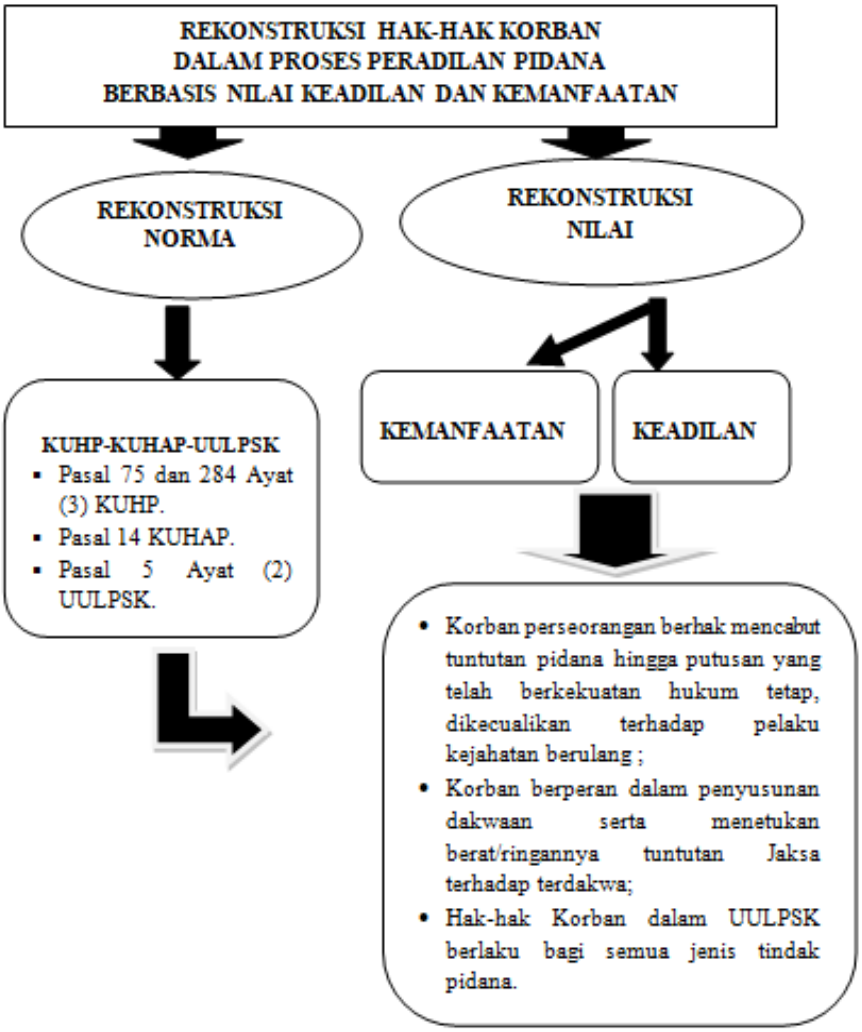
[134] Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Unissula,2017, *Buku Pedoman Penyusunan Disertasi*, Semarang, hlm. 5- 6. Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Unissula,*Op.Cit*., hlm. 5- 6.

Skema alur pemikiran penelitian disertasi Hak Korban Perseorangan Dalam Penuntutan Terdakwa Berbasis Nilai Kedadialan dan Kemanfaatan adalah sebagaimana di bawah ini:





REKONSTRUKSI HAK-HAK KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN DAN KEMANFAATAN


REKONSTRUKSI HAK-HAK KORBAN
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
BERBASIS NILAI KEADILAN DAN KEMANFAATAN
REKONSTRUKSI NORMA
REKONSTRUKSI NILAI
KUHP-KUHAP-UULPSK
Pasal 75 dan 284 Ayat (3) KUHP.
Pasal 14 KUHAP.
Pasal 5 Ayat (2) UULPSK.
KEMANFAATAN
KEADILAN
Korban perseorangan berhak mencabut tuntutan pidana hingga putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikecualikan terhadap pelaku kejahatan berulang ;
Korban berperan dalam penyusunan dakwaan serta menetukan berat/ringannya tuntutan Jaksa terhadap terdakwa;
Hak-hak Korban dalam UULPSK berlaku bagi semua jenis tindak pidana.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Paradigma penelitian

Paradigma Penelitian, berupa penjelasan tentang cara peneliti memandang realitas/ fenomena (aspek *ontologism, metodologis* dan *epistemologis*) meliputi pemilihan paradigma yang akan dipakai apakah paradigma positivisme, post positivisme, paradigma kritisme atau paradigma konstrutukivisme.[135]

Paradigmadalam bahasa Inggris '*paradigm*', dari bahasa Yunani '*paradeigma*', dari '*para*' (di samping, di sebelah) dan '*dekynai*' (memperhatikan; yang berarti; model contoh, arketipe, ideal). Menurut *Oxfor English Dictionary, 'paradigm'* atau paradigma adalah '*contoh atau pola'*. Akan tetapi di dalam komunitas ilmiah paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan, meskipun bukan sesuatu yang tabu untuk diperdebatkan. '*Ordering belief frame work*', begitu dikatakan oleh Like Wilardjo, ketika berbicara tentang paradigma,[136]yaitu sesuatu kerangka keyakinan dan komitmen para intelektual.

Paradigma penelitian ini adalah *konstruktuvisme*. Aspek-aspek dalam paradigma Konstrutukvisme menurut Guba dan Lincoln adalah sebagai berikut:[137]

a. Aspek *Ontologis* (*relativisme* dan *realitas*);

b. Aspek *Epistemologis* (*transaksionalis*/ *subjektivis*);

---

[135] *Ibid*.

[136] Liek Wilardjo,1990, *Realita dan Desiderata*,(Yogyakarta: Duta Wacana University Press), hlm 134

[137] E. G. Guba dan Y. S. Lincoln,1994, *Competing Paradims in Qualitative Reseach* di dalam N. K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Reseach*, London,Sage, dalam Otje Salman S. ,H. R. , Anthon F. Susanto,2013, *Teori Hukum (Mengingat, mengumpulkan dan Membuka Kembali)*,Refika Aditama, Bandung, hlm 77-78.

c. Aspek *Metodologis* (*hermeneutikal/ dialektikal*).

Aspek *ontologis* berupa *relativisme* dan realitas merupakan kontruksi sosial. Kebenaran sosial bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Aspek Epistemologis berupa *transaksionalis*/ *subjektivis* berupa pemahaman suatu tentang realitas atau temuan suatu realitas atau temuan sesuatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. Aspek Metodologi berupa *hermeneutikal/ dialektikal*merupakan penelusuran kontruksi melalui interaksi antar sesama penganut/ pemegang dan objek observasi/ investigasi, dengan tehnik *hermenneutikal* dan pertukaran dialektikal kontruksi tersebut diinterpretasi, dibandingkan; tujuan; distilasi kontruksi *consensus* atau *resultante* kontruksi.

1.8.2. Jenispenelitian

Jenis Penelitian berisi pemilihan promovendus dalam melakukan penelitian apakah memakai jenis penelitian hukum deskriptip analatis atau penelitian eksploratif atau eksplanatoris.[138]Jenis Penelitian disertasi ini adalah eksploratif.

Menurut Kotler penelitian ekploratif adalah penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis.[139]Menurut Kuncoro penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru dan untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya.

[138]Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Unissula,*Op.Cit.*, hlm.6.

[139]https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/. Diakses tanggal 18 Nopember 2020, Pukul 11.13 WIB.

Tujuan utama dari jenis penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi situasi penelitian dan tujuan khusus atau data yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian eksploratif sangat bermanfaat untuk pemahaman situasi yang lebih baik atau mengidentifikasi alternatif keputusan.[140]

1.8.3. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.[141] Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian berkerjaanya sistem hukum (*law in action*) di masyarakat.[142]

Dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas peneiliti adalah mengkaji tentang apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan.[143] Penelitian yuridis sosiologis pada penelitian ini adalah penelitian tehadap efektifitas hukum. Menurut Bambang Waluyo sebagaimana dilutip Ediwarman, penelitan efektifitas hukum,meliputi: [144]

7. Penelitian berlakunya hukum positif;

8. Penelitian berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat;

---

[140]https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/. Diakses tanggal 18 Nopember 2020, Pukul 11.13 WIB.

[141] Dalam Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Unissula, *Loc.Cit.*,bahwa metode pendekatan terdiri dari pendekatan yuridis sosiologi atau *social legal reseach*.

[142] Jonaedy Efendy,Johnny Ibrahim ,2016,*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,Depok:PrenadamedIa Group,hlm. 149-150.

[143]*Ibid*., hlm.150

[144]Ediwarman,2015,*Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Pelulisan Skripsi,Tesis dan Disertasi*,Medan:PT. Sofmedia,hlm. 44).

9. Penelitian terhadap faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan hukum positif; dan

10. Penelitian pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan hukum positif.

1.8.4. Sumber data

Sumber data penelitian berisi data primer (data yang diperoleh dari praktek hukum/ hukum empirik) dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen, guna mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sesuai kajian penelitian disertasi *promovendus*.[145]Dalam kaitan ini Ali Murthadho dan Muataf Kamal Rokan menerangkan:

> ”Pada umumnya untuk menentukan jenis dari suatu penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.”[146]

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.[147] Ketiga sumber bahan hukum tersebut digunakan dalam penelitian ini.

1.8.4.1.Bahan hukum primer

---

[145] Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Unissula, *Op.Cit.*, hlm.7.

[146] Ali Murthado,2008, Mustafa Kamal Rokan, 2008,*Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*,Medan: Wal Ashri Publishing, hlm. 27.

[147]*Ibid*., hlm.27-28.

Data Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang:
    a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
    b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
    c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
    d. Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
    e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang;
    f. Undang-undang Republik Indonesia Nomr 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
    g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentangPerlindungan Saksi dan Korban;
    h. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
    i. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

j. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

k. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentangPerlindungan Saksi dan Korban.

l. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang tanggal 21 Juni 2018. UU Nomor 5 Tahun 2018

3. Peraturan Pemerintah:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang tata Cara perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tatacara Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

1.8.4.2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hasil karya sarjana yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, baik dalam bentuk buku maupun jurnal atau makalah.

1.8.4.3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahwa hukum sekunder, seperti kamus (hukum, Inggris dan Indonesia), ensiklopedia dan lain-lain.

1.8.5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penulisan yang digunakan adalah model studi pustaka (*library research*). Studi kepustakaaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan disertasi ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

1.8.6. Analisis data

Analisis Data berisi dua hal, untuk penelitian hukum doktrinal menggunakan *silogisme* dan *interpretasi*. Untuk penelitian hukum non doktrinal menggunakan analisis data secara deskriptip kualitatif bila diperlukan digunakan analisa kuantitatif. [148]

Analisa data merupakan bagian akhir penelitian dimana data-data yang telah terkumpul telah diolah akan dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif, yang berupa taraf sinkronisasi dan penemuan asas hukum. Selain itu juga akan dilakukan prosedur verifikasi data dan penafsiran data dengan metode *hermeuneutik*.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi/ interpretasi, komparasi dan

[148]Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Unissula, *Op.Cit.*, hlm.8..

sejenis itu. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang) Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

1.9. Sistematika Penulisan

Disertasi ini ditulis dalam 6 (enam) Bab, yaitu:Bab I: Pendahuluan;BabII : Kajian Pustaka; Bab III:Kedudukan Korban Perseorangan dalam Peradilan Pidana di Indonesia; Bab IV: Penyebab Hak Korban dalam Penuntutan Terdakwa Belum Berbasis Nilai Keadilan dan Kemanfaatan; Bab V: Rekonstruksi Hak Korban Perseorangan dalam Penuntutan TerdakwaBerbasis Nilai Keadilan dan Kemanfaatan dan Bab VI: Penutup

Bab I (Pendahuluan)terdiri dari 10 (sepuluh) Sub Bab, yakni: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,Manfaat Penelitian (teoritis dan praktis),Kerangka Koseptual,Kerangka Teoritis,Kerangka Pemikiran,Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Keaslian Penulisan.

Sub Bab Kerangka Teoritis memuat tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni Teori Tujuan Hukum sebagai *Grand Theori*,Teori Ssitem Hukum sebagai *Middle* Theory dan Teori Hukum Progresif dan Teori *Restorative Justice* sebagai *Applied Theory*.

Sub Bab Metode Penelitian memiliki Anak Sub Bab: Paradigma penelitian,Jenis penelitian,Metode pendekatan,Sumber data (bahan hukum primer,sekunder dantersier),Teknik pengumpulan data dan Analisis data .

Bab II (Kajian Pustaka), terdiri dari 7 (tujuh) Sub Bab, yakni: Pengelompokan Korban, Hak-Hak Korban dalam Hukum Positif Indonesia,Hak-Hak Korban dalam Hukum Islam,Hak-Hak Korban dalam Instrumen Hukum Internasional,Model Pemberdayaan Korban Kejahatan,Pemeriksaan Perkara Pidana pada Persidangan Pengadilan Negeri,Paraturan/Keputusan POLRI,Kejagung dan MARI tentang Keadilan *Restorative* dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Sub BabHak-Hak Korban dalam Hukum Positif Indonesia memilki 3 (tiga) anak sub bab, yakni: Hak-hak Korban di dalam KUHP, Hak-hak Korban di dalam KUHAP dan Hak-hak Korban di dalam UULPSK.

Sub Paraturan/Keputusan POLRI,Kejagung dan MARI tentang Keadilan *Restorative* dalam Penyelesaian Perkara Pidanamemilki 4 (empat) anak sub bab, yakni: Keadilan Retributif dan Restoratif,Surat Edaran Kepolisian Republik Indoesia Nomor SE/8VII/2018,Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Putusan MARI Nomor 1600 K/Pid/2009.

Bab III (Kedudukan Korban Perseorangan dalam Peradilan Pidana di Indonesia),terdiri dari 4 (empat) Sub Bab,yakni: Sistem Peradilan Pidana,Pihak-pihak dalam Proses Peradilan Pidana,Kedudukan Korban Perseorangan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Sub Bab Sistem Peradilan Pidana memilki 2 (dua) Anak Sub Bab, yakni:Peradilan Pidana Sebagai SistemsertaSistem Peradilan Pidana dan Sistem Hukum. Sub Bab Pihak-pihak dalam Proses Peradilan Pidana memilki 5 (lima) Anak Sub Bak, yakni:POLRI sebagai Penyelidik/Penyidik,Kejaksaan sebagai Penuntut,Hakim Sebagai Pemeriksa Yang Mengadili dan Pemutus Perkara,Advokat sebagai Penasehat Hukum/PembelasertaTerdakwa,Saksi/Korban dan Ahli.

Sub BabPemenuhan Hak Korban dalam Putusan MARI Nomor 1600 K/Pid/2009 memiliki 3 (tiga) Anak Sub Bab, yakni:Deskripsi Singkat Perkara,Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung serta Tujuan Hukum dan Keadilan Restoratif dalam Putusan.

Bab IV (Penyebab Hak Korban dalam Penuntutan Terdakwa Belum Berbasis Nilai Keadilan dan Kemanfaatan), memilki 2 (dua) Sub Bab, yakni: Tata Cara Penuntutan Terdakwa dan Pemenuhan Hak Korban dan Penyebab Hak Korban dalam Penuntutan Terdakwa Belum Berbasis Nilai Keadilan dan Kemanfaatan.

Tata Cara Penuntutan Terdakwa dan Pemenuhan Hak Korban memiliki 2 (dua) Anak Sub Bab,yakni: Tatacara Penuntutan Terdakwa dan Pemenuhan Hak Ganti Rugi dalam KUHAP serta Tata Cara Pemenuhan Hak Korban dalam Peraturan Pemerintah.

Sub Bab Penyebab Hak Korban dalam Penuntutan Terdakwa Belum Berbasis Nilai Keadilan dan Kemanfaatan memiliki 3 (tiga) Anak Sub Bab,yakniSubstansi Hukum, Kultur Hukum dan Struktur Hukum.

Bab V (Rekonstruksi Hak Korban Perseorangan dalam Penuntutan Terdakwa Berbasis Nilai Keadilan dan Kemanfaatan), memiliki 2 (dua) Sub Bab, yakni: Hak Korban dan Tata Cara Pemenuhannya di BeberapaNegaradan Rekonstruksi Hak Korban Perseorangan dalam Penuntutan Terdakwa Berbasis Nilai Keadilan dan Kemanfaatan.

Sub Bab Hak Korban dan Tata Cara Pemenuhannya di BeberapaNegara,memiliki 4 (empat) Anak Sub Bab,yakni: Hak Korban dan Tata Cara Pemenuhannya di Amerika, Hak Korban dan Tata Cara Pemenuhannya di China, Hak Korban dan Tatacara Pemenuhannya di Saudi Arabia sertaHak Korban dan Tata Cara Pemenuhannya di Thailand.

Sub Bab Rekonstruksi Hak Korban Perseorangan dalam Penuntutan Terdakwa Berbasis Nilai Keadilan dan Kemanfaatan memilik 2 (dua) Anak Sub Bab,yakni:Rekonstruksi Nilai dan Rekonstruksi Norma.

Rekonstruksi Norma memiliki 3 (tiga) Anak Sub Bab, yakni:Rekonstruksi Hak Korban Perseorangan Mencabut Pengaduan,Rekonstruksi Hak Korban dalam Pembuatan Surat Dakwaan dan Tuntutan danRekonstruksi Hak Korban dalam Atas Informasi Pemeriksaan Perkara.

Bab VI (Penutup) yang berisikan Simpulan, Implikasi Teoritis dan Praktis serta Saran.

1.10. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Rekonstrusi Hak Korban Perseorangan dalam Penuntutan TerdakwaBerbasis Nilai Keadilan dan Kemanfaatan belum pernah

dilakukan sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian pertama dari penerapan suatu konsep yaitu nilai keadilan terhadap salah suatu praktek penyelenggaraan negara yaitu proses peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian-penelitian terdahulu dapat menjadi refensi atau pembanding untuk penelitian yang dilakukan sekarang ini, khususnya penelitian tentang hak-hak korban dalam pengajuan tuntutan. Penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, dijabarkan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 2. Penelitian-penelitian Terdahulu Terkait tentang Hak-hak Korban

NO.	PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN	KEBARUAN PENELITIAN
1.	Adil Lugianto Semarang/ Oktober/ 2014/ MMH,Jilid 43 No. 4.	Rekonstruksi Perlindungan Hak-hak Korban Tindak Pidana	Rekonstruksi perlindungan hak-hak korban dapat dilakukan dengan mengatur hal-hal sebagai berikut: a. Unifikasi atau harmonisasi undang-undang yang mengatur hak-hak korban meliputi pengaturan hak-hak korban secara komperhensif, posisi/ kedudukan korban dalam memperjuangkan haknya, lembaga/ pejabat perlindungan hak korban, tata cara perlindungan korban dan pelaksanaan perlindungan korban. b. Pembentukan mekanisme perlindungan korban yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana, dimana semua badan penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) dapat	1. Rekonstruksi Hak Korban Perseorangan Mencabut Pengaduan; 2. Rekonstruksi Hak Korban dalam Pembuatan Surat Dakwaan dan Tuntutan; 3. Rekonstruksi Hak Korban Atas Informasi Pemeriksaan Perkara

			berperan aktif dan bekerja sama dalam memberikan perlindungan hak korban.	
2.	Hermawaty Yogyakarta/ Fakultas Hukum Universitas Janabadra/ Mei 2018/ Jurnal Kajian Hukum Vol. 3 No. 1	Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran Lingkungan Akibat Pembakaran Lahan Pada Saat Panen di Lampung Tengah	Perlindungan hukum pada korban Korban Pencemaran Lingkungan Akibat Pembakaran Lahan Pada Saat Panen di Lampung Tengah masyarakatnya masih belum terlindungi oleh hukum	
3.	Latifah Hanim Semarang/2015/ Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 2 No. 2	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang	Faktor non yuridis dan faktor yuridis yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum korban *human trafficking*. 1. faktor non yuridis meliputi: ekonomi, kemiskinan dan sosial budaya. 2. faktor yuridis, menurut Latifah Hanim, aparat penegak hukum menghadapi kendala-kendala yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan mungkin berasal dari dirinya atau dari lingkungan. yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.	
4.	Mudzakkir Jakarta UI/ 2001/ Disertasi	Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem	Pengaturan perundang-undangan hukum pidana dan pelaksanaannya dalam praktek hukum sehari-hari seperti yang tercermin dalam Putusan MARI	

		Peradilan Pidana di Indonesia	menunjukkan bahwa eksistensi dan posisi hukum korban kejahatan tidak diakui. Tiadanya pengakuan hukum pidana ini membawa konsekuensi lebih jauh dimana hak-hak korban yang telah diatur dalam hukum pidana tidak berhubungan langsung dengan kewajiban (tugas) polisi dan jaksa, tidak dilengkapi dengan hak-hak pendukunglain dan tidak memiliki hak kontrol yang jelas, seperti halnya hak-hak hukum yang dimiliki terdakwa. Keadaan tersebut mengakibatkan hak-hak korban kejahatan tidak dapat dilaksanakan secara baik.	
5.	Ni Putu Rai Yuliartini Singaraja/2015/ Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015	Kedudukan Korban Kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Iindonesia Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	Kedudukan korban yang tidak seimbang dengan kepentingan pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yang tertuang di dalam sistem peradilan pidana, sehingga menyarankan sudah saatnya dilakukan pembaharuan hukum pidana dalam KUHAP mengenai hak korban dalam sistem peradilan pidana agar hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana berimbang dengan hak-hak pelaku tindak pidana.	

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1.Pengelompokan Korban Kejahatan

KBBI memberikan dua pengertian dari kata korban, yakni: 1. pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dsb.; 2. orang, binatang, dsb. yang menjadi menderita (mati, dsb.).[149] Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional memberikan defenisi tentang korban dan menyebutkan kata pengganti lain yang maksudnya sama dengan korban kejahatan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan korban dengan ”pengadu”.[150] Penyebutan ”korban” tidak ditemukan pada Ketentuan Umum KUHAP yang memberikan pengertian tentang beberapa istilah hukum dalam KUHAP, namun Pasal 108 KUHAP menyebutkan kata ”korban” sebagai orang yang berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.[151] Pasal 160 KUHAP juga

---

[149] KBBI, hlm.733.

[150] Pasal 72 KUHP menentukan: Ayat (1). Selama orang yang terkena kejahatan, yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, belum berumur enam belas tahun dan juga belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara perdata. Ayat (2) Bila tidak ada wakilnya, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau bila itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

[151] Pasal 108 Ayat (1) KUHAP menentukan:”setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.”

ditemukan adanya kata korban sekaligus dimaknai sebagai saksi.[152] Pada ketentuan lain KUHAP korban disebutkan sebagai ”pihak ketiga yang berkepentingan,”[153] ”pihak yang dirugikan”.[154]

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (*selanjutnya dituliskan UUKDRT*), mengartikan korban merupakan orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.[155] Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (*selanjutnya dituliskanUULPSK 2014*) menentukan bahwa

---

[152] Pasal 160 Ayat (1) KUHAP menentukan: a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum; b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi; c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

[153] Penyebutan ”pihak ketiga yang berkepentingan” yang dimaknai sama dengan korban ditemukan pada Pasal 80 KUHAP yang menentukan: permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 memnyatkan pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KHAP adalah korban.

[154] Penyebutan ”pihak yang dirugikan” yang pengertiannya sama dengan korban ditemukan pada Pasal 98 Jo 99 KUHAP yang menggariksan:

Pasal 98: Ayat (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Ayat (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum . mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 KUHAP : Ayat (1). Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Ayat (2).Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

[155] Pasal 1 Ayat (3) UUKDRT.

korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[156]Pasal 1 angka(3) UULPSK 2014menerangan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (*selanjutnya dituliskan PP Nomor 2 Tahun 2002*) menyebutkan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.[157]

Korban menurut Resolusi MU-PBB 40/34 ialah orang-orang baik secara individual maupun secara kolektif, yang menderita kerugian ataupun karena akibat perbuatan/tidak berbuatnya seseorang sebagaimana ditetapkan undang-undang/hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.[158] Pada pembagian lain juga dinyatakan bahwa pengertian korban termasuk orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional.[159]

---

[156] Pasal 1 Angka 3 UULPSK 2014.
[157] Pasal 1 Angka 2 PP Nomor 2 Tahun 2002.
[158] Mahmutarom,*Op.Cit.*,hlm.127
[159]*Ibid*.,hlm.127-128

Pengertian korban sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Prinsip-prinsip Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan *(United Nation of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*) menyebutkan bahwa korban dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*)meliputi dua hal, yaitu korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan.[160]

Hasil Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar, yang dimaksud dengan korban adalah "*Victim means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal law operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power"* (orang yang secara individu atau secara bersama-sama telah mengalami penderitaan, termasuk penderitaan yang bersifat fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak dasar mereka, yang diakibatkan oleh perbuatan atau sikap tidak berbuat (omisi) yang melanggar hukum pidana yang berlaku dalam negara-negara peserta, termasuk hukum yang melarang tindakan penyalahgunaan kekuasaan).[161]

Menurut Muladi pengertian korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa

---

[160] Rena Yulia, 2013, *Op.Cit.*,hlm.117

[161] United Nations,1985, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, Pasal 1 Kongres PBB ke-7 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar, Milan Italia dalam Dewi Meta Lutfian,2018,*Kewajiban Jaksa Penuntut Umum dalam pemenuhan Hak-hak Korban pada Tahap Penuntutan*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,hlm. 229.

keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan (*A victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime*).[162]

Mahmutarom mengemukakan bahwa cukup layak juga istilah korban dapat mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.[163] Mengenai pengertian keluarga, KUHAP dan UULPSK memberikan defenisi sebagai berikut:

(1) Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 1 angka 5 UULPSK).

(2) Keluarga adalah mereka yang memiliki hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 30 KUHAP).

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Korban tidak langsung disini seperti istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang

---

[162] Muladi,1997,*Politik dan Sistem Peradilan Pidana,* Semarang: Badan Penerbit Undip,hlm.177
[163] Mahmutarom, HR., 2009, *Op.Cit.*, hlm. 128.

kehilangan anaknya, dan lainnya.[164]

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai orang yang secara indivual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan *(by act)* maupun karena kelalaian *(by omission).*[165]Dalam pengertian ini tampak bahwa istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian di atas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan disini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, namun mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Mengenal penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian.[166]

Pada awalnya yang dianggap sebagai korban kejahatan adalah orang perorangan atau individu (*individual victims*). Pandangan seperti ini tidak salah karena untuk kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat lazimnya demikian, misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya.Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsi tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun

---

[164] Soeharto, 2007,*Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana,* Bandung:Refika Aditama, hlm. 78

[165] Theo Van Boven, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, hlm xiii

[166]*Ibid*, hlm.xiv.

juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara (*collective victims*).

Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka di sini menurut Arief Gosita dapat berarti indvidu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.[167] Arif Gosita menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ”mereka” di sini adalah:[168]

1. Korban orang perorangan atau korban individual (*viktimisasi primair*).
2. Korban yang bukan perorangan, misalnya, suatu badan, organisasi, lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial, kolektif *(viktimisasi sekunder)* adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah, misalnya, pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara *(viktimisasi tersier).*

Abdussalam menjabarkan mengenai korban sebagai berikut:[169]

a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non-material.
b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat

---

[167] Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan [Kumpulan Karangan]*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia,hlm.64.

[168] Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV Akademik Pressindo, hlm. 101

[169] Abussalam, sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika 2014,hlm. 11-12

serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab.

d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Korban juga dapat dibedakan atas dua kategori,yaitu:[170]

1. *Primary victims, those who suffer directly as a result of a crime* (korban primer, mereka yang menderita secara langsung sebagai akibat dari sebuah kejahatan).
2. *Secondary victims, which can include people who are witnesses to a crime, family members, friends, neighbours, and whole communities, who may also suffer trauma* (korban sekunder, yang dapat termasuk orang-orang yang merupakan saksi sebuah kejahatan, anggota keluarga, teman, tetangga, dan seluruh masyarakat, yang mungkin juga menderita trauma).

Pembedaan tersebut di atas sesuai dengan pembedaan atas korban kejahatan yang bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak

[170]Cook, B., David, F. & Grant, A, *Victims Need, Victims Right*, sebagaimana dikutip oleh M. Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui putusan-putusan Pengadilan Pidana*,hlm. 52 dalam Dewi Meta Lutfian, *Op.Cit.*,hlm.233.

langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat.[171] Kemudian dari sudut pandang kerugiannya, maka korban dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu kerugian korban juga dapat bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan immaterial yakni perasaan takut, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.[172]

Hasil Kongres PBB Ketujuh telah mengelompokkan macam-macam korban sebagai berikut:[173]

a. Korban kejahatan konvensional adalah korban yang diakibatkan oleh tindak pidana biasa atau kejahatan biasa misalnya, pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan lain- lain.
b. Korban non konvensional adalah korban kejahatan yang diakibatkan oleh tindak pidana berat seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika secara tidak sah, kejahatan terorganisir dan kejahatan komputer.
c. Korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan *(illegal abuse of power)* terhadap hak asasi alat penguasa termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan sebagainya.

Menurut Mudzakkir, PBB membedakan korban menjadi dua yaitu korban kejahatan (*victims or crime)* dan korban penyalahgunaan kekuasaan (*victims of*

---

[171]Lilik Mulyadi,2004,*Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Djambatan, hlm. 120

[172] Mardjono Reksodiputro,1994,*Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 78

[173] diakses pada Hari Selasa, 9 Mei 2017, Pkl. 14.02WIB dalam Dewi Meta Lutfian,*Op.Cit*., ,hlm 234.

abuse of power).[174] Batasan pengertian korban penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*) menurut PBB adalah korban yang berarti orang, secara perseorangan atau kolektif, telah mengalami penderitaan, termasuk luka-luka fisik atau mental, gangguan emosional, kerugian ekonomis atau penurunan nilai substansial dari hak- hak fundamental mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional, tetapi oleh norma-norma yang diakui secara internasional berkaitan dengan hak-hak asasi manusia.[175]

Menurut Benyamin Mendelson, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang menjadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).[176]

Korban kejahatan dikelompokkan dalam beberapa kelompok antara lain korban kejahatan bersifat abstrak *(abstractvictims*), misalnya negara atau masyarakat; korban kelompok *(collective victims)*, misalnya organisasi atau kelompok berdasarkan ras, agama, etnis, suku, warna kulit atau karena ada

---

[174] Dewi Meta Lutfian,*Op.Cit.*,hlm.230
[175]*Ibid.*,hlm.230
[176] J. E. Shaetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 117

persamaan kepentingan; dan korban yang nyata *(real victim),* misalnya Individu atau beberapa individu.[177]

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban da!am terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan bebeŕapa tipologi korban, yaitu:[178]

1. *Non participating victims* adalah mereka yang menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
3. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
4. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan sebagai berikut:[179]

a. *Primary victimization,* yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).
b. *Secondary victimization,* yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
c. *Tertiary victimization,* yaitu korban masyarakat luas.
d. *No victimization,* yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

---

[177] Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan…,Op.Cit.,*hlm.47-48.
[178] Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi,* Djambatan: Jakarta, hlm. 124
[179] Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 54.

Apabila ditinjau dari perspektif tanggungjawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:[180]

a) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
b) *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
c) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
d) *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungari kepada korban yang tidak berdaya.
e) *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau

[180] Lilik Mulyadi, *OpCit*., 2007, hlm. 124-125

masyarakat.

f) *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

g) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

2.2.Hak-Hak Korban dalam Hukum Positif Indonesia

Pembahasan mengenai korban kejahatan merupakan hal yang sangat menarik perhatian bagi kalangan ahli hukum, karena selama ini dalam praktik penegakan hukum, perhatian para penegak hukum lebih banyak hanya fokus kepada perlindungan terhadap pelaku kejahatan saja. Padahal sebenarnya perhatian mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan seharusnya sama-sama dianggap penting untuk diperjuangkan, mengingat korban kejahatan adalah pihak yang paling dirugikan dari akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan. Tim Murphy menyatakan: ”*victims are the forgetten people in the system*”[181](korban adalah pihak yang terlupakan di dalam sistem peradilan). Sistem peradilan pidana selama ini menempatkan korban kejahatan dan saksi sebagai obyek yang pasif dan lebih mengedepankan kewajiban hukum yang mengakibatkan hak-haknya sebagai pihak yang sangat

[181] Murphy, Tim, Judge, *Superior Court District of Columbia,* sebagaimana dikutip oleh M Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui putusan-putusan Pengadilan Pidana*,hlm. 7 dalam Dewi Meta Lutfian,*Op.Cit.*, hlm 230-231.

terpengaruh oleh suatu kejahatan.[182] Perhatian terhadap pelaku kejahatan maupun kepada korban kejahatan seharusnya sama-sama diperjuangkan agar tercipta suatu keadilan dan agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh para apat penegak hukum.[183]

Hak-hak korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.[184] Hak-hak Korban dalam Hukum Positif di Indonesia terdapat di dalam KUHP dan KUHAP serta UULPSK.

Setiap korban pada dasarnya harus mengetahui hak-hak nya sebagai korban dan juga keluarganya. Hal ini menjadi penting karena tidak jarang seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental atau materil akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan misalnya perasaan takut di kemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya karena

---

[182] Mudzakkir, *Urgensi Dan Prinsip Perlindungan Saksi Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana* (Makalah), sebagaimanadikutipolehM Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui putusan-putusan Pengadilan Pidana*, hlm.7 dalam Dewi Meta Lutfian,*Ibid.*, hlm 231.

[183] *Ibid.*

[184] Theo Van Boven, 2002, *Op.Cit.*,hlm xv

menganggap kejadian tersebut merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya, sehingga lebih baik korban menyembunyikan kasus tersebut dan atau korban menolak untuk mengajukan ganti rugi karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut. Alasan semacam itulah yang kemudian menjadikan beberapa korban kejahatan perkosaan menjadi enggan untuk mengetahui dan meminta hak-haknya sebagai korban. Terdapat beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan yang meliputi:[185]

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti rugi ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
5. Hak untuk memperoleh kembali hak berupa harta miliknya
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau apabila pelaku buron dari tahanan
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban

[185] Dikdik M Arief Mansyur, 2008, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 53.

9. Hak atas kebebasan pribadi/ kerahasiaan pribadi seperti merahasiakan nomor telefon atau identitas korban lainnya.

Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia secara memadai, bukan berarti kewajiban dari korban kejahatan dapat diabaikan eksistensinya karena melalui peranan korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Oleh karena itu, terdapat beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan antara lain adalah:[186]

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri atau balas dendam terhadap pelaku
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan
7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi

[186] *Ibid*.,hlm.54-55.

2.1.1. Hak-hak Korban di dalam KUHP

2.1.1.1 Hak Korban dalam Kaitan Penuntutan Tindak Pidana

R. Soesilo mengemukakan bahwa dalam prinsipnya jika terjadi suatu peristiwa pidana, maka pemerintah yang diwakili oleh polisi, kejaksaan dan kehakiman, tanpa permintaan dari yang kena peristiwa pidana itu segera bertindak melakukan pemeriksaan, penuntutan dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang bersalah. Akan tetapi dari banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis, hampir semuanya kejahatan, yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa semacam ini biasa disebut delik aduan[187]

Utrecht mengemukakan bahwa hukum acara pidana di muka hakim dilakukan atas inisiatif pihak pemerintah, yaitu jaksa. Tetapi inisiatif jaksa dibatasi dalam penuntutan terhadap delik-delik yang dikenal dengan nama delik aduan (*klachtdelict*). Dalam hal delik aduan maka diadakan tidaknya tuntutan terhadap delik itu digantungkan pada ada tidaknya persetujuan dari yang dirugikan. Selama yang dirugikan belum memasukkan aduan, maka jaksa tidak dapat mengadakan tuntutan.[188]

Dari apa yang dikemukan R. Soesilo dan Utrecht di atas, maka terhadap penuntutan pelaku tindak pidana ada yang bergantung pada permintaan korban dan ada yang tidak bergantung permintaan korban, dalam terminologi hukum pidana diperistilahkan dengan delik biasa dan delik aduan.

---

[187] R. Soesilo,1996, *Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) (serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal),*Bogor: Politeia, hlm.87.

[188] E.Utrecht,1986,*Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, hlm.257.

Alasan adanya delik aduan adalah bahwa dalam beberapa hal bagi orang yang bersangkutan lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu daripada keuntungan bagi pemerintah (masyarakat) jika dilakukan penuntutan.[189] Delik-delik aduan itu tidak dikumpulkan dalam salah satu titel Buku KUHP, tetapi terdapat tersebar dalam Buku II KUHP. Tiap tiap delik yang oleh Pembuat KUHP dijadikan delik aduan menyatakan hal itu secara tersendiri dan dalam ketentuan yang bersangkutan sekaligus juga ditunjuk siapa yang berwenang mengajukan aduan.[190]

Delik aduan tidak mengurangi azas *oportuniteit* yang diterima sebagai salah satau dasar hukum acara pidana. Biarpun dalam hal delik aduan Penuntut Umum harus menunggu sampai diterimanya aduan, masih juga Penuntut Umum itu tidak berkewajiban mengadakan tuntutan. Jaksa Penuntut Umum tetap berwenang men-*deponering* perkara yang bersangkutan.[191]

Jenis-jenis kejahatan (delik) aduan ada dua, yani: 1. Delik Aduan Absolut (tetap) dan 2. Delik Aduan Relatif (*nisbi*). Delik Aduan Absolut adalah tiap kejahatan yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan.[192]Delik Aduan Relatif adalah tiap kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan, biasanya kejahatan itu bukan delik aduan.[193]

---

[189]E.Utrecht,1986,*Ibid* & R.Soesilo,1996, *Loc.Cit.,*

[190] E.Utrecht,*Ibid* .hlm 258
[191] *Ibid* .
[192] *Ibid*.,hlm.260
[193]*Ibid.*,hlm.260-261

Menurut R. Soesilo Delik Aduan Absolut, ialah delik (*peristiwa pidana*) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan.[194] Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi: ”saya minta agar peristiwa ini dituntut”.[195] Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkut paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. Seorang suami jika ia telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan (Pasal 284) yang telah dilakukan oleh istrinya, ia tidak dapat menghendaki supaya orang laki-laki yang telah berzinah dengan istrinya itu dituntut, tetapi terhadap istrinya (karena ia masih cinta) jangan dilakukan penuntutan.[196] Ketentuan dalam KUHP yang termasuk dalam delik aduan absolut adalah Pasal: 284, 287, 293, 310 s.d. 321, 322, 332 dan 369.

Tabel 3. Ketentuan dalam KUHP tentang Delik Aduan Absolut

PASAL KUHP	TINDAK KEJAHATAN	KETERANGAN
284	A. Berbuat zina yang dilakukan oleh laki-laki yang telah beristeri dan oleh perempuan yang telah bersuami B. Laki-laki atau perempuan tiada bersuami yang turut melakukan	1. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/ istri yang tercemar, 2. Terhadap pengaduan tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75 KUHP.[197] 3. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan

[194] R.Soesilo,1996, *Loc.Cit.*
[195] *Ibid*.
[196] *Ibid*.
[197] KUHP Pasal 72,73 dan 75 berada dalam Bab VII tentang Mamasukkan dan Mencabut Pengaduan dalam Perkara Kejahatan yang hanya Boleh Dituntut atas Pengaduan.

		dalam sidang pengadilan belum dimulai.
287	Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin.	Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291[198] dan Pasal 294.[199]
293	Memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya.	Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.
310-	Pasal 310 s.d. 321 KUHP berada dalam Bab XVI KUHP tentang	Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut Bab XVI

[198] Salah satu hal dalam Pasal 291 KUHP adalah menyebabkan luka berat atau menyebabkan mati, sehingga menjadi delik biasa.

[199] Pasal 294 KUHP menjadi tindak pidana biasa apabila korban tindak pidana:

a. Anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa;
b. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;
c. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

321	Penghinaan	KUHP, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan Pasal 316[200] [Pasal 319 KUHP].
322	Sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu	Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.
332	Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;	- Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan. - Pengaduan dilakukan: a. Jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin; b. Jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.
369	Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya	Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

[200] Pasal 316 KUHP mengatur: Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam Bab XVI (Pasal 310-315 KUHP), dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

	memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.	

Delik aduan relatif merupakan delik-delik (peristiwa pidana) yang bisanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Pasal 367 ayat (1) KUHP mengatur bahwa jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dan orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.Ayat (2) Pasal 367 KUHP menentukan jika pelaku kejahatan adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.Ayat (3) Pasal 367 KUHP menggariskan jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Delik aduan relatif, pengaduan bukan untuk menuntut peristiwanya akan tetapi untuk menuntut orang-orang yang bersalah dalam peristiwa itu. Delik aduan relatif ini dapat dibelah terhadap pelaku kejahatan yang mana saja diadukan apabila kejahatan dilakukan lebh dari satu orang, namun masih memiliki hubungan keluarga sebagaimana ditentukan Pasal 367 KUHP. Delik aduan relatif

dalam KUHP ditentukan dalam a. Pasal 362 s.d. 366 *Jo* Pasal 367,b. Pasal 368, 369,371 *Jo* Pasal 370, 367, c. Pasal 372 s.d.375,377 *Jo* Pasal 370, 367, d. Pasal 378 s.d 393,395 bis *Jo* 394, 367, e. Pasal 404 Jo Pasal 367, f. Pasal 406 s.d. 410,412 *Jo* 411, 367.

Tabel 4. Ketentuan KUHP tentang Delik Aduan Relatif

PASAL KUHP DELIK ADUAN RELATIF		KETERANGAN
PASAL RUMUSAN TINDAK PIDANA	PASAL DELIK ADUAN (*Juncto*)	
362 s.d. 366	367	1. Pasal 362 s.d 367 KUHP berada dalam Bab XXII tentang Pencurian 2. Pasal 362 s.d 366 KUHP adalah delik biasa namun bila pelaku tindak pidana adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 367 ayat (2) dan ayat (3) maka menjadi delik aduan relatif.
368, 369, 371	370, 367	1. Pasal 368 s.d 371 KUHP berada dalam Bab XXIII KUHP tentang Pemerasan dan Ancaman. 2. Pasal 370 mengatur: ketentuan Pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam XXIII

372 s.d. 375,377	376, 367	1. Pasal 372 s.d 377 KUHP berada dalam Bab XXIV tentang Penggelapan 2. Pasal 376 mengatur: ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam XXIV.
378 s.d 393, 395 bis	394,367	1. Pasal 378 s.d 395 KUHP berada dalam Bab XXV tentang Penipuan 2. Pasal 394 mengatur:ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV, kecuali yang dirumuskan dalam ayat kedua Pasal 393 bis,[201] sepanjang kejahatan dilakukan mengenai keterangan untuk mohon cerai atau pisah meja dan ranjang.
404	404 (2), 376	1. Pasal 404 KUHP berada dalam Bab XXVI tentang Merugikan Penagih Utang atau Orang Yang Berhak 2. Pasal 404 ayat 2 KUHP mengatur bahwa ketentuan Pasal 367 KUHP berlaku terhadap pelaku tindak pidana

[201] Pasal 393 bis ayat (2) KUHP, menentukan: diancam dengan pidana yang sama ialah si suami (istri) yang mengajukan gugatan atau si pemiutang yang memasukkan permintaan pailit, yang sengaja memberi keterangan palsu kepada pengacara yang dimaksudkan dalam ayat pertama.

		404 KUHP.
406 s.d. 410, 412	411, 367	1. Pasal 406 s.d 412 KUHP berada dalam Bab XXVII tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang 2. Pasal 411 KUHP mengatur bahwa Ketentuan Pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXVII KUHP

2.1.1.2 Hak Korban Memasukkan dan Mencabut Pengaduan

Hak Korban untuk memasukkan dan mencabut pengaduan diatur dalam Bab VII KUHP pada Pasal 72, 73, 74 dan 75, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5. Ketentuan tentang Memasukkan dan Mencabut Pengaduan

PASAL KUHP	MATERI PASAL	KETERANGAN
72	1. Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak	a. Pasal 72 mengatur tentang pihak lain (bukan korban) yang dapat menjadi Pengadu karena beberapa alasan tertentu. b. Pasal 284 KUHP menentukan: i. Terhadap pengaduan Pasal 284 tidak berlaku Pasal 72 KUHP. (Pasal 284 (3));

	mengadu; 2. Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.	ii. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. (Pasal 284 (2));
73	Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan.	a. Pasal 73 mengatur tentang tempo waktu memasukkan pengaduan dan pihak yang berhak mengadu bagi korban yang telah meninggal dunia b. Pasal 284 KUHP menentukan bahwa terhadap pengaduan Pasal 284 tidak berlaku ketentuan Pasal 73 KUHP. (Pasal 284 (3))
74	.1. Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu	a. Pasal 74 mengatur tentang tempo waktu menyampaikan pengaduan.

	mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. .2. Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.	b. Pasal 293 ayat (3) KUHP menentukan bahwa tenggang waktu dalam Pasal 74 bagi pengaduan Pasal 293 adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.
75	Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.[202]	a. Pasal 75 mengatur tentang tempo waktu pencabutan pengaduan b. Pasal 284 KUHP menentukan: a) Terhadap pengaduan Pasal 284 tidak berlaku ketentuan Pasal 75. KUHP (Pasal 284 (3)) b) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

[202] Utrecht mengemukakan bahwa pengaduan yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembali. Selanjutnya Utrecht menerangkan bahwa dalam hal delik perzinahan seperti yang tercantum dalam Pasal 284 KUHP, maka pengaduan dapat dicabut kembali selama delik yang bersangkutan masih belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan.Telah menjadi satu paraktek bahwa sebelum sidang pengadilan dimulai, hakim masih sekali lagi menanya kepada Pengadu apakah ia tetap pada pengaduannya atau telah sanggup mencabutnya kembali.Apabila tetap, maka acara dimulai. (E.Utrecht,1986, *Op.Cit.*, hlm.267).

		KUHP (Pasal 284 (4))

Pencabutan pengaduan mengandung konsekuensi bagi penuntut umum dalam melakukan kewenangannya. Adapun konsekuensi yang dimaksud adalah:[203]

1. Dengan adanya pencabutan aduan, maka penuntut umum hilang kewenangannya untuk melakukan penuntutan.
2. Bila sudah dilakukan proses pengajuan dalam sidang pengadilan, maka dakwaan dicabut.
3. Bila dakwaan dilanjutkan, maka hakim hakim wajib memutuskan untuk memberhentikan proses tersebut.

2.1.2. Hak-hak Korban di dalam KUHAP

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Lahirnya KUHAP diperlukan untuk mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.[204]

KUHAP memberikan hak bagi korban untuk :

[203] Eva Achjani, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.11
[204] Konsiderans ”menimbang” huruf e. KUHAP.

a. Mengajukan laporan[205] atau pengaduan[206];

b. Menuntut ganti rugi;

c. Menerima pengembalian benda-benda yang disita.

d. Mengajukan permohonan praperadilan tentang penghentian penyidikan/ penuntutan;

Hak korban untuk mengajukan laporan atau pengaduan diatur dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP, yang menggariskan: "Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis."

Hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) KUHAP. Pasal ini menentukan bahwa apabila suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Bila melihat pengertian ganti rugi menurut KUHAP, maka ganti kerugian merupakan hak tersangka/ terdakwa untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau

[205] Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 Angka 24 KUHAP).

[206] Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduanyang merugikannya (Pasal 1 Angka 25 KUHAP).

hukum yang diterapkan.[207] Penjelasan Pasal 98 Ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ”kerugian bagi orang lain” termasuk kerugian bagi korban.

Hak korban atas benda-benda yang disita diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak[208] apabila :

a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Hak korban untuk mengajukan permohonan praperadilan tentang penghentian penyidikan/penuntutan dapat ditemukan pada Pasal 80 KUHAP yang menggariskan: “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua PNi dengan menyebutkan alasannya.” Pihak ketiga yang berkepentigan dalam pasal 80 KUHAP adalah Korban sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012, tanggal 8 Januari 2013 *Jo* Nomor 98/PUU-X/2012,tanggal 20 Mei 2013.

---

[207] Pasal 1 Angka 22 KUHAP.

[208] Menurut Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, pengembalian benda yang disita dikecualikan apabila menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan frasa ”pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ”termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”.[209] Selanjutnya dinyatakan pula frasa ”pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.[210]

Mudzakir mengemukakan, bahwa KUHAP mengatur tiga hak hukum yang memungkinkan korban-korban kejahatan dapat menggunakannya dalam proses peradilan pidana. Pertama, hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/ atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 109 dan 140 ayat 2 KUHAP). Kedua, hak korban yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi berdasarkan Pasal 168 KUHAP dan hak bagi keluarga korban, dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengijinkan atau tidak mengijinkan tindakan polisi untuk melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi (Pasal 134-136 KUHAP). Ketiga, hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita akibat kejahatan (Pasal 98-101 KUHAP) dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan. [211]

2.1.3. Hak-hak Korban di dalam UULPSK

[209]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012, hlm.36 pada Amar Putusan Angka 1.1.
[210] Putusan Mahamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 hlm.36 pada Amar Putusan Angka 1.2.
[211] Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan…,Op.Cit.,*hlm.76-77.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban (UULPSK) pertama kali diundangkan melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 11 Agustus 2006, kemudian diubah oleh Undang-undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014.

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada: a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia, b. rasa aman, c. keadilan, d. tidak diskriminatif dan e. kepastian hukum.[212] Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.[213]

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 *Jo* UU Nomor 31 Tahun 2014, hak-hak korban dibedakan berdasarkan jenis kasus, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 6. Hak-hak Korban dalam UULPSK

NO.	JENIS KASUS	HAK KORBAN
1.	Kasus Tertentu sesuai Keputusan LPSK[214]	▪ Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ▪ Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; ▪ Memberikan keterangan tanpa tekanan; ▪ Mendapat penerjemah;[215] ▪ Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

[212] Pasal 3 UU LPSK Nomor 13 Tahun 2006.
[213] Pasal 4 UU LPSK Nomor 13 Tahun 2006.
[214] Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2014.
[215] Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak menguasai bahasa Indonesia (Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Huruf d UU Nomor 31 Tahun 2014).

		▪ Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;[216] ▪ Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;[217] ▪ Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;[218] ▪ Dirahasiakan identitasnya; ▪ Mendapat identitas baru; ▪ Mendapat tempat kediaman sementara; ▪ Mendapat tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; ▪ Mendapat nasihat hukum; ▪ Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/ atau ▪ Mendapat pendampingan.[219]
2.	- Tindak Pidana Perdagangan Orang; - Tindak Pidana Penyiksaan; - Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Penganiayaan Berat.	▪ Seluruh hak korban dalam kasus-kasus tertentu sesuai keputusan LPSK; ▪ Bantuan medis;[220]dan ▪ Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.[221]
3.	- Kasus Pelanggaran HAM Berat; - Tindak Pidana Terorisme.	▪ Seluruh Hak Korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Penyiksaan, Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Penganiayaan Berat; ▪ Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ▪ Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak

[216] Yang dimaksud dengan ”informasi” adalah dalam bentuk keterangan lisan dan tertulis. (Penjelasan Pasal 5 ayat (1)Huruf f UU Nomor 31 Tahun 2014).

[217] Yang dimaksud dengan ”informasi” adalah dalam bentuk keterangan lisan dan tertulis. (Penjelasan Pasal 5 ayat (1)Huruf g UU Nomor 31 Tahun 2014).

[218] Yang dimaksud dengan ”informasi” adalah dalam bentuk keterangan lisan dan tertulis. (Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Huruf h UU Nomor 31 Tahun 2014).

[219] Pasal 5 Ayat (1) huruf p UU Nomor 31 Tahun 2014.

[220] Bantuan diberikan berdasarkan Putusan LPSK (Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 2014).

[221] Bantuan diberikan berdasarkan Putusan LPSK (Pasal 6 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 2014).

		pidana; dan/ atau ▪ Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis.[222] ▪ Kompensasi;[223]dan ▪ Restitusi.[224]

Kasus Tertentu sesuai Keputusan LPSK diterangkan oleh Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) UULPSK diberikan kepada korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu,antara lain dalam kasus:

1. Pelanggaran HAM Berat;
2. Tindak Pidana Korupsi;
3. Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Tindak Pidana Terorisme;
5. Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Tindak Pidana Narkotika;
7. Tindak Pidana Psikotropika;
8. Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak;
9. Tindak Pidana lain yang mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya;

UU Pengadilan HAM[225] menggariskan bahwa setiap korban Pelanggaran HAM Berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dan ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dan pihak manapun. Perlindungan tersebut wajib

[222] Pasal 7 A Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014.
[223] Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014.
[224] Bentuk restitusi berdasarkan Ketentuan Pasal 7 A Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 adalah :
a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
[225] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) diundangkan pada tanggal 23 Nopember 2000.

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cum-cuma.[226] Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.[227] Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap Pelanggaran HAM Berat[228] dengan syarat usia pelaku pada saat kejahatan harus berumur 18 tahun ke atas.[229] Pelanggaran HAM Berat meliputi:[230] a. kejahatan genosida[231] dan b. kejahatan terhadap kemanusiaan.[232]Hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang

---

[226] Pasal 34 UU Pengadilan HAM.

[227] Merupakan ketentuan Pasal 35 UU Pengadilan HAM.Dalam Penjelasan Pasal 35 UU Pengadilan HAM. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu rnemberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa: a.pengembalian harta milik, b.pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaandan c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Rehabilitasi menurut Penjelasan Pasal 35 UU Pengadilan HAM adalah pemulihan pada kedudukan semula,misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain.

[228] Pasal 1 angka 3 dan Pasal 5 UU Pengadilan HAM.

[229] Pasal 6 UU Pengadilan HAM.

[230] Pasal 7 UU Pengadilan HAM.

[231] Kejahatan Genosida berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Pengadilan HAM didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

a. membunuh anggota kelompok;
b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

[232] Kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Pengadilan diartikan sebagai salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

a. pembunuhan;
b. pemusnahan;
c. perbudakan;
d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
f. penyiksaan;

berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, apabila tidak ditentukan lain dalam UU Pengadilan HAM.[233] UU Pengadilan HAM membuat bab tersendiri tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni pada Bab V (Pasal 34) serta bab tersendiri tentang Hak Korban atas Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi, yakni pada Bab VI (Pasal 35).

UU Tindak Pidana Terorisme[234] menyatakan bahwa korban tindak pidana terorisme baik korban langsungmaupun korban tidak langsungmerupakan tanggung jawab negara.[235]

Korban langsung adalah korban yang langsung mengalami dan merasakan akibat Tindak Pidana Terorisme, misalnya korban meninggal atau luka berat karena ledakan bom.[236]

Korban tidak langsung merupakan adalah mereka yang menggantungkan hidupnya kepada Korban langsung, misalnya istri yang kehilangan suami yang

---

g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
i. penghilangan orang secara paksa; atau
j. kejahatan *apartheid*.

[233] Pasal 10 UU Pengadilan HAM.

[234] Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pertama kali diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tanggal 18 Oktober 2002. Perpuu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kemudian ditetapkan menjadi undang-undang, melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang tanggal 4 April 2003.UU Nomor 15 Tahun 2003 kemudian diubah oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang tanggal 21 Juni 2018. UU Nomor 5 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 22 Juni 2018.

[235] Pasal 35 A UU Nomor 5 Tahun 2018.

[236] Pasal 35 A Ayat (2) Huruf a UU Nomor 5 Tahun 2018 dan Penjelasannya.

merupakan korban langsung atau sebaliknya.[237]

Bentuk tanggung jawab negara terhadap korban berupa:[238]

a. bantuan medis;[239]

b. rehabilitasi psikososial dan psikologis;

c. santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan

d. kompensasi.

Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal duniadilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait.[240]

Korban Tindak Pidana Terorisme juga berhak mendapatkan restitusi [241]yang diajukan oleh Korban atau ahli warisnya kepada penyidik sejak tahap penyidikan.[242]Pemberian Kompensasi diberikan kepada Korban atau ahli warisnya[243] yang pembiayaannya dibebankan kepada negara.[244]

Dalam UUKDRT,[245] Korban berhak untuk mendapatkan: a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan

---

[237] Pasal 35 A Ayat (2) Huruf b UU Nomor 5 Tahun 2018 dan Penjelasannya.
[238] Pasal 35 A Ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2018.
[239] Bantuan medis diberikan sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme (Pasal 35 B Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2018).
[240] Pasal 35 B Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2018.
[241] Pasal 36 A Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2018.
[242] Pasal 36 A Ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2018.
[243] Pasal 36 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2018.
[244] Pasal 36 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2018.
[245] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), diundangkan pada tanggal 22 September 2004.

medis; c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. pelayanan bimbingan rohani.[246] Korban KDRT berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.[247]

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.[248]

Perlindungan kepada korban diatur dalam Pasal 43 s/d Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2007,yakni:

1. .Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua.[249]
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri,dan/atau hartanya.[250]

---

[246] Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004.
[247] Pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2004.
[248] Pasal 43 UU Nomor 21 Tahun 2007.
[249] Pasal 44 UU Nomor 21 Tahun 2007.
[250] Pasal 47 UU Nomor 21 Tahun 2007. Pada pasal ini ditentukan bahwa dalam hal korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya,

3. Hak untuk mendapatkan restitusi.[251]
4. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, pemulangan, dan reintegrasi social dari pemerintah.[252]
5. Korban yang berada di luar negeri berhakdilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara.[253]

Hak kerahasiaan identitas korbandiberikan juga kepada keluarga korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan korban.[254]Untuk melindungi korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi korban tindak pidana perdagangan orang.[255]Untuk melindungi korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi korban tindak pidana perdagangan orang.[256]

Restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berupa ganti kerugian atas:[257]

a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. penderitaan;
c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau

---

Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

[251] Pasal 48 UU Nomor 21 Tahun 2007.
[252] Pasal 51 UU Nomor 21 Tahun 2007.
[253] Pasal 54 UU Nomor 21 Tahun 2007.
[254] Pasal 44 Ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2007.
[255] Pasal 45 (1) UU Nomor 21 Tahun 2007.
[256] Pasal 46 (1) UU Nomor 21 Tahun 2007.
[257] Pasal 48 (2) UU Nomor 21 Tahun 2007.

d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.[258]Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.[259]Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.[260] Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. [261]Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan. [262]

Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi.[263]Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.[264]Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.[265]

Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.[266] Pengadilan memberikan surat

---

[258] Pasal 48 (3) UU Nomor 21 Tahun 2007.
[259] Pasal 48 (4) UU Nomor 21 Tahun 2007.
[260] Pasal 48 (5) UU Nomor 21 Tahun 2007.
[261] Pasal 48 (6) UU Nomor 21 Tahun 2007.
[262] Pasal 48 (7) UU Nomor 21 Tahun 2007.
[263] Pasal 49 Ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007.
[264] Pasal 49 Ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2007.
[265] Pasal 49 Ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2007.
[266] Pasal 50 Ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007.

peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.[267]Dalam hal surat peringatan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.[268] Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.[269]

Hak-hak Korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.[270] Permohonan dimaksud diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.[271]

Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.[272]Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

[267] Pasal 50 Ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2007.
[268] Pasal 50 Ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2007.
[269] Pasal 50 Ayat (4) UU Nomor 21 Tahun 2007.
[270] Pasal 51 Ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2007.
[271] Pasal 51 Ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2007.
[272] Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007.

membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.[273]Untuk penyelenggaraan pelayanan, masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.[274]

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan. [275]

Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.[276] Pemberian perlindungan korban WNI yang berada di luar negeri atau warga negara asing yang berada di Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.[277]

Korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.[278]

Menurut Arief Gosita, korban mempunyai peranan dan tanggungjawab fungsional dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu, macam-macam hak yang

---

[273] Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2007.
[274] Pasal 52 Ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2007.
[275] Pasal 53 UU Nomor 21 Tahun 2007.
[276] Pasal 54 Ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2007.
[277] Pasal 54 Ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2007.
[278] Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2007.

ada pada korban sedikit banyak ditentukan oleh tingkat keterlibatan dan tanggungjawab fungsional dari korban dalam tindak pidana yang bersangkutan dengannya. Menurut Arief Gosita, hak-hak korban itu antara lain:[279]

1. Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/ partisipasi/ peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut.
2. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau menerima kompensasi karena tidak memerlukannya).
3. Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya, bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Berhak mendapatkan kembali hak miliknya
5. Berhak menolak menjadi saksi,bila hal ini akan membahayakan dirinya, bila melapor dan menjadi saksi
6. Berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum
7. Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Dari deretan hak yang dikemukakan Arief Gosita, terlihat bahwa sebagian hak yang dimiliki oleh korban hanya merupakan hak moral karena tidak ada aturan hukum yang dapat dijadikan dasar atau landasan untuk melakukan tuntutan terhadap pihak lain (dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana).[280]

---

[279]Arief Gosita,1983, *Masalah Korban Kejahatan,* Cetakan Pertama, Jakarta: CV Akademika Pressindo,hlm.52-53.

[280] Widiartana, *Viktimologi & Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan pertama,Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,hlm. 55

2.2. Hak-Hak Korban dalam Hukum Islam

Dalam *Fiqh* Islam, sedikit ditemukan pembahasan atau kajian mengenai perlindungan korban tindak pidana. Perlindungan korban dalam Islam tidak dibahas dalam suatu bab khusus, tetapi praktik mengenai perlindungan korban ini ada walaupun tidak dikodifikasikan secara teoritis. Secara umum Allah sering kali menyebutkan dalam ayat-ayat-Nya menyuruh manusia untuk berbuat baik terhadap sesama, karena agama Islam diturunkan sebagai *rahmatan lil 'alamin* dan tolong menolong telah menjadi identitas orang-orang muslim dulu sejak masa Rasulullah.[281]Dalam Islam tolong menolong tidak hanya dianjurkan ketika seseorang telah menjadi korban, tetapi dalam setiap berbuat kebaikan juga umat Islam dianjurkan untuk saling bahu-mambahu dan tolong menolong. Dalam hukum Islam terdapat beberapa ketentuan yang dapat dipandang sebagai suatu bentuk perlindungan korban tindak pidana.Walaupun istilahnya bukan perlindungan korban tindak pidana, namun nilai-nilai yang terdapat dalam ketentuan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur, maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam upaya perlindungan korban. Salah satunya aalah system *diyat*yang diwajibkan atas pelaku pembunuhan yang seperti sengaja, pembunuhan tersalah dan dalam kasus penganiayaan.[282] Bentuk *diyat* ini juga dapat dikategorikan suatu bentuk restitusi yang disebut dalam hukum positif. *Diyat*adalah harta benda yang wajib ditunaikan sebab tindakan kejahatan kemudian diberikan kepada korban

[281]http://peunebah.blogspot.com/2011/02/hapusnya-hukuman-terhadap-pelaku.html?m=1, Tinjauan Hukum Islam terhadap Bentuk-bentuk Perlidungan Korban Tindak Pidana Yang Terdapat dalam Hukum Positif,hlm.3 diakses tanggal 11 Mei 2020, Pukul 12.10.

[282] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gema Insani 2003),hlm.3dhttp://peunebah.blogspot.com/2011/02/hapusnya-hukuman-terhadap-pelaku.html?m=1, Tinjauan Hukum Islam terhadap Bentuk-bentuk Perlidungan Korban Tindak Pidana Yang Terdapat dalam Hukum Positif,hlm.3 diakses tanggal 11 Mei 2020, Pukul 12.10

atau walinya.[283]Selain *diyat*,dalam hukum Islam juga dikenal adanya pengembalian barang hasil curian oleh pelaku kepada korban. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan apa yang menjadi hak korban yang telah diambil oleh pelaku kejahatan.[284]

Hukuman daĺam hukum pidana Islam terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu *hudud, qishosh diyat* dan *ta'zir*. Dari ketiga jenis hukuman tersebut, yang bersinggungan dengan konsep *restorative justice* adalah pidana *qishash diyat*.[285]

Qisas-diyat merupakan salah satu aturan dalam syari'at Islam mengenai hukum pidana dan berlaku bagi tindak pidana-tindak pidana yang berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan. Qisas yang berasal dari bahasa Arab al-qisās bermakna an yaf'ala bil-fā'il mi£la mā fa'ala[286]yang berarti melakukan seperti apa yang telah dilakukan pelakunya. Sedangkan diyat yang berasal dari bahasa Arab *ad-diyat*(*singular*) atau *diyāt* (*plural*) adalah bentuk maidar (bentuk jadian) dari *wadā*yang berarti *mā yu'ta in al-māl badala an-nafs al-qatīl* (harta yang diberikan sebagai ganti dari jiwa yang terbunuh). Bentuk asli dari ad-diyat adalah *al-wad*³. Huruf ta' digunakan sebagai ganti dari huruf *wau* yang dibuang sebagaimana dalam kata *'iddat.*[287]

---

[283]Sabiq,1984, *Fiqih Sunnah,* Cetakan Pertama, Bandung: Al-Ma'arif, hlm. 90
[284]Dewi Meta Lutfian,*Op.Cit.*,hlm.250.
[285] Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 120.

[286]Luis Ma'luf,1986, *Al-Munjid fī al-Lugah wa al-I'lām,* Beirut: Dar al-Masyriq, hlm. 631 dalam Ahmad Bahiej,2005,*Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qisas dan Diyat,*As-Syi'rah,Vol.39,No.I, hlm.1,diakses dari:https://www.researchgate.net/publication/315693779_Memahami_Keadilan_Hukum_Tuhan_dalam_Qisas_dan_Diyat,26 Nopember 2020,Pukul 09.51 WIB.
[287]Luis Ma'luf,*Ibid*. hlm.895 dalam Ahmad Bahiej, ,*Ibid.*

Dalam beberapa segi, aturan mengenai *qisas-diyat* ini mempunyai beberapakeunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh aturan-aturan *jarimah* lain, seperti dalam hudud maupun ta'zir. Keunikan-keunikan itu antara lain adalah, pertama, posisi *qisas-diyat* dalam hukum pidana Islam. Dalam literatur-literatur *fiqh* disebutkan bahwa aturanmengenai *qisas-diyat* ini tidak termasuk ke dalam pembahasan mengenai *hudud*, namun berdiri sendiri sebagai cabang dari *jinayat* (hukum pidana Islam). [288]

Keunikan aturan mengenai *qisas-diyat*yang kedua adalah aturan-aturan mengenai *qisas-diyat* dalam Al-Qur'an lebih banyak dari pada aturan-aturan *jarimah* yang lain. Paling tidak ada lima ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil penetapan sanksi *qishas-dhiyat*,yakni: [289]

1. Q.S.Al-Baqarah/2:178, Allah berfirman yang artinya:

> "Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang dimaafkan) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu ada korban lah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.Dan barang siapa melanggr batas maka baginya siksa yang pedih".[290]

---

[288]Luis Ma'luf,*Ibid*. Ahmad Bahiej, *Ibid.*

[289]Ahmad Bahiej, *Ibid*

[290]Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi menafsirkan Q.S. Al Baqarah/2:178,sebagai berikut: (Hai orang-orang beriman,diwajibkan atas kamu Qishash) pembalasan yang setimpal (berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh) baik tentang sifat maupun perbuatan (orang merdeka) dibunuh (karena membunuh orang merdeka) maka tidak boleh dibunuh karena membunuh hamba (hamba dibunuh karena membunuh hamba dan wanita dibunuh karena membunuh wanita). Sunah menyatakan bahwa laki-laki boleh dibunuh karena membunuh wanita dan dalam agama dipandang seimbang atau sebanding, tetapi tidak boleh seorang Islam walaupun ia seorang hamba dibunuh karena membunuh seorang kafir walaupun ia seorang merdeka (siapa yang dimaafkan) maksudnya di antara pembunuhan -pembunahan itu (berkenaan dengan) darah (saudaranya) yang dibunuh berupa sesuatu misalnya dengan ditiadakannya qishash terhadapnya dinakirahkan/indefinitifkannya lafal syai'un mengakibatkan gugurnya hukuman karena telah dimaafkan dari sebagiannya dan dari sebagian ahli waris korban. Dengan disebutkannya 'saudaranya', membangkitkan rasa santun yang mendorong penuntut/pendakwa untuk memaafkan dan menjadi pernyataan bahwa pembunuhan itu tidaklah mengakibatkan

2. Q.S. Al-Baqarah/2:179, berfirman yang artinya:

   ”Dan bagimu dalam *qishas* itu terdapat kehidupan hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertaqwa.”[291]

3. Q.S. An-Nisa/4: 92,berfirman yang artinya:

   ”Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

---

putusnya persaudaraan dalam agama dan keimanan. Man' yang merupa kan syartiyah atau isim mausul menjadi mubtada, sedangkan khabar-nya ialah, (maka hendaklah mengikuti) artinya orang yang memaatkan pembunuh hendaklah mengikuti (dengan cara yang baik) misalnya memintanya supaya membayar diat atau denda dengan baik-baik dan tidak kasar. Pengaturan 'mengikuti' terhadap 'memaafkan' menunjukkan bahwa yang wajib ialah salah satu di antara keduanya dan ini merupakan salah satu di antara dua pendapat Syafii, sedangkan menurut pendapatnya yang kedua yang wajib itu ialah kisas, sedangkan diat menjadi penggantinya. Sekiranya seseorang memafkan dan tidak menyebutkan diat, maka bebaslah dari segala ke wajiban dan Imam syafii menarjihkan pendapat yang kedua ini (dan) hendaklah si pembunuh (membayar) diat (kepadanya) yaitu kepada yang memaafkan tadi, yakni ahli waris (dengan cara yang baik pula) artinya tanpa melalaikan dan mengurangi pembayarannya. (Demikian itu) maksudnya diperbolehkannya hukum qishash dan memaafkan dengan diat, hal ini adalah (suatu keringanan) atau kemudahan(dari Tuhanmu) terhadapmu (suatu rahmat) kepadamu berupa kelapangan dengan tidak dipastikan-Nya salah satu di antara keduanya, seperti diwajibkan-Nya qishash atas orang-orang Yahudi dan diat atas orang-orang Kristen. (Dan barang siapa yang melanggar batas) misalnya dianiayanya si pembunuh dengan membunuhnya pula (sesudah itu) maksudnya setelah mamaafkan (maka baginya siksa yang pedih) atau menyakitkan, yaitu diakhirat dengan api neraka, atau didunia dengan dibunuh pula..[Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi, 2017, *Tafsir Jalalain Lengkap dan Disertai Asbabun Nuzul*,Cetakan Pertama, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,hlm.27].

[291]Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi menafsirkan Q.S. Al Baqarah/2:179,sebagai berikut: (Dan bagimu dalam *qishas* itu terdapat kehidupan) artinya terjaminnya kelangsungan hidup manusia (hai orang-orang yang berakal) karena jika seorang yang akan membunuh itu mengetahui bahwa ia akan dibunh pula, maka ia akan merasa takut lalu mengurungkan rencananya sehingga berarti ia telah memelihara nyawanya dari nyawa orang yang akan dibunuhnya tadi.Dan orang yang ingin menghukum mati si pembunuh maka telah disyaratkan oleh Allah (supaya kamu bertaqwa) artinya menjaga dirimu dari membunuh,agar terhindar dari qishas [*Ibid*.,hlm.27].

4. Q.S. An-Nisa/4: 93, berfirman yang artinya:

   ”Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

5. Q.S.Al-Maidah/: 45, berfirman yang artinya:

   ” Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

Keunikan aturan mengenai *qisas-diyat*yang ketiga adalahsanksi pidana bagi *jarimahqisas-diyat* lebih komprehensif dan menyediakan berbagai macam alternatif pidana bagi pelakunya.Pidana dengan berbagai alternatif ini tidak dikenal dalam bentuk *jarimah-jarimah* yanglain, khususnya dalam *jarimah hudud*.[292]

Pada dasarnya ayat-ayat *qishas-diyat* dalam Al-Qur'an adalah untuk mengajak kepada kemurahhatian dan mengurangi kekejaman dan pembalasan yang diberlakukanpada masa pra-Islam. Syarī’ah Islam kemudian datang untuk mengajarkan persamaan (*equality*) dan kemurahhatian (*mercy*) dengan menetapkan bahwa pembunuhan dibalas dengan pembunuhan (*qishas*)dan penganiayaan dibalas dengan penganiayaan. Namun jika pembunuh

[292]Ahmad Bahiej,*Loc.Cit.*

dimaafkan, dengan membayar diyāt yang *reasonable*, maka hal itu adalah lebih baik.[293]Selain itu, qisas sebagai hukuman yang tertinggi, disyaratkan dengan ketat dan harus dipastikan bahwa si pembunuh melakukannya dengan sengaja dan memenuhi unsur kesalahan. Jika terdapat keraguan (doubt/asy-syubhat) dalam pelaku atau dalam pembuktiannya, maka qisas tidak dapat dilakukan.[294]

Al-Jurjawi menjelaskan bahwa hikmah adanya hukuman *qishas-diyat* adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia, tindakan preventif agar manusia tidak saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat, serta menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.[295] Sementara itu, hikmah diyat adalah demi kepentingan kedua belah pihak. Dari pihak pembunuh, dengan membayar denda secara damai kepada pihak keluarga korban, dia akan merasa aman dan akan adakesempatan untuk bertaubat kembali ke jalan yang benar karena merasakan berharganyakehidupan. Sementara bagi keluarga korban, diyat yang diterima secara damai akan dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidupnya dan meringankan sedikit kesedihannya.[296]

Pada hakikatnya pidana *qishash diyat* itu merupakan bentuk pidana yang bersifat melindungi korban. Dilihat dari cara dan wewenang menuntut dan melaksanakan pidana *qishash diyat* itu dibatasi dan diatur dalam Al-quran dan

---

[293]Muhammad, Muslehuddin,1997, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Penerjemah Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana,hlm.88 dalam Ahmad Bahiej,*Ibid*.hlm.13.

[294]Muhammad, Muslehuddin,Ibid., dalam Ahmad Bahiej,*Ibid*.

[295]Al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), hlm. 346. dalam Ahmad Bahiej, *Ibid*.

[296]Ahmad Bahiej,*Ibid*.,hlm.13-14.

Hadist, maka ketentuan mengenai kedua bentuk pidana ini juga, sebenarnya melindungi dan meringankan beban terpidana.[297]

Pada dasarnya, hukuman *qishas* dan *diyat* bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dengan mengabaikan keadaan pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperhatikan pribadi dan kondisi pelaku kecuali jika korban atau walinya memberikan ampunan.[298]

Bersamaan dengan ditetapkannya pidana qisas bagi pelaku pembunuhan, Allah mensyari'atkan juga pemaafan kepada pelaku. Hal ini berarti qisas bukanlah pidana yang bersifat mutlak, namun sebaliknya bersifat relatif dengan bergantung padapemaafan dari pihak keluarga korban. Dengan demikian syari'at Islam sangatmemperhatikan eksistensi pihak keluarga korban sebagai pemutus ada tidaknya qishas.[299]

Hukum Islam memberikan hak pengampunan kepada korban atau walinya berdasarkan pertimbangan yang logis dan praktis karena pada dasarnya, hukuman ditetapkan untuk memberantas tindak pidana, tetapi pada banyak keadaan hukuman tidak selalu dapat mencegah terjadinya tindak pidana, sedangkan pengampunan seringkali dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Ini karena pengampunan baru akan terjadi setelah adanya perdamaian dan kebersihan hati

---

[297] H.C.Najmuddin,HS,2001,*Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam*,Tesis,Universitas Islam Bandung,hlm. 96

[298] Abdul Qodir Audah,2007,A*t-Tasyri al-Jina I al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*,Edisi Indonesia,Penerjemah Tim Tsalisah,Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jakarta :PT. Kharisma Ilmu,hlm.23 dalam Rena Yulia, *Op.Cit.,* hlm. 120-121.

[299]Ahmad Bahiej,*Op.Cit*.,hlm. 14.

antara kedua belah pihak dari unsur-unsur yang mendorong terjadinya tindak pidana.[300]

Jadi dalam hal ini, pengampunan dapat melakukan tugas hukuman dan mewujudkan hasil yang tidak dapat dilaksanakan oleh hukuman itu sendiri. Inilah sisi praktis pemberian hak pengampunan. Adapun dari sisi logika, tindak pidana pembunuhan dan pelukaan bersifat perseorangan yang berasal dari motif perseorangan. Tindak pidana ini lebih banyak menyentuh kehidupan dan fisik korban daripada menyentuh masyarakat. Oleh karena itu, selama suatu tindak pidana memiliki keterkaitan dengan perseorangan korban, penjatuhan hukumannya menjadi hak korban.[301]

Tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan menyentuh eksistensi masyarakat. Walaupun demikian, tindak pidana ini lebih menyentuh korban dari pada menyentuh masyarakat tindak pidana ini bahkan tidak menyentuh masyarakat kecuali terlebih dahulu menyentuh korban. Apabila korban atau walinya telah mengampuni pelaku, maka tidak ada jalan lain selain melakukan penegakan hukum supaya keadilan dirasakan oleh masyarakat umum. Ini karena pengaruh pidana berat itu telah hilang oleh pemaafan korban sehingga pidana itu menjadi tidak berbahaya dan tidak mempengaruhi eksistensi masyarakat.[302]

Pada realitasnya, si korban atau walinya tidak akan mengampuni pelaku kecuali ia telah benar-benar memaafkan pelaku atau melihat adanya manfaat material pada *diyat*. Artinya, alasan pengampunan si korban/ walinya dapat berupa dua hal: pemaafan dan manfaat material yang berupa diat untuk korban/

[300] Abdul Qodir Audah,*Op.Cit*., hlm.69 dalam Rena Yulia, *Op.Cit.,* hlm. 21.
[301] Abdul Qodir Audah,*Ibid*., hlm.70 dalam Rena Yulia, *Ibid*.,hlm. 123.
[302] Abdul Qodir Audah,*Ibid*., hlm.23 dalam Rena Yulia, *Ibid*.,hlm.121.

walinya. Kedua alasan ini disyariatkan dan dihalalkan oleh hukum Islam. Alasannya, pemaafan bermakna menghilangkan pertikaian dan kedengkian, sedangkan sikap mengutamakan pembayaran diat dari pada menjatuhkan hukuman bermakna sikap toleransi, memaafkan, dan melemahkan rasa permusuhan. Tidak diragukan lagi bahwa hak korban atau walinya adalah agar mereka menjadi pihak pertama yang mendapat manfaat atas tindak pidana yang menimpa mereka setelah mereka menanggung penderitaan yang tidak ditanggung oleh orang lain.[303]

Korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni hukuman *qishash*. Apabila ia memaafkannya, gugurlah hukuman *qishash* tersebut. Pemberian ampunan terkadang bisa dengan cuma-cuma atau dengan membayar *diyat* kepada korban/ walinya. Meskipun demikian, pengampunan tersebut tidak menghalangi penguasa untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai terhadap pelaku. [304]

Pada dasarnya korban atau walinya tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan dalam perkara pidana umum tetapi dalam pidana *qishashdiyat*, mereka diberi hak untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku sebagai pengecualian karena tindak pidana ini sangat erat hubungannya dengan pribadi korban, juga karena tindak pidana ini lebih banyak menyentuh pribadi korban dari pada keamanan masyarakat dan sistemnya. [305]

Hukum Islam mengakui sistem pengampunan (hak korban dalam memberikan pengampunan), prinsip ini diakui oleh hukum modern pada masa

[303] Abdul Qodir Audah,*Ibid*., hlm.23-24 dalam Rena Yulia, *Ibid*..
[304] Abdul Qodir Audah,*Ibid*., hlm.69 dalam Rena Yulia, *Ibid*.
[305] Abdul Qodir Audah,*Ibid*., dalam Rena Yulia, *Ibid*.

kini sehingga hukum Islam tetap lebih unggul daripada hukum konvensional karena memilih logika penerapan pengampunan tersebut dengan baik. Alasannya, penetapan hak pengampunan bagi tindak pidana pembunuhan akan menghasilkan perdamaian dan kerukunan serta menghi!angkan kedengkian dan rasa dendam.[306]

Konsep seperti ini implementasinya diberikan langsung kepada masing-masing negara yang menerapkan hukum pidana Islam, tetapi secara prinsip konsep *restorative justice* embrionya sudah ada dalam stelsel pemidanaan yang dianut dalam hukum pidana Islam. [307]

Munculnya konsep *restorative justice* pada prinsipnya telah lebih dahulu diperkenalkan oleh *fiqh jinayah* sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 178: "Maka barangsiapa yang mendapat suatu permaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula."[308]

Hakikat yang terkandung dalam konsep pidana *diyat* adalah adanya prinsip pembalasan terhadap kejahatan, prinsip perlindungan terhadap korban atau keluarganya, dan prinsip perdamaian dan pemaafan yang sangat ditekankan antara terpidana dan keluarga korban.[309]

Padanan kata "perdamaian" dalam Al Quran adalah "Islah". Iṣlāḥ yang berarti perdamaian merupakan salah satu term atau lafadz yang ditemui dalam al-

---

[306] Rena Yulia, *Ibid.,* hlm. 122.
[307] *Ibid*., hlm.123.
[308] Rocky Marbun,Juli 2017,*Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi FenomenaOvercapacity Lembga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 2, Juli 2017,hlm.202.
[309] H.C.Najmuddin,HS,*Loc.Cit.*

Qur'an.Kata aṣliḥū terambil dari kata aṣlaḥa yang asalnya adalah ṣaluḥa sebagai antonim dari kata fasada (rusak).[310]Dengan demikian kata ṣaluḥa berarti tidak ada atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat.Kata Iṣlāḥ dari ayat di atasdikaitkan dengan kata adil, artinya setiap orang yang menjadi penengah kelompok atau orang yang bertikai harus berbuat adil.[311]

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat-ayat menyangkut iṣlāḥ di antaranya adalah:

1. Q.S. Al-Baqarah/2: 182,Allah berfirman yang artinya:

> "Tetapi barangsiapa khawatir bahwa pemberi wasiat (berlaku) berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

2. Q.S. Al-Baqarah/2:224,Allah berfirman yang artinya:

> "Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

3. Q.S. Annisa/4: 35,Allah berfirman yang artinya:

> "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

4. Q.S. Annisa/4: 114,Allah berfirman yang artinya:

> "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan

---

[310] Abdul Wahid Haddade,2016, *Konsep Al-Ishlah dalam Al-Quran, Tafsere*, Volume 4 Nomor 1,hlm.13.

[311] Al-Asfahani, Al-Raghib,,t.th,*Mu'jam al-Mufradat al-Qur'an*,Beirut: dar al-Fikr dalam Abdul Wahid Haddade,Ibid.,hlm.14-15.

barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”

5. Q.S. Annisa/4: 128, Allah berfirman yang artinya:

”Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.”

6. Q.S. Annisa/4: 129,Allah berfirman yang artinya:

”Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

7. Q.S. Al-A’raf/7: 35,Allah berfirman yang artinya:

”Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barangsiapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

8. Q.S. Al-A’raf/7: 142,Allah berfirman yang artinya:

”Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.”

9. Q.S. Al-Anfal/8:1,Allah berfirman yang artinya:

”Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman."

10. Q.S. Al-Hujurat/49: 9,Allah berfirman yang artinya:

> ”Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zhalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zhalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

11. Q.S. Al-Hujurat/49: 10,Allah berfirman yang artinya:

> ”Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Dalam kesebelas ayat Al Quran di atas, ”Ishlah” diterjemahkan dengan ”damaikan” dan ”perbaiki”.Di kalangan ulama tafsir, M. Quraish Shihab dalam Tafsir al- Misbaḥ,[312]misalnya, menyingkap makna iṣlāḥ kaitannya dengan dimensi perdamaian. Di dalam al-Qur’an secara universal iṣlāhmenurut*lugawi*, diartikan perdamaian. Di samping itu, iṣlāḥ secara luas juga dapat dimaknai perdamaian termasuk menciptakan perdamaian dan mencegah konflik setiap fenomena atau realitas dalam masyarakat yang dipertautkan dengan teks (ayat) untuk menemukan solusi terhadap berbagai problematika kehidupan.

Majid Khadduri sebagaimana dikutip Mahmutarom, mengemukakan bahwa dalam kaitan hubungan sesama manusia yang berpegang pada prinsip keadilan harus didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, toleransi dan persaudaraan.[313] Dalam kaitan ini Mahmutarom menerangkan:

> ”Prinsip persaudaraan dan persamaan merupakan fondasi dalam tata pergaulan yang paling mendasar dan lebih penting ketimbang prinsip kebebasan, karena kebebasan yang ada pada masing-masing pribadi

---

[312] M. Quraish Shihab,2009, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al_Qur’an*, (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, hlm. 596 dalam Abdul Wahid Haddade,*Ibid*.

[313] Majid Khadduri,1984, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, hlm.39, dalam Mahmutarom, HR., 2009, *Op.Cit.*, hlm. 60.

> hendaknya diterapkan dalam suasana kebersamaan dan persaudaraan serta sangat toleransi yang tidak hanya sebagai dasar moral, tetapi juga menjadi kewajiban agama. Oleh karena itulah, dalam peradilan Islam prinsip rekonsiliasi atau yang dikenal dengan istilah *islah* menjadi landasan utama sebagai bentuk keadilan yang substansial."[314]

2.3. **Hak-Hak Korban dalam Instrumen Hukum Internasional**

Negara-negara terbelakang dan berkembang yang memiliki sumber kekayaan alam menjadi korban ekspansi negara-negara barat untuk menjadikan wilayah pemasaran brang-barang produk hasil industrinya dan mengeksploitasi sumber kekayaan untuk kepentîngan industri-industrinya. Kondisi negara-negara yang dikuasai tersebut, terlantar dan terhambat dalam pembangunan, sehingga menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, kebodohan dan menimbulkan penyakit penyakit bagi masyarakatnya. Bagi sebagian masyarakat bekerja dan dimanfaatkan oleh negara yang penguasa, maka mereka dapat hidup setara dengannya dengan menikmati kekayaan. pendidikan dan kesehatan yang gratis.[315].

Sebagian masyarakatnya memperjuangkan hidupnya dengan gigih menuntut kepada negara yang menguasai untuk melakukan pembangunan dalam segala aspek kehidupan pada masyarakat negara yang dikuasai dengan diberikan hak merdeka untuk dapat melakukan pembangunan sendiri. Perjuangan tersebut ada yang melalui diplomasi dan ada yang melalui kekerasaan. Negara yang menguasai melakukan tindakan tindakan tegas dengan melakukan penangkapan

---

[314]Mahmutarom, HR., 2009, *Iibid*.

[315] *United Nations*.1991, *The United Nations and Crime Prevention, New York : United Nations*, hlm. 2 dalam Abdul Salam, Adri Desasfuryanto, 2016,*Victimology (Ilmu Tentang Korban)*,Jakarta:PTIK, hlm.48.

dan penahanan terhadap mereka yang menuntut hak merdeka yang ditahan pada rumah-rumah tahanan yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dan dilakukan penyiksaan-penyiksaan serta perlakuan tidak masnusiawi. Sebagian masyarakat dimanfaatkan oleh negara-negara yang menguasai menjadikan pekerja kasar/buruh/budak tanpa mendapatkan gaji/upah untuk melakukan pekerjaan pada pabrik, industri-industri, perusahaan-pcrusahaan dan perkebunan-perkebunan milik negara yang menguasai, dengan mendapat perlakuan tidak manusiawi. Sebagian masyarakat pada negara yang dikuasai dalam hidupnya penuh penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan untuk mempertahankan hidup mereka melakukan tindak pidana konvensional, *illegal logging*, penyeludupan, privasi, *illegal mining*, dan *invironmentcrimes*, perdagangan narkoba, perjudian, pelacuran/ prostitusi, pemabukan dan lain-lain tindak pidana yang menimbulkan keresahan-keresahan, ketakutan, ketidakamanan, dan ketidaktertiban. Pelaku-pelaku tindak pidana tersebut dilakukan penangkapan dan penahanan serta diproses hukum tuntas sampai menjadi narapidana dengan mendapat perlakukan tidak manusiawi.[316].

Hasil penelitian para pakar internasional tersebut di atasbahwa tindak pidana yang terjadi bukan semakin menurun bahkan semakin meningkat, sehingga menghambat pembangunan, menghambat perekonomian dan perdagangan dan kepariwisataan pada negara-negara yang menjadi korban perang/penyerangan. Padahal di negara-negara tersebut sudah terdapat sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan serta aturan-

[316] *United Nations,Ibid.,* dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto *Ibid*.,hlm.48-49.

aturan hukum pidana, bahkan tindak pidana-tindak pidana telah terorganisir telah memiliki jaringan-jaringan yang canggih dan beroperasi di berbagai negara-negara dalam melakukan tindak pidana penyeludupan, *piracy*, *trafficking of human* (perdagangan manusia), penadahan barang-barang curian, perjudian illegal, prostitusi, pemerasan, rentenir/ lintah darat yang dijalankan secara bisnis modern dan para pejabat pemerintah secara rutin disuap.[317].

Kelompok-kelompok kriminal yang beroperasi dalam skala luas dan menikmati keuntungan yang luar biasa serta mampu mempergunakan teknologi muktahir dengan memanfaatkan aparat keamanan resmi untuk melindunginya serta memantapkan struktur-struktur organisasi dan manajemen perusahaan modern. Dalam banyak kasus kemampuan mereka melebihi kemampuan resmi untuk pengendalian sosia1.[318] Pihak yang menjadi korban adalah individu-individu, masyarakat bangsa, negara dan lingkungan hidup. Pada awal abad 20, bermunculan negara-negara, bangsa-bangsa dan pemerintah nasional baru. Berbarengan dengan hal itu terjadi kodifikasi perundang-undangan yang memberikan batasan perilaku kriminal pada tingkat nasional, negara bagian, propinsi dan kota-kota.[319]

Untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan korban tindak pidana bagi individu, masyarakat, lingkungan hidup maupun bangsa dan negara dari pelaku pelaku tindak pidana tersebut di atas, pada tahun 1919 dibentuk *The League of Nations* (Liga Bangsa-Bangsa) dan tahun 1920 dibentuk *The Permanent Court of International Justice sebagai World Court* merupakan

[317] *United Nations,Ibid.,* dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid*.,hlm.49.
[318] *United Nations,Ibid.,* dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid.*
[319] *United Nations,Ibid.,* dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid*.hlm.49-50.

landasan untuk pengembangan standar-standar pengadilan internasional bagi korban tindak pidana tersebut di atas. Para pendiri Liga Bangsa-Bangsa mengatur perilaku negara-negara dengan cara yang kurang lebih sama dengan perilaku invidual melalui hukum pidana dan hukum sipil. Upaya Liga Bangsa-Bangsa tenggelam dan kandas dengan terjadinya perang dunia ke II dengan berakhirnya perang dunia ke II, maka dibentuk *The United Nations* (PBB).[320].

Keputusan yang dihasilkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa yang pertama adalah *The Control and Prevention of Crime* dan menolak untuk menerima *afiliasi The Internasional Penal and Penitentcary Commission* (IPPC). Dan pada tanggal 1 Desember 1950 IPPC dibubarkan, tetapi fungsi-fungsi dan arsip-arsipnya diambil alih oleh PBB. Dengan usaha keras PBB, agar semua negara atau dunia percaya bahwa kerjasama internasional itu membawa manfaat maka tugas yang diberikan juga bertambah dengan cakupan kepeduliannya terhadap pencegahan kejahatan dan penggulangan kejahatan. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana, maka PBB mulai menetapkan standar-standar sehingga negara- negara dapat menilai praktek-praktek mereka sendiri dalam mengadili pelaku tindak pidana baik untuk memastikan agar hak-hak asasi manusia dihormati dan untuk meningkatkan hasil guna dalam menanggulangi tindak pidana.[321]

PBB meminta perhatian kepada negara-negara untukmemberikan sanksi-sanksi pidana yang sangat berat kepada tindak pidana kerusakan dengan sengaja atas lingkungan alam, organisasi tindak pidana dan terorisme internasional,

---

[320] *United Nations,Ibid.*hlm..5, dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid*.hlm.50.
[321] *United Nations,Ibid.*, dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid.*

penghancuran atau pengiriman tidak sah atas harta arkeologis nasional, kelalaian korporasi bisnis yang berdampak merugikan tindak-tindak pidana terhadap kedamaian dan keamanan umat manusia.[322]

Kongres-kongres dan konvens-konvensi PBB menunjukan adanya peningkatan kesadaran terhadap struktur penyebab tindak pidana (*the structural causes ofcrime*) dan kebutuhan akan tindakan-tindakan untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi korban (baik individu, masyarakat, maupun bangsa dan negara) yang selama ini menumbuhsuburkan perilaku kriminal (*criminal behaviour*). Pemahaman ini secara implisit mengandung pula kesadaran bahwa korban harus mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan tindak pidana merupakan suatu hambatan pengembangan ekonomi sosial secara nyata. Tindak pidana mengalihkan energi dan sumber daya dari usaha-usaha yang konstruktif merendahkan martabat manusia melalui perdagangan obat bius dan penyalahgunaan narkotika dan pelacuran. Tindak pidana juga menempatkan aktifitas sektor perekonomian yang besar diluar pengaturan negara dan tanpa membayar pajak yang sangat merugikan korban. Tindak pidana telah pula memerosotkan kredilitas dan kemampuan pemerintah dengan perusak para pejabat penyelenggara negara melalui korupsi. Untuk menyelamatkan korban (baik individu, institusi, masyarakat bangsa dan negara) dari tindak pidana tersebut, maka PBB lalu mengembangkan strategi-strategi yang lebih efektif untuk

[322] Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid.*

menempatkan perencanaan pencegahan tindak pidana dan pengadilan pidana dalam kerangka perencanaan sosial ekonomi secara penyeluruhan.[323]

Kongres PBB ke-1, diselenggarakan di Genewa pada tahun 1955 yang membahas tentang *The Prevention of Crimeand The Treatment of Offenders yaitu The Treatment of Offenders and Juvenile Deliquency*. Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap para pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana merupakan noda hitam yang sangat membekas pada peradaban sepanjang sejarah umat manusia. Sehingga hal ini merupakan isinya yang tajam setelah berakhirnya perang dunia ke 2. pada tahun-tahun yang tidak menentu sesudah perang dunia ke 2 itu begitu juga banyak bekas kerusakan akan pelanggaran hukum oleh para remaja yang diungkapkan secara jelas dalam studi-studi, novel, film dan tv dokumenter yang tak terhitung banyaknya. Hasil penelitian para pakar menunjukan permasalahan kenakalan remaja merupakan korban pemerintah yang kurang menyediakan sarana pendidikan umum, pendidikan agama, sarana olahraga dan rekreasi serta ikatan keluarga orang tua dan anak tidak harmonis dan berantakan dalam keadaan broken home. Dengan adanya kesenjangan sosial tersebut menimbulkan perilaku criminal harus *di atas*i dan harus mempunyai pandangan dan pemahaman yang lebih, menyeluruh atas sebab-sebab dan akibat-akibat tindak pidana.[324]

Kongres PBB ke-2 diselenggarakan di London pada tahun 1960. jumlah peserta meningkat dengan adanya pertambahan negara merdeka baru. Kongres tersebut dihadiri oleh utusan dari 70 negara disertai utusan dari 50 LSM yang

[323] *United Nations,Op.Cit.*, hlm.6 dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid*. hlm.50-51.
[324] Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid*. hlm.51-52.

ternjadi agenda kongres adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja sebagai korban kurang kepedulian pemerintah dan keluarga kepada remaja sebagai asset masa depan nkeluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta dunia. Oleh karena itu PBB dalam kongres ke 2 lebih mengutamakan membahas wadah bentuk-bentuk baru yang sedang muncul dari kenakalan remaja, asal-usul mereka pencegahan dan penangannya kemungkinan kemungkinan dibentuknya kekuatan polisi khusus untuk pencegahan pelangaran pidana oleh negara dan dampak dari media massa. Untuk semua prilaku tuna sosial dari para remaja diperdebatkan dengan mereka yang membedakan antara kaum muda yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma sekitarnya dan kaum muda yang melakukan tindak pidana secara langsung untuk alasan-alasan yang jelas. Oleh karena itu, dalam pembahasan kenakalan remaja hanya dibatasi dengan pelanggaran hukum pidana dan tidak mencakup sikap-sikap anti sosial dengan proses menuju kedewasaan. Dengan analisis tindak pidana dan peradilan pidana dalam kriteria dengan pembangunan nasional secara menyeluruh. Dengan pengkajian kaitan antara pembangunan sosial, ekonomi dan pencegahan tindak pidana dalam perspektif data yang ada mengenai demografi, lingkungan, ekonomi, kebudayaan, perencanaan kota, industrialisasi dan imigrasi. Pada utusan negara di PBB menyadari bahwa perubahan-perubahan yang cepat dalam bidang ekonomi dan kebudayaan tidak terbatas pada negara-negara yang baru merdeka saja. Pembahasan tersebut juga diperluas menyentuh pada kondisi kondisi di negara maju.[325]

[325] *United Nations, Op.Cit.*, hlm.19 dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid.* hlm.52.

Kongres PBB ke-3 diselengarakan di Stockholm, Swedia pada tahun 1965 dengan tema: ”*Prevention Of Criminality*”. Topiknya mencakup kelanjutan perubahan pada kongres ke II, yaitu :[326]

- Perubahan sosial dan tindak pidana
- Kekuatan kekuatan sosial dan penegakkan tindak pidana
- Tindakan pencegahan oleh masyarakat sebagai korban tindak pidana
- Tindakan tindakan untuk memotong residivisme (*measures to curtail*)
- Kebijaksanaan kebijaksanaan sosial (*probation policies*)
- Program program pencegahan serta penanganan khusus bagi remaja pemuda yang merupakan lapisan masyarakat/ penduduk yang paling rawan terhadap tindak pidana.

Kongres PBB ke-4 diselenggarakan di Kyoto Jepang pada tahun 1970. yang dihadiri oleh 85 perwakilan pemerintahan negara dengan judul "*crimes and developrnent*", kesimpulan kongrcs yang dihasilkan: bahwa kebutuhan akan pencegahan tindak pidana dan tindakan-tindakan pencegahan, hanya dapat dengan melakukan kebijakan-kebijakan ketahanan masyarakat yang harus dimasukan dalam perencanaan pembangunan nasional masing-masing negara. Permasalahannya adalah bagaimana menangani secara efektif aspek-aspek pembangunan yang beraneka ragam untuk mencapai pertumbuhan ekonomi standar kehidupan yang lebih tinggi, namun dapat berhasil pula menurunkan tindak pidana dan kenakalan remaja sekaligus. Meskipun demikian. ditekankan bahwa pengembangan integrasi masyarakat dan ekonomi sebagai suatu cara

[326] Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid.* hlm.52-53.

pencegahan tindak pidana, dapat menimbulkan kesan negatif bagi masyarakat luas, bahwa tindak pidana hanya dapat ditanggulangi dengan menyediakan layanan-layanan masyarakat secara memadai.[327]

Kongres PBB ke-5 diselenggarakan di Genewa pada tahun 1975 yang dihadiri sebanyak 101 negara dan badan-badan khusus Interpol, IPPC dan *The Organitation For Ekonomic Cooperation and Development (OECD)* dengan tema: *Crime Prevention and Control The Challenge Of The Last Quarter of The Century* (pencegahan tindak pidana dan pengawasan tantangan perempat abad terakhir abad XX). Persoalan-persoalan yang dibahas mencakup hal-hal:[328]

a. Perubahan bentuk dimensi dan kriminalitas baik tingkat nasional maupun internasional.
b. Tindak pidana korporasi dan tindak pidana terorganisasikan.
c. Peran undang-undang pidana, prosedur peradilan dan bentukbentuk pengawasan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana.
d. Pengembangan kegiatan pencegahan tindak pidana dan hal-hal yang terkait dengan penegakkan hukum adat serta peran polisi dan lembaga-lembaga penegakkan hukum lainnya.
e. Perlakuan terhadap para pelaku tindak pidana yang ada dalam tahanan atau di masyarakat, dengan rujukan kepada penerapan aturan standar mininum.
f. Akibat-akibat sosial ekonomis dari tindak pidana (termasuk biaya tindak pidana) dan tantangan baru untuk riset dan perencanaan.

---

[327] *United Nations, Op.Cit.,* hlm.21 dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid.*
[328] Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid.* hlm.53-54.

g. Alkohol dan penyalahgunaan obat bius (*alcohol and drugs abuse*).
h. Kompensasi bagi korban tindak pidana sebagai penggantian retributive dalam peradilan pidana.

Dalam kongres tersebut menghasilkan dua dokumen, yaitu: Dokumen 1:" *An attempt to eliminate an age old abuse of pouter throught a declaration on the protection of all person from being subjected to torture an other cruel, in human or degrading treatment or anisment* atau (percobaan untuk menghapuskan masalah klasik, yaitu penyalahgunaan kekuasaan melalui "Deklarasi perlindungan semua orang terhadap penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tak manusiawi dan merendahkan martabat), dengan materi sebagai berikut :[329]

Setiap penyiksaan dan tindakan atau hukuman yang kejam, tak manusiawi atau merendahkan martabat kemanusiaan merupakan pelanggaran terhadap keluhuran manusia dan pelanggaran yang hakiki terhadap hak-hak asasi manusia. Tidak satu negara pun boleh mengijinkan atau mentolerir penyiksaan dan tindakan atau hukuman yang kejam, tak manusiawi atau merendahkan martabat kemanusiaan. Keadaan-keadaan istimewa, termasuk keadaan perang, ketidakstabilan politik dalam negeri atau kegawatan umum, tidak dapat dipakai sebagai pembenaran atas tindakan-tindakan demikian.[330]

Pelatihan personil penegakan hukum dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas orang-orang yang diambil kebebasannya, harus dapat meyakini bahwa semua tindakan telah dilakukan tidak berupa penyiksaan dan tindakan atau hukuman yang kejam, tak manusiawi atau merendahkan martabat

[329] *Ibid*., hlm.54.
[330] *Ibid*.

kemanusiaan. Setiap negara harus meninjau kembali secara sistematis cara-cara integrasi dan pengaturan-pengaturan untuk penahanan dan perlakuan terhadap para narapidana guna menghindarkan kasus-kasus penyiksaan dan tindakan atau hukuman yang kejam, tak manusiawi atau merendahkan martabat kemanusiaan.[331]

Setiap negara harus memastikan bahwa semua tindakan kekejaman merupakan pelanggaran hukum pidana juga tindakan berupa ikut serta dalam kerja sama pada dan dorongan melakukan percobaan penyiksaan, setiap orang yang menyatakan dirinya telah disiksa dan memperoleh perlakuan atau hukuman yang kejam, tak manusiawi dan merendahkan martabat manusia oleh pejabat pemerintah dan/ atau didorong oleh pejabat pemerintah harus diberi hak untuk mengajukan pengaduan dan kasusnya diperiksa oleh para pejabat negara yang berwenang manakala ada alasan-alasan yang masuk akal untuk mempercayai terjadinya suatu tindakan penyiksaan, para pejabat yang berwenang harus melakukan penyelidikan yang netral, meskipun belum ada pengaduan yang resmi.[332]

Kalau hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa telah terjadi tindakan penyiksaan, maka harus diambil tindakan sesuai ketentuan-ketentuan pidana. Kalau tuduhan terhadap bentuk-bentuk tindakan atau hukuman yang kejam, tak manusiawi atau merendahkan martabat kemanusiaan lainnya dipandang cukup berdasar maka harus diambil tindakan baik berupa dukungan pidana, disiplin atau tindakan yang tepat lainnya.[333]

---

331 . *Ibid.*
332 *Ibid*., hlm.55.
333 *Ibid.*

Korban atas penyiksaan dan tindakan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat kemanusiaan harus diberi restitusi dan kompensasi yang diatur dengan undang-undang. Suatu perintah dari perwira atasan atau seorang pejabat pemerintah tidak boleh dipandang sebagai pembenaran untuk penyiksaan. Tidak satu negara pun boleh mengusir, mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara lain, kalau terdapat cukup petunjuk bahwa orang tersebut akan terancam penyiksaan di negara lain tersebut.[334]

Dokumen Kedua "*The Code of Conduct for Law Enforcement Official*", (pedoman cara bertindak bagi para pejabat penegak hukum), dengan materi sebagai berikut: para penegak hukum harus melaksanakan kewajiban yang diletakkan pada pundak mereka oleh hukum dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap tindakan-tindakan pelanggaran hukum. Pelayanan kepada masyarakat mencakup bantuan kepada mereka yang karena sebab pribadi, ekonomi, sosial dan alasan mendesak lainnya memerlukan bantuan negara. Perlindungan terhadap tindakan-tindakan pelanggaran hukum meliputi seluruh larangan-larangan menurut perundang-undangan pidana dan sampai kepada perilaku orang-orang yang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan tindak pidananya (mabuk, sakit jiwa dst).[335]

Para penegak hukum hanya boleh mempergunakan kekuatan jika sungguh-sungguh diperlukan dan hanya sebatas yang dituntut tuntuk kelancaran pelaksanaan tugasnya. Pemakaian senjata api dianggap sebagai tindakan *ekstrim*,

---

[334] *United Nations, Op.Cit.*, hlm.85-86 dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid.*
[335] Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid.*

tidak boleh dipergunakan, kecuali ketika tersangka melakukan perlawanan bersenjata atau membahayakan kehidupan orang Iain. Hal-hal rahasia yang dipegang para penegak hukum harus dijaga kerahasiannya, kecuali kalau sungguh diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas atau diperlukan oleh pengadilan. Tidak seorang penegak hukum pun boleh melakukan, mendorong atau mentolerir tindakan penyiksaan dan tindakan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat kemanusiaan. Para penegak hukum tidak boleh melakukan tindakan korupsi/ kolusi apapun dan harus dengan keras melawan semua tindakan yang sedemikian.[336]

Para penegak hukum harus menghormati undang-undang dan pedoman prilaku ini, dan berusaha sekuat mungkin untuk menghindarkan dan melawan setiap pelanggaran ketentuan ini. Kalau mereka yakin bahwa telah terjadi atau akan terjadi suatu pelanggaran terhadap pedoman perilaku ini, mereka wajib melaporkan hal itu ke atasannya, dan bila perlu kepada para pejabat atau badan-badan pemerintah lain. Sebagai upaya terakhir sesuai dengan perundang-undangan dan kebiasaan negara masing-masing mereka dapat mengutarakan pelanggaran-pelanggaran tersebut kepada media massa. Para penegak hukum yang menjalankan pasal-pasal dari pedoman ini pantas dihormati dan memperoleh dukungan serta dukungan dari masyarakat dan badan penegak hukum tempat pengabdian mereka.[337]

Kongres PBB ke-6 yang diselenggarakan di Caracas pada tahun 1980, yang dihadiri oleh 102 negara, ILO, WHO, Dewan Eropa, Interpol Liga Arab,

---

[336] Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid.*
[337] *United Nations, Op.Cit.*, hlm.87-88 dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid.* hlm.56.

Organisasi Persatuan Afrika, Organisasi PAN Arab, untuk pertahanan sosial, PLO, Organisasi Rakyat Afrika Barat (SWAPO), Kongres Nasional Afrika (ANC) dan Kongres PAN Afrika dan Azionia: Tema kongres ke enam: *Crime Prevention and The Quality of Life* (pencegahan tindak pidana dan mutu kehidupan). Dielaborasi keberhasilan sistem peradilan pidana dan strategi untuk pencegahan tindak pidana, khususnya dalam menghadapi pertumbuhan bentuk-bentuk tindak pidana yang baru dan canggih serta kesulitan yang dihadapi dalam penyelenggaraan peradilan pidana, tergantung pertama-tama pada kemajuan yang dicapai diseluruh dunia dalam memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan mutu kehidupan. Masalah-masalah yang dibahas adalah:[338]

a. Kecenderungan-kecenderungan baru dalam tindak pidana dan penerapan strategi-strategi pencegahan tindak pidana yang sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah peradilan kenakalan remaja sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana remaja.
b. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang berpengaruh, yang sering kebal terhadap hukum.
c. Penerapan kaidah-kaidah penghukuman dan implikasinya terhadap mereka yang dipenjara.
d. Petan pedoman dan standar-standar PBB dalam peradilan pidana sejak, sejak itu dijadikan standar sampai penerapannya.
e. Hukuman berat.
f. Pentingnya kerja sama internasional.

[338] Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid*.,hlm.56-57.

Pengembangan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana, perbaikan statistik tindak pidana dan penjahat dan penghapusan praktek eksekusi/ pembunuhan di luar peradilan (kasus-kasus penembakan misterius). Yang dipandang sebagai tindak pidana yang mengerikan dan menyalahgunakan kekuasaan kelompok ahli menganjurkan agar ahli-ahli peradilan pidana diikutsertakan dalam dewan perencanaan pembangunan nasional dan pendirian lembaga untuk kerjasama internasional di masing-masing negara anggota juga diusulkan pendekatan inovatif terhadap usaha untuk menentukan jenis- jenis tindakan yang keras diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Kelompok kerja berpendapat bahwa natara pembangunan dan tindak pidana terdapat hubungan dengan saling berpengaruh yang melahirkan kriminalisasi dan sekaligus diskrminalisasi. Untuk itu masalah pasal-pasal Undang-undang Hukum Pidana harus diperluas, mencakup tindakan-tindakan disengaja yang merusak kekayaan alam dan kesejahteraan nasional, misalnya pelanggaran-pelanggaran terhdap lingkungan hidup dan keterlibatan dalam jaringan peredaran obat bius serta perdagangan manusia.[339]

Kongres PBB ke-7 diselenggarakan di Milano, Italia pada tahun 1985 dihadiri oleh 125 pemerintahan dari para Menteri Kehakiman dan Dalam Negeri, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Pimpinan Pengacara, Hakim Agung, Direktur Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Kepolisian Negara. Pembahasan permasalahan terbagi dalam 5 kategori utama:[340]

---

[339] *United Nations, Op.Cit.*, hlm.18-20 dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid*. hlm.57.
[340] Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid*.,hlm.57-58.

Topik 1 : Dimensi-dimensi baru tindak pidana dan pencegahan tindak pidana dalam konteks pembangunan terhadap kaitan antara kebijakan perkembangan sosial dan sistem-sistem peradilan pidana. Penipuan dan tindak pidana dalam perdagangan internasional dan transfer uang merupakan salah satu bidang yang mendapatkan perhatian utama.

Topik 2 : Proses peradilan pidana dan pandangan-pandangan dalam dunia yang sedang berubah meliputi kebutuhan untuk merevisi, memperbaharui atau menegaskan kembali bekerjanya sistem-sistem peradilan pidana.

Topik 3 : Korban-korban tindakak pidana mengemukakan hak-hak korban tindak pidana dan penyalahgunaan kekerasaran kompensasi dan rancangan restitusi serta cara-cara membantu mereka melalui sistem peradilan.

Topik 4 : Kaum muda, tindak pidana dan keadilan memperluas ruhi dasar PBB terhadap para remaja yang merupakan pelanggaran tindakan terbesar.

Topik 5 : Perumusan dan penerapan standar dan norma PBB dalam peradilan pidana, berisikan suatu revişi atas nilai dari instrumen-instrumen PBB dalam bidang peradilan pidana dan seberapa jauh penerapanmya di negara-negara anggota.

Kongres mencapai mufakat bulat terhadap enam instrumen-instrumen internasional yang utama untuk menetapkan norma dan standar, yaitu:

a. Rencana tindakan Milano, yang menyerukan tanggapan yang terpadu dari masyarakat bangsa-bangsa untuk memberikan perhatian kepada faktor-faktor sosial ekonomi yang relevan terhadap terjadinya tindak pidana.

b. Prinsip-prinsip pedoman untuk pencegaham tindak pidana dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan.
c. Aturan standar minimum PBB untuk penyelenggaraan peradilan kenalan remaja.
d. Deklarasi prinsip keadilan hak asasi untuk korban tindak pidana dan penyalahgunaan kekuasaaan.
e. Prinsip asasi tentang kebebasan badan peradilan.
f. Persetujuan model transfer narapidana asing dan rekomendasi tentang perlakuan terhadap narapidana asing [341]

Dalam prinsip-prinsip pemandu untuk penegakan tindak pidana dan sistem peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan tata ekonomi baru, menguraikan materi, sebagai berikut: kebijakan-kebijakan untuk pencegahan tindak pidana dan sistem peradilan pidana perlu mempertimbangkan penyebab-penyebab struktural dari ketidakadilan, termasuk sebab-sebab di bidang ekonomi. Perlu diteliti arah dan pendekatan baru yang berkaitan dengan konsep, tindakan, prosedur dan lembaga-lembaga yang berhungan dengan penanganan tindak pidana. Negara-negara anggota perlu menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan pembangunan negara-negara lain dan seyogyanya saling membantu dalam pencegahan tindak pidana dan upaya-upaya perbaikan peradilan pidana. Pencegahan tindak pidana sebagai sesuatu kegiatan global dalam menyelamatkan korban hendaknya tidak diarahkan kepada tindak pidana yang biasa, tetapi harus tertuju pada tindak pidana tindak pidana yang sangat

[341] *United Nations, Op.Cit.*, hlm.26 dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid.*, hlm.58.

merugikan, seperti : tindak pidana ekonomi, perusakan lingkungan hidup, perdagangan obat bius, terorisme, *apartheid* dan tindak pidana berat lainnya.[342]

UU yang mengatur perusahaan perlu selalu diperbaiki, diperbuat dan disesuaikan dengan kebutuhan serta perlu ada kebijakan yang mantap atas kasus-kasus kompleks dari tindak pidana ekonomi dengan memperhatikan keputusan para hakim yang banyak menangani masalah bisnis. Negara-negara perlu memberi perhatian khusus, agar lembaga-lembaga maupun orang-orang yang diberi tugas untuk menangani tindak pidana bertanggung jawab penuh. Hukuman yang lebih sesuai untuk tindak pidana ekonomi harus secepatnya diadakan, apabila tindakan-tindakan yang sudah ada dirasakan tidak seimbang lagi dengan beratnya pelanggaran yang telah terjadi. Hukuman-hukuman ekonomi harus diberi peringkat untuk memastikan bahwa mereka patut dijadikan contoh secara sepadan baik bagi penjahat, baik yang berasal dari kaum miskin maupun kaya raya, perlu diambil tindakan khusus agar para korban tindak pidana di berikan perlindungan hukum yang efektif, termasuk kompensasi untuk kerusakan-kerusakan yang terjadi karena tindak pidana. Strategi-strategi pencegahan tindak pidana perlu dirumuskan, sesuai dengan konteks sosial ekonomi, tingkat perkembangan masyarakat, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan setempat.[343]

Sistem hukum termasuk peradilan pidana, harus mampu mendorong dan mengembangkan pembangunan secara berimbang dan bermanfaat sambil melindungi hak asasi manusia dan memajukan keadilan sosial, perbaikan dalam efektifitas pencegahan tindak pidana dan kebijakan untuk peradilan pidana perlu

---

[342] Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid*.,hlm.58-59.
[343] Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid*.,hlm.59.

didorong dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan proses penahanan/ pemidanaan serta dukungan peradilan. Kesamaan, keadilan dan keseimbangan dalam proses-proses penegakan hukum, penuntutan, penjatuhan, pemidanaan dan perlakuan pada tindak pidana perlu dijaga, agar dapat terhindar dari praktek diskriminasi berlatar belakang soal ekonomi, budaya, etnis, kewarganegaraan atau politik, seks atau harta. Kerjasama internasional hendaknya tidak lamban dan harus lebih efektif dalam bidang-bidang seperti ekstradisi para penjahat, bantuan investigasi, peradilan dan pengiriman narapidana-narapidana asing, kerjasama teknis dan ilmiah perlu ditingkatkan.[344]

Prinsip-prinsip dasar pengadilan dengan menguraikan materi sebagai berikut: pengadilan harus memutuskan perkara-perkara dengan tidak memihak, dengan dasar fakta sesuai denagn undang-undang, tanpa ada pengaruh atau tekanan yang tidak semestinya. Setiap orang harus mempunyai hak untuk diadili oleh pengadilan negeri atau pengadilan tinggi dengan mempergunakan prosedur-prosedur hukum yang sudah mantap. Pengadilan tinggi yang tidak mempergunakan prosedur prosedur hukum yang sudah mantap tidak boleh didirikan sebagai pengganti yurisdiksi pengadilan negeri. Para anggota badan peradilan, seperti halnya para warga negara lainnya, mempunyai kebebasan mengutarakan pendapat, keyakinan, berserikat dan berhimpun, namun para hakim harus selalu bertindak terbaik, guna mempertahankan martabat nilai keadilan, kenetralan dan kebebasan pengadilan.[345]

---

[344] *United Nations, Op.Cit.,* hlm.93-95 dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid*. hlm.59-60.

[345] *United Nations,Ibid.*, hlm.97 dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid*., hlm.60.

Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban tindak pidana dan penyalahgunaan kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice Victims of Crime and The Abuse of Power*) dengan menguraikan materi sebagai berikut: korban tindak pidana harus diperlakukan dengan penuh perhatian dan rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi. Mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan sisahkan untuk memungkinkan korban tindak pidana memperoleh ganti rugi. Korban tindak pidana harus diberi informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasusmereka. Penderitaan dan keprihatinan korban tindak pidana harus selalu ditampilkan dan disampaikan pada setiap tingkatan proses. Harus ada usaha mencegah penundaan proses dan kondisi yang membuat korban merasa tidak nyaman, menjamin privasi mereka, serta melindungi mereka dari intimidasi dan balas dendam. Pelaku kenakalan, jika mungkin diharuskan memberi ganti rugi kepada korban tindak pidana atau keluarganya, apabila pejabat pemerintah yang melakukan tindak pidana, negara harus bertanggung jawab atas pemberian ganti ruginya. Jika ganti rugi yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku kenakalan, dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, negara berkewajiban mengganti rugi kepada korban tindak pidana atau keluarganya, Korban tindak pidana harus menerima bantuan materi, medis, psikologis dan sosial yang cukup dari pemerintah atau sukarelawan. polisi, pengadilan, panti sosial dan orang lain yang terlibat penanganan korban tindak pidana, harus diberi latihan yang cukup untuk

mempertajam kepekaan mereka terhadap kondisi korban tersebut, negara harus selalu berusaha merumuskan undang-undang nasional yang mencantumkan norma-norma yang melarang penyalahgunaan kekuasaan, termasuk kekuasaannya politik dan ekonomi. Negara harus menyediakan fasilitas pemulihan bagi korban-korban penyalahgunaan tersebut termasuk ganti rugi dan kompensasi lain.[346]

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The sevent United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders,* yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.[347]

Sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam deklarasi PBB tersebut telah menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut:[348]

1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diberlakukan secara adil (*accses to justice and fair treatment)*;
2. Pembayaran ganti rugi (*restitution)* oleh pelaku tindak pidana pada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskkan dalam bentuk

---

[346] *United Nations,Ibid.,* hlm.107-108 dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid.* hlm.60-61.

[347] Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm. 177.

[348] Muladi, 24 Februari 2004, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang,* Pidato Pengukuhan Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 26.

sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;

3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensasion)*, finansial kepada korban keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
4. Bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik memalui negara, sukarelawan, masyarakat (*assistance)*.

Dalam deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu:

a. *acces to justice and fair treatment*
b. *restitution*
c. *compensation*
d. *assistance* [349]

Kongres PBB ke-8 diselenggarakan di Havana, Kuba pada tahun 1990, dihadiri oleh 1400 peserta dari 127 negara. Temanya adalah "*Crime Prevention and Criminal Justice"* hasil kesepakatan dalam kongres dan mengesahkan dan merekomendasi dan prinsip sebanyak lima model perjanjian, yaitu :[350]

1. Model perjanjian ekstradisi, bahwa sebuah negara diijinkan untuk mengadili warga negaranya sendiri atas pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan di negara lain, yang tidak memungkinkan dilakukannya ekstradisi. Perjanjian itu juga mengakomodasikan kebutuhan untuk penyerahan sementara agar dapat diadili dinegara lain dan pemulangannya kembali untuk menjalani

[349] Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm. 58.
[350] *United Nations, Op.Cit*.,.hlm..30-31, dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Op.Cit*.,.hlm.61-63.

putusan pengadilan yang telah dijatuhkan. Hal ini memungkinkan negara-negara untuk menangani secara lebih efektif para pelaku tindak pidana yang terorganisir dan tindak pidana transnasional termasuk perdagangan obat bius.

2. Model perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah tindak pidana. Dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama saling membantu di antara negara-negara anggota dalam menangani tindak pidana transnasional yang serius. Termasuk di dalamnya adalah saling membantu dalam hal berita acara. Dalam persetujuan tersebut negara-negara dapat saling menyepakati untuk pendaftaran denda asing, hukuman uang dan pencabutan perintah, jaminan dalam kaitan dengan harta dan milik yang merupakan hasil tindak pidana, penerapan untuk perintah penangkapan sementara dan pencatatan surat-surat perintah penangkapan dan penerapan untuk memonitor dan perintah yang berkaitan dengan rekening di lembaga-lembaga keuangan dan dokumen-dokumen yang menyangkut arus uang. Manfaat dari tindakan ini antara lain munculnya rasa takut, karena keuntungan yang diperoleh dari tindakan-tindakan tindak pidana dapat disita dan akses yang lebih luas kepada tindak pidana.
3. Model perjanjian penyerahan berita acara dalam masalah pidana negara-negara melalui perjanjian ini memperoleh jalan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang muncul karena orang yang harus diekstradisikan adalah warga negara dari negara yang dimintakan ekstradisi, dengan model ini negara yang meminta dapat menyerahkan berita acara pidananya untuk memastikan bahwa pelanggar tindak pidana diperlakukan adil. Memetik pengalaman dari

perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral yang sekarang adalah kepentingan dari negara-negara yang terlibat didahulukan, namun demikian kepentingan terdakwa dan korban jangan diabaikan.

4. Model perjanjian penyerahan pengawasan pelaku yang dijatuhi hukuman bersyarat atau dibebaskan bersyarat, menggambarkan jenis-jenis pemindahan dan meliputi berbagai macam permasalahan. Masalah yang diperhatikan secara khusus adalah prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya berkaitan dengan kedaulatan nasional, kriminalitas ganda, hak-hak korban, hukuman tunggal (*ne bis in idem)* penyesuaian dan tanpa pemberantasan. Model yang terus menekankan kerjasama internasional lebih lanjut, juga mempromosikan penggunaan alternatif-alternatif lain selain pemenjaraan, pengurangan jumlah narapidana dan perbaikan atas hunian para narapidana.
5. Model perjanjian untuk pencegahan tindak pidana terhadap warisan bangsa-bangsa dalam bentuk harta yang dapat dipindah-pindahkan, dimulai dengan definisi dari harta budaya yang dapat dipindah-pindahkan. Pengertiannya adalah harta benda yang atas dasar agama maupun alasan umum, seharusnya tidak boleh diekspor karena benda tersebut penting bagi arkeologi, prasejarah, sastra seni atau ilmu pengetahuan. Kemudian dikemukakan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk larangan untuk mengimpor dan ekspor benda budaya yang dicuri ataupun diekspor secara tidak sah dan larangan untuk memilikinya. Model ini juga mengemukakan perlunya diambil tindakan-tindakan untuk pencarian dan pemulangan kembali benda-benda budaya yang dapat dipindahkan tersebut. Akhirnya, model ini juga

mengemukakan sangsi dan menggariskan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang menandatangani persetujuan perhatian khusus, yaitu:

a. Kebijakan dan praktek negara yang dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban perjanjian internasional.
b. Tidak adanya norma khusus mengenai tanggung jawab negara untuk melakukan kewajiban-kewajiban internasional,
c. Penyalahgunaan kekebalan diplomatik.
d. Tidak adanya pengaturan internasional tentang perdagangan senjata,
e. Tidak adanya mekanisme internasional untuk penyelesaian konflik secara damai.
f. Penegakan hak asasi manusia, juga menghimbau adanya keseragaman yang semakin luas dalam perundang-undangan yurisdiksi territorial dan ekstra territorial, serta kerja sama bilateral dan multilateral antara polisi, penuntut umum dan hakim dari negara-negar anggota. Untuk peradilan pidana internasional atau mekanisme internasional lainnya dengan yurisdiksi terhadap pelanggaran-pelanggaran termasuk pelanggaran yang berkaitan dengan terorisme dan perdagangan obat bius dan zat-zat psikotropik. Semua Negara mempunyai kepadulian yang mendesak karena meningkatnya tindak pidana dan bentuk-bentuk baru dari tindak pidana yang terorganissir. PBB seharusnya mampu memainkan peran kunci dalam menanggulangi tindak pidana dan pengembangan kerjasama internasional. Kehadirannya di tempat terdepan dalam upaya-upaya

internasional penting sekali, agar dapat mencapai hasil-hasil yang lebih nyata.

Kongres PBB ke-9 "*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" Kairo tanggal 29 April - 8 Mei 1995 dalam point IV tentang "*Crime Prevention Strategies, in Particular as Related to Crime in Urban Areas and Juvenile and Violent Criminality, Including the Question of Victim: Assessment and New Perspectives*". "Strategi Pencegahan Kejahatan, khususnya yang berkaitan dengan Kejahatan Perkotaan, Kejahatan Remaja dan Kejahatan Kekerasan, Termasuk Pertanyaan tentang Korban: Penilaian dan Perspektif Baru". Pada point 4 dinyatakan, bahwa: *Expresses its concern about the plight ofvictims ofcrime and urges the full use and application of the United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Crime and Abuse of Power and intersified action for the protection of and assistance to victims at the national and international levels, including, training, actionprinted research and on-going information exchange and other means ofcooperation in thisfield*. Mengungkap keprihatinannya tentang penderitaan korban kejahatan dan mendesak menggunakan penuh dan penerapan PBB Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan untuk Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan dan tindakan *intersified* untuk perlindungan dan bantuan kepada korban di tingkat nasional dan internasional, termasuk pelatihan, penelitian tindakan-cetak dan on-akan pertukaran informasi dan cara lain kerjasama di bidang ini.[351]

Rome Statute ofthe International Criminal Court, 7 Juli 1998 merupakan hasil kongres PBB yang telah disepakati dan ditandatangani oleh semua negara-

[351] Ciptono,*Op.Cit*.,hlm.61-62.

negara peserta.[352]*Rome Statute* tersebut sebagai ketentuan Hukum Pidana Internasional yang memuat aspek substansi maupun aspek prosedural, yang didalamnya antara lain diatur tentang *victim* (korban) pada Pasal 75, menyebutkan ganti kerugian kepada korban, sebagai berikut:

1. Pengadilan harus menetapkan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan ganti kerugian kepada korban yaitu restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Pengadilan dalam keadaan luar biasa dapat menentukan lingkup dan luasnya setiap kerusakan dan kerugian yang diderita korban serta menentukan ganti rugi yang harus diterimanya.
2. *Internasional Criminal Court* (ICC) dapat membuat perintah secara langsung kepada terpidana dengan mcmerinci ganti rugi yang layak bagi para korban, yang meliputi restitusi, kompensasi dan rehabilitasi atau memutuskan bahwa pemberian ganti rugi dilakukan lewat *trust fund* yang ditctapkan dalam Pasal 79.
3. Sebelum mengambil keputusan berdasarkan Pasal ini, pengadilan dapat mengundang dan minta mempertimbangan perwakilan yang terhukum, korban atau orang-orang lain yang berhubungan dan menaruh perhatian terhadap nasib korban.
4. Dalam melaksanakan kekuasaanya berdasarkan Pasal ini, pengadilan dapat memutuskan keputusannya berdasarkan Pasal 93 ayat (1)

---

[352] R. Abdusalam,2003, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta : PTIK Press, hlm. 136-137 dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Op.Cit.,* hlm.63-64.

5. Suatu negara peserta harus memberlakukan suatu keputusan berdasarkan Pasal ini dengan memperhatikan Pasal 109.
6. Dalam penerapan pasal ini jangan merugikan hak-hak para korban menurut hukum nasional atau internasional.[353]

Pada Kongres PBB ke-10 "*Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" dalam "Deklarasi Wina Tahun 2000 tentang Kejahatan dan Keadilan: Pertemuan dalam rangka menghadapi tantangan abad ke XXI", dinyatakan kemungkinan pendekatan keadilan restoratif untuk mengurangi kejahatan, perbaikan korban, pelaku dan masyarakat "(*Aware of the promise of restorative approaches to justice that aim to reduce crime and promote the healing ofvictims, offenders and communities).*" [354]

Konverensi PBB diselenggarakan di Merida, Meksiko pada Tahun 2003 oleh semua negara anggota atas kesadaran dan keyakinan bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal tetapi juga merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian, membuat kerjasama internasional untuk mencegah dan mengontrol menjadi penting. Keseriusan problem dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhdap stabilitas dan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kinerja lembaga dan nilai-nilai dari demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengganggu pembanguan yang berkelanjutan dan penegakan hukum untuk itu para negara anggota membuat perjanjian, kesepakatan dan meratifikasi dalam bentuk *United Nation Convention*

[353] Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, 2016, *Ibid.*
[354] Ciptono,*Op.Cit*.,hlm.62-63.

Against Corruption", yang di dalamnya diatur juga mengenai *victim* (korban) pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 35,[355] dengan uraian materi sebagai berikut:

Pasal 32 perlindungan bagi saksi, pakar dan korban:

1. Setiap warga negara anggota akan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan sistem hukum di negerinya dan di dalam metodenya untuk memberikan proteksi yang efektif dari potensi pembalasan atau intimidasi terhadap saksi dan pakar yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang ditetapkan menurut konvensi ini dan selayaknya untuk keluarga dan orang-orang yang dekat dengan mereka.
2. Tindakan yang dimaksudkan dałam Paragraf 1 dari pasał ini, tanpa membeda-bedakan hak terdakwa meliputi hak yang mengacu kepada proses:
   a. Menetapkan prosedur bagi perlindungan fisik untuk orang-orang tersebut, sejauh diperlukan dan memungkinkan, dan bilamana memungkinkan tidak mengungkapkan atau membatasi pengungkapan informasi yang berkaitan dengan identitas dan keberadaan orang-orang tersebut.
   b. Membuatkan ketentuan yang jelas sehingga saksi dan pakar dapat memberikan kesaksian dengan cara tertentu yang menjamin keselamatan orang-orang tersebut, seperti mengijinkan pemberian kesaksian melalui pemanfaatan teknologi komunikasi berupa video atau sarana-sarana.
3. Negara-negara anggota akan mempertimbangkan untuk mengadakan kesepakatan atau perjanjian dengan negara-negara lain untuk merelokasi atau

[355] *United Nations,Op.Cit,*.hlm..17, dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Op.Cit.*,hlm.64-66.

memindahkan orang-orang yang disebutkan di dalam Paragraf 1 dari Pasał ini.

4. Ketentuan didalam Pasał ini juga akan berlaku pada korban selama mereka adalah merupakan saksi.
5. Sesuai dengan hukum di negerinya, setiap anggota akan memberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan keprihatinan korban dan dipertimbangkan pada tahapan-tahapan proses pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan cara yang tidak mendiskriminasi hak-hak dari terdakwa.

Pasał 33 Perlindungan bagi individu pelapor[356] setiap negara anggota akan mempertimbangkan untuk memasukan tindakan-tindakan yang semestinya ke dalam sistem hukum di negerinya untuk memberikan perlindungan terhadap setiap perlakuan yang tidak dapat dibenarkan kepada setiap orang yang melapor dengan niat baik dan dengan landasan pemikiran yang rasional kepada otoritas yang berwenang mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana yang disebutkan didalam konvensi ini.

Pasal 34 mengatur tentang konsekuensi dari tindakan korupsi, dengan memperhatikan hak-hak pihak ketiga diperoleh dengan niat baik, tiap-tiap negara akan mengambil tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum di negerinya untuk mengatasi dampak-dampak dari korupsi. Di dałam konteks ini, negara-negara anggota dapat memperhitungkan korupsi sebagai faktor yang relevan di dałam proses hukum untuk membatalkan atau menarik kembali satu

[356] *United Nations,Ibid.*,hlm..18 dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid*.hlm.65.

kontak, yang menghapus konsesi atau instrumen lain yang sejenis mengambil tindakan lain untuk mengatasinya.[357]

Pasal 35 kompensasi atas kerugian, setiap negara anggota akan mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperĺukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum di negerinya untuk menjalani bahwa entitas atau orang-orang yang mengalami kerugian sebagai dampak dari korupsi berhak untuk memulai proses hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut dengan tujuan untuk memperoleh kompensasi.[358]

Dengan demikian ketentuan mengenai *victim* (korban, juga ditetapkan dan kongres-kongres dan konvensi-konvensi IPBB dalam upaya memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum, baik kepada korban, saksi, pelapor dan para pakar yang memberikan informasi dan keterangan kepada komisi PBB.[359]

2.5.Model Pemberdayaan Korban Kejahatan

Dalam rangka pemberdayaan korban dalam sistem peradilan pidana, maka secara mendasar dikenal dua model:[360]

1. Model Hak-hak Prosedural (*The Procedural Rights*) dan
2. Model Pelayanan (*The Servis Model*)

Model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam

---

[357] *United Nations,Ibid.*hlm..19, dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid*.hlm.65-66.
[358] *United Nations,Ibid.,* dalam Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto, *Ibid*.,hlm.66.
[359] Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto *Ibid.*
[360] Muladi & Barda Nawawi Arief,2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana,* PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm 85.

jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan yang kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pernasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Pendekatan semacam ini melihat si korban sebagai seorang subjek harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.[361]

Selanjutnya, pada Model Pelayanan (*The Services Model*), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku hagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.[362]

Kedua model di atas memiliki kelemahan maupun keuntungannya sendiri. Model hak-hak prosedural dianggap dapat memehuhi perasaan untuk membalas si korban maupun masyarakat. Dalam model ini fungsi pidana dan hukum pidana dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menciptakan kerjasama antara polisi, jaksa dan si korban. Di samping itu si korban melalui cara ini dimungkinkan untuk memperoleh kembali harga diri dan rasa percaya diri. Keuntungan lainnya

[361] Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm. 159-160.
[362] *Ibid*., hlm.160.

adalah hak-hak yang diberikan pada korban untuk dapat berperan secara aktif dalam proses peradilan. Selain itu dalam model ini, hakim dapat memperoleh informasi secara langsung dari korban.[363]

Model hak prosedural juga dianggap memiliki beberapa kerugian di antaranya pertama, model ini dianggap dapat menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Sistem peradilan pidana harus berlandaskan pada kepentingan umum. Partisipasi si korban dalam administrasi peradilan pidana dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan individu korban. Kedua, dapat terjadi timbulnya beban berlebihan bagi administrasi peradilan pidana, hal ini tentu bertentangan dengan usaha untuk lebih menyederhanakannya sebagaimana kecenderungan dewasa ini. Ketiga, suasana asas praduga tidak bersalah mungkin akan terganggu oleh pendapat korban yang emosional.[364]

Sedangkan pada model kedua yaitu Model Pelayanan (*The Servis Model*), ada beberapa keuntungan yang dapat dikemukakan. Pertama, model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian *integrity of the system of institutionalized trust*, dalam kerangka perspektif komunal. Dalam hal ini korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Suasana tertib, terkendali dan saling mempercayai dapat diciptakan kembali. Kedua, model ini dianggap pula dapat menghemat biaya sebab dengan bantuan pedoman yang

[363]*Ibid*.
[364]*Ibid*., hlm.160-161.

baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh si korban? dalam rangka menentukan kompensasi bagi si korban.[365]

Kedua model di atas sebetulnya dapat dijalankan dalam *restorative justice*, mengingat dalam *restorative justice* ada 3 isu utama, pertama memperbaiki dan memuaskan korban dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Kedua, memperbaiki dan memuaskan pelaku, Ketiga, memperbaiki dan memuaskan masyarakat setelah proses sistern peradilan pidana.[366]

Dengan demikian terlihat bahwa dua model pemberdayaan korban pararel dengan tiga isu utama dari konsep *restorative justice*. *Restorative justice* adalah wahana untuk memperbaiki korban, pelaku dan masyarakat akibat adanya kejahatan, *restorative justice* berbeda dengan cara bekerjanya kriminologi yang hanya memperhatikan kejahatan tetapi melupakan korban sehingga *restorative justice* ini bekerja keras untuk terjaminnya keadilan, restorasi kehormatan, menumbuhkan budaya malu, penyembuhan terhadap korban, dan hal-hal lain. Dengan demikian, *restorative justice* adalah program yang menjanjikan dalam strategi mereduksi kejahatan. *Restorative justice* itu harus dibangun secara dinamis dan menciptakan tatanan yang dipergunakan sebagai pedoman.[367]

2.6. Pemeriksaan Perkara Pidana pada Persidangan PN

Pemeriksaan perkara pidana pada persiangan di PN memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:1. Pemeriksaan awal persidangan; 2.Pembacaan surat dakwaan;3.Pengajuan eksepsi (keberatan);4.Pembacaan/ pengucapan putusan

[365] *Ibid*., hlm.161
[366] *Ibid*.
[367] *Ibid*.

sela;5.Pembuktian;6.Pembacaan tuntutan;7.Pengajuan/pembacaan nota pembelaan (pledoi);8.Pengajuan/pembacaan tanggapan-tanggapan (replik dan duplik); dan 9.Pembacaan putusan.

Pada pemeriksaan awal persidangan, hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.[368] Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.[369] Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 153 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.[370] Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.[371]

Setelah hakim ketua sidang menanyakan identitas terdakwa, hakim ketua sidang meminta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan.[372] Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum

[368] Pasal 153 Ayat (2) Huruf a KUHAP.
[369] Pasal 153 Ayat (3) KUHAP.
[370] Pasal 153 Ayat (4) KUHAP.
[371] Pasal 155 Ayat (1) KUHAP.
[372] Pasal 155 Ayat (2) huruf a KUHAP.

atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.[373]

Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum (PH) mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada JPU untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.[374]

Putusan sela diucapkan/ dibacakan oleh hakim yang secara garis besar ada 3 (tiga) kemungkinan isi putusan sela:[375]

1. Eksepsi terdakwa/PH ditolak, sehingga pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut harus dilanjutkan,
2. Eksepsi terdakwa/PH diterima, sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan (harus dihentikan)
3. Eksepsi terdakwa/PH baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sehingga sidang harus dilanjutkan

Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan.[376]Agenda persidangan selanjutnya adalah pembuktian.

---

[373] Pasal 155 Ayat (2) huruf b KUHAP.
[374] Pasal 156 Ayat (1) KUHAP.
[375]https://infobatanghari.wordpress.com/2017/04/20/tata-cara-praktek-persidangan-perkara-pidana/,diakses pada tanggal 19 Maret 2020, Pukul 08.00.
[376] Pasal 156 Ayat (2) KUHAP.

Pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana terbagi dalam 3 tahapan, yaitu:

1. Pembuktian JPU;
2. Pembuktian Terdakwa/PH; dan
3. Pemeriksaan Terdakwa

Apabila JPU telah siap, maka hakim segera memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang. Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah samua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.[377] Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk manyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.[378]

Saksi yang pertama kali diperiksa adalah "saksi korban".[379]Setelah itu baru saksi yang lain yang dipandang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa baik saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara maupun saksi tambahan[380] yang diminta oleh JPU selama sidang berlangsung.

---

[377] Pasal 159 Ayat (1) KUHAP.
[378] Pasal 159 Ayat (2) KUHAP.
[379] Pasal 160 Ayat (1) huruf b. KUHAP.
[380] Pasal 160 Ayat (1) huruf c. KUHAP menentukan:"Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut."

Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa.[381] Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.[382] Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.[383]

Hakim ketua mengingatkan bahwa saksi harus memberi keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang dialami, dilihat atau yang didengar sendiri.Apabila perlu, hakim juga dapat mengingatkan bahwa jika saksi tidak mengatakan yang sesungguhnya, ia dapat dituntut karena sumpah palsu. Hakim ketua mulai memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa. Setelah hakim ketua selesai mengajukan pertanyaan pada saksi, hakim anggota, JPU, terdakwa/ PH juga diberi kesempatan untuk mengajukn pertanyaan pada saksi. Selama memeriksa saksi, hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut. Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

Hakim ketua menanyakan apakah JPU masih akan mengajukan alat bukti bukti lainnya seperti: keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan. Apabila JPU mengatakan masih, maka akan diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti-bukti tersebut. Tata Cara

[381] Pasal 160 Ayat (2) KUHAP.
[382] Pasal 160 Ayat (3) KUHAP.
[383] Pasal 160 Ayat (4) KUHAP.

Pengajuan Ahli sama seperti tata cara pengajuan saksi, perbedaannya yaitu keterangan yang diberikan oleh ahli adalah pendapatnya terhadap suatu kebenaran sesuai dengan pengetahuan atau bidang keahliannya. Apabila JPU mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua memberi kesempatan pada terdakwa/ PH untuk mengajukan bukti-bukti

Hakim ketua bertanya kepada terdakwa/PH apakah akan mengajukan saksi yang menguntungkan/ meringankan (*a de charge*). Jika terdakwa/PH tidak akan mengajukan saksi ataupun bukti lainnya, maka ketua majelis menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada acara pengajuan tuntutan oleh JPU. Apabila terdakwa/PH akan dan telah siap mengajukan saksi yang meringankan, maka hakim ketua segera memerintahkan agar saksi di bawah masuk ke ruang sidang untuk diperiksa. Tata cara pemeriksaan saksi *a de charge* sama dengan pemeriksaan saksi *a de charge*, dengan titik berat pada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pengungkapan fakta yang bersifat membalik/melemahkan dakwaan JPU atau setidaknya meringankan terdakwa.

Hakim ketua menanyakan apakah terdakwa/PH masih akan mengajukan bukti-bukti lainnya seperti: keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan. Apabila terdakwa/PH menyatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti tersebut sama dengan cara pengajuan oleh JPU. Apabila terdakwa/PH mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua menyatakan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan pada terdakwa

Hakim bertanya kepada terdakwa: “apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa”. Hakim mengingatkan pada terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada terdakwa diikuti oleh hakim anggota, JPU dan PH. Majelis hakim dapat menunjukkan segala jenis barang bukti dan menanyakan pada terdakwa apakah ia mengenal benda tersebut. Jika perlu hakim juga dapat menunjukkan surat-surat atau gambar/ photo hasil rekonstruksi yang dilampirkan pada BAP pada terdakwa untuk meyakinkan jawaban atas pertanyaan hakim atau untuk menegaskan suatu fakta. Tata cara pemeriksaan pada terdakwa sama pada tata cara pemeriksaan saksi kecuali dalam hal sumpah.

Apabila terdakwanya lebih dari satu dan diperiksa bersama-sama dalam suatu perkara, maka pemeriksaannya dilakukan satu persatu dan bergiliran. Apabila terdapat ketidaksesuaian jawaban di antara para terdakwa, maka hakim dapat mengc*rosscheck* antara jawaban terdakwa yang satu dengan terdakwa lainnya. Setelah terdakwa (para terdakwa) selesai diperiksa maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketua memberi kesempata kepada JPU untuk mempersiapkan surat tuntutan (*requisitoir*) untuk diajukan pada hari sidang berikutnya.

Apabila JPU telah siap mengajukan tuntutan, maka hakim ketua mempersilahkan pada JPU untuk mengajukan/membacakan tuntutannya. Sebelum tuntutan dibacakan, maka hakim ketua meminta kepada terdakwa agar menyimak dengan baik isi tuntutan. JPU membacakan tuntutan. Tata cara pembacaan

tuntutan sama dengan tata cara pembacaan dakwaan. Setelah selesai membacakan tuntutan, JPU menyerahkan naskah tuntutan (asli) pada hakim ketua dan salinannya pada terdakwa/PH. Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa paham dengan isi tuntutan yang telah dibacakan oleh JPU tadi. Jika perlu, hakim ketua menjelaskan sedikit inti dari tuntutan tersebut, terutama yang berkaitan dengan kesalahan terdakwa dan hukuman yang dituntutkan oleh JPU. Apabila terdakwa/PH menyatakan akan mengajukan pembelaan maka hakim ketua memberikan kesempatan pada terdakwa/PH untuk mempersiapkan *pledoii.*

Jika terdakwa akan mengajukan *pledoi* terhadap dirinya, maka hakim menanyakan kepada terdakwa apakah akan mengajukan sendiri pembelaannya atau menyerahkan sepenuhnya kepada PH. Jika terdakwa mengajukan sendiri pembelaannya, maka pertama-tama yang diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan adalah terdakwa. Sebelumnya hakim ketua menanyakan pada terdakwa apakah akan mengajukan secara lisan atau tulisan.

Apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, maka pada umumnya terdakwa mengajukan pembelaannya sambil tetap duduk di kursi pemeriksaan dan isi pembelaan tersebut selain dicatat oleh panitera dalam berita acara pemeriksaan, juga dicatat oleh pihak yang bekepentingan termasuk hakim. Apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, maka hakim dapat meminta agar terdakwa membacakan pembelaannya sambil berdiri di depan kursi pemeriksaan dan setelah selesai dibaca nota pembelaan diserahkan pada hakim.

Setelah terdakwa membacakan pembelaannya atau jika terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya kepada PH, maka hakim ketua bertanya kepada PH, apakah telah siap dengan nota pembelaannya. Apabila PH telah siap dengan pembelaan, maka hakim ketua segera mempersilahkan PH untuk membacakan pembelaannya. Adapun tata cara pembacaan pembelaan oleh PH sama dengan pengajuan eksepsi.

Setelah pembacaan nota pembelaan selesai, maka naskah nota pembelaan (asli) diserahkan pada hakim ketua, dan salinannya diserahkan pada JPU dan terdakwa. Selanjutnya hakim ketua bertanya kepada JPU apakah ia akan mengajukan tanggapan terhadap pembelaan terdakwa/ PH (*replik*). Apabila JPU akan menanggapi pembelaan terdakwa/ PH, maka hakim ketua memberi kesempatan pada JPU untuk mengajukan replik.

Apabila JPU telah siap dengan repliknya, maka hakim ketua segera mempersilahkan JPU untuk membacakannya.. Setelah replik diajukan/ dibacakan oleh JPU maka hakim ketua memberi kesempatan pada terdakwa/PH untuk mengajukan duplik. Apabila terdakwa/ PH telah siap dengan dupliknya, maka hakim ketua mempersilahkannya untuk membacakan

Jika acara tersebut di atas telah selesai, maka hakim ketua sidang bertanya pada para pihak yang hadir dalam persidangan tersebut, apakah ada hal-hal yang akan diajukan dalam pemeriksaan. Apabila JPU, terdakwa/PH menganggap telah cukup, maka hakim ketua menyatakan bahwa "pemeriksaan dinyatakan ditutup". Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pembacaan

putusan, oleh sebab itu guna mempersiapkan konsep putusannya hakim meminta agar sidang ditunda untuk beberapa waktu.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berdasarkan atas surat dakwaan, segala sesuatu yang terbukti di persidangan, tuntutan pidana, pembelaan, dan tanggapan-tanggapan (*replik-duplik*). Apabila perkara ditangani oleh majelis hakim, maka dasar-dasar pertimbangan tersebut harus dimusyawarahkan oleh majelis hakim. Setelah naskah putusan siap dibacakan. Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adallah pembacaan putusan. Sebelum putusan dibacakan oleh hakim ketua meminta agar para pihak yang hadir memperhatikan isi putusannya dengan seksama. Tata cara pembacaan putusan sama dengan tata cara pembacaan putusan sela. Apabila naskah putusan panjang maka hakim anggota dapat menggantikan secara bergantian.

Hakim ketua memjelaskan secara singkat isi putusannya terutama yang berkaitan dengan dengan amar putusannya hingga terdakwa mengerti terhadap putusan yang dijatuhkan terhadapnya. Hakim ketua menjelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan tersebut. Selanjutnya hakim ketua menawarkan pada terdakwa untuk menentukan sikapnya, apakah akan menyatakan siap menerima putusan tersebut, menyatakan menerima dan akan mengajukan grasi, menyatakan naik banding atau berpikir-pikir. Dalam hal ini terdakwa dapat diberi waktu sejenak untuk berkonsultasi dengan PH nya atau terdakwa mempercayakan haknya kepada PH. Hal yang sama juga ditawarkan kepada JPU. Jika *terdakwa*/PH menyatakan sikap menerima, maka hakim ketua memerintahkan agar terdakwa menandatangani berita acara menerima pernyataan menerima

putusan yang yang teah disiapkan oleh PP. jika terdakwa mengajukan banding, maka terdakwa diminta agar segera menandatangani akta permohonan banding (dapat dikuasakan kepada PH). Jika terdakwa/PH menyatakan pikir-pikir dulu, maka hakim ketua menjelaskan bahwa masa pikir-pikir diberikan selama 7 (tujuh) hari, apabila setelah 7 (tujuh) hari terdakwa tidak menyatakan sikap, maka terdakwa dianggap menerima putusan. Hal ini juga berlaku terhadap JPU. Apabila tidak ada hal-hal yang akan disampaikan lagi, maka hakim ketua menyatakan bahwa seuruh rangkaian acara persidangan perkara pidana yang bersangkutan telah selesai dan menyatakan sidang ditutup.

2.7. Peraturan/Keputusan POLRI,Kejagung dan MARI tentang Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

2.7.1. Keadilan *Retributif* dan *Restoratif*

Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal-tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, pertama, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang direpresentasikan oleh instrumen demokratik negara dan, kedua, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri. Konsep yang pertama dilandasi oieh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif

(*retributive justice*) dan konsep yang kedua pada konsep keadilan restoratif (*restorativc justice*).[384]

Dalam *retributive justice* kejahatan adalah merupakan pelanggaran sistem; yang fokusnya pada menjatuhkan hukuman, menimbuĺkan rasa bersalah pada pelaku kejahatan akan . tetapi kedudukan korban diabaikan. Pelaku bersikap pasif artinya menunjuk pada pertanggungjawaban pelaku yang berakhir pada penjatuhan hukuman.[385]

Karakteristik lain dari *retributive justice* adalah respon terhadap kejahatan terpaku pada perilaku masa lalu pelaku dengan begitu stigma tidak terhapuskan walaupun pelaku menyesal dan sudah dimaafkan, dan terakhir, penyelesaian kasus dengan konsep ini tetap bergantung pada aparat dan prosesnya sangat rasional.[386] Sedangkan dalam *restorative justice* kejahatan adalah perlukaan terhadap individu dan/atau masyarakat sehingga fokusnya pada pemecahan masalah dan memperbaiki kerugian. Hak dan kebutuhan korban sangat diperhatikan.[387]

Falsafah *retributif* (pembalasan) yang mendasari perspektif *retributive justice* melanjutkan falsafah yang dianut oleh hukum pidana dan penyelenggaraan peradilan pidana sebelumnya, bedanya kalau sebelumnya bahwa kejahatan adalah konflik antara pelanggar dengan korban yang diwakili oleh negara kemudian

---

[384] Mudzakir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan…Op.Cit.,* hlm 207.
[385]Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 162.
[386]. *Ibid*.
[387]*Ibid*.

berkembang ke arah perspektif *restorative justice* yang menganggap kejahatan merupakan pelanggaran terhadap individu yang diakui sebagai konflik. [388]

Konsep *retributive justice* yang sedang berlaku di Indonesia dirasakan kurang memberi perlindungan yang memadai terhadap korban. Konsep ini lebih memfokuskan terhadap pelaku kejahatan sehingga posisi korban menjadi terabaikan.[389]

Konsep penyelenggaraan hukum pidana dalam perkembangannya mengalami redefinisi, maksud dan tujuan tersebut komudian diganti yakni untuk mengontrol kejahatan, tetapi latar belakang falsafahnya sama, yakni falsafah retributif. Beberapa ciri yang tampak dalam penyelanggaraan peradilan pidana yang bercorak retribulif, yaitu sasaran dalam hukum pidana dan penyelanggaraan peradilan pidana menekankan pada perbuatan pelanggaran dan perlanggung jawaban (moral) atas pelanggarannya, sasaran pemidanaan adalah menderitakan pelanggar dalam bentuk pidana penjara, menolak partisipasi korban atau Individu karena dikhawatirkan akan merusak jalannya proses peradilan pidana yang menjadi bagian dari hukum publik.[390] Berat ringannya pidana sebagai parameter keadilan yang ditujukan kepada pelanggar dan keberhasilan penyelenggaraan peradilan pidana diukur dan seberapa besar penjahat dimasukkan dalam penjara,[391] dan pengaruhnya terhadap *special deterrence* atau *general deterrence.*[392]

---

[388] *Ibid*., hlm.189.
[389] *Ibid*., hlm.194.

[390] Ezzat A.Fattah dalam Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Op.Cit.*, hlm 185
[391] Mudzakkir *Ibid*., hlm.185-186.
[392] Mudzakkir *Ibid*., hlm.185-186.

Negara memainkan peranan utama dalam cara kerja sistem peradilan pidana. Tujuan panyelenggaraan peradilan pidana untuk mengadili orang yang disangka karena perbuatannya melanggar hukum dengan memberikan imbalan sanksi berupa penjatuhan pidana sebagai bentuk balasan atas pelanggarannya.[393] Oleh sebab itu, konsentrasi pemeriksaan diarahkan pada perbuatan yang lampau yang telah terjadi dan kesalahan pelanggar.[394] Penjatuhan pidana adalah bentuk pembalasan terhadap pelanggar hukurn pidana, sedangkan berat ringannya tergantung kepada penilaian kesalahan tersebut, *Efek stigma* pada pelanggar diperlukan sebagai salah satu bagian dan fungsi pencegahan.[395]

Lebih kurang 20 tahun yang lalu di dunia muncul teori dan program mutakhir yang disebut *restorative justice*. Kelompok kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pengertian *restorative justice*, yaitu suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan memikirkan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.[396]

W. Van Ness menyatakan bahwa keadilan restoratif hendak mencapai beberapa nilai melalui penyelenggaraan peradilan pidana, yaitu; pertama, penyelesaian konflik (*conflict resolution*) yang mengandung muatan pemberian ganti kerugian (*recompense*) dan pemulihan nama baik (*vindication*); dan, kedua,

---

[393] Mark S. Umbreit *dalam* Mudzakkir *Ibid*., hlm.186.
[394] Ezzat A. Fattah, dalam Mudzakkir, *Ibid*.
[395] Mudzakkir ,*Ibid*.
[396] Melani, Oktober 2005, *Membangun Hukum Pidana dari Retributif ke Restroratif*, Litigasi, Volume, 6 Nomor 3, hlm 223 dalam Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 164.

rasa aman (*safety*) yang rnengandung muatan perdamaian (*peace*) dan ketertiban (*order*).[397]

Perspektif *restoratif* memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarannya tetapi proses penimbulan kerugian (*viktimisasi*) kepada korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya juga melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri. Bagian-bagian yang dianggapnya penting ini sebagian besar te!ah dilupakan oleh sistem peradilan pidana menurut perspektif *retributive justice*. Van Ness mengkristatisasikan pondasi utama teori keadilan restoratif dalam proposisi: pertama, kejahatan adalah utama konflik antara individu yang mengakibatkan kerugian terhadap korban, masyarakat dan pelanggar itu sendiri; hanya kedua itu melanggar hukum; kedua, tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana harus merekonsiliasi pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan; dan ketiga, proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat, tidak semestinya harus didominasi oleh pemerintah kemudian mengeluarkan yang lainnya.[398]

Konsep *restorative justice* tidak hanya menghadirkan pelaku dalam SPP melainkan juga di dalamnya melibatkan peran korban dan masyarakat.[399] Pelaku di*restorasi* melalui SPP sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program

---

[397] Mudzakir, 2005, *Viktimologi Studi Kasus Di Indonesia,* Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi XI, Surabaya 14-16 Maret 2005, hlm 26, dalam Rena Yulia,*Ibid.*, hlm. 166.
[398] Mudzakir, 2005 *Ibid*, hlm 25 dalam Rena Yulia, *Ibid*. hlm 191.
[399] Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm. 194.

perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran.[400] Dalam perdamaian yang dilakukan, korban dapat memberikan masukan tentang keadilan apa yang hendak diperolehnya. Begitu juga pelaku bisa melakukan hal-hal sebaliknya, misalnya dapat saja membayar ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban.[401]

Dalam *restorative justice*, korban memiliki kesempatan untuk bertanya pada keluarganya, mengenai detil setiap peristiwa, atau kejadian, atau kejahatan yang menimpa dirinya. Apabila tidak jelas, korban bisa bertanya kembali tentang apa yang terjadi, korban juga berhak untuk berbicara tentang perasaan yang tidak enak dan luka yang diderita akibat perbuatan pelaku, namun dengan tanpa memperlihatkan kebencian terhadap pelaku melainkan harus bersikap ramah dan tersenyum.[402]

Apabila memiliki kesempatan berbicara dalam suatu perdamaian, maka korban harus memberikan kontribusi pemikiran. Jangan berbicara secara keras dan emosi. Tapi harus memperlihatkan expresi secara sosial bahwa korban menerima kondisi yang menimpanya. Pandangan-pandangan dan rencana yang ingin dilakukan pun harus disampaikan dengan baik, tanpa adanya aksi kekerasan balasan. [403] Apabila korban berpikir tentang pemaafan akan kesalahan pelaku maka kesalahan itu harus dilupakan dan dimaafkan, namun dalam negosiasi yang dilakukan harus lah jelas, apa pertimbangannya dan dilakukan dengan *fair*. Apabila menuňtut hak maka harus diajukan menurut hukum yang berlaku.[404]

---

[400] John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation,* Oxford University Press, New York, hlm 54 dalam Rena Yulia, *Ibid*.,hlm. 194.
[401] Rena Yulia, *Ibid*.
[402] *Ibid*.,hlm. 194-195.
[403]*Ibid*.,hlm. 195.
[404]. *Ibid.*

Keterlibatan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana merupakan hal yang penting, karena hubungan korban, masyarakat, dan pelanggar menjadi fokus untuk melakukan mediasi dan rekonsiliasi guna menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Bagian yang ditonjolkan adalah memberdayakan para partisipan, mempromosikan dialog dan penyelesaian masalah yang mutual dan memberikan kepuasan semua pihak.[405]

Restorative justice diharapkan dapat memberikan tanggungjawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku dimasa yang akan datang. Dengan demikian konsep *restorative justice* diharapkan paling tidak bisa membatasi perkara yang menumpuk di pengadilan (walaupun belum dapat diselesaikan melalui *out of court settlement)* dan dapat dijadikan solusi dalam pencegahan kejahatan.[406]

Selanjutnya perbedaan *retributive justice* dan *restorative justice* dapat dilihat dari tabel di bawah ini.[407]

Tabel 7. Konsep *Retributive Justice* dan *Restorative Justice*

No	***Retributive Justice***	***Restorative justice***
1.	Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, hakekat konflik dari kejahatan dikaburkan dan ditekan	Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain, dan diakui sebagai konflik.

[405] Mudzakir, 2005,*Op.Cit*.,hlm 26, , dalam Rena Yulia, *Ibid*.,hlm. 191
[406] Rena Yulia, *Ibid*. hlm. 168
[407] Dey Ravena, 2004, *Kebijakan Kriminal (Pemberdayaan Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Lentera Menuju Perubahan),* Bandung: tanpa penerbit, hlm. 208

2	Perhatian diarahkan pada penentuan kesalahan pada masa lalu	Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.
3	Hubungan para pihak bersifat pertawanan, melatui proses teratur dan bersifat normative	Sifat normatif dibangun ataq dasar dialog dan negosiasi,
4	Penetapan penderitaan untuk penjeraan dan pencegahan.	Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
5	Keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan proses.	Keadilan dirumuskan sebagai hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
6	Kerugian sosial yang satu digantikan dengan yang lain.	Sarana perhatian pada perbaikan sosial.
7	Masyarakat berada pada garis samping dan ditampilkan secara abstrak oleh negara.	Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.
8	Aksi diarahkan dari negara pada pelaku tindak pidana.	Peran korban dan pelaku kejahatan diakui, baik dalam masalah maupun dalam penyelesian hak-hak dan kebutuhan korban, pelaku kejahatan didorong untuk bertanggungjawab.
9	Pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan daiam rangka pemidanaan.	Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk memutuskan yang terbaik.
10	Tindak pidana dirumuskan dalam terminologi hukum yang bersifat teoritis dan murni tanpa dimensi moral, sosial dan ekonomis	Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis.
11	Stigma kejahatan tidak dapat dihilangkan.	Stigma dapat dihapus dengan tindakan restoratif .

2.7.2. Surat Edaran KAPOLRI Nomor SE/8/VII/2018

Pada tanggal 27 Juli 2018 Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (selanjutnya dituliskan *SE KAPOLRI 8/2018*). Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan SE KAPOLRI 8/2018 adalah KUHAP, UU Kepolisian RI, UU Pelayanan Publik,UU

Sistem Peradilan Anak,UU Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.[408]

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan Pintu entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.[409]

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (restorative justice) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap . pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan

[408]Angka 1 SE KAPOLRI 8/2018.
[409]Angka 2 Huruf a SE KAPOLRI 8/2018.

dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.[410]

Perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (restorative justice) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Pemasyarakatan yang over capacit% tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana.[411]

Dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyelidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses.[412]

Penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat

[410]Angka 2 Huruf b SE KAPOLRI 8/2018.
[411]Angka 2 Huruf c SE KAPOLRI 8/2018.
[412]Angka 2 Huruf d SE KAPOLRI 8/2018.

dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian.[413]

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.[414]

Berbagai metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan *restoratif* (*restorative justice*) dan dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan *restoratif* (*restorative justice*) terhadap perkara pidana adalah sebagai berikut:[415]

1) Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;

[413]Angka 2 Huruf e SE KAPOLRI 8/2018.
[414]Angka 2 Huruf f SE KAPOLRI 8/2018.
[415]Angka 2 Huruf g SE KAPOLRI 8/2018.

2) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi;
3) Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4) Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana.

Pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:[416]

1) Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan Iain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2) Pasal 16 ayat (l) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1)

[416]Angka 2 Huruf h SE KAPOLRI 8/2018.

angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana bahwa tindakan Iain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e. menghormati hak asasi manusia.

3) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4) Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan.bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Dalam SE KAPOLRI 8/2018 dijelaskan bahwa untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan sebagai berikut:

a. terpenuhi syarat materiil ;
b. terpenuhi syarat formil; dan
c. mekanisme penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*)

Syarat materiil penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* yaitu:[417]

a) tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
b) tidak berdampak konflik sosial;
c) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
d) prinsip pembatas:
    a) pada pelaku:
        1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*)) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
        2) pelaku bukan residivis;
    b) pada tindak pidana dalam proses

[417]Angka 3 Huruf a SE KAPOLRI 8/2018.

1) penyelidikan;
2) penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Syarat formil penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* yaitu:[418]

1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
3) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
4) rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
5) pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
6) semua tindak pidana dapat dilakukan Restorative Justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

Dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* mekanisme penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*), yaitu:[419]

1) Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas meterai, lakukan penelitian administrasi

[418]Angka 3 Huruf b SE KAPOLRI 8/2018.
[419]Angka 3 Huruf c SE KAPOLRI 8/2018.

syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);

2) Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
3) Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/ Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
4) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
5) Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
6) Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
7) Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
8) Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan*Restorative Justice*;

9) Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyelidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
   a Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
   b Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
   c Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;
10) Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Ini, yang ditandatangani oleh:
   a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
   b) Direktur Reserse Kriminal, pada tingkat Polda;
   c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;
11) Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice)* dihitung sebagai penyelesaian perkara.
12) Terkait dengan administrasi penyelesaian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilaksanakan sesuai dengan format yang ditetapkan Kabareskrim Polri.

2.7.3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Jaksa Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 2020, menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutatan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya dituliskan *PERJA No.15 Thn 2020*). Terbitnya peraturan dimaksud didasarkan pertimbangan antara lain:

1. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;[420]
2. Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan Mengingat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[421]

Peraturan Kejaksaan No.15 Thn 2020 terdiri dari VII Bab dengan 17 Pasal,yakni sebagai berikut:

1. Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum (Pasal 1 s.d. Pasal 2);
2. Bab II mengatur tentang Penutupan Perkara Demi Kepentingan Hukum (Pasal 3);
3. Bab III mengatur tentang Syarat (Pasal 4 s.d. Pasal 6);
4. Bab IV mengatur tentang Tata Cara Perdamaian (Pasal 7 s.d. Pasal 14);
5. Bab V mengatur tentang Penahanan (Pasal 15);

[420]Huruf b Konsiderans ”Menimbang” PERJA No.15 Thn 2020.
[421]Huruf c Konsiderans ”Menimbang” PERJA No.15 Thn 2020.

6. Bab VI mengatur tentang Ketentuan Lain (Pasal 16):
7. Bab VII mengatur tentang Ketentuan Penutup (Pasal 17).

Pada Bab II (Penutupan Perkara Demi Kepentingan Hukum)PERJA No.15 Thn 2020, ditentukan bahwa Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:[422]

a. terdakwa meninggal dunia;
b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).[423]

Bab III PERJA No.15 Thn 2020 tentang Syarat, digariskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan memperhatikan:[424]

a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
b. penghindaran stigma negatif;
c. penghindaran pembalasan;
d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

---

[422]Pasal 3 Ayat (2) PERJA No.15 Thn 2020.

[423]Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan ketentuan: a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 3 Ayat (3) PERJA No.15 Thn 2020).
Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif menghentikan penuntutan (Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Kejaksaan No.15 Thn 2020)..

[424]Pasal 4 Ayat (1) PERJA No.15 Thn 2020.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus mempertimbangkan:[425]

a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
b. latar belakang terjadinyaj dilakukannya tindak pidana;
c. tingkat ketercelaan;
d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
e. *cost and benefit* penanganan perkara;
f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5 Ayat (1) PERJA No.15 Thn 2020 menentukan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;[426] dan
c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah).[427]

---

[425]Pasal 4 Ayat (2) PERJA No.15 Thn 2020.

[426]Dapat dikecualikan untuk tindak pidana dilakukan karena kelalaian (Pasal 5 Ayat (4) PERJA No.15 Thn 2020). Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Pasal 5 Ayat (5) PERJA No.15 Thn 2020).

[427]Dapat dikecualikan untuk:
a. Tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan (Pasal 5 Ayat (3) PERJA No.15 Thn 2020).
b. Tindak pidana dilakukan karena kelalaian (Pasal 5 Ayat (4) PERJA No.15 Thn 2020).

Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang

Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c Peraturan Kejaksaan No.15 Thn 2020.[428]

Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Aayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Kejaksaan No.15 Thn 2020, penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:[429]

a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara: [430]
   1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
   2. mengganti kerugian Korban;
   3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
   4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
c. masyarakat merespon positif.

---

menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Pasal 5 Ayat (5) PERJA No.15 Thn 2020).

[428]Pasal 5 Ayat (2) PERJA No.15 Thn 2020.

[429]Pasal 5 Ayat (6) PERJA No.15 Thn 2020.

[430]Dapat dikecualikan dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula (Pasal 5 Ayat (7) PERJA No.15 Thn 2020).

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:[431]

a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
c. tindak pidana narkotika;
d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pada Pasal 6 Peraturan Kejaksaan No.15 Thn 2020 ditentukan bahwa pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Bab IV tentang Tata Cara Perdamaian Peraturan Kejaksaan No.15 Thn 2020 memiliki 2 (dua) bagian, yakni: Upaya Perdamaian dan Proses Perdamaian. Upaya Perdamaian pada Bab VI terdiri dari dari 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8 dan Pasal 9. Proses Perdamaian pada Bab VI terdiri dari dari 6 (enam) pasal, yakni Pasal 9 s.d. Pasal 14.

Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.[432]Upaya perdamaian dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan

[431]Pasal 5 Ayat (8) PERJA No.15 Thn 2020.
[432]Pasal 7 Ayat (1) PERJA No.15 Thn 2020.

intimidasi.[433] Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).[434]

Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.[435] Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluaga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.[436]Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.[437] Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.[438] Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.[439]

Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5)Peraturan Kejaksaan No.15 Thn 2020. juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.[440]

Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:[441]

---

[433]Pasal 7 Ayat (2) PERJA No.15 Thn 2020.
[434]Pasal 7 Ayat (3) PERJA No.15 Thn 2020.
[435]Pasal 8 Ayat (1) PERJA No.15 Thn 2020.
[436]Pasal 8 Ayat (2) PERJA No.15 Thn 2020.
[437]Pasal 8 Ayat (3) PERJA No.15 Thn 2020.
[438]Pasal 8 Ayat (4) PERJA No.15 Thn 2020.
[439]Pasal 8 Ayat (5) PERJA No.15 Thn 2020.
[440]Pasal 8 Ayat (6) PERJA No.15 Thn 2020.
[441]Pasal 8 Ayat (7) PERJA No.15 Thn 2020.

a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.[442] Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.[443] Penuntut Umum tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.[444]Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.[445] Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).[446]

Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.[447] Kesepakatan perdamaian berupa:a. sepakat berdamai disertai pemenuhan

[442]Pasal 9 Ayat (1) PERJA No.15 Thn 2020.
[443]Pasal 9 Ayat (2) PERJA No.15 Thn 2020.
[444]Pasal 9 Ayat (3) PERJA No.15 Thn 2020.
[445]Pasal 9 Ayat (4) PERJA No.15 Thn 2020.
[446]Pasal 9 Ayat (5) PERJA No.15 Thn 2020.
[447]Pasal 10 Ayat (1) PERJA No.15 Thn 2020.

kewajiban tertentu; atau b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. [448]

Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.[449] Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban tertentu Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.[450] Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.[451]

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:[452]

a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik

[448]Pasal 10 Ayat (2) PERJA No.15 Thn 2020.
[449]Pasal 10 Ayat (3) PERJA No.15 Thn 2020.
[450]Pasal 10 Ayat (4) PERJA No.15 Thn 2020.
[451]Pasal 10 Ayat (5) PERJA No.15 Thn 2020.
[452]Pasal 10 Ayat (6) PERJA No.15 Thn 2020.

dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.[453] Pertimbangan juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.[454] Pertimbangan dimaksud berupa:[455]

a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
b. keadaan yang meringankan dalam pengaJuan tuntutan pidana; dan/atau
c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.[456] Berdasarkan laporan Penuntut Umum Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.[457] Permintaan persetujuan disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.[458]

Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan

[453]Pasal 11 Ayat (1) PERJA No.15 Thn 2020.
[454]Pasal 11 Ayat (2) PERJA No.15 Thn 2020.
[455]Pasal 11 Ayat (3) PERJA No.15 Thn 2020.
[456]Pasal 12 Ayat (1) PERJA No.15 Thn 2020.
[457]Pasal 12 Ayat (2) PERJA No.15 Thn 2020.
[458]Pasal 12 Ayat (3) PERJA No.15 Thn 2020.

diterima.[459]Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu yang ditentukan pada Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Kejaksaan No.15 Thn 2020.[460]

Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.[461] Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.[462] Penetapan status barang bukti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[463]Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.[464] Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.[465]

Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/ atau pihak lain, Penuntut

[459]Pasal 12 Ayat (4) PERJA No.15 Thn 2020.
[460]Pasal 12 Ayat (5) PERJA No.15 Thn 2020.
[461]Pasal 12 Ayat (6) PERJA No.15 Thn 2020.
[462]Pasal 12 Ayat (7) PERJA No.15 Thn 2020.
[463]Pasal 12 Ayat (8) PERJA No.15 Thn 2020.
[464]Pasal 12 Ayat (9) PERJA No.15 Thn 2020.
[465]Pasal 12 Ayat (10) PERJA No.15 Thn 2020.

Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.[466] Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian dilakukan Penuntut Umum dengan:[467]

a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;
b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.[468]

Penahanan, penangguhan penahanan, dan/atau pembantaran penahanan terhadap tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[469]Dalam hal Tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum segera membebaskan Tersangka setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan.[470] Pembebasan tersangka dibuatkan berita acara.[471]

2.7.4. Putusan MARI Nomor 1600 K/Pid/2009

[466]Pasal 13 Ayat (1) PERJA No.15 Thn 2020.
[467]Pasal 13 Ayat (2) P PERJA No.15 Thn 2020.
[468]Pasal 14 PERJA No.15 Thn 2020.
[469]Pasal 15 Ayat (1) PERJA No.15 Thn 2020.
[470]Pasal 15 Ayat (2) PERJA No.15 Thn 2020.
[471]Pasal 15 Ayat (3) PERJA No.15 Thn 2020.

Putusan MARI Nomor:1600 K/Pid/2009 merupakan Putusan Kasasi perkara tindak pidana Terdakwa Ismayawati dan Korban Ny. Emiwati (ibu Merua Ismiyati) yang *tempos* perkaranya terjadi pada kurun waktu antara bulan April 2007 sampai dengan bulan Oktober 2007 dengan *locus delicti* di Jl. Bhayangkara No.51 A Kel. Ngupasan Kec. Ngampilan Kotamadya Yogyakarta.Dalam dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Yogyakarta (PN. Yogyakarta), Terdakwa Ismiyati didakwa sebagai berikut dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua.Dakwaan Kesatu terhadap Terdakwa Ismayawati adalah melanggar Pasal 378[472] *Jo* Pasal 64 ayat (1)[473] KUHP.Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua, mendakwa Ismayawati atau dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372[474] *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.[475]

2.7.4.1.Deskripsi Singkat Perkara

Bermula dari upaya Terdakwa untuk mengembangkan usaha dagang/ bisnis perdagangan barang-barang elektronik yang telah Terdakwa jalankan, untuk mengembangkan usaha dagang tersebut Terdakwa memerlukan tambahan modal usaha, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban Ny. Emiwati yang kebetulan

[472]Pasal 378 KUHP menentukan:"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

[473]Pasal 64 Ayat (1) KUHP menggariskan:"Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.[473]

[474]Pasal 372 KUHP mengatur: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

[475]Putusan MARI Nomor :1600 K/Pid/2009, hlm. 14.

adalah mertua Terdakwa sendiri untuk bekerjasama dalam usaha dagang/ bisnis perdagangan barang-barang elektronik yang telah Terdakwa jalankan tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi korban Ny. Emiwati untuk membantu permodalan guna pengembangan usaha dagang/bisnis perdagangan barang-barang elektronik yang telah Terdakwa jalankan dengan janji memberikan keuntungan berupa bunga atas setiap modal yang saksi korban berikan kepada terdakwa.

Oleh karena saksi korban Ny. Emiwati sudah begitu mengenal Terdakwa selaku menantu (isteri dari anak saksi) sendiri dan untuk membantu usaha yang dijalankan Terdakwa supaya lebih berkembang lagi serta lebih sukses lagi, saksi korban Ny. Emiwati menjadi tergerak hatinya memenuhi keinginan Terdakwa dengan menyerahkan uang tunai berjumlah Rp.3.910.000.000 (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai penguatan modal usaha yang dijalankan Terdakwa, penyerahan uang-uang tersebut kepada Terdakwa terjadi dalam kurun waktu antara bulan April 2007 sampai dengan Oktober 2007 yang penyerahannya secara bertahap.

Terdakwa menerima penyerahan modal usaha tersebut baik dalam bentuk uang tunai Bilyet Giro (BG) maupun Check dari saksi korban Ny. Emiwati, Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro (BG) dan Check sebagai barter (tukar) atas nama penerima uang dari saksi korban Ny. Emiwati, yang pencairan Bilyet Giro (BG) maupun Check jatuh temponya mundur 1 (satu) bulan sejak tanggal penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa, dari sejumlah Bilyet Giro (BG) maupun Check yang Terdakwa serahkan kepada saksi korban Ny. Emiwati tersebut, ternyata ada beberapa di antaranya yang tidak bisa dicairkan (diuangkan)

atau ditolak oleh pihak bank dengan alasan antara lain nomor rekeningnya tidak sama dengan yang ada pada bank, dananya (saldonya) tidak mencukupi, atau telah terjadi penutupan rekening giro oleh bank karena masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.

Terdakwa telah menyadari atau setidak-tidaknya sudah dapat memperkirakan di antara sejumlah *bilyet giro* maupun *check* yang Terdakwa serahkan kepada saksi korban Ny. Emiwati tersebut dananya (saldonya) tidak mencukupi, keadaan demikian tidak pernah Terdakwa beritahukan dengan tujuan untuk menyakinkan saksi korban Ny. Emiwati supaya tetap bersedia menyerahkan uangnya kepada Terdakwa pada setiap kali Terdakwa memerlukan/ membutuhkan tambahan modal usaha dagang/ bisnis perdagangan elektronik yang dijalankannya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Ny. Emiwati menderita kerugian setidak-tidaknya senilai Bilyet Giro maupun Check yang telah ditolak oleh Bank yang seluruhnya mencapai Rp.3.910.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah)

Bahwa uang sejumlah Rp.3.910.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan ada dalam penguasaan Terdakwa sebagai penguatan modal usaha dari saksi korban Ny. Emiwati guna pengembangan usaha dagang/ bisnis perdagangan barang-barang elektronik yang telah Terdakwa jalankan, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Ny. Emiwati menderita kerugian yang

seluruhnya mencapai Rp.3.910.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Ny. Emiwati/saksi pengadu melalui surat permohonan pencabutan tanggal 28 Oktober 2008 dan telah dibacakan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Nopember 2008 telah secara tegas menyatakan mencabut segala tuntutan hukum kepada Terdakwa Sdri. Ismayawati. Alasan pencabutan tuntutan hukum oleh korban Ny. Emiwati dikarenakan:1.Terdakwa Ismayawati merupakan menantu dari Ny. Emiwati/saksi pengadu; 2.Terdakwa Ismayawati memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang tentunya sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu; 3.Ny. Emiwati/ saksi pengadu telah memaafkan segala perbuatan Terdakwa Ismayawati; dan 4.Kerugian uang yang digunakan oleh Ismayawati (anak menatu) sudah Ny. Emiwati ikhlaskan dan Ny. Emiwati tidak menuntut lagi.

Majelis Hakim menanyakan kepada Ny. Emiwati/saksi pengadu : “Apabila ibu/saksi pengadu masih mau memberikan keterangannya dalam perkara ini?”, jawaban Ny. Emiwati/saksi pengadu “Saya tidak mau lagi/tidak bersedia lagi memberikan keterangan-keterangan dalam perkara ini, karena saya telah mencabut segala tuntutan saya kepada anak mantu saya Ismayawati”.

Perkara Penipuan atau Penggelapan dengan Terdakwa Ismayawati dan Korban Ny.Emiwati diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (Banding) dan MARI.

2.7.4.2.Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung

PN. Yogyakarta melalui Putusan Nomor 317/PID.B/ 2008/PN.YK, tanggal 03 Desember 2008 mengabulkan permohonan pencabutan Pengaduan yang diajukan oleh Korban Emiwati dan menyatakan Penuntutan Perkara Nomor : 317/Pid.B/2008 atas nama Terdakwa Ismayawati tidak dapat diterima serta membebankan biaya perkara kepada negara. Putusan PN Yogyakarta Nomor 317/PID.B/ 2008/PN.YK dilakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta (PT. Yogyakarta) pada tanggal 02 Maret 2009 melalui Putusan Nomor 01/PID/PLW/ 2009/PT.Y, menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum. PT Yogyakarta membatalkan Putusan PN. Yogyakarta No.317/Pid.B/2008/PN.YK. dan menyatakan pemeriksaan persidangan PN. Yogyakarta dalam perkara tersebut batal demi hukum serta memerintahkan PN. Yogyakarta untuk memeriksa kembali perkara Terdakwa Ismayawati/ No. 317/Pid.B/2008/PN.YK. Putusan PT.Yogyakarta tersebut diajukan upaya kasasi oleh Ismayawati melalui kuasa hukumnya.

MARI melalui Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009, tanggal 24 Nopember 2009 mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa Ismayawati. MARI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 01/PID/ PLW/2009/PTY. tanggal 02 Maret 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.317/PID.B/2008/PN.YK. Mahkamah mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh Emiwati dan menyatakan Penuntutan Perkara Nomor: 317/Pid.B/2008 atas nama Terdakwa Ismayawati tidak dapat diterima.

2.7.4.3.Tujuan Hukum dan Keadilan Restoratif dalam Putusan

Dalam mengabulkan permohonan pencabutan laporan pengaduan oleh korban Emiwati yang diajukan pada persidangan di Pengadian Negeri Yogyakarta, MARI memberikan pertimbangan hukum[476] membenarkan alasan-alasan kasasi Pemohon yang antara lain mendalilkan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 01/PID/PLW/2009/PT.Y tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[477] Menurut MARI, salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Selanjutya dipertimbangkan bahwa perkara antara korban Emiwati dengan terdakwa Ismayawati terjadi karena adanya konflik antara mertua (sebagai pelapor) dengan menantu (sebagai terdakwa) yang ternyata kemudian sang mertua tidak lagi mempersoalkan tindak pidana yang dilakukan oleh menantunya, sehingga pengaduan dicabut.

Walaupun pencabutan pengaduan telah melewati 3 (tiga) bulan, yang menurut Pasal 75 KUHP telahwat waktu, menurut MARI, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih. Pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh pelapor yang *nota bene* mertua terdakwa, adalah merupakan tindakan untuk memaafkan menantu yang dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara ini diteruskan.

---

[476] Pertimbangan Hukum Putusan MARI Nomor :1600 K/Pid/2009 dapat dilihat pada hlm.23-24.
[477] Angka 7 hlm. 20 dan angka 10, hlm.21 Putusan MARI Nomor :1600 K/Pid/2009.

Walaupun perkara antara Korban Emiwati dengan Terdakwa Ismayawati perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan. Menurut MARI ajaran keadilan restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih induvidu di dalam hubungan kemasyarakatan dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih.

BAB III
KEDUDUKAN KORBAN PERSEORANGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

3.1.Sistem Peradilan Pidana

3.1.1. Peradilan Pidana Sebagai Sistem

Istilah *"criminal justice system"* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.[478] Sistem menurut Soebekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan.[479] Suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut dan juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih *(overlapping)* di antara bagian-bagian itu.[480]

Menurut Barda Nawawi Arif, sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses penegakan hukum. Jadi hakikatnya identik dengan sistem kekuasaan kehakiman karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan kekuasaan

---

[478] Romli Atmasasmita,2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,hlm. 2.

[479] Soebekti,*Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang*, sebagaimana dikutip Rusli Muhammad,2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama,Yogyakarta: UII Press, hlm. 13.

[480]Dewi Meta Lutfian,*Op.Cit.*,hlm.42.

atau kewenagan menegakkan hukum.[481] Apabila fokus dalam bidang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana yang juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana.[482]

Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.[483]

Hagan (1987) membedakan pengertian antara *"criminal justice process"* dan *"criminal justice system". "Criminal justice process"* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *"criminal justice system"* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.[484]

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah, sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan

---

[481]Barda Nawawi Arief,2011, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*, Edisi Revisi, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 2-3
[482]*Ibid*.
[483] Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hlm 2
[484]. *Ibid.*

terpidana.[485]Dalam kesempatan lain, Mardjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana *(criminal justice system)* adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.[486]

Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:

1. *Sinkronisasi Struktural(structural synchronization);*
2. *Sinkronisasi Substansial(substantial synchronization);* dan
3. *Sinkronisasi Kultural(cultural syncrhonization)*[487]

Sinkronisasi Struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. *Sinkronisasi Substansial* adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat *vertikal* dan *horizontal* dalam kaitannya dengan hukum positif. *Sinkronisasi Kultural* adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.[488]

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice sistem*, menurut *Encyclopedia Crime and Justice*, dibedakan menjadi tiga batasan pengertian yaitu batasan normatif, administratif dan sosial. Sistem peradilan pidana dilihat dari

---

[485] MardjonoReksodipoetro, 1993: *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi).* Pidato Pengukuhan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 30 Oktober 1993-1.

[486] Romli Atmasasmita,2010,*Op.Cit.*,hlm.3.

[487] Muladi, 1995, *kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, hlm 1-2, dalam Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 6.

[488] Romli Atmasasmita, 2010, *Op.Cit.*,hlm.6.

aspek norma atau sebagai sistem normatif adalah *a body of legal rules expressing social values social values through prohibitionsbached by penal sanctions against conduct viewed as seriously wrong or harmful.* Kedua, sistem peradilan pidana sebagai sistem administratif, melihat sistem peradilan pidana sebagai *comprehends the official apparatus for enforcing the criminal law, including the police and other frontline enforcement agencies, procecutorial authorities, the judiciary, and penal and correctional facilities and services.* Ketiga, sistem peradilan pidana dari sudut sosial atau sebagai sistem sosial yang merupakan pendefinisian dan pengungkapan yang terkait dengan seluruh unsur-unsur dalam masyarakat dan cakupannya tidak hanya dalam lingkup hukum pidana yang diundangkan oleh pembentuk undang-undang melainkan juga meliputi ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat pada semua tingkatan. Pengertian sistem peradilan pidana dalam disertasi dipahami sebagai sistem administratif dan sistem peradilan pidana merupakan konkretisasi (struktur yang konkrit) dari hukum pidana formil dan materiil.[489]

Menurut Soebekti, sistem ialah suatu tatanan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan dibentuk untuk mencapai tujuan. Bagian-bagian dari sistem yang saling berhubungan mengharuskan adanya kerjasama pada setiap bagian yang saling mendukung satu sama lain. Hal tersebut berarti bahwa tidak boleh terjadi pertentangan maupun tumpang tindih dalam pelaksanaan dari bagian-bagian sistem tersebut.

[489] Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan…,Op.Cit.,*hlm.48-49.

Istilah "*criminal justice system*" atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dałam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.[490]

Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem iłu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.[491]

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah, sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.[492]

SPP untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *"criminal justice science*" di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegakan hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu, pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum adalah "hukum dan ketertiban (*law and order*

---

[490]Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abosionisme,* Putra Bardin, Bandung, hlm 2.
[491]*Ibid*.,hlm.14
[492] Mardjono Reksodipoetro,1993, *Op.cit.* hlm. 1

approach)" dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah, "*law enforcement*".[493]

Sistem peradilan pidana yang terdapat dalam KUHAP adalah sistem peradilan pidana terpadu *(intergrated criminal justice system).* Pelaksanaan dari sistem peradilan pidana membutuhkan alat-alat untuk menggerakkannya atau dapat dikatakan sebagai subsistem. Adapun susbsistem tersebut terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.Subsistem merupakan suatu kesatuan sehingga diperlukan kerjasama antar subsistem agar tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana. Beberapa akibat yang ditimbulkan apabila sistem tidak dijalankan secara terpadu, yakni:

1. Sulit melakukan penilaian terhadap kinerja masing-masing lembaga yang memiliki tugas bersama;
2. Sulitnya memecahkan masalah yang dihadapi masing-masing lembaga;
3. Kurangnya efektivitas secara menyeluruh dari sistem peradilan pidana oleh masing-masing lembaga.

Kata ”*integrated*” sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah sistem dalam *the criminal justice system*. Hal ini disebabkan karena dalam istilah sistem seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*), di samping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-tujuan

[493] Romli Atmasasmita, 2010, *Op.cit,* hlm. 26-27.

yang jelas dari sistem, proses: *input throughput output and feedback*, sistem kontrol yang efektif, *negative antropy* dan sebagainya.[494]

İstilah sinkronisasi yang mengandung makna keserempakan dan keselarasan. Sinkronisasi dalam hal ini, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat betsifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural syncronization*) dapat pula bersifat substansial (*substancial syncronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural syncronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lernbaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan ini mengandung makna baik *vertikal* maupun *horizontal* dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikapı dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.[495]

Pemahaman terhadap tiga kerangka sinkronisasi di atas sangat penting, mengingat apa yang dinamakan sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan *open system*, mengingat besarnya pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia terhadap keberhasilan pencapaian tujuannya (jangka pendek resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan, dan jangka panjang kesejahteraan sosial).[496]

---

[494] Muladi, *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana,* Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 1

[495] *Ibid*.hlm,1-2

[496] *Ibid*.,hlm. 2

La Patra menggambarkan *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) sistem peradilan pidana dengan lingkungannya ini dałam peringkat-peringkat (levels) sebagai berikut:[497]

Peringkat (*level*) 1 : *society*.

peringkat (*level*) 2: *economics, technology, educationand politics*.

Peringkat (*level*) 3: *subsystems of criminal justice system*.

Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan:[498]

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana mengacu pada kodifikasi pidana formil yaitu KUHAP, namun belum ada upaya yang sistematis dan signifikan dalam rangka untuk mengatasi kekosongan dan kekurangan hukum pidana formil yang hanya mendasarkan pada acuan KUHAP. Payung hukum untuk menutupi kekosongan dan kelemahan tersebut adalah apa yang disebut dengan kebijakan pidana. Padahal tuntutan perkembangan sistem informasi dan teknologi semakin sulit untuk dikejar dan diimbangi hanya dengan KUHAP ini. Ketentuan mengenai proses beracara untuk kasus-kasus pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan umumnya yakni KUHAP, disamping juga terdapat ketentuan hukum

---

[497] *Ibid*.
[498] *Ibid*.,hlm.14

pidana formil selain yang telah diatur dalam KUHAP yang tersebar dalam berbagai peraturan, sehingga terjadi masalah yang sering menjadi penghalang tercapainya peradilan yang diharapkan salah satunya adalah masalah penuntutan.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana di masyarakat, bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam UU dan bagaimana hakim menerapkannya. Setelah berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai 4 (emat) sub sistem, yaitu: 1. Sub Sistem Kepolisian,2. Sub Sistem Kejaksaan,3. Sub Sistem Pengadilan dan 4. Sub Sistem Lembaga Pemasyarakatan.

Setelah Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berlaku, di antara keempat subsistem peradilan pidana tersebut terdapat unsur advokat (dengan berbagai istilahnya) yang memiliki peranan sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 dan 56 KUHAP.

Bekerjanya sistem peradilan pidana adalah sebagai upaya untuk pencegahan kejahatan, hal ini erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem, yang di dalamnya mempunyai fungsi kontrol sosial dan pemeliharaan sosial.[499]

Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam SPP (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *"integrated criminal justice system"*. Apabila

[499] Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm. 153.

keterpaduan dalam bekerja sistem tidakdilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.[500]

Berdasarkan batasan tentang sistem peradilan pidana, tampak bahwa Mardjono tidak membedakan istilah "pengendalian" dan "penegakan hukum" sedangkan menurut Romli Atmasasmita kedua istilah tersebut memiliki makna yang jauh berbeda. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa pengertian sistem pengendaliandalam batasan tersebut di atas merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan (mengekang). Dalam istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan, sedangkan apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement,* maka di dalamnya terkandung aspek hukumyang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum *(certainty).* Di lain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang

[500]Mardjono Reksodipoetro, dalam Romli Atmasasmita, 2010, *Op.Cit*., hlm.3-4

terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung *aspek sosial* yang menitikberatkan kegunaan *(expediency).*[501]

Proses peradilan pidana merupakan bekerjanya suatu sistem yaitu serangkaian kegiatan otoritas dalam sistem peradilan pidana (sub-sub sistem) dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing. Adapun tahap-tahap proses peradilan pidana dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa (pra-adjudikasi), pemeriksaan sidang pengadilan oleh hakim (adjudikasi), dan pelaksanaan pidana (pasca adjudikasi).[502]

Romli Atmasasmita berpendapat, sistem peadilan pidana yang bercirikan kebersamaan dan semangat kerjasama yang tulus ikhlas adalah sistem peradilan pidana yang sejalan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.[503]

3.1.2. Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Hukum

Pembaharuan hukum pidana merupakan pembaharuan terhadap sistem hukum. Sistem hukum[504] mempunyai unsur-unsur yaitu: pertama struktur hukum, kedua, substansi hukum dan ketiga, budaya hukum.

Struktur Hukum merupakan bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.Substansi hukum, yaitu aturan, norma, dan pola

---

[501] Romli Atmasasmita, 2010, *Ibid.*, hlm.4
[502] Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan…,Op.Cit.,*hlm.50.
[503] Atmasasmita, 1996*Op.Cit.*, hlm. 26,
[504] Lawrence M. Friedman,2001, *American Law an Introduction (Hukum Amerika sebuah pengantar),* penerjemah Wisnu Basuki,Jakarta: PT. Tatanusa, 2001, hlm. 7-8,

perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan dalam kitab hukum (*law books*). Budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.[505]

Apabila digambarkan tiga unsur sistem hukum itu dengan mengibaratkan struktur hukum sepetti meşin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh meşin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan meşin itu serta memutuskan bagaimana meşin itu digunakan.[506]

Sistem hukum mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial, penyelesaian sengketa, rekayasa sosial dan pemeliharaan sosial.[507] Sistem peradilan pidana merupakan contoh kongkrit dari fungsi sistem hukum sebagai kontrol sosial. Sebagai sebuah sistem yang mempunyai fungsi mengendalikan dan memberantas kejahatan sistem peradilan pidana bukanlah suatu sistem yang bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu secara harfiah, melainkan adanya kombinasi yang serasi antar subsistem untuk mencapai satu tujuan. Jadi proses peradilan dari awal sampai akhir itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-

[505] Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm. 150-151..
[506] *Ibid*., hlm.151.
[507] Lawrence M. Friedman,2001, *Op.Cit*., hlm. 11

pisahkan. Rangkaian sistem yang menyatu ini disebut sistem peradilan pidana terpadu.[508]

Sebagai sebuah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari penyidikan, penuntutan, pemidanaan, dan pemasyarakatan terpidana maka fungsi sistem peradilan pidana adalah menanggulangi masalah kejahatan dalam arti sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.[509] Keempat tahap/proses itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral. Oleh karena itu keseluruhan Sistem/ proses/kewenangan penegakan hukum pidana itupun harus terwujud dalam satu kesatuan kebijakan legislatif yang integral.[510]

Tahapan penyidikan merupakan langkah awal dalam menegakkan hukum, karena itu unsur kepolisian merupakan gerbang sistem peradilan pidana yang pertama, pengendalian kejahatan dimulai dari tahapan ini. Hasil penyidikan akan dibawa ke tingkat selanjutnya yaitu kejaksaan untuk dilakukan tahap penuntutan di muka pengadilan. Akan tetapi dalam melakukan penyidikan ada beberapa lembaga yang berwenang, sehingga terkesan menjadi tumpang tindih.[511] Tahapan selanjutnya pengadilan memutus perkara tersebut berdasarkan hasil penyidikan dan tuntutan yang diajukan jaksa.

Dari gambaran singkat *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*, dapat dilihat bahwa berhasil atau tidak fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan

---

[508] Edi Setiadi,2007, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System),* Materi Kuliah S2 UNISBA, Bandung, hlm. 1, dalam Rena Yulia,*Op.Cit.*,hlm.151.
[509] Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm. 151.
[510] Barda Nawawi Arief,1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana,* Bandung:Citra Aditya, hlm. 31
[511] Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm. 152.

yang dilakukan JPU dan Hakim menyatakan terdakwa bersalah serta memidananya, sangat tergantung atas hasil penyidikan.[512]

SPP diharapkan dapat berperan dalam penataan keadilan dan sebagai sarana pengendalian sosial,akan tetapi dalam banyak hal, sistem peradilan pidana dapat mengakibatkan ketergantungan pada kekuasaaan politik dominan dan mengakibatkan kecenderungan mempertahankan tata tertib sosial serta melegitimasi pola-pola subordinasi sosial.[513]

SPP diharapkan dapat mewujıdkan keinginan masyarakat untuk memperoleh keadilan,akan tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang kecewa dengan hasil bekerjanya sistem peradilan pidana. Hal itu berkaitan dengan terlalu bergantungnya sistem peradilan terhadap kekuasaan dan penguasa, sehingga seolah-olah hukum hanya milik penguasa bukan milik masyarakat. Dengan kondisi demikian, semakin menjustifikasi kelemahan rakyat kecil di hadapan penguasa dan sistem peradilan pidana berpihak pada penguasa.[514]

Dari kondisi SPP yang digambarkan di atas maka perlu dilakukan reformasi penegakan hukum dengan melalui pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum ini meliputi pembaharuan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Hal ini berkaitan dengan proses penegakan hukum.[515]

Proses penegakan hukumn sebenarnya bukan terjadi pada tahap aplikasi/ pelaksanaannya saja, tetapi harus dimulai dari tahap formulasi/pembuatan

---

[512]*Ibid*., hlm.152.
[513] Mulyana W. Kusumah,2002, *Tegaknya Supremasi Hukum,* Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 5
[514]. Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm. 152.
[515]*Ibid*., hlm.152-153.

undang-undang. Hal ini penting karena dalam tahap ini dirumuskan semua kebijakan yang terkandung dalam suatu undang-undang atau dengan kata lain tahap ini merupakan tahap perumusan politik hukum dari undang-undang.[516]

Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana terdiri dari unsur substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Oleh karena itu pembaharuan sistem peradilan pidana harus meliputi pembaharuan unsur substansi hukum, struktur hukum dan juga budaya hukum.[517]

Substansi hukum adalah seperangkat norma-norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Struktur hukum terkait dengan sistem peradilan pidana yang diwujudkan melalui aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat. Struktur hukum berkaitan dengan hal penegakan hukum yaitu bagaimana substansi hukum harus ditegakkan serta dipertahankan. Budaya hukum merupakan kesadaran masyarakat pada hukum, yaitu cerminan dukungan masyarakat pada hukum. Dengan demikian, betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa didukung oleh aparatur penegak hukum yang bersih tidak akan berfungsi apabila tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat.[518]

Dengan demikian, minimal ada tiga hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam penegakan hukum. Pertama, substansi hukum. Artinya, isi dan ketentuan peraturan perundang-undang yang adat dalam proses perkara pidana yang menjadi pegangan utama adalah KUHAP yang telah diundangkan sejak tahun 1981, di mana KUHAP merupakan pelaksana dan KUHP yang merupakan produk hukum

---

[516] *Ibid*., hlm.153.
[517] *Ibid*.
[518] Abdussalam & Sitompul,2013,*Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung, hlm. 7-8

Negara Belanda yang melalu asas konkordansi diberlakukan sarna bagi golongan masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam perjalanannya KUHAP memiliki banyak kelemahan. Meskipun telah banyak peraturan yang bersifat khusus yang mengatur masing-masing lembaga penegak hukum, namun tetap saja ada celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk bermain di dalamnya, misalnya ketidakjelasan hubungan koordinasi antar lembaga dan pengawasan kinerja antar lembaga penegak hukum.[519]

Kedua, struktur hukum dalam hal ini aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan faktor penentu, karena sebagai penggerak atau pelaksana dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam arti konkrit sangat diharapkan mental aparat penegak hukum sesuai dengan jiwa yang terkandung di dalam undang-undang tersebut. Pendapat mengatakan bahwa walaupun peraturan perundang-undangan kurang baik namun aparat penegak hukumnya punya mental yang baik, maka hasilnya akan baik dan sebaliknya jika ketentuan peraturan perundang-undangan sudah baik namun aparat penegak hukumnya kurang baik maka hasilnya akan lebih buruk.[520]

Ketiga, budaya hukum masyarakat terkait dengan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang menjadi objek yang dikendalikan oleh peraturan perundang-undangan, juga sekaligus sebagai subjek yang akan mengontrol jalannya ketentuan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu masyarakat dituntut untuk proaktif mengawasi gerak-gerik aparat dalam

[519] Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm. 153-154.
[520] *Ibid*., hlm.154

memproses setiap perkara pidana yang terjadi. Masyarakat harus memiliki keberanian untuk menjalankan prosedur peraturan perundang-undang sebagai mana mestinya. Dalam hal ini tentu pemerintah juga dituntut untuk gencar melakukan sosialisasi terhadap produk hukum yang sedang berlaku ke tengah masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami dan menjalankannya dengan baik.[521]

Dari gambaran di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem sangat diperlukan agar rnasyarakat hidup dalam keteraturan, untuk mencapai keteraturan sistem ada tiga faktor penting yang harus berjalan bersama secara berkesinambungan yaitu substansi hukum, struktur hukum/ aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Dengan berjalannya ketiga hal itu maka keteraturan di tengah masyarakat akan terjamin, maka masyarakat madani yang dicita-citakan akan terwujud.[522]

Keselarasan dan keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu sub sistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu

[521]*Ibid*., hlm.154-155.
[522]*Ibid*., hlm.155.

komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal.[523]

Komponen SPP sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (*criminal policy*) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum.[524]

Dengan semakin meningkatnya proses modernisasi yang memunculkan fenomena baru berupa globalisasi, menuntut perubahan struktur hubungan-hubungan hukum (*legal stucture*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) maka akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketenteraman hidup (*peaceful life*) dalam berbagai kehidupan sosial, akan menjadi tidak pasti tidak tertib dan tidak terlindung. Sebabnya adalah penegakan hukum aktual (*actual enforcement*) akan menuju penegakan hukum ideal (*total enforcement and full anforcement*).[525]

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tigă konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali. Kedua, konsep yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara

---

[523] *Ibid*.
[524] *Ibid*.
[525] www.hukumtatanegara.blogspot diakses tanggal 7 April 2008 dalam Rena Yulia, *Ibid*,hlm.155-156.

dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan ketiga, konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukułn karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianyał kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.[526]

Kembali lagi kepada sistem peradilan pidena sebagai upaya pencegahan kejahatan, maka sebenarnya penegakan hukum tidak akan berhasil apabila struktur kelembagaan, substansi hukum dan budaya hukum aparat tidak mengalami perubahan. Struktur kelembagaan yang berhubungan dengan masalah penegakan hukum tidak mungkin tercapai apabila masing-masing lembaga ini mempunyai sentral kekuasaan sendiri yang semuanya mempunyai pola yang setara untuk mengendalikan misinya masing-masing. Akibatnya yang dihasilkan oleh pengadilan kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan polisi dan jaksa. Idealnya komponen struktur hukum harus berada pada satu kekuasaan sendiri sehingga mudah dałam pengawasannya.[527]

Komponen selanjutnya yang harus dibenahi dalam rangka penegakan hukum pidana adalah substansi hukum. Berbicara substansi hukum, maka pokok bahasan akan terfokus pada apakah undang-undang yang dibuat telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Atau hanya merupakan undang-undang produk sponsor yang hanya memenuhi kepentingan segelintir orang.[528]

---

[526] www.hukumtatanegara.blogspot .*Ibid* dalam Rena Yulia, *Ibid*,hlm. 156.
[527] Rena Yulia, *Loc.cit.*,hlm. 156
[528] *Ibid*.

Pentingnya memperhatikan substansi hukum dalam pembaharuan hukum (pidana) didasarkan pada bahwa hukum itu harus rasional, bukan hanya sekedar alat bantu untuk mencapai rasionalitas. Hukum yang rasional akan efisien apabila ditunjang oleh perangkat hukum pelaksana hukum, di sarnping itu hukum harus bersentuhan dengan struktur sosial masyarakat. Tanpa dapat mengintegrasikan seluruh kepentingan masyarakat maka fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial tidak dapat berjalan efektif, fungsi hukum sebagai *social engineering* masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum juga akan gagah oleh karena itu pembenahan lingkungan peradilan dimulai dari pembenahan substansi hukum yang dicocokan dengan sistem nilai yang membentuk perlaku budaya hukum dari masyarakat.[529]

Komponen lain yang tidak kalah pentingnya adalah budaya hukum masyarakat itu sendiri. Budaya hukum terkait dengan persamaan persepsi dalam penegakan hukum baik itu antar penegak hukum maupun dengan masyarakat. Selain itu, pembaharuan hukum dalam aspek budaya hukum terkait dengan pendidikan hukum masyarakatnya itu sendiri. Pendidikan Tinggi Hukum sangat berperan dalam memberikan pengetahuan dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Apabila masyarakat telah mempunyai kesadaran hukum yang tinggi maka budaya hukum yang terbentuk akan timbul dari masyarakat yang sadar akan hukum. Budaya hukum yang sadar hukum ini pun harus terbentuk di kalangan aparat penegak hukum.[530]

---

[529]*Ibid*., hlm.157.
[530]*Ibid*.

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak datam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang tetah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum.[531]

Pembaharuan SPP merupakan pembaharuan sistem hukurn, yaitu pembaharuan yang meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum itu sendiri.[532] Substansi hukum dapat dilihat dalam perundang-undangan yang mengatur, struktur hukum dapat diperbaharui dari kedudukan dan kewenangan aparatur negara dalam menjalankan fungsinya, dan budaya hukum dapat diwujudkan dengan adanya persamaan persepsi dalam penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan.[533]

3.2. Pihak-pihak dalam Proses Peradilan Pidana

3.2.1 POLRI sebagai Penyelidik/ Penyidik

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI) menentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.[534]

---

[531] *Ibid.*
[532] *Ibid.*
[533] *Ibid*., hlm.158.
[534]Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Pasal 13 UU POLRI menyebutkan mengenai tugas pokok kepolisian, yaitu:[535]

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pengamanan kepada masyarakat.

Dari serangkaian tuga kepolisian, salah satu tugas kepolisian yang paling mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem. Dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan "pintu gerbang" pertama bagi para pencari keadilan. Dari proses di kepolisian lah setiap penyelesaian perkara pidana dimulai. Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik polisi harus melakukan penangkapan dan bila perlu penahanan, berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwasannya tugas kepolisian itu sebagai multi fungsi, yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus.[536]

Menurut Pasal 6 KUHP ada pihak lain juga yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan yakni Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, namun kewenangannya hanya terbatas pada tindak pidana perikanan (Pasal 3, 12 Undang-Undang

---

Indonesia.

[535]Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[536] Satjipto Rahardjo, *Studi Kepolisian Indonesia : Metodologi dan Substansi*, sebagaimana dikutip Rusli Muhammad,2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*,Cetakan Pertama,Yogyakarta:UII Press,hlm. 15

Nomor 9 Tahun 1985), tindak pidana imigrasi (Pasal 47 UU No 9 Tahun 1992), tindak pidana dalam bidang HAKI, tindak pidana dalam bidang pasar modal dan tindak pidana kesehatan. Polisi dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan juga dibekali dengan asas-asas hukum pidana formil, yaitu: asas sederhana, cepat, biaya murah; *Due Process of Law*; Efektif dan efisien; mekanisme control akuntabilitas publik; persamaan di muka hukum (*equality before the law*).[537] PPNS diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.[538]

Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian telah dicantumkan pada KUHAP, yang di dalamnya telah disebutkan mengenai wewenangnya sebagai penyelidik dan penyidik secara terperinci dalam Pasal 5 dan seterusnya, yang secara garis besar dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Di bidang penyidikan kepolisian mendapat porsi seabagai penyidik tindak pidana umum.
2. Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tambahan.
3. Kepolisian berperan sebagai koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.[539]

---

[537] Sidik Sunaryo,2004, *Sistem Peradilan Pidana,* Cetakan Kedua, Malang: UMM Press, hlm. 227-228

[538] Andi Hamzah,1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga,Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 75

[539] Dewi Meta Lutfian,*Op.Cit.*,hlm.64.

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.[540] Penyelidik karena kewajibannya memiliki wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.[541]

Selanjutnya hasil penyelidikan disampaikan kepada pihak penyidik apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyelidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyelidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Penyelidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Pasal 105 KUHAP menyebutkan bahwa dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.[542]

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau

---

[540]Pasal 1 Angka 5 KUHAP.
[541] Rusli Muhammad, *Loc.Cit.*
[542]Dewi Meta Lutfian,*Op.Cit.*,hlm. 66-67.

siasat (Malaysia).[543] Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan definisi mengenai penyidikan sebagai berikut: serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[544] Tujuan adanya penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum, apakah dipenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan atau tidak. Adapun wewenang yang dimiliki penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j KUHAP adalah sebagai berikut:[545]

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

---

[543] Andi Hamzah,1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Edisi Revisi, Jakarta: CV. Satpa Artha Jaya, hlm. 121-122
[544]Pasal 1 Angka 2 KUHAP.
[545]Pasa 7 Ayat (1) Huruf a-j KUHAP.

i. Mengadakan penghentian penyidikan

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Tugas seorang penyidik di samping harus mempunyai pendidikan khusus juga diperlukan pengalaman yang cukup lama, karena penyidik harus dilakukan oleh polisi negara yang berpangkat pembantu Letnan Dua ke atas.[546] Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan oleh penyidik. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang hal tersebut diatur dalam Pasal 109 KUHAP, namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Tiap kali penyidik melakukan tugas dalam lingkup wewenang nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP tanpa mengurangi ketentuan dalam undang-undang, harus selalu dibuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.[547]

Apabila dalam proses penyidikan tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik harus mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Apabila SP3 tersebut telah diterbitkan maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Apabila pihak korban tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut,

---

[546] Moch Faisal Salam,2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*, Cetakan Pertama, Bandung: Mandar Maju, hlm. 53

[547]Dewi Meta Lutfian,*Op.Cit.*,hlm. 68- 69.

maka pihak korban dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme Praperadilan tersebut diatur di dalam Pasal 77 butir a KUHAP tentang Praperadilan.[548]

Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, maka penuntut umum harus segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik dengan disertai petunjuk untuk melengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikam berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.[549]

6.2.2. Kejaksaan Sebagai Penuntut

Jaksa sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memiliki posisi yang strategis dalam pencapaian tujuan dari sistem tersebut. Posisi penting yang dimiliki lembaga kejaksaan adalah berkaitan dengan lingkup pekerjaan yang diembannya yang melingkupi tahap *pra ajudikasi*, *ajudika*si dan *purna ajudikasi*. Lingkup pekerjaan yang diemban oleh lembaga kejaksaan melingkupi proses peradilan pidana sejak awal proses hingga berakhirnya proses peradilan pidana. hal tersebut yang menyebabkan jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya akan selalu bersinggungan dengan tugas dan kewenangan instansi lainnya yaitu polisi dan hakim.[550]

---

[548] *Ibid*.hlm. 69.
[549] *Ibid*.
[550] *Ibid*. hlm. 73.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan tersebut dilaksanakan secara merdeka, artinya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara merdeka, makaseorang jaksa dilarang merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/ daerah, dan atau badan usaha swasta. Selain itu seorang jaksa juga dilarang untuk merangkap menjadi seorang advokat atau penasehathukum.[551]

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Kejaksaan, seorang Jaksa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah:[552]

a. Bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggung jawab sesuai saluran *hirearki*
b. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah
c. Senantiasa bertindak berdasarkan hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan
d. Wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

---

[551] *Ibid*. hlm.74.
[552]Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Pada dasarnya negara memberikan wewenang untuk melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana ada pada penuntut umum (Jaksa). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP:

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHAPyang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan merupakan keputusan sementara tentang pelaksanaan penegakan hukum pidana dan yang menjadi materi penuntutan adalah surat dakwaan. Sebelum melakukan proses penuntutan perkara, penuntut umum harus lebih dahulu mempelajari dan meniliti berkas perkara apakah cukup bahan-bahan keterangan yang dapat membuktikan bahwaterdakwa telah melakukan tindak pidana.[553] Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan penuntutan, karena bahan keterangan tidak cukup dan dan juga tidak mungkin dilengkapi, maka ia mengambil keputusan untuk menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan

[553] Soedirjo,1985, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 4

itu dituangkan di dalam surat ketetapan, dilakukan karena:[554]

1. Tidak cukupbukti;
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidanaatau;
3. Perkara ditutup demihukum

Untuk penuntutan yang telah selesai dilakukan secepatnya harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Surat dakwaan tersebut berisikan identitas tersangka dan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila penuntut umum hendak mengubah surat dakwaan baikdengantujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya maka hal tersebut hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari dimulainya persidangan di pengadilan. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai dan penuntut umum harus menyampaikan perubahan surat dakwaan tersebut kepada terdakwa atau penasehat hukum terdakwa danpenyidik.[555]

Penuntutan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum yang merupakan suatu usaha guna untuk membentuk, menciptakan suatu tata tertib dan ketentraman dalam masyarakat serta pencegahan

[554]*Ibid.*, hlm 4-5

[555]Djoko Prakoso,1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bina Aksara, hlm. …. dalam Dewi Meta Lutfian, *Op.Cit.*, hlm 71-72.

dan penindakan setelah terjadinya tindak pidana. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penuntutan sesuai Pasal 137 KUHAP, guna mendapatkan kebenaran materil.

Tuntutan menurut KBBI adalah: 1. hasil menuntut; sesuatu yang dituntut (seperti permintaan keras); gugatan; dakwaan. Tuntutan hukuman diartikan KBBI sebagai beratnya hukuman yang diajukan terdakwa.[556] Pidana menurut KBBI adalah kejahatan, kriminal.[557]

Bab I tentang Ketentuan Umum KUHAP, memberikan definisi tentang penuntutan dan penuntut umum, yakni pada Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7 KUHAP yakni sebagai berikut:

1. Jaksa[558] adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 Huruf a KUHAP).
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 angka 6 Huruf b KUHAP).
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara

[556]KBBI, hlm.1507.
[557]KBBI, hlm.1070.
[558]Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan menentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan menggariskan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan menentukan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang. melakukan penuntutan.

yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP).

Pengaturan lebih lanjut tentang Penuntutan dalam KUHAP dimuat pada Bab IV tentang Penyidik dan Penuntut Umum, Bab XV tentang Penuntutan dan Bab XVII tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, yang antara lain memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 8 Pengaturan Penuntutan dalam KUHAP

NO.	PASAL	MATERI PASAL
1.	13	Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
2.	14	Penuntut umum mempunyai wewenang: b. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; c. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; d. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; e. membuat surat dakwaan; f. melimpahkan perkara ke pengadilan; g. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa ataupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; h. melakukan penuntutan; i. menutup perkara demi kepentingan hukum; j. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; k. melaksanakan penetapan hakim.
3.	15	Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.
4.	137	Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam

		daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili
5.	182 (1)	a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana; b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir; c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

6.2.3. Hakim Sebagai Pemeriksa Yang Mengadili dan Pemutus Perkara

Lembaga pengadilan adalah pelaksanaan atau penerapan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim yang bersifat melihat, putusan mana dapat berupa pemidanaan, pembebasanmaupunpelepasandarihukumanterhadappelaku tindak pidana.[559] Secara singkat tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyeesaikan setiap perkara yang diajukan termasuk yang bersangkutan dengan *yurisdiksi voluntair*.[560] Lembaga pengadilan sangat penting keberadaannya karena pada hakikatnya pengadilan merupakan tempat pengujian dan perwujudan negara hukum *(rechstate),* yang merupakan barometer atau tolak ukur dari pada kemampuan suatu bangsa melaksanakan norma-norma hukum dalam suatu negara. Ide dasar konsep kekuasaan lembaga peradilan menurut Barda Nawawi Arifadalah:[561]

---

[559] Rusli Muhammad, *Op.Cit.,* hlm 24

[560] Guntur Purwanto Joko Lelino,2004,*Peranan Pengadilan Negeri*, Cetakan Pertama,Yogyakarta: Guntur, hlm. 48

[561] Barda Nawawi Arif, P*okok-Pokok Pikiran Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Mujahidin,2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 14

> "Kekuasaan Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Dengan pengertian seperti ini maka kekuasaan kehakiman tidak berarti hanya kekuasaan mengadili (kekuasaan menegakkan hukum di badan-badan peradilan), tetapi juga mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakanhukum."

Lembaga pengadilan merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki independensi tinggi dalam menjatuhkan suatu putusan mengenai perkara tindak pidana. indenpendensi lembaga peradilan adalah kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Kebebasan yang dimaksud adalah adalah kebebasan yang bersifat *zakelijkfungtional,* yaitu kebebasan fungsional. Maksudnyaadalah bahwa kebebasan fungsional seperti yang diketahui, mengandung larangan *(verbod)* menurut hukum tata negara lainnya untuk mengadakan intervensi dalam pemeriksaan perkara-perkara oleh hakim, dalam *oordeelvorming* mereka dalam menjatuhkan putusan. Dalam perundang-undangan Indonesia mengalami eksistensi pengertian, dengan menyatakan bahwa ia tidak terbatas pada kebebasan campur tangan dari pihak kekuasaan Negara lainya, melainkan pada kebebasan dari paksaan, *derekvta* atau rekomendasi dari pihak *ekstrayudisial*.[562] Selain pendapat yang dikemukakan oleh Oemar Seno Adji tersebut, Sudikno Mertokusumo juga memiliki pendapat tersenidi tentang independensi lembaga peradilan,yakni:[563]

> "Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat di mana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam mealaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam/ untuk memeriksa dan

---

[562] Oemar Seno Adji,1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum,* Cetakan Pertama, Jakarta: Erlangga, hlm. 253

[563] Sudikno Mertokusumo, *Relevensi Penegakan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman* sebagaimana dikutip Ahmad Mujahidin, *Loc.Cit.*

> mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisial. Jadi pada dasarnya dalam/ untuk memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali ini pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstrayudisial yang boleh mencampuri jalannya sidangpengadilan."

Membahas mengenai lembaga pengadilan berarti juga membahas mengenai hakim. Hakim dengan kekuasaan kehakiman yang dimiliki mempunyai peranan yang sangat besar juga dalam menentukan pelaksanaan sistem peradilan pidana dan akses publik pencari keadilan ke peradilan pidana, karena hakim merupakan satun-satunya pihak yang berada di lembaga peradilan yang mempunyai peranan sangat penting terhadap putusan suatu perkara pidana. Ada banyak landasan hukum yang mengatur mengenai kewenangan seorang hakim pada keikutsertaanya dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik, yakni KUHAP dan Undang-Undang Nomor 4 Thun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Pasal 1 Angka 8 KUHAP menggariskan bahwa hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Adapun yang di maksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihakdi siding pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalamKUHAP.[564]

Mengenai kewajiban seorang hakim, pada Pasal 28 UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

[564]Pasal 1 Angka 9 KUHAP.

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

6.2.4. Advokat sebagai Penasehat Hukum/Pembela

Kedudukan advokat sebagai penasihat hukum dapat terlihat dalam pemeriksaan tersangka oleh peyidik dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, hak dan wewenang advokat sangat dibatasi. Advokat hanya mengawasi jalannya penyidikan dengan tujuan agar hak-hak tersangka tetap terlindungi oleh aparat penyidik advokat tidak diperbolehkan ikut campur dan memberikan masukan atau pendapat atau pembelaan padatahap penyidikan ini, namun sebelum melakukan penyidikan, tersangka diperkenankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan advokat untuk mendapatkan pengarahan-pengarahan yang nantinya mungkin dapat menguntungkan pihak tersangka. Pada saat sidang di pengadilan tersangka atau yang statusnya telah dinaikkan menjadi terdakwa dapat berkonsultasi dengan penasihat hukum jika ada pertanyaan yang sulit dijawab selama berlangsungnya persidangan. Dengan keadaan demikian maka advokat dapat memberikan bantuan hukum namun hanya terbatas pada pemberian nasihat dalam persoalan hukum belaka. Karena haknya hanya terbatas sebagai penasihat hukum saja, maka dari itu seringkali kedudukan advokat sering disebut sebagai penasihat hukum.[565]

Pada saat tahapan di dalam sidang pengadilan, kedudukan advokat tidak lagi terbatas seperti pada saat tahap penyidikan. Advokat yang mendampingi kliennya dapat menggunakan hak-hak seperti yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum, yakni hak untuk bertanya, hak utuk mengajukan pembuktian (termasuk

[565] Dewi Meta Lutfian,*Op.Cit.*,hlm.85-86.

mengajukan saksi*acharge*),surat-suratdanalatbuktilainnyadan juga hak untuk mengajukan pledoi. Dengan demikian maka tidak salah apabila kedudukan advokat juga disebut sebagai pembela.[566]

Menurut Bismar Siregar, ia menyebut advokat sebagai seorang pembela. Maksudnya adalah bahwa seorang advokat adalah seseorang yang dalah permasalahan hukum selalu membela pihak yang berkepentingan yang dalam hal tersebut hubungannya adalah sebagai klien. Pembela berkewajiban untuk selalu membela kliennya dengan cara apapun, ata setidal-tidaknya dapat mengurangi jatuhan hukuman terhadap kliennya yang nantinya akan diputus oleh majelis hakim.[567]

Seorang advokat dalam menjalankan profesinya memiliki bebrapa hak yang tidak boleh diganggu atau dicampuri oleh pihak manapun. Ada beberapa pasal di dalam Undang-undang Advoat menyebutkan tentang hak-hak yang dimiliki oleh seorang advokat, yaitu sebagaiberikut:[568]

1. Hak kebebasan dan kemandirian (*independence*); yang ditentukan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Advokat;
2. Hak imunitas, yaitu hak kekebalan seorang advokat dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya, bahwa ia tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya; yang ditentukan dalam Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (2) Undang-undangAdvokat;
3. Hak untuk meminta informasi terhadap perkara yang dihadapinya yang

---

[566] *Ibid*.,hlm.86-87.
[567] *Ibid*.,hlm.87.
[568] A Sukris Sarmadi,2009, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*,Tanpa Cetakan, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 59-73

merupakan kemutlakan atas diri seorang advokat, baik karena kepentingan untuk menjalankan tugasnya maupun karena kepentingan hukum dari orang yang menjadi tanggungjawabnya (klien) ; yang ditentukan dalam Pasal 17 Undang-UndangAdvokat.

4. Hak ingkar, yaitu hak untuk mengajukankeberatan-keberatandalampersidangan misalnyaeksepsi.
5. Hak untuk menjalankan praktik peradilan di seluruh wilayah Indonesia ; yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat(2)
6. Hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lainnya, yaitujaksamaupunhakim; yang ditentukan dalam Pasal5ayat (1) Undang-UndangAdvokat
7. Hak memperoleh honorarium dalam melakukan retensi; yang ditentukan dalam Bab V Pasal 21 Undang-UndangAdvokat.
8. Hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien; yang ditentukan dalam Pasal 19 Undang-undangAdvokat
9. Hak memberikan somasi, yaitu teguran langsung maupun tidak langsung kepada pihak tententu agar pihak tersebut dapat memahami langkah hukum yang akan dilakukan oleh seorangadvokat .
10. Hak membuat *legalComent* atau *Legal Opinion*.

Sedangkan kewajiban advokat berdasarkan Undang-undang adalah diatur di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari kliennya karena

hubungan profesinya.[569] Kerahasiaan tersebut meliputi perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronikadvokat.[570]

Interaksi antara advokat dengan kliennya memberikan pemahaman mendasar tentang dua hal. Pertama,adalah bagaimana advokat berprilaku professional di dalam memberikan layanan hukum kepada klien. Kedua,adalah berkenaan dengan bagaimana klien harus bersikap dengan perilaku standard, ketika menggunakan layanan hukum advokat dalam mengurai kekusutan dan menyelesaikan masalah hukum.[571] Jadi intinya antara pihak klien dengan pihak advokat harus tercipta sikap saling menghormat satu sama lain agar terjalin hubungan hukum kontraktual yang baik ke depannya.[572]

6.2.5. Terdakwa, Saksi/Korban dan Ahli

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.[573] Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat hukum yang merupakan seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.[574]

Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.[575] Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk

---

[569]Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
[570] Dewi Meta Lutfian,*Op.Cit.*,hlm.90.
[571] Maradut Tampubolon,2014, *Membedah Profesi Advokat*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 147
[572] Dewi Meta Lutfian,*Op.Cit.*,hlm.92.
[573]Pasal 1 Angka 15 KUHAP.
[574]Pasal 1 Angka 13 KUHAP.
[575]Pasal 189 Ayat (1) KUHAP.

membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.[576] Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.[577] Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.[578]

Menurut KUHAP Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.[579] Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.[580] Pengajuan saksi guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya merupakan hak tersangka atau terdakwa.[581]

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana.[582] Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.[583] Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan

[576]Pasal 189 Ayat (2) KUHAP.
[577]Pasal 189 Ayat (3) KUHAP.
[578]Pasal 189 Ayat (4) KUHAP.
[579]Pasal 1 Angka 26 KUHAP.
[580]Pasal 1 Angka 27 KUHAP.
[581]Pasal 65 KUHAP.
[582]Pasal 184 Ayat (1) Huruf a KUHAP.
[583]Pasal 185 Ayat (1) KUHAP.

kepadanya[584] dan tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.[585]

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. [586] Pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.[587]

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
4. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;[588]

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan

[584]Pasal 185 Ayat (2) KUHAP.
[585]Pasal 185 Ayat (3) KUHAP.
[586]Pasal 185 Ayat (4) KUHAP.
[587]Pasal 185 Ayat (5) KUHAP.
[588]Pasal 185 Ayat (6) KUHAP.

keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.[589]

Beberapa pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang saksi yakni Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a diuji oleh Mahkamah Konsttusi dalam Perkara Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra.

Dalam Putusan Perkara Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2011:

1. Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP adalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri";
2. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak

[589]Pasal 185 Ayat (7) KUHAP.

pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."

Mahkamah Konstitusi mengemukakan bahwa mengenai pengertian "saksi" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Secara ringkas, Mahkamah menilai yang dimaksud saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan.[590]

Menurut Mahkamah, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa "ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/ tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau

[590] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Pertimbangan Hukum angka [3.13],hlm.88

terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/ tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/ti ndak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/ tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benarbenar melakukan atau terlibat perbuatan/ tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak meIihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.[591]

Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.[592]

Terkait dengan permasalahan siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa memiliki relevansi dengan sangkaan atau dakwaan, Mahkamah berpendapat bahwa penyidik tidak dibenarkan menilai keterangan ahli dan/ atau saksi yang menguntungkan tersangka atau terdakwa, sebelum benar-benar memanggil dan memeriksa ahli dan/ atau saksi yang bersangkutan. Mahkamah menilai, kewajiban

[591]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 ,hlm.88
[592]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 ,hlm.88-89.

penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka tidak berpasangan dengan kewenangan penyidik untuk menilai apakah saksi yang diajukan memiliki relevansi atau tidak dengan perkara pidana yang disangkakan, sebelum saksi dimaksud dipanggil dan diperiksa (didengarkan kesaksiannya). Begitu pula dengan kewenangan jaksa penuntut umum dan hakim untuk menilai relevansi keterangan saksi baru dapat dilakukan setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa, untuk selanjutnya menentukan apakah tersangka memenuhi semua unsur tindak pidana dan statusnya layak ditingkatkan menjadi terdakwa; [593]

Menurut Mahkamah, pengaturan atau pengertian saksi dalam KUHAP, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas *lex certa serta asas lex stricta* sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang multitafsir dalam hukum acara pidana dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, karena dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dengan tersangka atau terdakwa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.[594]

Mahkamah berpendapat Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27;

---

[593] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Pertimbangan Hukum angka [3.14], ,hlm.89.

[594] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Pertimbangan Hukum angka [3.15],hlm.89.

Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". [595]

Korban menurut Pasal 160 Ayat (1) KUHAP juga merupakan Saksi dalam pemeriksaan perkara pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.[596]

Ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.Keterangan Ahli menurut Pasal 1 Angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pengajuan seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya merupakan hak tersangka atau terdakwa.[597]

6.3. Kedudukan Korban Perseorangan dalam Peradilan Pidana di Indonesia

Problem klasik dalam hukum pidana muncul kembali, karena sistem peradilan pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui

[595]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Pertimbangan Hukum angka [3.15],hlm.90-91.
[596]Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, Sistem Peradilan Pidana, Semarang, BP Undip, hlm 197 dalam Adil Lugianto,*Rekonstruksi Perlindungan Hak-hak Korban Tondak Pidana*,MMH,Jilid 43 No.4,Oktober 2014,hlm.555.
[597]Pasal 65 KUHAP.

eksistensi korban kejahatan selaku pencari keadilan sebagai pihak yang tercakup dalam sistem peradilan pidana. Pihak yang dirugikan atau korban kejahatan tidak bisa dilibatkan langsung seperti halnya dalam perkara perdata, tidak dapat secara langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan melalui instansi yang ditunjuk, yakni kepolisian dan kejaksaan. Sementara itu, hubungan antara ditunjuk, yaitu kepolisian dan korban kejahatan di satu pihak dengan polisi dan jaksa di lain pihak bersifat simbolik sedangkan hubungan antara terdakwa di satu pihak dengan penasehat hukumnya di pihak lain adalah murni hubungan hukum antara pengguna jasa dan pemberi jasa hukum yang diatur dalam hukum perdata. Tindakan nyata dari keduanya juga berbeda, polisi dan jaksa bertindak untuk melaksanakan tugas negara, sedangkan penasehat hukum bertindak atas kuasa atau kepercayaan langsung dari terdakwa dan bertindak untuk mewakili kepentingan terdakwa.[598]

Dalam penegakan hukum di Indonesia, salah satu kelemahan yang mendasar adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai.[599] Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP, sedikit pasal-pasal yang membahas mengenai korban. Pembahasannyapun tidak fokus terhadap *eksistensi* korban tindak pidana melainkan hanya sebagai warga negara biasa yang memilikii hak yang sama dengan warga negara yang lain. Sebagai contoh, pada

---

[598] Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan…,Op.Cit.,* hlm.7-8

[599] Sidik Sunaryo,2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Cetakan Pertama, Malang: UMM Press 2005, hlm. 2

Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang menyebutkan bahwa yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Posisi korban di sini hanya sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka/ terdakwa. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanya yang diberikan Undang-undang kepada pelaku kejahatan. Hal tersebut dapat mengakibatkan pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban terabaikan atau tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.[600]

Selama peradilan pidana telah cukup banyak dalam melayani dan melindungi hak dan kepentingan pelaku kejahatan, tetapi belum banyak bertindak untuk kepentingan korban kejahatan yang secara langsung sebagai pihak yang dirugikan. Menurut Mudzakkir, pengabaian SPP terhadap korban kejahatan akan membawa dampak negatif terhadap sistem peradilan pidana itu sendiri. Korban kejahatan akan mengurangi dukungannya terhadap sistem peradilan pidana, dan korban akan menjadi apatis. Keadaan semacam ini dapat dijadikan alasan oleh korban untuk mencari alternatif penyelesaian di luar sistem peradilan pidana dengan cara *illegal*.[601] Sikap dan dukungan korban kejahatan terhadap system peradilan pidana banyak tergantung pada bagaimana pelayanan yang diberikan

[600] Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom,Tan;a Tahun, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita,* Jakarta:Rajawali Press,hlm. 24 dalam Dewi Meta Lutfian, *Op.Cit.,* hlm 119-120

[601] Mudzakkir,1992*, Korban Kejahatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,Jakarta,hlm. 234

secara langsung dan nyata terhadap korban kejahatan. Semakin baik perhatian dan pelayanan (kemampuan penegak hukum untu menyelesaikan perkara) yang diberikan kepada korban, maka semakin besar dukungan korban kejahatan terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, sikap positif dan kepercayaan korban terhadap kemampuan polisi dan jaksa sangat menentukan besar kecilnya partisipasi korban terhadap peradilan pidana.[602]

Negara, dalam hal ini polisi dan jaksa, memiliki peran yang dominan dan memonopoli reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana adalah wakil sah dari masyarakat atau kepentingan publik, sesungguhnya melalui proses sejarah yang panjang telah mengambil alih peran korban sebagai pihak yang menderita karena kejahatan. Dominannya peran negara tersebut tidak diikuti oleh pengaturan yang jelas eksistensi korban kejahatan dan hubungan hukum antara korban di satu pihak dengan negara, dalam hal ini polisi dan jaksa, di lain pihak yang mengakibatkan korban menjadi objek yang pasif dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Sedangkan partisipasi korban dalam sistem peradilan dipandang sebagai "*nothing more than a piece of evidence"*[603] dan berada di luar sistem (*outsider*) bukan menjadi pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam sistem (*insider*).[604]

Pada tingkat kepolisian, kedudukan dan peranan korban kejahatan dibutuhkan oleh penyidik untuk dimintai memberikan keterangan sebagai saksi, karena korban adalah dianggap sebagai pihak yang memberikan laporan atau

---

[602]Mudzakkir,1992, *Ibid.*, hlm 257.

[603]Robert Reiff, 1979, *The Invisibke Victim, Basic Books Inc. Publishers*,hlm.76, dalam Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Op.Cit.,* hlm 2-3.

[604] Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan…,Op.Cit.,*hlm.3.

pengaduan teah terjadinya suatu tindak pidana.[605]Meskipun bersifat pasif, namun keterangan korban sangat diperlukan penyidik untuk memperkuat sangkaan mengenai telah dilakukannya tindak pidana oleh tersangka. Kedudukan dan peranan korban ini akan menjadi lebih penting manakala tindak pidana yang terjadi sangat minim akan alat bukti. Dalam keadaan demikian, diteruskan atau tidaknya proses pidana akan sangat tergantung pada kesediaan korban untuk memberikan kesaksian di depan penyidik. Kedudukan dan peranan korban pada tingkat di kepolisian tersebut akan terus berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan perkara dipersidangan.[606]

Pada tahapan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pemeriksaan perkara di pengadilan oleh hakim, pada dasarnya tidak terlepas dari keberadaan Pasal 183 dan 184 KUHAP mengenai pembuktian dan alat bukti. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwasannya kedudukan dan peranan korban tidak lebih dari sekedar saksi. Pada tingkat ini korban juga masih harus bersikap pasif. Ia boleh atau bahkan wajib untuk menceritakan kembali kejadian tragis yang terjadi pada dirinya apabila diminta oleh aparat pada saat proses peradilan. Ketika keterangan yang diberikan oleh korban dianggap telah mencukupi, maka selesai juga kedudukan dan peranan korban dalam mekanisme peradilan pidana. ia tidak lagi berhak untuk ikut campur dalam menentukan sanksi yang setimpal yang akan dituntutkan atau dijatuhkan kepada pelaku, karena semua itu telah menjadi

---

[605]G.Widiartana,*Viktimologi & Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan pertama,Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,hlm. 49

[606]Dewi Meta Lutfian,*Op.Cit.*,hlm.122,

monopoli birokrasi pengadilan.[607] Bahkan ketika sanksi telah dijatuhkan dan harus dijalankan oleh pelaku, kewenangan untuk menentukan cara bagaimana sanksi itu dijalankan oleh pelaku, diputuskan tanpa meminta pendapat korban.[608]

Menurut Darmono, kedudukan penuntut umum yang memiliki kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dan sebagai penyidik (dalam perkara tertentu) yang bertugas membuat terang surat perkara, maka jaksa mempunyai kepentingan agar korban mendapatkan perlindungan dan jaminan atas keselamatannya agar ia merasa nyaman dalam memberikan keterangan.[609] Sebab bila ia dalam memberikan keterangan mengalami tekanan, teror dan intimidasi, dikhawatirkan keterangan yang diberikan pada saat penyidikan berbeda dengan keterangan yang diberikan pada pemeriksaan di persidangan. Kondisi seperti itu akan menyulitkan jaksa dalam membuktikan kesalahan terdakwa guna untuk meyakinkan majelis hakim. Oleh karena itu, ketika saksi dan korban memberikan keterangan, harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan nyaman dan terbebas dari rasa takut,[610] Baik sebelum memberikan keterangan, sedang memberikan keterangan maupun setelah meberikan keterangan. Jaminan ini diberikan guna untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi/korban benar-benar murni, bukan hasil dari rekayasa apalagi tekanan dari pihak-pihak tertentu. Jadi hal tersebutlah yang menjadi alasan pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban, untuk lancarnya proses peradilan yang sedang berlangsung.[611]

---

[607]G.Widiartana, *Op.Cit.*,hlm 50.
[608]Dewi Meta Lutfian,*Op.Cit.*,hlm.123.
[609] Darmono, "Komitmen Kejaksaan RI Dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana", *Jurnal Saksi dan Korban*, Edisi No.1, Vol.1, (2011), hlm. 5-6
[610] *Ibid*.,hlm.6
[611]. Dewi Meta Lutfian,*Op.Cit.*,hlm.258-259.

Dalam penyelesaian perkara pidana, negara telah mengambil alih seluruh reaksi yang dapat dilakukan oleh korban terhadap orang yang telah merugikan atau menderitakan dirinya akibat dari perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Kerugian atau penderitaan korban telah diabstraktir oleh negara dan diwujudkan dalam bentuk ancaman sanksi, pidana, atau tindakan terhadap pelakunya. Ancaman sanksi tersebut dalam banyak hal tidak dapat mewakili kerugian atau penderitaan dari si korban, dan dengan demikian tidak dapat mengembalikan kebahagiaan dan kesejahteraan korban seperti kondisi semula.[612]

Bekerjanya peradilan pidana baik dalam lembaga dan pranata hukumnya lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan (*offender oriented*). Eksistensi korban tersubordinasikan dan tereleminasi sebagai *risk secondary victimizations* dalam bekerjanya peradilan pidana, hal ini merupakan bentuk viktimasi yuridis dari aspek peradilan maupun menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan hukum kekuasaan.[613] Dapat dipahami bahwa sistem peradilan pidana memiliki publiknya sendiri yang selalu terkait dengan konteks sosial masyarakat dimana sistem peradilan pidana itu dijalankan. Kerentaan sistem peradilan pidana dalam menerjemahkan fungsinya yang berafiliasi dengan kepentingan dapat dipahami dari karakter sistem peradilan peradilan pidana itu sendiri.[614]

Peradilan pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pembuat kejahatan *(offender centered),* dilatarbelakangi oleh

---

[612]*Ibid*.,hlm.123.
[613]J.E. Sahetapy, 1965,*Bunga Rampai Viktimasi*, Kumpulan Karangan, Bandung: Eresco, hal. ii
[614] Ciptono,*Op.Cit.*,hlm.55.

pandangan bahwa sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan.[615]

Alasan lain yang mendukung perdagangan tersebut antara lain: kejahatan adalah melanggar kepentingan publik (hukum publik), maka reaksi terhadap kejahatan menjadi monopoli negara sebagai representasi publik atau masyarakat. Pandangan tersebut mendominasi peraktek peradilan pidana, akibatnya orang yang terlanggar haknya dan menderita akibat kejahatan diabaikan oleh sistem peradilan pidana.[616]

Mudzakkir dengan mengutip M.S. Groenhuijsenmengemukakan bahwasannya korban kejahatan secara hukum tidak diakui sebagai pihak dalam sistem peradilan pidana Belanda, tetapi kepentingan korban diakui dan diperhatikan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.[617] Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil.Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang member keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.[618]

Korban kejahatan sebagai pihak yang dirugikan dalam adanya suatu tindak pidana, belum mendapatkan perhatian yang khusus sistem peradilan pidana.

---

[615] Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan…,Op.Cit.,*hlm.9.
[616] *Ibid*,hlm.10.
[617] *Ibid*,hlm.240.
[618] Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm. 104.

Menurut Rendy E. Bernett sebagaimana dikutip Mudzakkir, sistem peradilan pidana disadari atau tidak disadari sengaja menyampingkan kepentingan korban kejahatan, dengan dalih sistem peradilan pidana diselenggarakan memang bukan untuk melayani kepentingan yang hendak diperjuangkan oleh korban kejahatan.[619]

Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana (*selanjutnya disebut SPP*) saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hükum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadi]an bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Kedudukan korban yang demikian oleh para *viktimolog* diistilahkan dengan berbagai kata, seperti *forgotten man* (manusia yang dilupakan)[620]*forgotten person, invisible*,(orang yang dilupakan, tidak kelihatan)[621]*a second class citizen*, *a second victimization* (sebagai warga negarayang kedua, jadi korban kedua setelah yang pertama)[622] dan *double victimization*.

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatmentof*

---

[619] Rendy E. Barnett, *Assesing The Criminal: Restitution And The Legal Process*, sebagaimana dikutip oleh Mudzakkir,1992, *Op.Cit.*, hlm 230-231

[620]Joanna Shapland, Jon Willmore, Peter Duff,1985, *Victim In The CriminalJustive System,* Series Editor: A. E. Bottons, PublishedbyGowerPublishing Company Limited, Gower House, croftRoad, Aldershot, Hant Gu 3 HR, England,hlm. 1dalam Ciptono, *Op.Cit.*,hlm. 55-56.

[621]Andrew, Karmen, 1984, *CrimeVictim An IntroductiontoVictimology*, , California: Books/ Cole Publishing Company Monterey, hlm. 3 dalam Ciptono, *Op.Cit.*, hlm 56

[622]Robert Elias,1986,*Community Control, Criminal Justice and Victim Seri*es, dalam Fattah, Ezzat A., 1986, *From Crime Policyto Victim Policy*, *Reorienting the Justice System*, , Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 2XS and London, The Macmillan Press Ltd, hlm. 290 dalam Ciptono, *Ibid.*

offent, readaptasi sosial. pemasyarakatan dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian, dan tidak jarang pula hak- hak asasi korban terabaikan.[623]

Proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Para pihak yang terkait antara lain dimulai dai Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai Penyidik Tindak Pidana, JPU, Penasihat Hukum (PH) tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung fokus pada pembuktian atas tuduhan JPU terhadap tersangka/terdakwa.[624]

Dilupakannya unsur korban dalam proses peradilan cenderung menjauhkan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku maupun masyarakat. Memang harus diakui dalam beberapa kasus, korban dapat berperan dengan berbagai derajat kesalahan dari yang tidak bersalah sama sekali hingga derajat yang lebih salah daripada pelaku, berkaitan dengan peranan korban dalam suatu tindak pidana tersebut, *Hans Von Hentig* mengatakan, ". . *in sense, the victim shapes and molds the criminal and his crime. . .* " Dengan demikian apabila akan memahami suatu kejahatan menurut porsi yang sebenarnya secara

[623] Ciptono,*Op.Cit.*,hlm.54-55.
[624]*Ibid*.,hlm.56.

dimensional, maka harus mempertimbangkan peranan korban dalam timbulnya kejahatan.[625]

Kondisi sebagaimana disebutkan di atas tidak lepas dari norma hukum positif, teori hukum pidana dan pemidanaan serta doktrin yang menjadi sumber dari hukum pidana. Mendasarkan pada hal itu maka diperlukan adanya perubahan pandangan atau paradigma baru dalam proses sistem peradilan pidana. Orientasinya tidak hanya pada pelaku saja, akan tetapi juga korban secara seimbang. Dalam kepustakaan viktimologi pandangan tersebut oleh Schafer disebut *criminal-victim relationship*.[626]

Jika mengacu pada teori tersebut di atas, maka perhatian pada masalah hukum pidana cenderung akan berubah menjadi kejahatan (perbuatan), kesalahan (orang), korban dan pidana. Melalui paradigma demikian, tampaknya hukum pidana menjadi lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan. Konsep pemikiran inilah yang seharusnya dikaji dan dikembangkan dalam penelitian tentang kedudukan korban dalam SPP yang muaranya adalah direkomendasikannya suatu model kedudukan korban secara adil dalam SPP yang memenuhi rasa keadilan sebagai hakikat dibentuknya suatu norma.[627]

Demikian juga mengenai masalah korban tindak pidana sesungguhnya telah lama dibicarakan oleh para ahli, akan tetapi masyarakat rupanya lebih memperhatikan masalah kejahatan dari segi pelakunya, hal ini terbukti dengan

---

[625] Stephen Schafer,1968, *TheVictimand His Criminal a Study in Functional Responsibility*, New York: PublishedbyRandom House Inc., hlm. 40 dalam Ciptono, *Ibid.*,hlm. 57

[626] Stephen Schafer,1968, The *Victimand His Criminal a Study in FunctionalResponsibility*, New York: PublishedbyRandom House Inc, hlm. 4 dalam Ciptono *Ibid.*,hlm. 57-58

[627] Ciptono,*Op.Cit.*,hlm. 58.

diadakannya disiplin ilmu kriminologi yaitu ilmu Pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dan cara menanggulanginya.[628]

Proses peradilan lebih berkutat pada perbuatan tersangka/terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materil (*substantial truth*) sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnya dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human right*) tidak seluruhnya tercapai.[629]

Polisi dan jaksa dalam bertindak menangani perkara pidana adalah melaksanakan tugas negara di bidang penyidikan dan penuntutan, bukan dalam rangka melindungi dan melayani atau memperjuangkan kepentingan korban kejahatan. Korban kejahatan memang tidak mempunyai hubungan hukum yang jelas dengan polisi dan jaksa, seperti halnya hubungan hukum pelaku dengan penasihat hukumnya. Jadi bagi polisi dan jaksa, ia tidak punya tanggungjawab kepada korban untuk memperjuangkan kepentingan korban karena diantara polisi/ jaksa dengan korban tidak memiliki hubungan hukum yang jelas. Polisi dan jaksa sepenuhnya hanya bertanggungjawab kepada negara sebagai wadah yang memberikan tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan kepada korban. Hal demikianlah yang mengakibatkan polisi dan jaksa kurang maksimal dalam menjalankan wewenangnya memberikan pelayanan kepada korban untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya, dan hanya tanggungjawab terhadap birokrasinya demi untuk memperlancar tugas-tugas normatif yang mereka

[628]*Ibid*.
[629]*Ibid*.,hlm.57.

emban.[630]

Pengabaian kepentingan korban kejahatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan negara hukum Indonesia, dimana negara berkewajiban untuk mengayomi semua pihak, baik kepentingan anggota masyarakat yang disangka melanggar hukum apalagi anggota masyarakat yang menjadi korban dari suatu kejahatan. Nasib korban kejahatan tersebut diibaratkan seperti mengalami bencana alam dan sistem peradilan pidana tidak mempedulikan nasib orang yang menderita karena bencana alam.[631]

Perlakuan yang baik dan adil terhadap tersangka dan orang yang menjadi korban kejahatan adalah suatu keharusan dalam penyelenggaraan negara hukum Indonesia. Refleksi prinsip negara hukum, seperti dimuat dalam Penjelasan Umum UUD 1945 seharusnya menjadi dasar dan tercermin dalam penyelenggaraan peradilan pidana, di tempat mana hukum dan keadilan ditegakkan. Hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai cabang hukum yang banyak bersinggungan dengan masalah hak-hak asasi manusia dan melalui stetem peradilan pidana sebagian dari hak-hak asasi manusia fersebut diuji dan nilai yang dikehendaki oleh masyarakat ditegakkan.[632]

Korban sebagai pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan pelaku, seharusnya tetap mempunyai andil dalam proses peradilan perkara yang bersangkutan dengannya, karena bagaimanapun juga korban juga punya hak untuk

---

[630]G.Widiartana, *Viktimologi & Perspektif Korba…,Op.Cit.,* hlm 50.

[631]Pengabaian kepentingan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana dikatakan oleh William F. McDonald, William F. sebagai"*forgetten man of the system*" atau Tim Murphy sebagai *"the forgotten people in the system*"sebagaimana dikutip Mudzakkir dalam Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan… Op.Cit.,* hlm 10-11

[632] Mudzakkir2001,*Ibid*,hlm.3-4.

mengeluarkan keinginannya ikut menentukan pengambilan sanksi untuk pelaku kejahatan. Sehingga keadilan bagi pihak korban sulit untuk dirasakan oleh pihak korban.[633]

Keterlibatan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana merupakan hal yang penting, karena hubungan korban, masyarakat dan pelanggar menjadi fokus untuk melakukan mediasi dan rekonsiliasi guna menyelesaikan konflik yang mereka hadapi.[634] Bagian yang ditonjolkan adalah memberdayakan para partisipan, mempromosikan dialog dan penyelesaian masalah yang mutual dan memberikan kepuasan semua pihak.[635]

Peraturan perundang-udangan hukum pidana dan pelaksanaannya dalam praktek hukum sehari-hari seperti yang tercermin dalam Putusan MARI menunjukkan bahwasanya eksistensi dan posisi korban kejahatan tidak diakui. Tidak adanya pengakuan tersebut membawa konsekuensi lebih jauh dimana hak-hak korban yang telah diatur dalam hukum pidana tidak berhubungan langsung dengan kewajiban (tugas) polisi dan jaksa, tidak dilengkapi dengan hak-hak pendukung lain, dan tidak memiliki hak kontrol yang jelas, seperti haknya hak-hak hukum yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa.Keadaan tersebut mengakibatkan hak-hak korban kejahatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.[636]

Menyitir pendapat Andrew Ashworth, dikatakan bahwa kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang

---

[633] Dewi Meta Lutfian,2018,*Op.Cit*.,hlm. 123.

[634] Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan…,Op.Cit.,*hlm.176

[635] Mark S. Umbreit, (1994), *Victim Meets Offender: The Impactof Restorative Justice and Mediation* (New York: Willow Tree Press, Inc) dalam Mudzakkir,*Ibid*, hlm 176.

[636] Mudzakkir,*Ibid*,hlm.397.

diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku *(offender orientied)*[637]

Kedudukan korban kejahatan dalam praktek hukum acara pidana di Indonesia merupakan pihak yang paling tidak diuntungkan karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Sedangkan hak-hak korban adalah hak atas perlakuan sama didepan hukum, hak atas keadilan dan hak atas resparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjukan kepada semua tipe pemulihan baik *material* maupun *nonmaterial* bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, sedangkan dalam penyelesaian perkara pidana seringkali proses hukum terlalu mengedepankan hak-hak pelaku tindak pidana sementara hak-hak korban kejahatan diabaikan.

Tiadanya perlindungan hukum sebagai implikasi atas belum ditempatkannya secara adil korban dalam SPP, dapat ditelaah melalui perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana meliputi hukum materil, hukum formal serta hukum pelaksanaan (pidana). Demikian pula melalui pengamatan empirik dalam praktik penegakan hukum dalam lembaga sub-sub SPP, korban juga belum tampak memperoleh perlindungan hukum.[638]

Hal ini dapat dilihat dengan lebih banyak asas-asas lainnya mengatur perlindungan pelaku tindak pidana dibandingkan korban kejahatan tersebut seperti contohnya asas praduga tak bersalah yang dimana pelaku tindak pidana belum ditetapkan bersalah sebelum ada putusan dari hakim dan masih banyak asas-asas

---

[637]Lilik Mulyadi ”Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 1,Nomor 1 Maret 2012, hlm. 3.

[638] Ciptono,*Op.Cit.*,hlm. 56.

lain dalam raktek hukum acara pidana yang mengatur kepentingan pelaku sehingga menimbulkan rasa keadilan yang kurang bagi korban serta kedudukan dan hak-hak aspirasi apa yang korban ingin terhadap pelaku kejahatan tidak tersampaikan karena kedudukan dan hak-hak korban dalam praktek hukum acara pidana tidak diberikan peran secara aktif walaupun sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum.

Selain itu dalam proses peradilan diatur Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHAP yaitu penyidik memiliki wewenang setiap saat untuk menghentikan perkara karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Hal ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai baik sifatnya materil maupun inmateriil, korban tidaklah diberi wewenang secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan, sehingga kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaan akibat suatu kejahatan yang diderita oleh korban kejahatan. Walaupun kepentingan korban sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum dalam proses persidangan sebagai bagian perlindungan terhadap korban kejahatan tetapi dalam proses peradilan korban tidaklah diberikan hak prosuderal yaitu hak yang diberikan kepada korban dengan secara langsung melalui peran korban sendiri untuk melakukan penuntutan dalam proses persindangan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Apabila dicermati kedudukan dan hak-hak korban diatas dalam KUHAP lebih menitikberartkan perlindungan atas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa dibandingkan kedudukan dan hak-hak korban sehinga tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap korban kejahatan. Maka dari itu KUHAP yang berlaku pada saat ini haruslah direvisi karena kedudukan dan hak-hak korban kejahatan sangat sedikit diatur dibandingkan hak-hak dari pada pelaku tindak pidana. Sehingga nantinya dalam KUHAP yang baru terdapat keseimbangan antara kedudukan dan hak-hak korban dengan pelaku dalam paktek hukum acara pidana.

Korban sangat memiliki peran penting dalam partisipasi kinerja polisi dan jaksa melalui bentuk laporan atau pengaduan dari korban. Tanpa adanya partisipasi itu dari korban, maka peran kerja dalam melakukan kewenangannya polisi dan jaksa tidak dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu, demi sistem peradilan pidana berjalan dengan baik dan maksimal, seharusnya harus ada keseimbangan antara apa yang telah diberikan korban (partisipasi) kepada polisi dan jaksa dengan apa yang diberikan polisi dan jaksa kepada korban yaitu berupa pemenuhan hak dan kepentingan korban dengan cara memberikan pelayanan yang baik.[639]

Dengan demikian, kedudukan korban kejahatan dalam praktek hukum acara pidana di Indonesia merupakan pihak yang paling tidak diuntungkan karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Hak-hak yang diberikan kepada korban meliputi hak atas

[639]. Dewi Meta Lutfian,2018,*Op.Cit.*,hlm. 257-258.

perlakuan yang sama di depan hukum, hak atas keadilan dan hak atas resparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjukan kepada semua tipe pemulihan baik *material* maupun *non material* bagi korban pelanggaran hak asasi manusia tetapi tidak diberi peran aktif dalam proses peradilan sehingga menimbulkan rasa kurang adil terhadap korban.

Bagi korban kejahatan dengan terjadinya kejahatan pada dirinya akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi mengembalikan kepercayaan tersebut.[640] Pertimbangan perlunya perhatian terhadap korban kejahatan didasarkan pada landasan teori bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran dan negara boleh dikatakan memang memonopoli seluruh reaksi terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karena itu apabila terjadi kejahatan yang menimbulkan korban maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban itu.[641]

Kedudukan korban hanya menjadi sebagai suatu unsur saja dari ketertiban hukum. Maka suatu tindak pidana bukanlah suatu perbuatan yang merugikan orang yang mempunyai darah, daging dan perasaan akan tetapi suatu perbuatan yang melawan hukum, bertentangan dengan suatu yang abstrak yang dinamakan ketertiban hukum (*inbreuk op de rechtsorde*). Dengan pertumbuhan yang demikian ini maka orang yang dirugikan tidak memilki; ia ini di*abstrak*kan.

---

[640] Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, BP UNDIP, hlm 66

[641] Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1997, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, hlm 83

Dalam proses perkara pidana ia seolah-olah "tidak dimanusiakan"; ia merupakan saksi (biasanya saksi pertama) yang hanya penting untuk memberi keterangan tentang apa yang dilakukan si pembuat guna dijadikan alat bukti tentang kesalahan si pembuat ini.[642]

Posisi hukum korban kejahatan, yakni negara, dalam sistem peradilan memainkan peranan yang sentral dan dominan dalam mengambil keputusan-keputusan terhadap tersangka atau pelanggar hukum pidana. Sebaliknya, pihak lainnya yang tidak dikonsep sebagai yang terlibat atau tercakup, sebagai pelaku atau korban, diposisikan sebagai instrumen pembuktian dalam proses pidana, yakni sebagai saksi. Sebagai salah satu alat bukti, saksi tidak mernpunyai hubungan hukum dengan perkara pelanggaran hukum pidana yang disaksikannya dan selanjutnya dijadikan instrumen dalam penjatuhan pidana.[643] Konsep tersebut dominan hingga akhir abad ke 19. Konsep kejahatan melanggar negara mulai digugat dan dinilai tidak sesuai dengan kenyataan hidup sehari-hari. *Fiksi* atau anggapan bahwa negara menjadi korban tunggal tersebut sulit untuk diterima dalam situasi nyata dan objektif. John O. Haley mengatakannya bahwa negara dan sistem peradilannya tidak dapat berdiri sebagai wakil khayalan bagi orang yang nyata yang secara personal telah menderita karena kejahatan. Dosa pelanggar sendiri adalah bukan entitas yang abstrak yang disebut negara, tetapi adalah korbannya dan komunitas yang aktual dan nyata.[644]

Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan karena pelanggaran hukum pidana (kejahatan), pertama dan terutama adalah orang yang langsung menderita

[642] Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni, hal 185
[643] Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan…,Op.Cit.,*hlm.208-209.
[644] *Ibid*,hlm.208.

karena kejahatan disebut korban sesungguhnya (primer), kemudian disebut korban, sedangkan yang lainnya sebagai korban yang tidak langsung (sekunder).[645]

Dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sebetulnya korban utamanya adalah masyarakat dan negara. Berupa hilangnya rasa damai dan aman serta runtuhnya kewibawaan negara di mata masyarakat dalam artian masyarakat akan menganggap bahwa negara tidak mampu melindungi warganya dari kejahatan.[646]

Penghapusan posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan (hukurn pidana) melalui proses perjalanan sejarah hukum pidana yang cukup lama dan masing-masing negara memiliki pengalaman sendiri-sendlri. Korban kejahatan yang secara nyata dirugikan pada mulanya sebagai aktor yang dominan dalam sistem peradilan pidana, berangsur-angsur diambil alih oleh negara sebagai wakil sah dan masyarakat seiring dengan terbentuknya organisasi negara modern. *Monopoli* negara dalam melakukan penuntutan terhadap pelanggar hukum pidana dan penghapusan posisi korban tersebut, memperoleh dukungan doktrin hukum pidana (akademik), akhirnya pendirian tersebut melembaga dalam suatu sistem hukum pidana hingga sekarang.[647]

Konsep hukum pidana tentang korban kejahatan dipengaruhi oleh pandangan politik pembentuk hukum pidana, yakni pengertian korban kejahatan adalah individu yang dirugikan kemudian sesuai dengan perkembangan politik ketatanegaraan kemudian negara sebagai satu-satunya yang menjadi korban,

---

[645] *Ibid*,hlm.210-211.
[646] Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm.187.
[647]. Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan…,Op.Cit.,*hlm.152-153.

sekarang mulai digagas kembali bahwa individu juga menjadi korban, selain negara atau masyarakat secara kolektif.[648]

Ketika konsep negara sebagai satu-satunya yang menjadi korban dari pelanggaran hukum pidana, maka negara selanjutnya memiliki kekuasaan yang besar dan memonopoli reaksi terhadap kejahatan dan mempengaruhi sendi-sendi penyelenggaraan peradilan pidana. Partisipasi individual dari orang yang secara individual nyata-nyata dirugikan karena kejahatan dihapuskan, di samping karena mereka tidak diakui sebagai korban, juga untuk menghindari balas dendam individual yang berlebihan dalam menuntut pidana seperti yang berlaku sebelumnya.[649] Penyelenggaraan peradilan pidana menempatkan fungsi negara sebagai yang dominan dalam bentuk rasionalisasi penyaluran balas dendam terhadap pelanggar.[650]

Posisi hukum korban kejahatan dalam SPP menurut keadilan *retributif* dan keadilan *restoratif* disederhanakan pada tabel berikut:[651]

Tabel 9.Tema Pokok Keadilan *Retributif* dan Keadilan *Restoratif*

KEADILAN RETRIBUTIF	TEMA POKOK	KEADILAN RESTORATIF
Melanggar Negara	Kejahatan	Konflik antar orang perseorangan

[648]*Ibid*,hlm.184.
[649] Mark S. Umbreit dan Irvin Walker dalam Mudzakkir *Ibid*,hlm.184-185.
[650]*Ibid*,hlm.185.
[651]*Ibid*,hlm.212.

Negara	Korban kejahatan	Orang yang dirugikan langsung karena kejahatan (korban yang pertama dan terutama), di samping masyarakat, pelanggar dan Negara
Hanya Negara dan tidak mengakui adanya korban lain. Orang yang menderita langsung karena kejahatan diposisikan sebagai saksi	Posisi hukum korban	Diakui sebagai pihak yang dirugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum pidana)
Negara yang aktif dan orang yang dirugikan bersifat pasif	Peran korban dalam sistem peradilan pidana	Korban kejahatan berperan aktif untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan keperluan dan kepentingannya masing-masing.
Pelangaran hukum pidana, pelanggar dan penjatuhan pidana	Orientasi peradilan	Pelanggaran hukum pidana (kejahdtan), darnpak kejahatan, dan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh kejahatan dan pertanggungjawaban pelanggar
Pembalasan kepada pelanggar agar supaya jera Penderitaan fisik kepada pelanggar	Pemidanaan	Ditujukan kepdda pemulihan dampak kejahatan dalam rangka rekonsiliasi dan perdamaian. Kewajiban restitusi kepada korban.

Konsep pertama memberikan landasan pemikiran bahwa kepentingan yang dilanggar adalah kepentingan publik atau negara, maka dapat ditarik suatu konklusi bahwa negaralah yang dirugikan apabila terjadi suatu kejahatan atau

pelanggaran hukum pidana. Konsep ini dibangun, menurut sejarahnya, adalah untuk menghindari tindakan balas dendam dari orang perseorangan. Negara dan orang yang disangka melanggar hukum pidana menjadi pusat perhatian dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Negara kemudian memperoleh legitimasinya sebagai wakil sah dari representasi kepentingan publik dan basis pelampiasan balas dendam personal yang bersifat emosional dan subjektif tersebut kemudian direkonstruksi dalam penyelenggaraan peradilan pidana sebagai rasionalisasi atau objektivikasi balas dendam kepada pelanggar hukum pidana.[652]

Konsep kejahatan menurut konsep *restorative justice* diberi pengertian yang lebih nyata, bahwa kejahatan adalah konflik antar orang perseorangan. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran, pertama dan terutama melanggar hak perseorangan dan juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik), kepentingan negara, dan juga sesunguhnya secara tidak langsung melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri.[653]

Teori keadilan *restoratif* menempatkan sejumlah nilai yang lebih tinggi pada keterlibatan langsung oleh pihak-pihak. Korban berfungsi sebagai suatu elemen kontrol. Pelanggar didorong untuk menerima tanggung jawab sebagai tahapan yang penting dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan, oleh kejahatan dan dalam membangun suatu sistem nilai tanggung jawab sosial. Keterlibatan masyarakat secara aktif memperkuat masyarakat itu sendiri dan menegakkan nilai masyarakat yang tanggap dan peduli kepada yang lain. Cara pandang *restorative justice* menuntut usaha kerja sama dengan masyarakat dan

[652]*Ibid*,hlm.208.
[653]*Ibid*,hlm.210.

pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan di mana korban dan pelanggar dapat merekonsiliasi konflik mereka dan menyelesaikan kerugian mereka, dalam waktu yang bersamaan menimbulkan rasa aman dalam masyarakat.[654]

Pergeseran konsep kejahatan dan orientasi hukum pidana yang telah diuraikan di atas, telah membawa harapan cerah untuk perlindungan hukum terhadap korban. Pergeseran dari *retributive justice* ke arah *restorative justice* memberikan dampak positif bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Sebagai contoh program *restorative justice* di negara yang sudah lebih dahulu menggunakannya seperti New Zeland, Kanada, dan Inggris, telah berhasil mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan, atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.[655]

Adanya proses pergeseran perspektif dari keadilan retributif kepada perspektif keadilan restoratif adalah pergeran pada level filsafah keadilan yang mendasari hukum positif sebagai asas hukum materil, mendasari hukum pidanadan peradilan pidana. Pergeseran tersebut akan membawa cara pandang baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana, yaitu:

1. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban (*viktimisasi* atau dampak kejahatan) dan pertanggung jawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibatnya pada diri korban;
2. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar kepentingan publik dan kepentingan korban adalah bagian pertama dan utama dari kepentingan

[654]Mudzakir, 2005, *Viktimologi Studi Kasus Di Indonesia…,Op.Cit*.,hlm 26
[655] Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm.193.

publik. Jadi kejahatan merupakan konflik antara pelanggar dengan antar perseorangan (korban) sebagai bagian dari kepentingan publik;

3. Korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum pidana), pertama dan terutama adalah korban (langsung), masyarakat, negara, dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri;[656]
4. Penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik *(conflict resolution);*
5. Pidana dan jenis pidana yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar adalah bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan tanggung jawab pelanggar terhadap perbuatan beserta akibat-akibatnya; dan
6. Korban, masyarakat, negara dan pelanggar dalam proses peradilan pidana bersifat aktif.[657]

Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif *restorative justice* adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni sebagaimana merestorasi perderitaan orang yang terlanggar haknya (korban kejahatan) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi. baik aspek *materil* maupun aspek *immateril.*[658] Negara tidak lagi diposisikan sebagai peran tunggal dan dominan dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena negara bukanlah korban tunggal yang sesungguhnya dan

---

[656] Daniel W. Van Ness sebagaimana dikutip Mudzakkir dalam Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan…,Op.Cit.,*hlm.180.
[657]*Ibid*,hlm. 179-180.
[658]*Ibid*,hlm.193.

perannya dibatasi dan lebih diperankan fungsinya sebagai *mediator* dan *fasilitator*.[659]

Keadilan *restorative* dalam penegakan hukum belakangan ini diadopsi dalam peraturan di Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Pada tanggal 27 Juli 2018 Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE KAPOLRI 8/2018).

Dalam SE KAPOLRI 8/2018 disebutkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian.[660]

Pada SE KAPOLRI 8/2018 dijelaskan bahwa untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan yang antara lain terpenuhi syarat materiil dan syarat formil.

---

[659] Daniel W. Van Ness dalam Mudzakkir *Ibid*,hlm.211.
[660] Angka 2 Huruf e SE KAPOLRI 8/2018.

Syarat materiil penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* antara lain adalah adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.[661]

Syarat formil penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice*,antara lain:[662]

a) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
b) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
c) pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
d) semua tindak pidana dapat dilakukan Restorative Justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

SE KAPOLRI 8/2018, belum memposisikan korban sebagai pihak yang menjadi penentu untuk menghentikan perkara pidana yang dialaminya. Berlanjut atau tidaknya perkara masih memerlukansurat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) serta rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Tindak pidana yang dapat diselesaikan dibatasi terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutatan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*PERJA No.15 Thn 2020*),syarat

[661]Angka 3 Huruf a SE KAPOLRI 8/2018.
[662]Angka 3 Huruf b SE KAPOLRI 8/2018.

penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan *restoratif* sebagai berikut:[663]

a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;dan
c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap syarat tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dapat dikecualikan untuk tindak pidana dilakukan karena kelalaian[664]dan tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.[665]

Syarat tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah), dapat dikecualikan apabila tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan[666] serta tindak pidana dilakukan karena kelalaian.[667]Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut

[663]Pasal 5 Ayat (1) PERJA No.15 Thn 2020.
[664]Pasal 5 Ayat (4) PERJA No.15 Thn 2020.
[665]Pasal 5 Ayat (5) PERJA No.15 Thn 2020.
[666]Pasal 5 Ayat (3) PERJA No.15 Thn 2020.
[667]Pasal 5 Ayat (4) PERJA No.15 Thn 2020.

pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.[668]

Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Aayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) PERJA No.15 Thn 2020, penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:[669]

a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara: [670]
    1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
    2. mengganti kerugian Korban;
    3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
    4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
c. masyarakat merespon positif.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:[671]

a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;

[668]Pasal 5 Ayat (5) PERJA No.15 Thn 2020.
[669]Pasal 5 Ayat (6) PERJA No.15 Thn 2020.
[670]Dapat dikecualikan dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula (Pasal 5 Ayat (7) PERJA No.15 Thn 2020).
[671]Pasal 5 Ayat (8) PERJA No.15 Thn 2020.

c. tindak pidana narkotika;

d. tindak pidana lingkungan hidup; dan

e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6 PERJA No.15 Thn 2020 yang menentukan bahwa pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilanbelum memposisikan korban sebagai pihak yang menjadi penentu untuk menghentikan perkara pidana yang dialaminya. Berlanjut atau tidaknya perkara masih bergantung pada pertimbangan Penuntut Umum.

MARI melalui Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009, tanggal 24 Nopember 2009 mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan dan menyatakan penuntutan Perkara Nomor: 317/Pid.B/2008 atas nama Terdakwa Ismayawati tidak dapat diterima menggunakan keadilan restoratif dalam pertimbangan hukumnya.

Walaupun pencabutan pengaduan telah melewati 3 (tiga) bulan, yang menurut Pasal 75 KUHP telahwat waktu, menurut MARI, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih. Pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh pelapor yang *nota bene* mertua terdakwa, adalah merupakan tindakan untuk memaafkan menantu yang dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara ini diteruskan.

Walaupun perkara antara Korban Emiwati dengan Terdakwa Ismayawati perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan. Menurut MARI ajaran keadilan restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih induvidu di dalam hubungan kemasyarakatan dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih.

Hakim memiliki kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada yang telah usang ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Cara ini disebut "*contra legem*". Hakim dalam menggunakan lembaga *contra legem*, harus mencukupkan pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.[672]

Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan dipelihara baik di tengah-tengah masyarakatnya. Nilai-nilai hukum yang hidup itu antara lain: nilai-nilai ajaran agama, nilai-nilai adat istiadat yang masih terpelihara baik, budaya dan tingkat kecerdasan masyarakat, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat dan lain-lain.[673]

---

[672] Ahmad Kamil, M. Fauzan, 2004, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, hlm 9.

[673] *Ibid.*,hlm 8-9.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa dalam hal hakim memutus perkara dengan menggali nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat akan lebih dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat karena pada prinsipnya hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Ketika masyarakat berubah, maka hakim dalam penegakan hukum juga harus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat. Pengadilan bukanlah institusi hukum yang steril yang hanya berurusan dengan pengongkritan undang-undang, melainkan memiliki jangkauan yang lebih luas. Pengadilan sudah menjadi institusi sosial yang peka terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Pengadilan sarat dengan pikiran keadilan, pembelaan rakyat dan nasib bangsanya. Pengadilan juga berhati nurani (*concience of ihe court*). Hakim sebagai penegak hukum di pengadilan harus benar-benar memperhatikan dinamika masyarakat. Hakim berhati nurani dalam memutus perkara, sehingga benar-benar bisa memberikan keadilan bagi masyarakat.

Bentuk pekerjaan hakim dalam peradilan, khususnya dipandang dari sudut sosiologis merupakan proses sosial yang lebih besar. Lembaga kehakiman dilihat sebagai bagian atau kelanjutan dari pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan peranannya hakim merupakan:

1. pengemban nilai-nilai yang dihayati masyarakat;
2. hasil pembinaan masyarakat atau yang lazim disebut sosialisasi;dan
3. sasaran pengaruh lingkungan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.[674] Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, bukan menegakkan undang-undang. Jadi yang dikehendaki bukanlah hakim sebagai corong undang-undang. Dengan demikian hakim sebagai unsur sentral penegakan hukum di pengadilan tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan formal, tetapi terikat pada tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kata merdeka dimaksudkan bahwa hakim memutus perkara bebas, dalam hal ini adalah suatu kebebasan yang bertanggung jawab. Suatu kebebasan yang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hukum tidak identik dengan undang-undang. Penegakan hukum juga tidak identik dengan keadilan. Untuk dapat mewujudkan keadilan yang didambakan oleh para pencari keadilan serta masyarakat pada umumnya, maka hakim harus benar-benar dapat menggali dan menemukan hukum yang ada di dalam masyarakat dengan berbagai metode penemuan hukum.[675]

Dalam kebijakan hukum nasional terdapat ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian kekuasaan kepada pengadilan untuk menentukan sendiri apa yang menurut pendapatnya layak diterima sebagai hukum di negeri ini.

---

[674]Siti Malikhatun badriyah,*Op.Cit*.,hlm.48
[675]*Ibid*.,hlm 48-49

Konsekuensi penerimaan terhadap tafsir tersebut adalah pengadilan selain bisa menyimpangi dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), atau bahkan sumbangan lernbaga pengadilan bagi pembangunan hukum dan perubahan sosial dengan melakukan penemuan hukum (*judge made law*). Ketentuan yang dimaksud antara lain:[676]

1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 angka (l) UU 48 tahun 2009);
2. Pengadilan dilarang menolak unluk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pusal 10 ayat (l) UU 48/2009).
3. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 ayat (l) UU 48/2009).

Baik dalam wacana akademik maupun politik hukum selalu memasukkan pengadilan sebagai salah satu objek pembangunan hukum. Mempermasalahkan pengadilan sebagai objek pembangunan hukum tidak lepas dari pentingnya putusan hakim sebagai pembaharu hukum. Ketika hakim hanya mengikuti logika undang-undang maka sulit diharapkan akan terjadi pembaharuan hukum oleh

---

[676] Kuat Puji Prayitno,2011,*Rekonstruksi Pemikiran Hukum Pidana Yang Integral*,Disertasi,Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 274-275.

hakim karena hakim hanya sebagai corong/mulut undang-undang (*spreekbuis van de wet* (Belanda), *la bouche de la loi* (Perancis), *mouth of the laws* (Inggris). Dalam posisinya yang demikian hakim cenderung menerapkan hukum/undang-undang apa adanya (*rechtstoepassing*), tidak ada kreasi, karena kreasi ada pada perancang kain, hakim sepetli penjahit yang semata-mata meletakkan dengan jahitan bagian-bagian dari kain yang sudah dipotong sesuai pada tempatnya masing-masing. Kreasi sepenuhnya ada pada pembentuk undang-undang.[677]

Bagaimana jika ada kesenjangan antara peristiwa hukum dengan peraturan yang ada, bagaimana jika ada kekosongan hukum, bagaimana jika aturan yang ada sudah usang, dan bagaimana jika aturan yang ada bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat? Persoalan ini tentu tidak akan terjawab kecuali memberinya kesempatan yang luas pada hakim untuk menemukan hukum. [678]

Menemukan hukum (*rechtsvinding*) merupakan fungsi hakim untuk mendapatkan hukum. Hukum bisa ditemukan dalam peraturan perundangan atau di luar peraturan perundangan. Mendapatkan hukum dari peraturan perundangan yang sudah ada berkaitan dengan upaya memberi makna atau memberi arti agar hukum yang ada dapat diterapkan secara wajar dan adil, hal ini dilakukan dengan cara penafsiran. Selanjutnya mendapatkan hukum di luar peraturan perundangan dilakukan dengan memanfaatkan kaidah-kaidah yurisprudensi atau hukum yang hidup dalam masyarakat atau asas-asas lain yang berkaitan dengan tuntutan kesusilaan dan lain-lain.[679]

---

[677]. *Ibid*,hlm. 272.
[678] *Ibid*,hlm. 273.
[679]*Ibid*

Selain itu dikenal pula upaya pembaharuan kaidah hukum melalui penciptaan hukum (*rechtschepping*) yaitu apabila tidak ada hukum yang tersedia untuk memecahkan persoalan hukum. Atau terjadi keadaan sebagai berikut:[680]

a. kekosongan hukum;
b. hukum yang ada tidak jelas;
c. hukum yang ada sudah usang;
d. hukum yang ada bertentangan dengan rasa keadilan atau ketertiban umum.

Hakim dalam kaitannya dengan penegakan hukum adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu hukum dan keadilan, sebagaimana seorang filsuf hukum terkemuka Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum itu adalah hasrat kehendak untuk/demi mengabdi pada keadilan.[681] Lebih lanjut, pada dasarnya tugas hakim dalam penegakan hukum akan sangat berkait erat dengan persoalan filsafat hukum sebagaimana dikatakan Roscoe Pound bahwa salah satu objek filsafat hukum adalah ”*The application of law*.”[682] Lewat penemuan hukum, hakim dituntut untuk melakukan penafsiran terhadap realitas dalam memberikan putusan yang adil berdasarkan kebenaran dan mewujudkan rasa keadilan itu sendiri dengan menggunakan hati nurani. Hati nurani ini penting sebagai faktor yang dapat mencegah dan menjaga penemuan

---

[680]Bagir Manan, *Hakim Sebagai Pembaharu Hukum*, Varia Peradilan, No.254 Januari 2007, IKAHI, Jakarta, hlm 17

[681]Otje Salman, 2012, Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 58

[682]Roscoe Pound, 1953, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, hlm. dalam Ucuk Agiyanto, *Penegakan Hukum di Indonesia:Eksplorasi Konsep dan Keadilan Berdimensi Ketuhanan*,Hukum Rensendental, hlm.496-497.

hukum yang harus ditingkatkan dan diasah terus sehingga mampu menerima hidayah dari Tuhan.[683]

Terhadap bagaimana sikap hakim apabila menghadapi perkara yang dilematis sebagai akibat adanya *spanungsverhaltnis*, Radbruch mengatakan: *"....where statutory law is incompatible with the requirements of justice "to an intolerable degree", or where statutory law was obviously designed in a way that deliberately negates "the equality that is the core of all justice", statutory law must be disregarded by a judge in favour of the justice principle.* Berdasarkan pendapat Radbruch tersebut, dapat dikatakan bahwa seorang hakim dapat mengabaikan hukum tertulis (*statutory law/state law*) apabila hukum tertulis tersebut ternyata dalam praktiknya tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Wajah buruk pengadilan di Indonesia sebagaimana dipaparkan di muka mengindikasikan bahwa hakim dalam memutus perkara lebih menitikberatkan pada aspek dogmatika atau *statutory law* bahkan seringkali hakim hanya bertugas untuk menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang berakibat pada penciptaan keadilan formal belaka bahkan seringkali menemui kebuntuan legalitas formal. [684]

Pemberdayaan pengadilan melalui putusan-putusan hakim untuk memecahkan persoalan hukum, atau bahkan turut berperan dalam pembangunan hukum memang dimungkinkan. Dalam politik pembangunan hukum nasional

---

[683]*Ibid.*

[684]Suteki, "Budaya Oriental dan Implikasinya Terhadap Cara Berhukum danalm Perspektif Hukum Progresif, dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia,2010,*Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*,hlm.271.

dalam era pasca reformasi, salah satunya adalah pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum nasional.[685]

Apabila dicermati dari sumber politik hukum Indonesia terlihat tidak mutlak condong ke tradisi hukum sipil sistem Eropa Kontinental atau tradisi hukum kebiasaan (*common law*). Formulasi sistem hukum Indonesia ada dalam formulasi "kombinatif'. Dalam fungşi ini pembentukan hukum dapat dilakukan baik oleh lembaga legislatif maupun oleh hakim.[686]

Dalam masyarakat negara yang menganut sistem Eropa Kontinental atau tradisi hukum sipil, pembentukannya dilakukan oleh badan legislatif, sedangkan dalam masyarakat negara yang menganut tradisi hukum kebiasaan (*common law*) kewenangannya terpusat pada hakim (*judge as a central of legal action*). Di samping kedua tradisi itu, terdapat juga kecenderungan untuk menggabungkan kedua tradisi itu. Kecenderungan ini tampak sebagai penjelajahan baru peradaban manusia dalam bidang hukum untuk mendapatkan formulasi paling ideal bagi usaha mewujudkan tujuan sebagai suatu negara hukum.[687]

Dalam formulasi kombinatif, pengadilan memiliki kekuasaan yang lebih luas untuk bertindak demi kepentingan keadilan antara lain membuat keputusan *contra legem*. Ketika suatu aturan dalam keadaan tertentu menurut keyakinan hakim tidak mampu sebagai sarana untuk menghasilkan putusan yang adil, maka tidak perlu diikuti. Kebijakan *kontra legem* didasarkan atas pertimbangan keadilan

---

[685]Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, Fakultas Hukum UI, Jakarta, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 3, September 2006,hlm 90-91

[686] Kuat Puji Prayitno,2011, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Pidana Yang Integral*,Disertasi,Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 275.

[687]Lili Rasjidi dan L.B. Wyasa Putra,2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 163.

bukan atas pertimbangan tegaknya aturan (*judgment based on considerations of fairness not on considerations ofcxisting law*).[688]

Dalam formulasi kombinatif, yurisprudensi menjadi kebutuhan yang fundamental mendampingi keterbatasan peraturan perundang-undangan dalam penerapannya, yurisprudensi juga menjadi faktor penting dalam mengembangkan hukum, sekaligus ia dapat menjadi umpan balik ke dalam proses pembentukan hukum melalui sarana legislasi.[689]

Menurut Jimly, Sistem hukumIndonesiayangsebaiknyadibangunkedepan dari komponen instrumental berupa dokumen hukum (*legal documents*) yang sangat penting antara lain adalah bentuk dokumen berupa keputusan-keputusan peradilan, baik putusan pengadilan (vonis) atau pun putusan badan-badan semi-peradilan (quasi yudisial). Bahkan dalam tradisi *'common law*', putusan-putusan pengadilan inilah yang dipandang sebagai hukum yang sebenarnya, sehingga sistem '*common law*' biasa juga dinamakan sebagai '*judge-made law*', yaitu hukum buatan hakim.[690]

Putusan MARI Nomor 1600 K/Pid/2009, yang mengabulkan permohonan pencabutan pengaduanmeskipun telah lewat waktu berdasarkan Pasal 75 KUHPidana dengan menggunakan keadilan restoratif dalam pertimbangan hukumnya harus dijadikan yurisprudensi, karena memenuhi unsur-unsur yurisprudensi berdasarkan hasil penelitian BPHN tahun 1995,yaitu:[691]

---

[688]http;//people.virginia.edu/rjby3v/latin.html,10 Jul 2011 dalam Kuat Puji Prayitno hlm 275-276.

[689] Kuat Puji Prayitno,*Op.Cit*.,hlm.276

[690]Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*.,hlm.27.

[691] Ahmad Kamil, M. Fauzan,*Op.Cit*.,hlm.11.

a. putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangannya;
b. putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
c. telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama;
d. putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;
e. putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.[692]

Putusan MARI Nomor 1600 K/Pid/2009 telah menempatkan korban menjadi penentu dalam penghentian perkara pidana, namun masih sebatas terhadap jenis perkara delik aduan. Putusan ini belum dapat menjadikan dasar hukum bagi korban dalam menghentikan penuntutan perkara pidana biasa.

Munculnya konsep *restorative justice* pada prinsipnya telah lebih dahulu diperkenalkan oleh *fiqh jinayah* sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 178: "Maka barangsiapa yang mendapat suatu permaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula."[693]

---

[692] Ahmad Kamil dan M.Fauzan mengemukakan ada enam Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi dalam masyarakat demokratis, yaitu:1Hukum melindungi kebebasan setiap warga negaranya; 2.Penguasa dan rakyat harus tunduk pada hukum;3. Aktivitas setiap individü hanya boleh bergerak dalam batas-batas hukum;4.Sanksi hanya dapat dijatuhkan sesuai dengan hukum;5.Setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum;6.Hukum harus menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Op.Cit*.,hlm. 18-22

[693] Rocky Marbun,Juli *Op.Cit*.,hlm.202

Hukum Islam mengakui sistem pengampunan (hak korban dalam memberikan pengampunan), prinsip ini diakui oleh hukum modern pada masa kini sehingga hukum Islam tetap lebih unggul daripada hukum konvensional karena memilih logika penerapan pengampunan tersebut dengan baik. Alasannya, penetapan hak pengampunan bagi tindak pidana pembunuhan dan akan menghasilkan perdamaian dan kerukunan serta menghi!angkan kedengkian dan rasa dendam.[694]Korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni hukuman *qishash*. Apabila ia memaafkannya, gugurlah hukuman *qishash* tersebut..[695]Dalam *qishas*, Hukum Islam memposisikan korban sebagai penentu apakah terhadap pelaku pidana dijatuhi hukuman atau tidak.

Keadilan restoratif dengan tiga isu utama dari konsep *restorative justice*. *Restorative justice* adalah wahana untuk memperbaiki korban, pelaku dan masyarakat akibat adanya kejahatan paralel dengan Model Hak-hak Prosedural (*The Procedural Rights*).

Model Hak-hak Prosedural penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan yang kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pernasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Pendekatan semacam

[694] Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm.122.
[695]Abdul Qodir Audah *Op.Cit*.,hlm. 121

ini melihat si korban sebagai seorang subjek harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.[696]

Model hak-hak prosedural dianggap dapat memehuhi perasaan untuk membalas si korban maupun masyarakat. Dalam model ini fungsi pidana dan hukum pidana dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menciptakan kerjasama antara polisi, jaksa dan si korban. Di samping itu si korban melalui cara ini dimungkinkan untuk memperoleh kembali harga diri dan rasa percaya diri. Keuntungan lainnya adalah hak-hak yang diberikan pada korban untuk dapat berperan secara aktif dalam proses peradilan. Selain itu dalam model ini, hakim dapat memperoleh informasi secara langsung dari korban.[697]

[696] Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm.159-160.
[697] Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm.160.

BAB IV

PENYEBAB HAK KORBAN DALAM PENUNTUTAN TERDAKWA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN DAN KEMANFAATAN

4.1. Tata Cara Penuntutan Terdakwa dan Pemenuhan Hak Korban

Tata cara penuntutan terdakwa dan pemenuhan hak ganti rugi diatur di dalam KUHAP,sementara tata cara pemenuhan hak korban lainnya diatur pada Peraturan Pemerintah, yakni:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan SaksiTindak Pidana Pencucian Uang;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitus dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

4.1.1. Tata Cara Penuntutan Terdakwa dan Pemenuhan Hak Ganti Rugidalam KUHAP

4.1.1.1. Tata cara Penuntutan Terdakwa

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.[698] Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.[699]Penuntut umum memiliki wewenang:[700]

a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

[698]Pasal 1 Angka 7 dan Pasal 13 KUHAP.
[699]Pasal 1 Angka 6 Huruf b KUHAP.
[700]Pasal 14 KUHAP.

d. membuat surat dakwaan;
e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
g. melakukan penuntutan;
h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
j. melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 2 UU Kejaksaan menentukan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan tersebut dilaksanakan secara merdeka, artinya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara merdeka, makaseorang jaksadilarang merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/ daerah, dan atau badan usaha swasta. Selain itu seorang jaksa juga dilarang untuk merangkap menjadi seorang advokat atau penasehathukum.[701]

Penuntutan merupakan keputusan sementara tentang pelaksanaan penegakan hukum pidana dan yang menjadi materi penuntutan adalah surat dakwaan. Sebelum melakukan proses penuntutan perkara, penuntut umum harus

[701] Dewi Meta Lutfian,*Op.Cit.*,hlm.74.

lebih dahulu mempelajari dan meniliti berkas perkara apakah cukup bahan-bahan keterangan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.[702] Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan penuntutan, karena bahan keterangan tidak cukup dan dan juga tidak mungkin dilengkapi, maka ia mengambil keputusan untuk menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan itu dituangkan di dalam surat ketetapan, dilakukan karena:[703]

1. Tidak cukupbukti;
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidanaatau;
3. Perkara ditutup demihukum

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.[704]

Untuk penuntutan yang telah selesai dilakukan secepatnya harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Surat dakwaan tersebut berisikan identitas tersangka dan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila penuntut umum hendak mengubahsuratdakwaan baikdengantujuan untuk menyempurnakan maupun untuk

---

[702] *Op.Cit.*, hlm. 4
[703] *Ibid.*,hlm. 4-5
[704] Ketentuan Pasal 137 KUHAP. Pasal 15 KUHAP menentukan bahwa Penuntut Umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.

tidak melanjutkan penuntutannya maka hal tersebut hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari dimulainya persidangan di pengadilan. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai, dan penuntut umum harus menyampaikan perubahan surat dakwaan tersebut kepada terdakwa atau penasehat hukum terdakwa danpenyidik.[705]

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.[706] Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.[707]

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.[708]

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.[709] Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena

[705]Djoko Prakoso, *Op.Cit.*
[706] Pasal 138 Ayat (1) KUHAP.
[707] Pasal 138 Ayat (2) KUHAP.
[708] Pasal 139 KUHAP.
[709] Pasal 140 Ayat (1) KUHAP.

tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.[710] Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.[711] Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.[712] Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.[713]

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:[714]

a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
b. beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain;
c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak

[710] Pasal 140 Ayat (2) Huruf a KUHAP.
[711] Pasal 140 Ayat (2) Huruf b KUHAP.
[712] Pasal 140 Ayat (2) Huruf c KUHAP.
[713] Pasal 140 Ayat (2) Huruf d KUHAP.
[714] Pasal 141 KUHAP.

termasuk dalm ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.[715]

Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar. segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.[716] Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:[717]

a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Surat dakwaanyang tidak berisikanuraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.[718]Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. [719]

Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.[720]Pengubahan surat dakwaan tersebut

[715] Pasal 142 KUHAP.
[716] Pasal 143 Ayat (1) KUHAP.
[717] Pasal 143 Ayat (2) KUHAP.
[718] Pasal 143 Ayat (3) KUHAP.
[719] Pasal 143 Ayat (4) KUHAP.
[720] Pasal 144 Ayat (1) KUHAP.

dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.[721] Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.[722]

4.1.1. Tatacara Pemenuhan Hak Ganti Rugi

KUHAP memberikan ruang kepada korban untuk mendapatkan hak berupa pengajuan ganti kerugian terhadap kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dan meminta hakim ketua sidang memberi penetapan untuk menggabungkan pemeriksaan perkara ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana tersebut. Gugatan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP.[723]

Permintaan untuk menggabungkan pemeriksaan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalamhal penuntut umumtidak hadir permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkanputusan.Pengadilan negeri akan menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya berkekuatan hukumtetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

---

[721] Pasal 144 Ayat (2) KUHAP.
[722] Pasal 144 Ayat (3) KUHAP.
[723] Adil Lugianto,*Op.Cit*., hlm.557.

Apabila terhadap putusan perkara pidana tidak diajukan banding oleh penuntut umum, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. [724]

Gugatan ganti kerugian tersebut hanya dapat diajukan terhadap penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban dan tidak termasuk ganti rugi imateriil. Selain itu, korban tidak dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan terhadap gugatan ganti kerugian tersebut, karena hak untuk mengajukan upaya hukum ada pada penuntut umum, bukan korban. Apabila terhadap putusan perkara pidana tidak diajukan banding oleh penuntut umum, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.[725]

Suatu pelanggaran hukum pidana dapat menimbulkan kerugian dan immateriil kepada pihak lain. Orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum, menurut hukum perdata, memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata). Korban kejahatan sebagai salah satu orang yang dirugikan dalam pelanggaran hukum pidana memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti keugian digabungkan melalui prosedur pidana (Pasal 98 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut selengkapnya berisi:[726]

> Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri *menimbulkan kerugian bagi orang lain*, (pen) maka hakim ketua siding atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

---

[724] *Ibid.*
[725] *Ibid.*
[726] Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan…,Op.Cit.,* hlm 82-83.

Kerugian bagi orang lain maksudnya adalah (subjeknya) tidak bersifat limitatif yakni sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata siapa saja yang manderita kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan, termasuk kerugian pihak korban (Penjelasan Pasal 98 ayat 1), sedangkan jenis kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejahatan bersifat limitatif, yakni dibatasi pada kerugian bersifat materiil berupa biaya-biaya atau pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 99 KUHAP) yang dikuatkan dalam yurisprudensi MARI.[727] Ketentuan tentang jenis kerugian ini tidak sesuai dengan aspirasi Pasal 101 KUHAP yaitu "ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian." Hukum perdata tidak membatasi jenis dan jumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan (penggugat) apabila kerugian tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip kuasalitas sebagaimana diatur pada pasal 1365 KUH Perdata.[728]

Kemungkinan gugatan pihak ketiga atau korban kejahatan yang dapat digunakan dengan ~~perkara~~ pidana, menurut Yahya Harahap merupakan "sistem hukum baru dalam kehidupan hukum di Indonesia,[729] sedangkan Lamintang mengatakan sebagai suatu yang luar biasa dan sebagai ketetuan yang pertama dalam sejarah hukum acara peradilan pidana Indonesia.[730] Pemeriksaan dan putusan dikabulkan dan tidaknya permohonan ganti kerugian bersifat assesoir,

---

[727] Putusan MARI Nomor 976.K/Pid/1988, 24 September 1991.dalam Mudzakkir,*Ibid*,hlm.83.
[728] *Ibid*,hlm.83.
[729] Yahya Harahap,1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*,Jakarta: Pustaka Kartini, cet. Ke-3, Jilid II, hlm. 604.
[730] Lamintang, PA.F. 1984, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, hlm.262-263.

artinya putusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan ganti kerugian bergantung kepada putusan perkara pokok, yakni perbuatan pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan ganti kerugian kepada pihak ketiga baru dapat *eksekusi* jika putusan pokoknya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.[731]

Tuntutan ganti kerugian yang dimbulkan oleh suatu pelanggaran hukum pidana dapat ditempuh malalui dua prosedur, yaitu penggabungan dalam prosedur peradilan pidana dan gugtann melalui Prosedur peradilan perdata. Tuntutan ganti kerugian karena kejahatan di berbagai negara dapat diajukan kepada negara dalam bantuk kompensasi, karena negara memiliki tanggung jawab terhadap warganya yang menderita kerugian karena palanggaran hukum pidana. Hukum positif Indonesia tidak mengatur masalah kompensasi terhadap korugian materiil yang disebabkan karena kejahatan. Hak untuk memperoleh kompensasi ini menjadi salah satu hak korban yang dimuat dalam Deklarasi PBB Tahun 1985 Nomor A/Res/ 40/34.[732]

Secara normatif KUHAP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan, tanpa memberi ruang kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Sebagaimana dikemukakan pada bab-bab terdahulu, korban dalam KUHAP hanya diaturdalam beberapa pasal saja yaitu Pasal 98-101.[733]Pasal 98-101 KUHAP adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian. Mekanisme yang ditempuh adalah penggabungan

[731] Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan…Op.Cit.,*, hlm 84.
[732] *Ibid*,hlm.110.
[733] Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm.105.

perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana. Penggabungan perkara ganti kerugian merupakan acara yang khas dan karakteristik, yang ada di dalam isi ketentuan dari KUHAP.[734] Hak-hak korban dalam Pasal 98-101 KUHAP tertera sebagaimana pada Tabel 10.

Tabel 10. Hak-hak Korban dalam Pasal 98-101 KUHAP

NO	PASAL KUHAP	HAK-KORBAN
1.	98 Ayat (1)	Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
2.	99 Ayat (1)	Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana ‘dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut.
3.	99 Ayat (2)	Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

[734] *Ibid*., hlm.106.

4.	99 Ayat (3)	Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya niendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.
5.	100 Ayat (1)	Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
6.	100 Ayat (2)	Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.
7.	101	Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Asas penggabungan perkara ganti kerugian pada perkara pidana dapat disebutkan sebagai berikut:[735]

1. Merupakan praktik penegakan hukum berdasarkan ciptaanKUHAP sendiri bagi proses beracara (pidana dengan perdata) untuk peradilan di Indonesia. KUHAP memberi prosedur hukum bagi seorang korban (atau beberapa korban) tindak pidana, untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung;
2. Penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana sekaligus adalah sesuai dengan asas keseimbangan yang dimaksud

[735] R. Soeparmono, 2003, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 86.

KUHAP.

Maksud dari penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah: pertama, supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Kedua, hal penggabungan sesuai dengan asas beracara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.Ketiga, orang lain termasuk korban, dapat sesegera mungkin memperoleh ganti ruginya tanpa harus melalui prosedur perkara perdata biasa yang dapat memakan waktu yang lama.[736]

Adapun tujuan dari penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana adalah, bahwa tujuan yang sebenarnya terkandung dalam lembaga penggabungan yaitu, agar orang lain atau saksi korban dalam tindak pidana sesegera mungkin mendapatkan ganti kerugian, serta tidak lagi dibebani melalui prosedur dan proses perdata yang terpisah dan memakan waktu lama.[737]

Untuk dapat mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:[738]

1. Haruslah berupa dan merupakan kerugian yang dialami oleh orang lain termasuk korban (saksi korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
2. Jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat diminta hanya terbatas sebesar jumlah kerugian material yang diderita orang lain, termasuk korban tersebut.
3. Bahwa sasaran subjek hukumnya pihak-pihak adalah terdakwa.

---

[736] *Ibid*.
[737] *Ibid*.,hlm.87.
[738] *Ibid*.

4. Penuntutan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidananya tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitor*).
5. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, tuntutan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.
6. Perkara pidananya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian bagi orang lain termasuk kerugian pada korban.
7. Penuntutan gugatan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidana tersebut tidak perlu diajukan melalui panitera pengadilan negeri, melainkan dapat jangsung diajukan dalam sidang pengadilan melalui majelis hakim/ hakim.
8. Gugatan ganti kerugian Pasal 98 ayat (1) KUHAP adalah, harus sebagai akibat kerugian yang timbul karena perbuatan terdakwa dan tidak mengenai kerugian-kerugian lainnya.

Dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang dapat diajukan hanya terbatas pada tuntutan ganti kerugian yang secara nyata-nyata (riil) dikeluarkan, atau dengan kata lain ganti kerugian material.[739] Pembatasan ini dimaksudkan didasarkan pada:[740]

a. Proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut harus berjalan cepat, tidak memakan waktu yang lama dan seketika dan sesegera mungkin dapat direalisasikan, serta adanya prinsip pemeriksaan peradilan yang cepat dan sederhana, misalnya hanya membuktikan bukti-bukti surat dan kwitansi,

[739] Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konterporer,* Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 115

[740] R. Soeparmono,*Op.Cit*.hlm.88-89.

biaya pengobatan, biaya perawatan, biaya memperbaiki kendaraan, dan lain-lain.

b. Kerugian materiil yang berupa kerugian yang secara nyata (riil) tersebut mudah pembuktiannya.
c. Karena hanyalah kerugian yang immateriil tidak dapat diterima untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.
d. Karena itulah, imbalan ganti kerugian immateriil harus dipisahkan, dengan maksud agar diajukan tersendiri pada gugatan perdata biasa, karena dipandang tidak sederhana dan tidak mudah.
e. Karena pemeriksaan dan pembuktiannya sulit serta memakan waktu pula menghambat pemeriksaan pidananya, sehingga bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan adanya pembatasan di atas, muncul kelemahan-kelemahan dari praktik penggabungan gugatan ganti kerugian yang ada dalam KUHAP, di antaranya:[741]

a. Sistem penggabungan tersebut dirasakan belum mendekati hakekat tujuan ganti kerugian itu sendiri.
b. Tuntutan ganti kerugian oleh orang lain yang menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian dibatasi hanya pada kerugian materiil yang nyatanyata dikeluarkan oleh orang yang dirugikan langsung tersebut. Jadi KUHAP dalam ketentuan-ketentuannya

[741] *Ibid.*,hlm.103-104.

membatasi hak.

c. Untuk kerugian non materiil, yaitu kerugian immateriil terpaksa harus mengajukan lagi dengan gugatan perdata biasa tersendiri, yang mungkin dapat memakan waktu lama.
d. Kondisi seperti ini berarti mengaburkan maksud semula dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses.
e. Adanya kendala dalam pelaksanan masalah pembayaran ganti kerugian tersebut.
f. Apabila pihak korban tetap menuntut ganti kerugian yang bersifat immateriil juga, hasilnya akan nihil, karena putusan selalu menyatakan gugatan ganti kerugian immateriil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berdasarkan hukum.
g. Majelis hakim harus cermat, sebab selalu harus memisahkan antara kerugian materiil dengan kerugian immateriil, sehingga tidak efisien.
h. Karena gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat assesoir.
i. Pada setiap putusan perdatanya, pihak korban/ penggugat dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut selalu menggantungkan pihak terdakwa atau jaksa penuntut umum jika mau banding, sehingga melenyapkan hak bandingnya sebagai upaya hukum.

Kelemahan-kelemahan di atas semakin mempersempit ruang korban tindak pidana untuk mengajukan hak-haknya, penggabungan gugatan ganti kerugian hanya memberikan peluang untuk kerugian materiil saja, sedangkan untuk pemulihan kerugian immateriil masih harus diajukan secara terpisah

melalui gugatan perdata yang pada prakteknya tidak sederhana.[742]

Gelaway[743] merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

1. Meringankan penderitaan korban
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
4. Mempermudah proses peradilan
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalarn bentuk tindakan balas dendam.

Dari tujuan yang dirumuskan Gelaway di atas, bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Artinya, tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian karena ada juga korban, baik langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam suatu kejahatan. Hal yang perlu dilayani dan diayomi adalah korban dari golongan masyarakat kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial.[744]

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolok ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia.Atas dasar itu, program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang

---

[742] Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm.110.
[743] Chaerudin & Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Grhadika Press, hlm. 65
[744] *Ibid*., hlm.179.

kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.[745]

Pembatasan mengenai jenis kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dapat dituntut melalui prosedur pidana yakni hanya kerugian yang diderita korban yang sifatnya perdata berupa biaya atau ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh korban (Pasal 99 KUHAP) sesungguhnya tidak layak dibandingkan dengan penderitaan korban. Kerugian materiil lainnya yang bukan biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan dan kerugian immateriil yang justru yang paling lebih berat dialami oleh korban tidak dapat dimintakan ganti kerugian melalui prosedur pidana. Dengan pemilahan itu, kerugian yang pertama tersebut dapat secara cepat dengan prosedur yang sederhana dan segera memperoleh kepastian hukum melalui keputusan pengadilan yang dikeluarkan bersamaan dengan perkara pidana. Asas yang sama juga berlaku bagi tuntutan ganti kerugian bagi tersangka (terdakwa atau terpidana) karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 95KUHAP).[746]

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

[745] *Ibid*.
[746] Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan…Op.Cit.,* hlm 71-72.

hukum tetap diterima.[747] Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.[748]

Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.[749] Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.[750]

Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).[751] Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).[752](3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud

---

[747] Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (PP No. 92 Tahun 2015)

[748][748] Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (PP No. 92 Tahun 2015).

[749] Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (PP No. 7 Tahun 1983).

[750] Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (PP No. 7 Tahun 1983)

[751]Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (PP No. 92 Tahun 2015).

[752]Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (PP No. 92 Tahun 2015).

dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).[753]

Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.[754] Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.[755]

Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan.[756] Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.[757] Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.[758]

---

[753]Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (PP No. 92 Tahun 2015)

[754]Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (PP No. 92 Tahun 2015)

[755]Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (PP No. 92 Tahun 2015)

[756]Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (PP No. 92 Tahun 2015)

[757]Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (PP No. 92 Tahun 2015)

[758]Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (PP No. 92 Tahun 2015)

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a. pemohon yang telah mengajukan ganti kerugian namun belum mendapatkan petikan putusan atau penetapan pengadilan mengenai besaran ganti kerugian yang diterima, putusan atau penetapan pengadilan mengenai besaran ganti kerugian mengacu pada peraturan pemerintah ini.[759]Pemohon ganti kerugian yang telah mendapatkan petikan putusan atau penetapan pengadilan namun belum menerima ganti kerugian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, besaran ganti kerugian dibayarkan sesuai dengan petikan putusan atau penetapan pengadilan.[760]

4.1.2. Tata Cara Pemenuhan Hak Korban dalam Peraturan Pemerintah

4.1.2.1. Perlindungan Korban Saksi Pelanggaran HAM Berat

Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat diundangkan pada tanggal 13 Maret 2002, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (PP No. 2 Tahun 2002).

PP No. 2 Tahun 2002 menentukan bahwa setiap korban atau saksi dalam Pelanggaran HAMBerat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak

[759]Pasal 39B huruf a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (PP No. 92 Tahun 2015)

[760]Pasal 39B huruf b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (PP No. 92 Tahun 2015).

hukum dan aparat keamanan[761]yang diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.[762]

Bentuk-bentuk perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan,meliputi:[763]

a. perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
b. perahasiaan identitas korban atau saksi;
c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Tata cara perlindungan korban dan saksi Pelanggaran HAM Berat diatur pada Bab III PP No. 2 Tahun 2002, sebagai berikut:

1) Perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan:[764]
    a. inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan[765]; dan atau
    b. permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi
2) Permohonan disampaikan kepada:[766]
    a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada tahap penyelidikan

[761]Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (PP No. 2 Tahun 2002).

[762]Ketentuan Pasal 2 Ayat 2 PP No. 2 Tahun 2002.Pada Penjelasannya diterangkan bahwa yang dimaksud "pemeriksaan di sidang pengadilan" adalah proses pemeriksaan pada sidang di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

[763]Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2002.

[764] Pasal 5 Ayat (1) PP No. 2 Tahun 2002

[765]Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a PP No. 2 Tahun 2002 menerangkan bahwa yang dimaksud inisiatif aparat penegak hukum atau aparat keamanan adalah tindakan perlindungan yang langsung diberikan berdasarkan pertimbangan aparat bahwa korban dan saksi perlu segera dilindungi. Inisiatif tersebut dapat berasal dari laporan masyarakat.

[766]Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) PP No. 2 Tahun 2002. Pada Penjelasan diterangkan bahwa permohonan perlindungan yang diajukan pada tahap tertentu sekaligus merupakan permohonan untuk tahap berikutnya.

b. Kejaksaan, pada tahap penyidikan dan penuntutan;

c. Pengadilan, pada tahap pemeriksaan

3) Permohonan disampaikan lebih lanjut kepada aparat keamanan untukditindaklanjuti.[767]Permohonan perlindungan dapat disampaikan secara langsung kepada aparat keamanan.[768]

4) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, aparat penegak hukum atau aparat keamanan melakukan:[769]

a. klarifikasi atas kebenaran permohonan; dan

b. identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan

5) Pemberian perlindungan terhadap korban dan saksi dihentikan apabila:[770]

a. atas permohonan yang bersangkutan;

b. korban dan atau saksi meninggal dunia; atau

c. berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum atau aparat keamanan, perlindungan tidak diperlukan lagi.

6) Penghentian perlindungan harus diberitahukan secara tertulis kepada bersangkutan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan.[771]

7) Korban dan saksi tidak dikenakan biaya apapun perlindungan yang diberikan kepada dirinya.[772] Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan perlindungan terhadap korban dan saksi dibebankan pada anggaran masing-

[767]Pasal 5 Ayat (3) PP No. 2 Tahun 2002.
[768]Pasal 5 Ayat (4) PP No. 2 Tahun 2002.
[769]Pasal 6 PP No. 2 Tahun 2002.
[770]Pasal 7 Ayat (1) PP No. 2 Tahun 2002.
[771]Pasal 7 Ayat (2) PP No. 2 Tahun 2002.
[772]Pasal 8 Ayat (1) PP No. 2 Tahun 2002.

masing instansi aparat penegak hukum atau aparat penegak hukum atau aparatkeamanan. [773]

4.1.2.2. Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM Berat

Tata cara kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat diundangkan pada tanggal 13 Maret 2002 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 (PP No. 3 Tahun 2002). Kompensasi,[774] restitusi,[775] dan atau rehabilitasi,[776] diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.[777]Pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat,cepat, dan layak.[778]

---

[773]Pasal 8 Ayat (2) PP No. 2 Tahun 2002.

[774]Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya, (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tatacara Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (PP No.3 Tahun 2002).

[775]Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Pasal 1 Angka 5 PP No.3 Tahun 2002).

[776]Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain (Pasal 1 angka 6. PP No.3 Tahun 2002).

[777]Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) PP No.3 Tahun 2002. Pada penjelasannya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan ”ahli waris” adalah ahli waris sesuai dengan penetapan pengadilan.

[778]Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) PP No.3 Tahun 2002.Pada penjelasannya diterangkan bahwa Yang dimaksud dengan “tepat” adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban yang memang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang dimaksud dengan “cepat” adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban sesegera mungkin dalam rangka secepatnya mengurangi penderitaan korban. Yang dimaksud dengan “layak” adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban secara patut berdasarkan rasa keadilan.

Instansi Pemerintah Terkait[779]bertugas melaksanakan pemberian kompensasi dan rehabilitasi berdasarkan putusan Pengadilan HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[780] Dalam hal kompensasi dan atau rehabilitasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan.[781] Pemberian restitusi dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan perintah yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan HAM.[782]

Tata cara pelaksanaan kompensasi restitusi dan atau rehabilitasi diatur dalam Bab III PP No. 3 Tahun 2002, sebagai berikut:

1) Pengadilan HAM mengirimkan salinan putusan Pengadilan HAM, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Jaksa Agung.[783]
2) Jaksa Agung melaksanakan putusan dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada instansi pemerintah terkait untuk melaksanakan pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi dan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi.[784]
3) Instansi pemerintah terkait melaksanakan pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi serta pelaku atau pihak ketiga melaksanakan pemberian restitusi,

[779]Instansi Pemerintah Terkait adalah instansi Pemerintah termasuk Departemen Keuangan yang secara tegas disebut dalam amar putusan (Pasal 1 Angka 7 PP No.3 Tahun 2002).
[780]Pasal 3 Ayat (1) PP No.3 Tahun 2002
[781]Pasal 3 Ayat (2) PP No.3 Tahun 2002
[782]Pasal 4 PP No.3 Tahun 2002.
[783]Pasal 6 Ayat (1) PP No.3 Tahun 2002.
[784]Pasal 6 Ayat (2) PP No.3 Tahun 2002.

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak berita acara pelaksanaan putusan pengadilan diterima.[785]

4) Pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi, dilaporkan oleh instansi pemerintah terkait, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan HAM yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi tersebut.[786]
5) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi disampaikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.[787]
6) Setelah Ketua Pengadilan HAM menerima tanda bukti, Ketua Pengadilan HAM mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.[788]
7) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi kepada pihak korban melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari, korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung.[789]
8) Jaksa Agung segera memerintahkan instansi pemerintah terkait, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.[790]

---

[785]Pasal 7 PP No.3 Tahun 2002.
[786]Pasal 8 Ayat (1) PP No.3 Tahun 2002.
[787]Pasal 8 Ayat (2) PP No.3 Tahun 2002.
[788]Pasal 8 Ayat (3) PP No.3 Tahun 2002.Pada penjelasannya diterangkan bahwa ketentuan Pasal 8 Ayat (3) dimaksudkan agar tercipta adanya keterbukaan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi kepada pihak korban.
[789]Pasal 9 Ayat (1) PP No.3 Tahun 2002.
[790]Pasal 9 Ayat (2) PP No.3 Tahun 2002.

9) Dalam hal pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau kelambatan pelaksanaan harus dilaporkan kepada Jaksa Agung.[791]

4.1.2.3. Perlindungan Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

Tata cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme diundangkan pada tanggal 14 Mei 2003 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 (PP No. 24 Tahun 2003).[792]

PP No. 24 Tahun 2003 mengartikan bahwa perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dari kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme.[793] Setiap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan

[791]Ketentuan Pasal 10 PP No.3 Tahun 2002. Pada penjelasan pasal diterangkan bahwa Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan kepada pelaku atau Pemerintah dalam pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi untuk dilakukan secara bertahap karena keterbatasan kemampuan bila dilaksanakan sekaligus.

[792] UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantas Tindak Pidana Teroris Menjadi Undang-undang yang dijadikan konsiderans"Mengingat" angka 2 pada PP No. 24 Tahun 2003, telah diubah oleh UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003. Dengan demikian PP No. 24 Tahun 2003 harus juga diubah menyesuaikan tambahan ketentuan yang ada pada UU Nomor 5 Tahun 2018.

[793]Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (PP No. 24 Tahun 2003).

diri, jiwa dan atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.[794]

Perlindungan dilakukan oleh aparat hukum dan aparat keamanan berupa: a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; b. kerahasiaan identitas saksi; c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.[795]

Tata cara perlindungan Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme berdasarkan PP No. 24 Tahun 2004, adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan wajib dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya tindak pidana terorisme.[796]
2. Dalam hal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan atau Hakim bertempat tinggal di luar wilayah kerja kepolisian, perlindungan diberikan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.[797]
3. Dalam hal persidangan dilaksanakan di luar tempat terjadinya tindak pidana terorisme maka perlindungan diberikan oleh pejabat Kepolisian Negara

[794]Pasal 2 PP No. 24 Tahun 2003.
[795]Ketentuan Pasal 3 PP No. 24 Tahun 2003. Pada penjelasannya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan di sidang pengadilan adalah proses pemeriksaan pada sidang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung.
[796]Pasal 4 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 2003.
[797]Pasal 4 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 2003.

Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat sidang pengadilan dilaksanakan.[798]

4. Perlindungan terhadap Saksi wajib diberikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam semua tingkat pemeriksaan perkara.[799]
5. Perlindungan wajib diberitahukan kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, dalam waktu 1 (satu) hari sebelum perlindungan diberikan.[800]
6. Dalam hal perlindungan belum diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Saksi, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dapat mengajukan permohonan perlindungan.[801]
7. Permohonan perlindungan diajukan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.[802]
8. Dalam hal permohonan perlindungan diajukan oleh Saksi, tembusan permohonan tersebut disampaikan kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam semua tingkat pemeriksaan perkara.[803]
9. Dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permohonan perlindungan diterima, Kepolisian Negara Republik

[798]Pasal 4 Ayat (3) PP No. 24 Tahun 2003.
[799]Pasal 5 PP No. 24 Tahun 2003.
[800]Pasal 6 PP No. 24 Tahun 2003.
[801]Pasal 7 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 2003.Pada Penjelasannya diterangkan bahwa Permohonan perlindungan yang diajukan Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim berlaku juga kepada keluarga. Perlindungan yang diajukan pada tahap penyidikan berlaku sampai berakhirnya pemeriksaan di sidang pengadilan.
[802]Pasal 7 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 2003.
[803]Pasal 7 Ayat (3) PP No. 24 Tahun 2003.

Indonesia melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.[804]

10. Pemberian perlindungan dihentikan:[805]
    a. Berdasarkan penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia perlindungan tidak diperlukan lagi; atau
    b. Atas permohonan yang bersangkutan.
11. Penghentian pemberian perlindungan harus diberitahukan secara tertulis kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan/ atau Hakim dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan.[806]
12. Dalam hal saksi didatangkan dari luar wilayah negara Republik Indonesia, perlindungan Saksi tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengan pejabat kepolisian yang berwenang di negara tersebut.[807]
13. Segala biaya berkaitan dengan perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dibebankan pada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.[808]

4.1.2.4. Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uangdiundangkan pada tanggal 11 November 2003 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 (PP No. 57 Tahun 2003). Pasal 1 Angka 1 PP No. 57 Tahun 2003 menerangkan bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk

[804]Pasal 7 Ayat (4) PP No. 24 Tahun 2003
[805]Pasal 9 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 2003.
[806]Pasal 9 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 2003.
[807]Pasal 10 PP No. 24 Tahun 2003.
[808]Pasal 11 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 2003.

perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap Pelapor[809] atau Saksi[810] dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/ atau hartanya termasuk keluarganya[811] Pelapor dan Saksi tidak dikenakan biaya atas perlindungan khusus yang diberikan kepadanya.[812]Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus kepada Saksi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.[813]

Bentuk Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:[814]

a. perlindungan atas keamanan pribadi, dan/ atau keluarga Pelapor dan Saksi dari ancaman fisik atau mental;[815]
b. perlindungan terhadap harta Pelapor dan Saksi;
c. perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor dan Saksi;[816] dan/ atau

---

[809]Pelapor berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (PP No. 57 Tahun 2003) adalah
   a. karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan menyampaikan laporan kepada PPATK tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan atau Transaksi Keuangan yang dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang; atau
   b. secara sukarela melaporkan kepada penyidik tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

[810]Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana pencucian uang yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri (Pasal 1 Angka 3 PP No. 57 Tahun 2003).

[811]Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/istri dan anak dari Pelapor dan Saksi. (Pasal 1 Angka 4 PP No. 57 Tahun 2003).

[812]Pasal 4 PP No.57 Tahun 2003.

[813]Ketentuan Pasal 3 PP No.57 Tahun 2003.Pada Penjelasannya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan tingkat pemeriksaan perkara adalah pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan..

[814]Pasal 5 PP No.57 Tahun 2003.

[815]Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/ atau keluarga Pelapor dan Saksi dari ancaman fisik atau mental dapat diberikan misalnya dalam bentuk penjagaan fisik yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu, evakuasi atau relokasi Pelapor dan Saksi ke tempat lain yang aman dan bebas dari ancaman (Penjelasan Pasal 5 huruf a PP No.57 Tahun 2003).

[816]Yang dimaksud dengan perahasiaan misalnya tidak menyebutkan sama sekali identitas Pelapor dan Saksi. Penyamaran misalnya dilakukan dengan menyebut identitas lain dari Pelapor dan Saksi. (Penjelasan Pasal 5 huruf c PP No.57 Tahun 2003).

d. pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara

Tata cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam BAB II PP No.57 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan khusus oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan adanya kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/ atau harta, termasuk keluarga Pelapor dan Saksi sebagai akibat:[817]
   a. disampaikannya laporan tentang adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan atau Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai oleh Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a atau PPATK kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   b. disampaikannya laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang oleh Pelapor atau PPATK kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
   c. ditetapkannya seseorang sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang.
2. Dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan diterima atau seseorang ditetapkan sebagai Saksi, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan klarifikasi atas kebenaran laporan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.[818]
3. Pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pelapor dan/ atau Saksi paling lambat

[817]Pasal 6 Ayat (1) PP No.57 Tahun 2003.
[818]Pasal 6 Ayat (2) PP No.57 Tahun 2003.

dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan perlindungan.[819]

4. Dalam hal perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum diberikan, Pelapor, Saksi, PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat mengajukan permohonan perlindungan khusus kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.[820]
5. Permintaan perlindungan khusus oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dilakukan sesuai dengan tingkatan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang.[821]
6. Permohonan perlindungan khusus diajukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pelapor dan/ atau Saksi.[822]
7. Dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permohonan perlindungan khusus diterima, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan khusus yang diperlukan. Permohonan perlindungan khusus diajukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pelapor dan/ atau Saksi.[823]
8. Pemberian perlindungan khusus diberitahukan secara tertulis kepada Pelapor dan/ atau Saksi paling lambat dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan perlindungan. Permohonan perlindungan

[819]Pasal 6 Ayat (3) PP No.57 Tahun 2003.
[820]Pasal 7 Ayat (1) PP No.57 Tahun 2003.
[821]Pasal 7 Ayat (2) PP No.57 Tahun 2003.
[822]Pasal 7 Ayat (3) PP No.57 Tahun 2003.
[823]Pasal 7 Ayat (4) PP No.57 Tahun 2003.

khusus diajukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pelapor dan/ atau Saksi.[824]

9. Dalam melaksanakan perlindungan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi[825] dengan PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang.[826]
10. Teknis pelaksanaan perlindungan khusus diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan masukan dari instansi terkait.[827]
11. Pemberian perlindungan khusus terhadap Pelapor dan/ atau Saksi dihentikan: a. berdasarkan penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia perlindungan tidak diperlukan lagi; atau b. atas permohonan yang bersangkutan.[828]
12. Penghentian pemberian perlindungan khusus harus diberitahukan secara tertulis kepada Pelapor, Saksi dan/ atau keluarganya dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum perlindungan khusus dihentikan.[829]
13. Dalam hal Pelapor dan/ atau Saksi menilai perlindungan khusus masih diperlukan, Kepolisian Negara Republik Indonesia atas dasar permohonan

[824]Pasal 7 Ayat (5) PP No.57 Tahun 2003.

[825]Yang dimaksud dengan berkoordinasi adalah bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perlindungan khusus kepada Pelapor dan Saksi, bekerja sama dengan PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang, agar perlindungan tersebut dapat berjalan secara optimal (Penjelasan Pasal 8 PP No.57 Tahun 2003).

[826]Pasal 8 PP No.57 Tahun 2003.

[827]Ketentuan Pasal 9 PP No.57 Tahun 2003. Penjelasan Pasal 9 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan instansi terkait adalah PPATK, Kejaksaan, Pengadilan, dan instansi lain yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

[828]Pasal 10 Ayat (1) PP No.57 Tahun 2003.Penjelasan Pasal 10 ayat (1) menerangkan bahwa Penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap alasan penghentian perlindungan khusus dilakukan secara seksama dan hati-hati dengan memperhatikan kepentingan Pelapor dan Saksi.

[829]Pasal 10 Ayat (2) PP No.57 Tahun 2003.

Pelapor dan/ atau Saksi wajib melanjutkan pemberian perlindungan khusus bagi Pelapor dan/ atau Saksi yang telah dihentikan.[830]

14. Dalam hal Saksi didatangkan dari luar wilayah negara Republik Indonesia, perlindungan khusus saksi tersebut dilaksanakan dengan melakukan kerja sama dengan pejabat kepolisian yang berwenang di negara tersebut berdasarkan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik di bidang tindak pidana antara Pemerintah Indonesia dan negara tersebut.[831]
15. Dalam hal tidak ada perjanjian kerja sama bantuan timbal balik perlindungan khusus dapat dilakukan berdasarkan prinsip resiprositas.[832]
16. Segala biaya berkaitan dengan perlindungan khusus terhadap Pelapor dan Saksi, dibebankan pada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia tersendiri.[833]

4.1.2.5. Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT

Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga diundangkan pada tanggal 13 Februari 2006 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 (PP No. 4 Tahun 2006). Pasal 1 PP Nomor 4 Tahun 2006 memberikan pengertian tentang kerjasama dan penyelenggaraan pemulihan.

PP No. 4 Tahun 2006 mengertikan kerjasama sebagai cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk

[830]Pasal 10 Ayat (3) PP No.57 Tahun 2003.
[831]Pasal 11 Ayat (1) PP No.57 Tahun 2003.
[832]Pasal 11 Ayat (2) PP No.57 Tahun 2003.
[833]Pasal 12 PP No.57 Tahun 2003.

memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.[834] Penyelenggaraan pemulihan[835] menurut PP No. 4 Tahun 2006 adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan[836] kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.[837]

Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.[838]Fasilitas dimaksud meliputi:[839]

a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
b. tenaga yang ahli dan profesional;
c. pusat pelayanan dan rumah aman;[840] dan
d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi :[841]

a. pelayanan kesehatan;
b. pendampingan korban;
c. konseling;[842]

---

[834]Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (PP No. 4 Tahun 2006).

[835]Pasal 1 Angka 1 PP No. 4 Tahun 2006 menentukan bahwa pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.

[836]Pasal 1 Angka 3 PP No. 4 Tahun 2006 menentukan bahwa Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi

[837]Pasal 1 Angka 2 PP No. 4 Tahun 2006.

[838]Pasal 2 Ayat (1) PP No. 4 Tahun 2006.

[839]Pasal 2 Ayat (2) PP No. 4 Tahun 2006.

[840]Yang dimaksud pusat pelayanan adalah yang dikenal dengan trauma center, sedangkan rumah aman dikenal dengan shelter (Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Huruf c PP No. 4 Tahun 2006).

[841]Pasal 4 PP No. 4 Tahun 2006.

[842]Yang dimaksud dengan "konseling" adalah pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Penjelasan Pasal 4 Huruf c PP No. 4 Tahun 2006).

d. bimbingan rohani;[843] dan

e. resosialisasi.

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.[844] Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.[845] Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban.[846] Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.[847] Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.[848]

Untuk kepentingan pemulihan, korban berhak mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ atau pembimbing

[843]Yang dimaksud dengan "bimbingan rohani" adalah konseling yang diberikan oleh rohaniwan (Penjelasan Pasal 4 Huruf d PP No. 4 Tahun 2006).
[844]Pasal 5 Ayat (1) PP No. 4 Tahun 2006.
[845]Pasal 5 Ayat (2) PP No. 4 Tahun 2006.
[846]Pasal 5 Ayat (3) PP No. 4 Tahun 2006.
[847]Pasal 5 Ayat (4) PP No. 4 Tahun 2006.
[848]Pasal 5 Ayat (5) PP No. 4 Tahun 2006. Penjelasan Pasal 5 ayat (5) menerangkan bahwa Instansi Sosial adalah instansi pemerintah yang ruang lingkup tugasnya menangani urusan sosial, dan instansi pemerintah daerah yang menanggulangi masalah sosial.

rohani.[849] Tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan kebutuhan medis korban.[850] Pelayanan dilakukan di sarana kesehatan dasar dan sarana kesehatan rujukan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat termasuk swasta.[851]

Dalam memberikan pelayanan kepada korban, tenaga kesehatan melakukan upaya:[852]

a. anamnesis kepada korban;
b. pemeriksaan kepada korban;
c. pengobatan penyakit;
d. pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis;
e. konseling; dan/ atau
f. merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan.

Selain upaya sebagaimana dimaksud di atas untuk kasus tertentu, tenaga kesehatan dapat melakukan :[853]

a. pelayanan keluarga berencana darurat untuk korban perkosaan; dan
b. pelayanan kesehatan reproduksi lainnya sesuai dengan kebutuhan medis.

---

[849]Pasal 6 PP No. 4 Tahun 2006

[850]Pasal 7 Ayat (1) PP No. 4 Tahun 2006.Penjelasan Pasal 7 ayat (1) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "Standar Profesi" adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and proffesional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

[851]Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) PP No. 4 Tahun 2006. Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sarana kesehatan antara lain puskesmas, balai pengobatan, dan rumah sakit.

[852]Pasal 8 Ayat (1) PP No. 4 Tahun 2006.

[853]Pasal 8 Ayat (2) PP No. 4 Tahun 2006.

Dalam memberikan pelayanan tenaga kesehatan harus membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[854]Untuk setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan harus ada persetujuan tindakan medis (*informed consent*) dari korban atau keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[855] Untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat *visum et repertum* dan/ atau *visum et repertum psichiatricum* atau membuat surat keterangan medis.[856]

Pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada korban, dapat dilakukan di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.[857]Dalam hal diperlukan dan atas persetujuan korban, korban dapat ditempatkan oleh pekerja sosial di rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang aman untuk melindungi korban dari ancaman.[858]Pengadaan rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang dilakukan masyarakat dapat difasilitasi oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[859]

---

[854]Ketentuan Pasal 8 Ayat (3) PP No. 4 Tahun 2006. Penjelasan Pasal 8 ayat (3) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "rekam medis" adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien (korban) pada sarana kesehatan

[855]Ketentuan Pasal 8 Ayat (4) PP No. 4 Tahun 2006. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "persetujuan tindakan medis" (informed consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien (korban) atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap korban tersebut. Persetujuan dapat diberikan secara lisan atau tertulis.

[856]Ketentuan Pasal 8 Ayat (5) PP No. 4 Tahun 2006. Penjelasan Pasal 8 ayat (5) menerangkan bahwa Visum et repertum dibuat oleh dokter yang memeriksa korban dan visum et repertum psichiatricum dibuat oleh dokter spesialis kesehatan jiwa.

[857]Pasal 9 Ayat (1) PP No. 4 Tahun 2006.

[858]Pasal 9 Ayat (2) PP No. 4 Tahun 2006.

[859]Pasal 9 Ayat (3) PP No. 4 Tahun 2006.

Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, pekerja sosial melakukan upaya:[860]

a. menggali permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalahnya;
b. memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial;
c. melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban;
d. mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling; dan/ atau
e. melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, relawan pendamping melakukan upaya:[861]

a. membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya;
b. berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang terkait dengan permasalahannya;
c. meyakinkan korban bahwa tidak seorang pun boleh melakukan tindakan kekerasan;
d. menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan;
e. memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya; dan/ atau
f. membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum.

[860]Pasal 11 PP No. 4 Tahun 2006.
[861]Pasal 12 PP No. 4 Tahun 2006.

Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, pembimbing rohani melakukan upaya:[862]

a. menggali informasi dan mendengarkan keluh kesah dari korban;
b. mempertebal keimanan dan ketakwaan korban serta mendorong untuk menjalankan ibadah menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu.
c. menyarankan pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu.
d. memberikan pemahaman mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Menteri dapat melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan kerjasama dalam rangka pemulihan korban.[863]Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dapat membentuk forum koordinasi pusat yang keanggotaannya berasal dari instansi terkait dan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.[864]

Untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka pemulihan korban, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi antar instansi terkait dengan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.[865]Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan yang khusus membidangi pemberdayaan perempuan dan anak.[866] yang dapat dibentuk oleh Gubernur.[867]

---

[862]Pasal 13 PP No. 4 Tahun 2006.
[863]Pasal 15 Ayat (1) PP No. 4 Tahun 2006.
[864]Pasal 15 Ayat (2) PP No. 4 Tahun 2006.
[865]Pasal 16 Ayat (1) PP No. 4 Tahun 2006.
[866]Pasal 16 Ayat (2) PP No. 4 Tahun 2006.
[867]Pasal 16 Ayat (3) PP No. 4 Tahun 2006.

Tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani dapat melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemulihan korban.[868]Kerjasama sebagaimana meliputi kegiatan sebagai berikut :[869]

a. melakukan rujukan dalam pelaksanaan upaya pemulihan korban; dan
b. penyiapan fasilitas rumah aman atau tempat alternatif bagi korban.

Dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/ atau pembimbing rohani dapat menjalin kerjasama dengan:[870]

a. kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
b. advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan;
c. penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan;
d. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
e. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
f. pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.

Untuk penyelenggaraan pemulihan, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial, baik nasional maupun internasional yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[871]

Pemerintah dan pemerintah daerah :[872]

a. menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban;

[868]Pasal 17 Ayat (1) PP No. 4 Tahun 2006.
[869]Pasal 17 Ayat (2) PP No. 4 Tahun 2006.
[870]Pasal 18 PP No. 4 Tahun 2006.
[871]Pasal 19 PP No. 4 Tahun 2006.
[872]Pasal 20 PP No. 4 Tahun 2006.

b. mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban; dan
c. mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban.

Menteri melakukan pemantauan, evaluasi, dan peningkatan kinerja pelaksanaan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga secara transparan dan bertanggung jawab.[873] Segala biaya untuk pelaksanaan pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dibebankan pada:[874]

a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
c. sumber pendapatan lain yang sah yang perolehannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.1.2.6. Pelayanan Terpadu Bagi Saksi/Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang diundangkan pada tanggal 4 Februari 2008 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 (PP No.9 Tahun 2008).

Pelayanan Terpadu yang dimaksud oleh PP No. 9 Tahun 2008 adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/ atau korban tindak pidana perdagangan orang[875] yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh

[873]Pasal 21 PP No. 4 Tahun 2006.
[874]Pasal 22 PP No. 4 Tahun 2006.
[875]Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam undang-

instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan,[876] rehabilitasi sosial,[877] pemulangan,[878] reintegrasi sosial[879] dan bantuan hukum bagi saksi dan/ atau korban tindak pidana perdagangan orang.[880]

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) wajib:[881]

a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/ atau korban;
b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi saksi dan/ atau korban;
c. menjaga kerahasiaan saksi dan/ atau korban; dan
d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/ atau korban.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu bertujuan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/ atau korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.[882]

---

undang (Pasal 1 Angka 4Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP No. 9 Tahun 2008).

[876]Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis yang dilaksanakan di PPT (Pasal 1 Angka 5 PP No. 9 Tahun 2008).

[877]Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan saksi dan/ atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian social secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat (Pasal 1 Angka 6 PP No. 9 Tahun 2008).

[878] Pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan/ atau korban ke daerah asal atau negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya (Pasal 1 Angka 7 PP No. 9 Tahun 2008).

[879]Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/ atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/ atau korban (Pasal 1 Angka 8 PP No. 9 Tahun 2008).

[880]Pasal 1 Angka 1 PP No. 9 Tahun 2008.

[881]Pasal 2 PP No. 9 Tahun 2008.

[882]Pasal 3 PP No. 9 Tahun 2008.

Lingkup pelayanan terpadu bagi saksi dan/ atau korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk advokasi,[883] konseling, dan bantuan hukum.[884]Pelayanan terpadu berlaku bagi:a. setiap saksi dan/ atau korban yang berada di wilayah Republik Indonesia; dan b. setiap saksi dan/ atau korban warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.[885]Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak, maka pelayanan diberikan secara khusus sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.[886]

Penyelenggaraan PPT bersifat integratif antar instansi atau lembaga, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada saksi dan/ atau korban.[887] Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan satu atap, PPT bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja untuk memberikan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban.[888]Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan

[883]Yang dimaksud dengan ”advokasi” dalam ketentuan ini adalah menyampaikan informasi dengan tujuan untuk mempengaruhi dalam pemberian pelayanan terhadap saksi dan/ atau korba (Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2008).

[884]Pasal 4 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2008.

[885]Pasal 4 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2008.

[886]Ketentuan Pasal 4 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 2008.Pada Penjelasan pasal diterangkan bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (3) dimaksudkan agar standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap anak sebagai saksi dan/ atau korban ditentukan sesuai dengan prinsip konvensi hak anak, antara lain prinsip nondiskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak.

[887]Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2008. Pada Penjelasan pasal diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga” dalam ketentuan ini adalah lembaga yang melakukan pendampingan terhadap saksi dan/ atau korban, misalnya lembaga sosial masyarakat atau lembaga bantuan hukum.

[888]Pasal 5 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2008.

berjejaring, PPT bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan saksi dan/ atau korban.[889]

Untuk melindungi saksi dan/ atau korban, pemerintah kabupaten/ kota membentuk dan menyelenggarakan PPT.[890]Pembentukan dan penyelenggaraan PPT diatur dalam peraturan daerah pada masing-masing kabupaten/ kota.[891] Untuk mempermudah penanganan saksi dan/ atau korban, di daerah perbatasan dapat dibentuk PPT.[892]Dalam membentuk peraturan daerah substansi atau materi peraturan daerah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah ini.[893]Dalam hal di daerah belum dibentuk peraturan daerah, maka ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dijadikan dasar untuk menyelenggarakan PPT.[894]

Untuk lebih menjamin kualitas pelayanan terpadu, Menteri menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial pada PPT.[895]Standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial harus dijadikan

---

[889]Pasal 5 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 2008.Pada Penjelasannya diterangkan bahwa yang dimaksud "rujukan pelayanan" dalam ketentuan ini adalah pemberian jenis pelayanan lanjutan kepada rumah sakit atau pusat trauma yang tersedia, yang masuk dalam jaringan pelayanan terpadu. Ketentuan ini merupakan jejaring yang berbasis rumah sakit dan masyarakat.

[890]Pasal 6 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2008.

[891]Pasal 6 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2008.Pada Penjelasannya diterangkan bahwa pembentukan dan penyelenggaraan PPT dalam ketentuan ini meliputi pula pembentukan organisasi dan tata laksana PPT.

[892]Pasal 6 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 2008.

[893]Pasal 6 Ayat (4) PP No. 9 Tahun 2008.

[894]Ketentuan Pasal 6 Ayat (5) PP No. 9 Tahun 2008. Pada Penjelasannya diterangkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar bagi daerah yang telah tersedia semacam lembaga pelayanan terpadu, maka sebelum dibentuk peraturan daerah, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman bagi lembaga tersebut dalam menyelenggarakan pelayanan tehadap saksi dan/ atau korban. Peraturan pelaksanaan dalam ketentuan ini misalnya: Peraturan Menteri mengenai standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial.

[895]Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2008.

pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu.[896]Dalam menyusun standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial, Menteri melakukan pembahasan bersama dengan menteri atau pimpinan lembaga terkait.[897]

Guna menjamin terselenggaranya PPT sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial, Pimpinan PPT menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan.[898] Dalam melaksanakan program kerja, PPT dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat.[899]

Pemerintah kabupaten/ kota yang membentuk dan menyelenggarakan PPT wajib menyediakan sarana dan prasarana pada PPT.[900] Dalam penyediaan sarana dan prasarana wajib disesuaikan dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial yang berlaku.[901]Rumah sakit swasta dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk rujukan PPT bagi saksi dan/ atau korban setelah mendapat persetujuan dari dinas kesehatan di

---

[896]Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2008.

[897]Ketentuan Pasal 7 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 2008.Pada penjelasannnya diterangkan bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (3) dimaksudkan agar terdapat satu pedoman dari Pemerintah sehingga tidak tersebar di berbagai peraturan. Hal ini untuk lebih memudahkan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelengarakan pelayanan terpadu. Yang dimaksud dengan menteri terkait, antara lain: Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Pimpinan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

[898]Pasal 8 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2008.

[899]Pasal 8 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2008.

[900]Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2008. Pada penjelasannnya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan ”sarana” adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, misalnya, meja dan tempat tidur periksa pasien, stetoskop. yang dimaksud dengan ”prasarana” adalah segala hal yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pelayanan terpadu misalnya, ruangan khusus untuk pemeriksaan.

[901]Pasal 9 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2008.

daerahnya.[902]Persetujuan dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan terpadu dan pelaksanaan evaluasi.[903]

Dalam hal telah tersedia sarana dan prasarana pelayanan terpadu yang digunakan untuk saksi dan/ atau korban tindak pidana lain sebelum peraturan pemerintah ini berlaku, maka sarana dan prasarana yang telah ada tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pelayanan terpadu bagi saksi dan/ atau korban.[904] Ketentuan dimaksud, pengaturannya diserahkan pada masing-masing kabupaten/ kota.[905]Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial yang berlaku berdasarkan peraturan pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya.[906]

Penyelenggaraan pelayanan terpadu wajib didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial yang disediakan oleh instansi atau lembaga

[902]Pasal 9 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 2008.
[903]Pasal 9 Ayat (4) PP No. 9 Tahun 2008.
[904]Pasal 10 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2008.Pada Penjelasannya diterangkan bahwa sarana dan prasarana pelayanan terpadu yang telah ada selama ini misalnya di rumah sakit umum milik Pemerintah, provinsi, dan kabubaten/kota serta Rumah Sakit Kepolisian Pusat, atau Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II, III, dan IV.
[905]Pasal 10 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2008.
[906]Pasal 10 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 2008.

terkait.[907]Dalam hal tenaga psikolog dan psikiater belum tersedia, maka PPT dapat meminta bantuan kepada instansi atau lembaga lain yang tersedia dengan memberikan honorarium.[908]Dalam hal diperlukan, PPT dapat melakukan kerja sama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping yang diperlukan oleh saksi dan/ atau korban.[909]

Penyelenggaraan pelayanan terpadudilaksanakan pemerintah kabupaten/ kota yang dilakukan dengan bekerja sama antarinstansi atau lembaga pemerintah terkait di daerah.[910]Pemerintah dan pemerintah provinsi dapat menyediakan petugas pelaksana atau petugas fungsional yang diperlukan oleh PPT di kabupaten/ kota.[911]Dalam hal diperlukan, PPT dapat mendayagunakan tenaga pelaksana atau petugas fungsional dari masyarakat. [912]

Dalam hal petugas PPT memerlukan perlindungan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu, maka pimpinan PPT dapat mengajukan permohonan perlindungan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia

[907]Pasal 11 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2008.Pada Penjelasannya diterangkan bahwa petugas pelaksana atau petugas fungsional dalam ketentuan ini berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan dinas masingmasing yang dipekerjakan yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
[908]Ketentuan Pasal 11 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2008. Pada Penjelasannya diterangkan bahwa honorarium diberikan sesuai dengan kemampuan pemerintah kabupaten/kota.
[909]Ketentuan Pasal 11 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 2008. Pada Penjelasannya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan relawan pendamping, misalnya, pekerja sosial, advokat, atau petugas rohaniwan.
[910]Pasal 12 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2008.
[911]Pasal 12 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2008.
[912]Pasal 12 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 2008.

terdekat untuk memberikan rasa aman kepada petugas PPT.[913]Perlindungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[914]

Saksi dan/ atau korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum pada PPT.[915] Hak dimaksud diajukan oleh saksi dan/ atau korban, keluarganya, temannya, petugas kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial.[916]Pimpinan atau petugas yang ada pada PPT wajib melayani saksi dan/ atau korban.[917] Pimpinan atau petugas PPT segera menangani saksi dan/ atau korban sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.[918] Pimpinan atau petugas PPT, dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak menerima saksi dan/ atau korban yang sedang dirawat atau dipulihkan kesehatannya, wajib melaporkannya kepada petugas kepolisian terdekat.[919]

Dalam hal saksi dan/ atau korban melaporkan kepada kepolisian terdekat, maka petugas kepolisian wajib menempatkan saksi dan/ atau korban pada ruang

[913]Pasal 13 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2008.
[914]Pasal 13 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2008.
[915]Pasal 14 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2008.
[916]Pasal 14 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2008.
[917]Pasal 14 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 2008.
[918]Ketentuan Pasal 14 Ayat (4) PP No. 9 Tahun 2008. Pada Penjelasannya diterangkan bahwa makna ”segera” dimaksudkan agar pimpinan atau petugas dalam menangani saksi dan/ atau korban menggunakan metode penanganan atau pertolongan pertama pada saksi dan/ atau korban.
[919]Pasal 14 ayat (5) PP No. 9 Tahun 2008.

pemeriksaan khusus yang tersedia.[920]Jika setelah dilakukan pemeriksaan dan terbukti bahwa saksi dan/ atau korban mengalami penderitaan akibat tindak pidana perdagangan orang, maka petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan wajib membawa saksi dan/atau korban ke PPT terdekat.[921] Laporan wajib ditindaklanjuti untuk diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.[922] Untuk menjalankan proses, pimpinan kepolisian memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan tugas penyidikan dan sekaligus melakukan perlindungan terhadap saksi dan/ atau korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [923]

Dalam hal pemerintah daerah sudah memiliki rumah perlindungan sosial atau pusat trauma sebelum peraturan pemerintah ini diberlakukan, maka rumah perlindungan sosial atau pusat trauma tersebut dapat difungsikan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan PPT.[924]Untuk penyelenggaraan pelayanan, pemerintah daerah dapat mendayagunakan rumah perlindungan sosial

[920]Pasal 15 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2008. Pada Penjelasannya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan ”Ruang Pemeriksaan Khusus” dalam ketentuan ini adalah tempat melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/ atau korban tindak pidana perdagangan orang pada setiap Kepolisian Resort/Kepolisian Kota Besar dan Kepolisian Daerah yang pembentukan dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[921]Pasal 15 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2008.

[922]Pasal 15 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 2008.

[923]Pasal 15 Ayat (4) PP No. 9 Tahun 2008.

[924]Pasal 16 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2008. Pada Penjelasannya diterangkan bahwa Rumah perlindungan sosial atau pusat trauma (trauma center) dalam ketentuan ini ada yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Rumah perlindungan sosial adalah lembaga atau panti yang bertujuan untuk memberikan perlindungn awal kepada korban sebelum dirujuk ke lembaga atau panti lain yang memberikan pelayanan lebih intensif. Pusat trauma adalah suatu lembaga atau panti yang menjadi pusat peredaman (penurunan atau penghilangan) kondisi traumatis yang dialami korban sebagai tindak kekerasan yang dialaminya atau anggota keluarganya.

atau pusat trauma milik masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya.[925]Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penyelenggaraan pelayanan di daerah, diatur sekaligus dalam peraturan daerah kabupaten/kota mengenai pembentukan PPT. [926]

Dalam hal saksi dan/ atau korban adalah Warga Negara Indonesia dan berada di luar negeri, Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan saksi dan/ atau korban serta memulangkannya ke Indonesia atas biaya negara.[927]Untuk kepentingan pemulangan saksi dan/ atau korban, perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri segera melaporkan kepada Menteri Luar Negeri dalam rangka percepatan penanganan saksi dan/ atau korban.[928] Menteri Luar Negeri wajib melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah asal saksi dan/ atau korban dan instansi terkait lainnya, untuk memulangkan saksi dan/ atau korban ke daerah

[925]Pasal 16 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2008.
[926]Pasal 16 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 2008.
[927]Pasal 17 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2008.
[928]Pasal 17 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2008.

asalnya.[929]Pemerintah daerah wajib menjemput dan memulangkan ke daerah asal dan tindakan lain yang diperlukan dalam melindungi saksi dan/atau korban.[930]

Dalam hal saksi dan/ atau korban mengalami penderitaan akibat tindak pidana perdagangan orang, maka:

a. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri wajib memberikan pertolongan kepada saksi dan/ atau korban ke rumah sakit terdekat;
b. Departemen Sosial atau instansi yang menangani bidang sosial di daerah wajib membawa saksi dan/ atau korban ke PPT terdekat. [931]

Dalam hal diperlukan, pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dibentuk PPT.[932] PPT dibentuk dengan Peraturan Menteri Luar Negeri. [933]Dalam hal saksi dan/ atau korban berada di luar wilayah daerah asalnya, kepala daerah setempat segera melakukan koordinasi dengan kepala daerah asal saksi dan/ atau korban untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah perlindungan

[929]Ketentuan Pasal 17 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 2008. Pada Penjelasannya diterangkan bahwa "Instansi terkait lainnya" dalam ketentuan ini misalnya: Departemen Sosial, Departemen Dalam Negeri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Polri, Imigrasi.
[930]Pasal 17 Ayat (4) PP No. 9 Tahun 2008. Pada Penjelasannya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "tindakan lain" dalam ketentuan ini antara lain: pemberitahuan kepada pihak keluarga saksi dan/atau korban.
[931]Pasal 17 Ayat (5) PP No. 9 Tahun 2008.
[932]Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2008. Pada Penjelasannya diterangkan bahwa pembentukan PPT di luar negeri diutamakan pada negara yang sering terjadi tindak pidana perdagangan orang.
[933]Pasal 18 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2008.

dan pemulangan saksi dan/ atau korban ke daerah asalnya.[934]Bupati/ walikota daerah asal saksi dan/ atau korban tersebut wajib segera menangani hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan dan pemulihan saksi dan/ atau korban ke PPT yang tersedia.[935]Dalam penyelenggaraan pemulangan saksi dan/ atau korban, bupati/ walikota dapat melakukan kerja sama dengan bupati/ walikota lainnya dengan pemberitahuan kepada gubernur masing-masing.[936]

Dalam hal saksi dan/ atau korban adalah warga negara asing, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan perwakilan negara asal saksi dan/ atau korban tersebut di Indonesia, untuk membantu pemulangannya dan memberitahukan kepada perwakilan asingnya.[937]Pemulangan dibebankan kepada perwakilan negara asing yang berada di Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[938] Dalam hal saksi dan/ atau korban adalah warga negara asing yang negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

[934]Pasal 19 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2008.
[935]Pasal 19 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2008 Pada Penjelasannya diterangkan bahwa pembiayaan penanganan dalam ketentuan ini dibebankan kepada bupati/walikota daerah asal saksi dan/ atau korban.
[936]Pasal 19 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 2008.
[937]Pasal 20 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2008.
[938]Pasal 20 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2008.

memberitahukan kepada negara asing tersebut pada perwakilan negara asing yang terdekat dengan wilayah negara Republik Indonesia.[939]

Dalam penanganan saksi dan/ atau korban, PPT wajib melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatannya.[940] Dalam hal diperlukan, PPT juga dapat melakukan jejaring dengan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat, atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya.[941]

Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial pada PPT.[942] Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui: [943]

a. perkembangan pelaksanaan program PPT;

b. capaian kinerja PPT.

Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.[944] Menteri melaporkan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi kepada Presiden dan tembusan disampaikan kepada

[939]Pasal 20 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 2008.
[940]Pasal 21 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2008.
[941]Pasal 21 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2008.
[942]Pasal 22 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2008.
[943]Pasal 22 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2008.
[944]Pasal 22 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 2008.

pimpinan Gugus Tugas Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. [945]

Dalam hal pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka Menteri dapat merekomendasikan kepada PPT melalui bupati/ walikota untuk peningkatan kualitas pelayanan.[946]Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud tidak ditindaklanjuti, maka bupati/ walikota dapat memberikan sanksi administratif kepada pimpinan atau petugas di PPT.[947] Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[948]

Dalam hal pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya, maka Menteri memberikan penghargaan kepada pimpinan dan/ atau petugas pada PPT.[949] Pendanaan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini dan penyelenggaraan PPT bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah serta

[945]Pasal 22 Ayat (4) PP No. 9 Tahun 2008.
[946]Pasal 23 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2008.
[947]Pasal 23 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2008.
[948]Pasal 23 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 2008.
[949]Pasal 24 PP No. 9 Tahun 2008. Pada Penjelasannya diterangkan bahwa penghargaan dalam ketentuan ini misalnya piagam atau tropi.

dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[950]

4.1.2.7. Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban diundangkan pada tanggal 29 Mei 2008 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 (PP No.44 Tahun 2008).[951]

Permohonan untuk memperoleh Kompensasi bagi korban pelanggaran HAM Berat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.[952]Permohonan untuk memperoleh Kompensasi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.[953]

Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum[954]Permohonan kompensasi sekurang-kurangnya memuat:[955]

---

[950]Pasal 25 PP No. 9 Tahun 2008.

[951] UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dijadikan konsiderans"Mengingat" angka 2 pada PP No.44 Tahun 2008, telah diubah oleh UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006. Dengan demikian PP No.44 Tahun 2008 harus juga diubah menyesuaikan perubahan ketentuan yang ada pada UU Nomor 31 Tahun 2014.

[952]Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (PP No. 44 Tahun 2008).

[953]Pasal 2 Ayat (3) PP No. 44 Tahun 2008.

[954]Pasal 3 PP No. 44 Tahun 2008.Penjelasan pasal menenrangkan bahwa yang dimaksud dengan kata "dapat" adalah untuk mempersiapkan persyaratan pengajuan permohonan Kompensasi melalui LPSK.

[955]Pasal 4 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.

a. identitas pemohon;[956]

b. uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

c. identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat;[957]

d. uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita;[958] dan

e. bentuk Kompensasi yang diminta.[959]

Permohonan kompensasi harus dilampiri:[960]

a. fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;[961]

b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;

c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/ atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;

d. fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia;

e. surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai korban atau keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

---

[956]Yang dimaksud dengan ”identitas pemohon” antara lain: nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan dan alamat. Dalam hal pemohon Kompensasi bukan Korban sendiri, identitas pemohon harus diisi dan dijelaskan hubungan antara pemohon dan Korban. (Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Huruf a PP No. 44 Tahun 2008).

[957]Dalam hal pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh institusi, identitas institusi tersebut perlu dicantumkan dalam permohonan (Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Huruf c PP No. 44 Tahun 2008).

[958]Yang dimaksud dengan ”kerugian yang nyatanyata diderita”, antara lain hilangnya pekerjaan dan/atau musnah/rusaknya harta benda milik Korban (Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Huruf d PP No. 44 Tahun 2008).

[959]Bentuk Kompensasi yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat berupa sejumlah uang atau bentuk lain (Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Huruf e PP No. 44 Tahun 2008).

[960]Pasal 4 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.

[961]Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat instansi yang berwenang mengeluarkan kartu tanda penduduk (Penjelasan Pasal 4 Ayat 2 Huruf a PP No. 44 Tahun 2008).

f. fotokopi putusan pengadilan hak asasi manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
g. surat keterangan hubungan keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
h. surat kuasa khusus, apabila permohonan kompensasi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.

LPSK memeriksa kelengkapan permohonan kompensasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kompensasi diterima.[962] Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.[963] Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan.[964] Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemohon dianggap mencabut permohonannya.[965]Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.[966] Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Kompensasi, LPSK

[962]Pasal 5 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.
[963]Pasal 5 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.
[964]Pasal 5 Ayat (3) PP No. 44 Tahun 2008.
[965]Pasal 5 Ayat (4) PP No. 44 Tahun 2008.
[966]Ketentuan Pasal 6 PP No. 44 Tahun 2008.Pada Penjelasan pasal diterangkan bahwa pemeriksaan substantif dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan kerugian yang nyata-nyata diderita Korban.

dapat meminta keterangan dari korban, keluarga, atau kuasanya dan pihak lain yang terkait.[967]

Dalam hal korban, keluarga, atau kuasanya tidak hadir memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali.[968] LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan kepada pemohon.[969]

Hasil pemeriksaan permohonan kompensasi ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya.[970]Dalam pertimbangan LPSK disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Kompensasi.[971]

LPSK menyampaikan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia.[972] Ketentuan ini berlaku juga bagi permohonan kompensasi yang dilakukan setelah putusan pengadilan hak asasi manusia yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[973]Dalam hal LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, permohonan

[967]Ketentuan Pasal 7 PP No. 44 Tahun 2008. Pada Penjelasan pasal diterangkan bahwa yang dimaksud dengan ”pihak lain yang terkait”, antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kepolisian, kejaksaan, rumah sakit/dokter, dan kepala desa/kelurahan setempat.
[968]Pasal 8 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.
[969]Pasal 8 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.
[970]Pasal 9 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.
[971]Pasal 9 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008. Pada Penjelasan pasal diterangkan bahwa mengabulkan dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (2) diberikan sebagian atau seluruh permohonan.
[972]Pasal 10 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.
[973]Pasal 10 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.

disampaikan kepada Jaksa Agung.[974]Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan disampaikan kepada korban, keluarga, atau kuasanya dan kepada instansi pemerintah terkait.[975]

Dalam hal LPSK mengajukan permohonan, pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan menetapkan permohonan kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.[976] Penetapan pengadilan hak asasi manusia disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.[977] LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada korban, keluarga, atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.[978]

Dalam hal LPSK mengajukan permohonan kompensasi kepada Jaksa Agung penuntut umum pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam tuntutannya mencantumkan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK.[979]Pengadilan HAM dalam melakukan pemeriksaan permohonan kompensasi dapat meminta keterangan kepada korban, keluarga, atau

---

[974]Pasal 10 Ayat (3) PP No. 44 Tahun 2008. Pada Penjelasan pasal diterangkan bahwa ketentuan Pasal 10 Ayat (3) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menentukan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.

[975]Pasal 10 Ayat (4) PP No. 44 Tahun 2008. Pada Penjelasan pasal diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "instansi pemerintah terkait" dalam ketentuan ini misalnya instansi yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; Departemen Pendidikan Nasional dalam hal Kompensasi yang diminta dalam bentuk pemberian beasiswa atau pendidikan; Departemen Tenaga Kerja dalam hal Kompensasi yang diminta dalam bentuk kesempatan kerja.

[976]Pasal 11 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.

[977]Pasal 11 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.

[978]Pasal 11 Ayat (3) PP No. 44 Tahun 2008.

[979]Pasal 12 PP No. 44 Tahun 2008.

kuasanya, LPSK, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan pihak lain yang terkait.[980]

Pengadilan HAM memeriksa dan memutus permohonan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[981] Salinan putusan pengadilan HAM disampaikan oleh Penuntut Umum kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan.[982] LPSK menyampaikan salinan putusan Pengadilan HAM kepada korban, keluarga, atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.[983]

LPSK melaksanakan penetapan Pengadilan HAM mengenai pemberian Kompensasi dengan membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan hak asasi manusia kepada instansi pemerintah terkait.[984] Instansi pemerintah terkait melaksanakan pemberian Kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara.[985]Dalam hal Kompensasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya

[980]Pasal 13 PP No. 44 Tahun 2008.

[981]Ketenuan Pasal 14 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008. Pada Penjelasannya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "peraturan perundangundangan" adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

[982]Pasal 14 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.

[983]Pasal 14 Ayat (3) PP No. 44 Tahun 2008.

[984]Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008. Pada Penjelasannya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "instansi pemerintah terkait" dalam ketentuan ini misalnya instansi yang menimbulkan kerugian terhadap Korban, Departemen Pendidikan Nasional dalam hal Kompensasi diberikan dalam bentuk pemberian beasiswa atau pendidikan, Departemen Tenaga Kerja dalam hal Kompensasi diberikan dalam bentuk kesempatan kerja.

[985]Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008. Pada Penjelasannya diterangkan bahwa pelaksanaan pemberian Kompensasi dapat dilakukan secara bertahap.

dilakukan oleh Departemen Keuangan setelah berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait lainnya.[986]

Pelaksanaan pemberian kompensasi, dilaporkan oleh instansi pemerintah terkait dan/atau Departemen Keuangan kepada ketua Pengadilan HAM yang menetapkan permohonan Kompensasi.[987]Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi disampaikan kepada korban, keluarga, atau kuasanya, dengan tembusan kepada LPSK dan penuntut umum.[988] Pengadilan HAM setelah menerima tanda bukti mengumumkan pelaksanaan pemberian kompensasi pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.[989]

Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi kepada korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, korban, keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan permohonan kompensasi dan LPSK.[990]Pengadilan HAM segera memerintahkan instansi pemerintah terkait dan/ atau Departemen Keuangan untuk melaksanakan pemberian kompensasi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.[991]

Dalam hal pemberian kompensasi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan korban,

[986]Pasal 15 Ayat (3) PP No. 44 Tahun 2008.
[987]Pasal 16 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.
[988]Pasal 16 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.
[989]Pasal 16 Ayat (3) PP No. 44 Tahun 2008.
[990]Pasal 17 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.
[991]Pasal 17 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.

keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan atau memutuskan permohonan kompensasi. [992]

LPSK menyampaikan kutipan putusan Pengadilan HAM kepada instansi pemerintah terkait dengan pemberian Kompensasi sesuai dengan amar putusan pengadilan.[993] Pelaksanaan putusan Pengadilan HAM mengenai pemberian kompensasi dilakukan oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[994]

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.[995] Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.[996]Permohonan untuk memperoleh restitusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.[997]Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[998]

Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat sekurang-kurangnya:[999]

a. identitas pemohon; [1000]

---

[992]Pasal 18 PP No. 44 Tahun 2008.
[993]Pasal 19 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.
[994]Ketentuan Pasal 19 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008. Pada Penjelasannya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan ”peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
[995]Pasal 20 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.
[996]Pasal 20 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.
[997]Pasal 20 Ayat (3) PP No. 44 Tahun 2008.
[998]Pasal 21 PP No. 44 Tahun 2008.
[999]Pasal 22 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.

b. uraian tentang tindak pidana;

c. identitas pelaku tindak pidana;

d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan

e. bentuk restitusi yang diminta.

Permohonan restitusi harus dilampiri:[1001]

a. fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;[1002]

c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/ atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;

d. fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia;

e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana;

f. surat keterangan hubungan keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga; dan

g. surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.

[1000]Yang dimaksud dengan ”identitas pemohon” antara lain: nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan dan alamat. Dalam hal pemohon Restitusi bukan korban sendiri, identitas pemohon harus diisi dan dijelaskan hubungan antara pemohon dan Korban (Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) Huruf a PP No. 44 Tahun 2008).

[1001]Pasal 22 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.

[1002]Yang dimaksud dengan ”bukti”, antara lain surat keterangan kepolisian dalam hal rumah dibakar dan surat keterangan dokter selama dalam perawatan dalam hal Korban menderita, baik fisik maupun psikis. Dalam hal tindak pidana telah diputus oleh pengadilan, putusan pengadilan dilampirkan dalam permohonan (Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Huruf b PP No. 44 Tahun 2008).

Apabila permohonan restitusi perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut.[1003]

LPSK memeriksa kelengkapan permohonan restitusi.[1004]Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan, LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.[1005] Pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan.[1006] Dalam hal permohonan tidak dilengkapi oleh pemohon, maka pemohon dianggap mencabut permohonannya.[1007]

Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.[1008]Untuk keperluan pemeriksaan permohonan restitusi, LPSK dapat memanggil korban, keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberi keterangan.[1009]Dalam hal pembayaran restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut. [1010]

Dalam hal korban, keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang

[1003]Pasal 22 Ayat (3) PP No. 44 Tahun 2008.
[1004]Pasal 23 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.
[1005]Pasal 23 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.
[1006]Pasal 23 Ayat (3) PP No. 44 Tahun 2008.
[1007]Pasal 23 Ayat (4) PP No. 44 Tahun 2008.
[1008]Pasal 24 PP No. 44 Tahun 2008. Pada Penjelasannya diterangkan bahwa pemeriksaan substantif dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan kerugian yang nyata-nyata diderita korban.
[1009]Pasal 25 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.
[1010]Pasal 25 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.

diajukan dianggap ditarik kembali.[1011] LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan kepada pemohon.[1012]

Hasil pemeriksaan permohonan restitusi ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya.[1013]Dalam pertimbangan LPSK disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.[1014]

Dalam hal permohonan restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang.[1015] Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.[1016] Penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan restitusi beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya.[1017]Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan, disampaikan kepada korban, keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/ atau pihak ketiga.[1018]

Dalam hal LPSK mengajukan permohonan restitusi, pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan restitusi dalam jangka waktu paling

[1011]Pasal 26 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.
[1012]Pasal 26 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.
[1013]Pasal 27 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.
[1014]Pasal 27 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.
[1015]Ketentuan Pasal 28 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008. Pada Penjelasannya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "pengadilan yang berwenang" adalah pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana yang bersangkutan.
[1016]Pasal 28 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.
[1017]Pasal 28 Ayat (3) PP No. 44 Tahun 2008.
[1018]Pasal 28 Ayat (4) PP No. 44 Tahun 2008.

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.[1019] Penetapan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.[1020] LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/ atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.[1021]

Dalam hal LPSK mengajukan permohonan restitusi, putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan.[1022]LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/ atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.[1023]

Pelaku tindak pidana dan/ atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima.[1024]Pelaku tindak pidana dan/ atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan restitusi kepada pengadilan dan LPSK.[1025]LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan.[1026]Pengadilan mengumumkan pelaksanaan restitusi pada papan pengumuman pengadilan.[1027]

[1019]Pasal 29 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.
[1020]Pasal 29 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.
[1021]Pasal 29 Ayat (3) PP No. 44 Tahun 2008.
[1022]Pasal 30 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.
[1023]Pasal 30 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.
[1024]Pasal 31 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.
[1025]Pasal 31 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.
[1026]Pasal 31 Ayat (3) PP No. 44 Tahun 2008.
[1027]Pasal 31 Ayat (4) PP No. 44 Tahun 2008.

Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari,korban, keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada pengadilan yang menetapkan permohonan restitusi dan LPSK.[1028]Pengadilan segera memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/ atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima. [1029]

Dalam hal pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan korban, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan restitusi.[1030]

Korban pelanggaran HAM yang berat berhak memperoleh bantuan.[1031] bantuan dapat berupa: a. bantuan medis; b. bantuan rehabilitasi psiko sosial.[1032]Permohonan bantuan diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.[1033] Permohonan bantuan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.[1034]

Permohonan Bantuan memuat sekurang-kurangnya:[1035]

a. identitas pemohon;[1036]

b. uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

[1028]Pasal 32 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.
[1029]Pasal 32 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.
[1030]Pasal 33 PP No. 44 Tahun 2008.
[1031]Pasal 34 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.
[1032]Pasal 34 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.
[1033]Pasal 34 Ayat (3) PP No. 44 Tahun 2008.
[1034]Pasal 34 Ayat (4) PP No. 44 Tahun 2008.
[1035]Pasal 35 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.
[1036]Yang dimaksud dengan ”identitas pemohon” antara lain: nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan dan alamat. Dalam hal pemohon Bantuan bukan Korban sendiri, identitas pemohon harus diisi dan dijelaskan hubungan antara pemohon dan korban (Penjelasan Pasal 35 ayat (1) Huruf a PP No. 44 Tahun 2008).

c. identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

d. bentuk bantuan yang diminta.

Permohonan bantuan harus dilampiri:[1037]

a. fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

b. surat keterangan dari Komnas HAM yang menunjukkan pemohon sebagai korban atau keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

c. fotokopi putusan pengadilan hak asasi manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

d. surat keterangan hubungan keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga; dan

e. surat kuasa khusus, apabila permohonan bantuan diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.

LPSK memeriksa kelengkapan permohonan bantuan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan bantuan diterima.[1038]Dalam hal terdapat ketidaklengkapan permohonan, LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.[1039]Pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas

[1037]Pasal 35 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.
[1038]Pasal 36 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.
[1039]Pasal 36 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.

permohonan.[1040]Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, pemohon dianggap mencabut permohonannya.[1041]

Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Bantuan, LPSK dapat meminta keterangan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya.[1042] LPSK menentukan kelayakan, jangka waktu serta besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian Bantuan berdasarkan keterangan dokter, psikiater, psikolog, rumah sakit, dan/ atau pusat kesehatan/rehabilitasi.[1043]

Pemberian bantuan ditetapkan dengan keputusan LPSK.[1044]Keputusan sebagaimana dimaksud memuat sekurang-kurangnya:[1045]

a. identitas Korban;
b. jenis bantuan yang diberikan;
c. jangka waktu pemberian Bantuan; dan
d. rumah sakit atau pusat kesehatan/rehabilitasi tempat korban memperoleh perawatan dan pengobatan.

LPSK berwenang memperpanjang atau menghentikan pemberian, setelah mendengarkan keterangan dokter, psikiater, atau psikolog.[1046]Penghentian pemberian bantuan dapat dilakukan atas permintaan korban.[1047]Dalam melaksanakan pemberian bantuan, LPSK bekerja sama dengan unit kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta.[1048]

[1040]Pasal 36 Ayat (3) PP No. 44 Tahun 2008.
[1041]Pasal 36 Ayat (4) PP No. 44 Tahun 2008.
[1042]Pasal 37 PP No. 44 Tahun 2008.
[1043]Pasal 38 PP No. 44 Tahun 200.
[1044]Pasal 39 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.
[1045]Pasal 39 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.
[1046]Pasal 39 Ayat (3) PP No. 44 Tahun 2008.
[1047]Pasal 39 Ayat (4) PP No. 44 Tahun 2008.
[1048]Pasal 40 PP No. 44 Tahun 2008.

4.2.Penyebab Hak Korban dalam Penuntutan Terdakwa Belum Berbasis Nilai Keadilan dan Kemanfaatan

Sebagai suatu sistem, hukum tentunya memiliki unsur-unsur sebagai suatu sistem. seorang sosiolog hukum, yakni Lawrence Friedman, mengemukakan tentang komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam suatu sistem hukum, meliputi *legal substance* (aturan dan norma-norma), *legal structure* (institusi atau penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara), dan *legal culture*(budaya hukum meliputi: ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang hukum).[1049]Penyebab hak korban dalam penuntutan terdakwa belum berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan dianalisis dari aspek substansi hukum, kultur hukum dan struktur hukum.

4.2.1. Substansi Hukum

Substansi hukum positif belum mengandung nilai keadilan dan kemanfataan, dikarenakan:

a. Pencabuatan Pengaduan oleh Korban memiliki batas waktu (Pasal 75 dan 284 Ayat (3) KUHP).
b. Korban tidak memiliki peranan dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan oleh JPU (Pasal 14 KUHAP).

[1049]H.Jaja Ahmad Jayus, ”Pengaruh Hukum Kolonial pada Budaya Hukum Masyarakat” dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia,2010,*Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*,hlm.223.

c. Hak Korban atas informasi perkara dibatasi hanya pada kasus-kasus tertentu (Pasal 5 Ayat (1) UULPSK).

Pasal 75 KUHPyang menentukan bahwaorang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukanmerupakan aturan umum tentang pencabutan pengaduan tindak pidana aduan, baik absolut[1050] maupun relatif.[1051]

Ketentuan Pasal 75 KUHP tidak berlaku dalam pengaduan tindak pidana Pasal 284 KUHP (delik zina), yang dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.[1052]Diadakan tidaknya tuntutan terhadap delik aduan digantungkan pada ada tidaknya persetujuan dari korban. Selama korban belum memasukkan aduan, maka jaksa tidak dapat mengadakan tuntutan.[1053]

Alasan adanya delik aduan adalah bahwa dalam beberapa hal bagi orang yang bersangkutan lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu daripada keuntungan bagi pemerintah (masyarakat) jika dilakukan penuntutan.[1054] Delik-delik aduan itu tidak dikumpulkan dalam salah satu titel Buku KUHP, tetapi

---

[1050]Delik Aduan Absolut, ialah delik (*peristiwa pidana*) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan.Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi: ”saya minta agar peristiwa ini dituntut”.
Ketentuan dalam KUHP yang termasuk dalam delik aduan absolut adalah:Pasal 284,287,293,310 s.d.321,322,332 dan Pasal 369.

[1051]Delik aduan relatif merupakan delik-delik (peristiwa pidana) yang bisanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan.
Ketentuan dalam KUHP yang termasuk dalam delik aduan relatif adalah:Pasal Delik aduan relatif dalam KUHP ditentukan dalam a. Pasal 362 s.d. 366 *Jo* Pasal 367,b. Pasal 368, 369,371 *Jo* Pasal 370, 367, c. Pasal 372 s.d.375,377 *Jo* Pasal 370, 367, d. Pasal 378 s.d 393,395 bis *Jo* 394, 367, e. Pasal 404 Jo Pasal 367, f. Pasal 406 s.d. 410,412 *Jo* 411, 367.

[1052]Pasal 284 Ayat (3) KUHP.

[1053]E.Utrecht,1986,*Op.Cit.*,hlm.257.

[1054]E.Utrecht,1986,*Ibid*., R. Soesilo, *Op.Cit.*,hlm. 87.

terdapat tersebar dalam Buku II KUHP. Tiap tiap delik yang oleh Pembuat KUHP dijadikan delik aduan menyatakan hal itu secara tersendiri dan dalam ketentuan yang bersangkutan sekaligus juga ditunjuk siapa yang berwenang mengajukan aduan.[1055]

Pencabutan pengaduan dalam hukum positif yang memiliki batas waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP),dikecualikan untuk delik aduan zina (Pasal 284 KUHP) yang pencabutan pengaduannya sebelum dimulainya pemeriksaan perkara di persidangan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan tidak memiliki manfaat hukum. Dalam Putusan MARI Nomor:1600 K/Pid/2009dipertimbangkan bahwa walaupun pencabutan pengaduan telah melewati 3 (tiga) bulan, yang menurut Pasal 75 KUHP telah lewat waktu, menurut MARI, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih. Pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh pelapor yang *nota bene* mertua terdakwa, adalah merupakan tindakan untuk memaafkan menantu yang dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara ini diteruskan.Menurut MARI, walaupun perkara antara korban dengan terdakwa perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan. Menurut MARI ajaran keadilan restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum

---

[1055]. E.Utrecht,1986,*Ibid*. hlm 258.

tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih induvidu di dalam hubungan kemasyarakatan dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih.

Pasal 14 KUHAP menentukan bahwa Penuntut Umum memiliki wewenang :

a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
d. membuat surat dakwaan;
e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
g. melakukan penuntutan;
h. menutup perkara demi kepentingan hukum;

i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;

j. melaksanakan penetapan hakim.

Kewenangan membuat surat dakwan dan melakukan penuntutan berdasarkan Pasal 14 KUHAP di atas hanya dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam praktek hukum acara pidana, korban telah diwakili oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan pasal 14 KUHAP dalam hal membuat surat dakwaan melakukan penuntutan sampai melakukan upaya hukum. Lebih tegas lagi dalam pasal 1 angka 12 KUHAP yang diberikan hak untuk melakukan upaya hukum hanyalah terdakwa atau penuntut umum sedangkan korban tidak diberikan hak untuk melakukan upaya hukum.Hukum positif di Indonesia memposisikan korban pasif dalam penuntutan perkara pidana.

Mahkamah Agung Republik Indonesia praktis mengembangkan posisi hukum korban kejahatan seperti yang diatur dalam hukum pidana, karena terikat dengan asas legalitas dalam hukum pidana (Pasal 1 ayat 1 KUHP). Kajian terhadap Putusan MARI menunjukkan bahwa korban kejahatan diposisikan hanya sebagai saksi dan sebagai penuntut atau penggugat ganti-kerugian (perdata) yang digabungkan dalam prosedur pidana (Pasal 98-101 KUHAP).[1056]

Tidak adanya hubungan hukum tersebut diperkuat dengan argumen putusan MARI Nomor 1457.K/Pid/1991 bahwa korban kejahatan sebagai pihak yang dirugikan tidak dapat mengajukan gugatan hukum ke pengadilan atas kecerobohan jaksa atau hakim yang merugikan kepentingan korban. Kasus

[1056] Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan…Op.Cit.,* hlm 106.

posisinya, korban kejahatan mengajukan tuntutan ganti kerugian secara lisan tetapi oleh jaksa atau hakim (Pengadilan Negeri) tidak dimasukkan dalam berkas perkara, padahal hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan ganti kerugian. Tergugat (terpidana) mengajukan banding/kasasi dengan dalih hukum bahwa ia keberatan terhadap keteledoran jaksa/hakim yang tidak memuat permohonan korban tersebut dan Mahkamah Agung akhirnya menyetujui keberatan terdakwa dan kemudian membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dengan alasan "tidak jelas kapan tuntutan tersebut diajukan dan bukti biaya yang dikeluarkan tidak dijelaskan penggunaannya."[1057]

Dalam Putusan MARI Nomor 296.K/Pid/1987 korban tidak dapat mengajukan keberatan hukum kepada pengadilan atas keteledoran jaksa penuntut umum, karena mengubah surat dakwaan yang mengakibatkan dakwaan batal demi hukum. Mahkamah Agung berpendapat bahwa korban kejahatan tidak memiliki hak hukum terhadap perbuatan jaksa dan oleh karenanya tertutup kemungkinan korban melakukan upaya hukum menurut pertanggungjawaban hukum terhadap jaksa tersebut.[1058]

Putusan yang berisi pembebasan atau pelepasan terdakwa atau dakwaan jaksa dinyatakan batal demi hukum yang bersumber dari kekurangcermatan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan atau dalam penyusunan rekuisitor, bukan disebabkan tidak cukup bukti atau ada keragu-raguan dalam pernbuktian dapat merugikan korban kejahatan sebagai pancari keadilan. Putusan MARI yang

[1057] *Ibid*,hlm.106-107.
[1058] *Ibid*,hlm.107-108.

memuat keekurang cermatan jaksa penuntut umum yang menyebabkan terdakwa dibebaskan, antara lain:[1059]

1. Putusan MARI Nomor 26.K/Pid/1988, 8 Februari 1980, dalam kasus perkosaan, karena tidak memberkas surat aduan yang benar.
2. Putusan MARI Nomor 321/K/Pid/1983,tanggal 26 Mei 1984, dalam kasus penganiayaan delik penyertaan yang menyebabkan matinya orang, karena jaksa tidak mendakwa pelaku peserta (terdakwa II) dengan dakwaan melakukan penganiayaan seperti pada pelaku utama (terdakwa I).
3. Putusan MARI Nornor 162.K/Pid/1986. Tanggal 26 September 1987, dalam kasus karena kealpaannya mengakibatkan luka-luka berat orang lain, karena jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai luka berat (Pasal 90 KUHP).[1060]
4. Putusan MARI Nomor 1677.K/Pid/1987,tanggal 7 Februari 1990, dalam kasus perzinahan,karena pelaku perzinahan tidak ikut diajukan sebagai terdakwa.
5. Putusan MARI Nomor 296.K/Pid/1987, tanggal 15 Mei 1991 dalam kasus pendudukan atau menyerobot tanah orang lain,karena jaksa mengubah surat dakwaan, maka dakwaan jaksa dinyatakan batal demi hukum yang mengakibatkan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban juga ditolak.

Melihat beberapa putusan MARI di atas, maka kewenangan mutlak Jaksa dalam membuat surat dakwan dan melakukan penuntutan tanpa melibatkan korban tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan.

[1059] *Ibid*,hlm. 108-109.
[1060] *Ibid*

Pasal 5 Ayat (2) UULPSK memberikan hak kepada korban untuk:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) UULPSK menerangkan bahwa hak-hak sebagaimana dimaksud diberikan kepada korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu,antara lain dalam kasus:

1. Pelanggaran HAM Berat;
2. Tindak Pidana Korupsi;
3. Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Tindak Pidana Terorisme;
5. Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Tindak Pidana Narkotika;
7. Tindak Pidana Psikotropika;

8. Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak;
9. Tindak Pidana lain yang mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Hak-hak Korban dalam UULPSK di atas belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban untuk seluruh kasus tindak pidana, karena dibatasi hanya dalam kasus-kasus tertentu.

Uraian-uraian di atas merupakan fakta bahwa substansi hukum tentang adanya batas waktu pencabuatan pengaduan oleh korban (Pasal 75 dan 284 Ayat (3) KUHP), ketiadaan peran korban dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan oleh JPU (Pasal 14 KUHAP) serta adanya pembatasan pemberian hak-hak korban dalam perkara tertentu (Pasal 5 Ayat (1) UULPSK) tidak memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan.Hal ini tidak sejalan dengan firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Dalam Q.S. An Nisa'/4:58, Allah Subhanahu Wata'la berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."[1061]

[1061]Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi menafsirkan Q.S. An Nisa'/4:58, sebagai berikut: (Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah) artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya). Ayat ini turun ketika Ali RA. hendak mengambil kunci ka'bah dari Usman Bin Thalhah Al- Hajabi penjaganya secara paksa yakni ketika Nabi SAW datang pada tahun pembebasan Makkah. Usman ketika itu tidak mau memberikannya lalu ia berkata,"seandainya saya tahu bahwa yang memerintahkan adalah Rasulullah tentu saya tidak menghalanginya." Maka Rasulullah SAW pun menyuruh mengembalikan kunci itu kepadannya seraya bersabda,"terimahlah ini untuk selama-lamanya tiada putus-putusnya ." Usman merasa heran atas hal itu lalu Ali RA. membacakan ayat tersebut

4.2.2. Kultur Hukum

Lawrence M. Friedman menggunakan istilah kultur hukum untuk menggambarkan sejumlah fenomena yang saling berkaitan. Budaya hukum/ kultur hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Lawrence M. Friedman adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan pendapat tentang hukum. Dengan demikian keberadaan budaya hukum menjadi sangat strategis dalam menentukan pilihan untuk berperilaku dalam menerima hukum alau menolak hukum. Dengan perkataan lain suatu hukum hukum akan menjadi hukum yang benar-benar diterima dan dipatuhi oleh masyarakat adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat bersangkutan.[1062] Friedman mengakui bahwa masalah hukum tidak bisa digeneralisasikan pada lintas sistem hukum, karena budaya hukum adalah khas pada masing-masing negara. Oleh sebab itu, pembangunan hukum yang memperhatikan budaya hukum akan memiliki dasar pijak yang kuat, karena budaya hukum akar yang dapat menopang berdiri tegaknya hukum.

---

sehingga Usman pun masuk Islam. Ketika akan meninggal kunci itu diserahkan kepada saudaranya Syaibah lalu tinggal pada anaknya. Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi berlaku umum disebabkan digunakannya damir jamak (apabila kami menetapkan hukum di antara manusia) maka Allah akan menitahkanmu (agar menenetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya) pada ni'imma diidgamkan mim kepada ma , yakni nakirah mausufah artinya ni'ma syai'an atau sebaik-baik sesuatu (yang memberikan kepadamu) yakni menyampaikan amanah dan menjatuhkan putusan secara adil. (Sesungguhnya Allah Maha Mendengar akan semua perkataan (lagi Maha Melihat) segala perbuatan.[Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi, *Op.Cit.*, ,hlm.87].

[1062]Any Ismayawati, Januari 2011, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembanguanan Hukum di Indomesia (Kritik terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia)*,Pranata Hukum, Volume 6 Nomor 1,hlm.57.

Budaya hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum.[1063] Budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.[1064]

Menurut Jimly, budaya hukum merupakan aspek atau komponen sistem hukumIndonesiayangsebaiknyadibangunkedepan.[1065] Budaya hukum (*legal culture*), yang di dalamnya terkait pula fungsi-fungsi pendidikan hukum dan sosialisasi hukum yang dalam konteks Indonesia kini, harus dilihat sebagai satu kesatuan komponen yang tidak terpisahkandarikeseluruhansistemhukum.Budayahukumadalah cermin identitas dan sekaligus sumber refleksi, sumber abstraksi yang terwujud dalam nilai-nilai yang terkandung dalam setiap produk hukum, dan terlembagakan dalam setiap institusi hukum, dalam produk substansi hukum, dan juga terbentuk dalam sikap dan perilaku setiap pejabat atau aparat dan pegawai yang bekerja di bidang hukum serta para pencari keadilan (*justice seekers*) dan warga masyarakat pada umumnya. Bahkan budaya hukum itu juga mempengaruhi cara kerja para pemimpin dan mekanisme kepemimpinan hukum dalampraktik.

[1063] *Ibid* .hlm.57
[1064] Hilman Hadikusuma, I986,Antropologi Hukum Indonesia, Bandung:Alumni,hlm.11
[1065] Jimly asshidiqie, *Op.Cit*.hlm.26

Untukitu,fungsipendidikanhukummenjadisangatpenting dan sosialisasi hukum mutlak mendapat perhatian penting. [1066]

Budaya hukum bangsa Indonesia banyak mendapatkan pengaruh dari aliran-aliran hukum maupun sistem hukum bangsa barat (Belanda), yang merupakan asal hukum positif bangsa Indonesia.[1067] Saat ini bangsa Indonesia berhukum juga dipengaruhi pandangan positivistis. Baik aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam melaksanakan dan mematuhi peraturan mengharuskan diri berpedoman pada aturan yang secara formal ada sebagai undang-undang. Para aparat penegak hukum dalam mengartikan hukum adalah undang-undang. Jadi dalam bekerja, para aparat hukum sangat kaku karena berpandangan *legalistik*.[1068]Diakui memang positivisme hukum telah banyak memberi sumbangan besar dalam pembangunan hukum modern di dunia, namun bukan berarti ia tidak memiliki kekurangannya yang antara lain adalah telah mengabaikan substansi hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan.[1069]

Cakupan cara berpikir legalistis positivis dalam studi hukum telah memberi paradigma berpikir hukum bersifat analisis hukum semata atas suatu peraturan yang berlaku. Titik kebenaran adalah teks peraturan yang dikenal dengan peraturan perundangan (*legislation*). Hukum yang pada wujud sesungguhnya tak terbatas direduksi dalam batas tertentu, deterministik bahkan

---

[1066]*Ibid* .hlm.39

[1067] Any Ismayawati,*Op.Cit.*,hlm.58

[1068]*Ibid* .hlm.59

[1069] Yusriyadi, "Paradigma Positivisme dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal hukum, Vol. 14, No. 3, April 2004, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), hlm. 463

mekanistik bagi penegak hukum untuk dilaksanakan menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi.[1070]

Mazhab positivisme hukum merumuskan sejumlah premis dan postulat mengenai hukum yang menghasilkan dasar konseptual mazhab positivisme hukum, bahwa:

a. Tata hukum suatu negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, maupun dalam jiwa bangsa, dan juga bukan berdasarkan hukum alam, namun mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang. Hukum dibuat dan dijalankan atas dasar perintah penguasa. Artinya pendapat ini mewakili paham determinisme dan reduksionisme dari paradigma Cartesian-Newtonian.
b. Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dengan bentuk materiilnya. Artinya pendapat ini mewakili paham dualisme dan mekanistik dari paradigma CartesianNewtonian.
c. Sistem hukum haruslah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika, tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral, maupun etik. Artinya pendapat ini mewakili paham materialisme-saintisisme dari paradigma Cartesian-Newtonian.
d. Hukum harus bersifat netral dan memenuhi kebenaran objektif. Artinya pendapat ini mewakili paham instrumentalisme dan objektivisme dari paradigma Cartesian-Newtonian.[1071]

[1070]A.Sukris Sarmadi,"*Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)*", Jurnal Dinamika Hukum, Vo. 12 No.2 Mei 2012,hlm.331.

Pernyataan di atas mencerminkan adanya penerapan pemikiran positivisme masuk ke dalam ilmu hukum secara masif. Pemikiran positivisme dalam ilmu hukum telah menimbulkan semacam pelembagaan cara pandang yang penuh dengan keteraturan yang sifatnya pasti. Secara kasuistik, ketika hakim menangani suatu kasus, hakim akan mengidentifikasikan prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan akan menerapkannya secara deduktif, sehingga diharapkan ketentuan hukum tersebut akan menuntun penyelesaian perkara menurut prinsip asas kepastian hukum.[1072]

Positivisme telah melahirkan hukum dalam skesta matematika, menyelesaikan hukum yang terjadi dalam masyarakat berdasar apa yang tertulis dalam teks undang-undang, mengkristal di posisi binernya suatu teks lalu pembaca harus memahami di keadaan itu dan tidak dibolehkan untuk berpikir lain. Sementara para hakim memutus perkara dengan teks tersebut atas persoalan hukum yang dihadapi. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, hakim memutus perkara mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber utamanya. Kelompok-kelompok hakim yang berpikir demikian dapat digolongkan sebagai suatu aliran konservatif.[1073]

Produk hukum sendiri akan melahirkan formalistik semata di mana kepastian hukum menjadi ikon kebenaran. Keadilan adalah keadilan yang terdefinisi atas apa yang tertulis dan menutup diri atas keadilan yang selama ini

---

[1071]Faisal,"*Menggugat Dominasi Positvisme Huku*m", hlm.14.,diakses dari https://adoc.tips/queue/menggugat-dominasi-positivisme-hukum.html,tanggal 20 Mei 2020,Pkl14.29

[1072]*Ibid.*

[1073]Lintong O. Siahaan, "Peran Hakim Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 36 N0.1 Januari 2006, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 35

tidak termaktub dalam suatu teks perundang-undangan. Teori ini mengidentikkan hukum dengan undang-undang. Tidak ada hukum di luar undang-undang dan satu-satunya hukum adalah undang-undang. [1074]

Hukum bukan hanya bangunan peraturan biasa, namun disadari juga sebagai bangunan ide, kultur dan cita-cita. Keterpurukan hukum di Indonesia lebih dikarenakan penyingkatan hukum sebagai *rule of law* tanpa melihat sebagai *rule of morality*. Akibatnya hukum hanya dilihat sebagai peraturan prosedur yang lekat dengan kekuasaan. Padahal di balik hukum juga sarat dengan nilai, gagasan untuk membangun kultur baru yang lebih kontekstual pada rasa keadilan masyarakat. Di sini akan terjadi suatu muatan hukum harus luas dalam cakupan moralitas. Hukum tertulis selama ini pasti tidak sunyi dari kesalahan dan pengabaian hati nurani, kultur dan cita-cita ideal manusia. Hukum progresif mengalaskan muatan hukum harus menggenapi kultur dan cita ideal manusia yaitu kebahagiaan. Kultur itu sendiri tidak lain adalah Indonesia yang menurut kacamata hukum progresif amat berbeda dengan pemberlakuan hukum modern yang masuk dan mempengaruhi hukum di Indonesia. Hukum modern disadari tidak mungkin dihapuskan namun ia perlu diberikan ruh kehidupan kultur Indonesia agar ia menjadi hukum yang Indonesia. Hukum yang sepadu hati nurani masyarakat sehingga hukum itu responsif yaitu hukum didasarkan pada kultur masyarakat itu sendiri.[1075]

[1074] Rusli Muhammad, "Kajian Kritis Terhadap Teori Hukum Positif (Positivisme)", Jurnal Hukum Respublika, Vol. 5, No. 2, Tahun 2006, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning (Unilak), hlm. 222-223

[1075] A.Sukris Sarmadi,*Op.Cit.*,hlm.335

Hukum seharusnya aktif berperan untuk dan sebagai motor pembangunan kehidupan masyarakat dalam tujuan sosialnya, kehidupan yang ideal dan melindungi serta mengabdi pada manusia. Betapa pentingnya hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, budaya dan spiritual masyarakat. Sedang kenyataan hukum positif selama ini masih menyisakan problem. Hukum positif modern yang dipakai oleh bangsa Indonesia dikembangkan tidak dari dalam masyarakat Indonesia melainkan ditanamkan dari luar (*impposed from outside*). Hukum modern dalam produk sosial, ekonomi, dan kultural barat, khususnya Eropa. Pemberlakuan hidup manusia secara sama tanpa diskriminatif merupakan ikon dalam hukum produk barat menjadikan tidak ada pembelaan terhadap orang-orang kecil dan lemah karena semua orang harus diberlakukan sama.[1076]

Daniel S. Lev sebagaimana dikutip Any Ismayawati membedakan budaya hukum dalam dua macam. Pertama "*Internal Legal Culture*" , yaitu budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, misalnya pengacara, polisi, jaksa dan hakim; dan Kedua, "*External Legal Culture*'. yaitu budaya hukum dari masyarakat pada umumnya/ masyarakat luas. Daniel S. Lev (I 980: I92- I 93) melihat bahwa untuk memahami budaya hukum, ada cara praktis yang dapat dilakukan dengan memperhatikan dari 2 (dua) indikator, yaitu (I) nilai-nilai yang berhubungan dengan sarana pengaturan sosial dan penanganan konflik. Nilai-nilai ini adalah dasar kultur dari sistem hukum dan sangat membantu dalam menentukan "sistem pemberian tempat”" kepada lembaga-lembaga hukum, politik , religi dan lain-lainnya pada setiap tempat dan

[1076] *Ibid* .hlm.339-340.

waktu dalam sejarah suatu masyarakat: (2) asumsi-asumsi dasar mengenai penyebaran dan penggunaan sumber daya yang ada dalam masyarakat, kebaikan dan keburukan sosial dan lain sebagainya. Asumsi-asumsi tersebut, lanjut Daniel S. Lev terdapat dalam pandangan ideologi mengenai ekonomi, politik dan sosial yang berubah-ubah serta berbanding lurus dengan perubahan masyarakat, dengan kemrurgkinan secara kultur bersifat khusus atau justru sebaliknya.[1077]

Cara penafsiran hukum yang selama ini digunakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan adalah penafsiran sistematik. Suatu undang-undang merupakan legalitas mutlak beserta penjelasannya yang tidak dapat diartikan lain melewati suatu penafsiran. Ini merupakan ciri utama dari paradigma positivisme, di mana para pelaku hukum menempatkan diri dengan cara berpikir dan pemahaman hukum secara legalistik positivis dan berbasis peraturan (*rule bound*), sehingga dalam mengkaji hukum hanya aspek lahiriahnya saja yang diperhatikan sedangkan nilai-nilai atau norma yang muncul dari realitas sosial seperti keadilan, kebenaran, atau kebijaksanaan yang biasanya mendasari aturan-aturan hukum tidak mendapat tempat, karena tidak dapat dijangkau oleh penginderaan.[1078]Aplikasi paradigma positivisme hukum dalam praktek, lebih mengutamakan prosedur atau hukum acara, maka tidak heran akan menghasilkan keadilan prosedural yang belum tentu merefleksikan keadilan yang sesungguhnya.[1079]

[1077]Any Ismayawati,*Op.Cit.*,hlm.57

[1078] Erwin, "Upaya Mereformasi Hukum Sebagai Akibat Dominasi Positivisme Dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal Hukum Progresif Vol.1, No.1, Juni 2007, Semarang : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm.16

[1079] Faisal,"*Menggugat Dominasi Positvisme Huku*m",*Loc.Cit.*

Keberadaan hukum yang hidup tidak dipedulikan bahkan hukum yang hidup cenderung ditiadakan. Kondisi seperti ini (budaya hukum) ini merupakan pergeseran budaya hukum yang sangat tidak sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan pandangan positivistis/legalistic pemikiran dan tenaga kita lebih banyak difokuskan untuk membuat aturan dan undang-undang baru tanpa memberi ruang yang memadai bagi perbaikan dan penyiapan kultur hukum (sebagai struktur) yang lebih kuat dan baik.[1080]

Arti penting keberadaan budaya hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dikemukakan oleh Soerjono Seokanto bahwa dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait yaitu: [1081]

1. Hukum dan aturannya sendiri. Faktor ini diperlukan adanya peraturan perundangan yang dapat dilaksanakan dan keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada;
2. Sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan hukum (penegakan hukum). Faktor ini sering terabaikan sehingga hukum sulit untuk ditegakkan, karena sesungguhnya dalam penegakan hukum diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang;
3. Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri. Faktor ini merupakan wujud dari budaya hukum masyarakat yang bersangkutan (budaya hukum eksternal), dan;
4. Mental aparat penegak hukum. faktor ini merupakan budaya hukum internal.

[1080]Any Ismayawati,*Op.Cit.*,hlm.59.

[1081] Soerjono Soekanto,1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.3

Dalam hal penegakan hukum, Esmi Warassih mengatakan bahwa titik perhatian dalam penegakan hukum harus ditujukan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor *non* hukum lainnya terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan kultur hukum. Faktor-faktor non hukum, tennasuk kultur hukum yang membuat adanya perbedaan penegakan hukum masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.[1082]

Para hakim, jaksa, polisi harus berani membaca teks hukum dengan makna yang lebih luas secara progresif, yaitu menempatkan pada konteks sosial dan tujuan sosial masa kini. Tidak sedikit teks undang-undang yang malah bisa mengganggu rasa keadilan di masyarakat apabila tidak dibaca dan dimaknai secara progresif. Atas kenyataan itulah disadari benar oleh pembuat undang-undang di negeri ini sehingga diberlakukan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menentukan bahwa (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[1083]

Penegakan hukum di Eropa tidak terlalu bergantung dan dipengaruhi oleh unsur-unsur non hukum seperti moral, *ethic* dan *religion* yang tergabung dalam *natural law*. Bangsa-bangsa di Eropa sangat nyaman dengan *state law*. Berbeda dengan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang sangat dipengaruhi oleh adat, moral, *religion, ethic* dalam cara berhukumnya. Hal ini disebabkan pembentukan

---

[1082]Esmi Warassih Pujirahayu,2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, hlm. 81-82

[1083] A.Sukris Sarmadi,2012,*Op.Cit.*,hlm.341

hukumnya juga berasal dari dua unsur utama yaitu adat dan religion di samping bahan hukum dari Eropa. Cara berhukum yang hanya mengandalkan *positive law* hanya akan bermuara pada kebuntuan dalam pencarian keadilan substantif. [1084]

Di Indonesia komunalisme atau kebersamaan lebih diutamakan daripada individualisme. Pengutamaan yang demikian itu menjelaskan mengapa liberalisme kurang mendapat tempat di negeri ini. Tipe manajemen yang ditonjolkan juga musyawarah dan bukan ”penyelesaian konflik”. Dengan menggunakan acuan konfigurasi nilai-nilai Talcott Parsons (dalam teorinya *Cybernetic*), maka Indonesia lebih mengutamakan nilai-nilai budaya dan politik dari pada ekonomi. Penggalian konsep hukum yang sesuai dengan alam Indonesia memang mungkin dilakukan sebagai alternatif tandingan dari konsep "*rule of law*" yang mungkin disfungsional. Pada awal penggunaan doktrin ROL, mungkin ia sarat dengan kandungan moral, tetapi seratus tahun kemudian ia sudah lebih bersifat teknis daripada mengemban suatu misi tertentu. Kritik-kritik dari dalam sendiri sudah bermunculan, baik dari segi praktek, maupun ideologis. Dihadapkan kepada berbagai kekurangan dan cacat dari sistem yang dominan beserta asas, doktrin dan konsep-konsepnya,maka pikiran-pikiran serta pendekatan Indonesia, dapat diajukan sebagai suatu alternatif. Dengan demikian nilai-nilai seperti musyawarah, kekeluargaan, keselarasan, keseimbangan dapat diajukan dan digarap secara lebih bersungguh-sungguh. Bangsa Indonesia sering dikritik

[1084]Suteki,*Op.Cit.*,hlm.274.

"banyak memiliki gagasan besar, tetapi akhirnya lemah dalam implementasi dan mempraktekkannya".[1085]

Ketika menerima, mengakomodasi, studi banding dan menerima hukum asing, seyogyanya memperhatikan budaya hukum lokal/ masyarakat setempat/ corak asli sebagai suatu tatanan masyarakat yang sudah hidup teratur sebelum yang asing itu diterima. Kondisi ini sebetulnya secara konsepsional telah dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia dengan meletakkan pentingnya ketiga bangunan komponen hukum tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), tahun 2004-2009. Di dalam penjabarannya, RPJM tahun 2004 mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul dari perspektif budaya hukum masyarakat Indonesia, antara lain:[1086]

1. Timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat.

   Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Hal ini telah tercermin dari peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat. Pada tataran akar rumput, maraknya kasus main hakim sendiri, pembakaran para pelaku kriminal, pelaksanaan *sweeping* oleh sebagian anggota masyarakat yang terjadi secara terus menerus tidak seharusnya dilihat sebagai sekedar eforia yang terjadi pasca reformasi. Di balik itu tercermin rendahnya budaya hukum masyarakat karena kebebasan telah diartikan sebagai serba boleh, padahal hukum adalah instrumen untuk

[1085] *Ibid*.,hlm.268-269.
[1086] H.Jaja Ahmad Jayus, *Op.Cit.*, hlm.223-224.

melindungi kepentingan individu dan sosial. Sebagai akibatnya timbul ketidakpastian hukum yang tercipta melalui proses pembenaran perilaku salah dan menyimpang atau dengan kata lain hukum hanya merupakan instrumen pembenar bagi perilaku salah.

2. Menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat.

   Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum tetap mensyaratkan antara lain tingkat pendidikan yang memungkinkan untuk dapat memahami dan mengerti berbagai permasalahan yang terjadi. Dua pihak berperan penting yaitu masyarakat dan kualitas aparat yang bertugas melakukan penyebarluasan hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan. Walaupun tingkat pendidikan sebagian masyarakat masih kurang memadai, namun dengan kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan pendekatan penyuluhan hukum ke dalam masyarakat, pesan yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima secara baik dan dapat diterapkan apabila masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan hak dan kewajiban mereka. Masalah lainnya adalah ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses dan manfaat dari kegiatan penyuluhan, penyadaran dan pelayanan hukum.

Adanya cara masyarakat menyelesaikan problemnya yang mengandalkan karakter oriental, misalnya pengutamaan musyawarah. Di masyarakat Banjar dikenal adat badamai, dewan adat (damang dan let adatnya) di masyarakat Dayak, di Aceh dikenal pola penyelesaian konflik dengan di'iet, sayam, suloeh dan pemat jaroe, di Maluku dikenal Dewan Saniri dan Raja, di masyarakat Lombok Utara

dikenal adat Wet Tu Telu dengan begundem-nya, di masyarakat adat Lamaholot (Flores NTT) dikenal adat mela sareka. Semua adat tersebut menunjukkan adanya kesamaan bentuk yaitu kemauan untuk mengutamakan musyawarah sebagai proses untuk menyelesaikan konflik.[1087]

Dalam praktek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, secara mendasar (*grounded dogmatic*) dimensi kultur seyogianya mendahului dimensi lainnya, karena di dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai (*value system*). Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (*policy*) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai rambu-rambu yuridis dan *code of conduct* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan.[1088]

Pancasila merupakan nilai-nilai filosofis kultural yang fundamental, maka dapat ditegaskan bahwa strategi pembangunan Sistem Hukum Nasional seharusnya dimulai dari pembangunan kultural (budaya hukum nasional), karena nilai-nilai Pancasila inilah yang merupakan ruh/jiwa/nur/nilai dasar/ide dasar dari sistem hukum nasional. Pembangunan/pembaharuan sistem hukum nasional pada hakikatnyaberawal dari pembaharuan nilai ide dasarnya. Pembangunan/pembaharuan sistem hukum nasional berarti pembaharuan budaya/wawasan/nilai-nilai/ide dasar/konsep hukum yang meliputi pembaharuan substansi hukum, pembaharuan struktur hukum dan pembaharuan kultur/budaya

---

[1087] Suteki,*Op.Cit.*,hlm.259.

[1088].Sudirman Sesse, Budaya Hukum dan Implikasinya terhadap Pembangunan Hukum Nasional,Jurnal Hukum Diktum,Volume 11, Nomor 2, hlm.175.

hukum. Pembaharuan kultur/ budaya hukum meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum. Pembahaaruan "budaya hukum pidana", yang meliputi antara lain kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum). Jadi pada dasamya pembaharuan hukum nasional dimulai dari pembaharuan budaya atau kultur hukum dan filsafat hukum (filsafat hukum Pancasila) dan pembaharuan ilmu hukum (ilmu hukum Pancasila).[1089]

Manusia Timur itu menghargai persepsi, sikap, pengetahuan batin, dan alam bawah sadarnya jauh melebihi di atas konsep tentang alasan-alasan logis. Manusia timur melihat kaidah ketuhanan sebagai sesuatu yang tetap dan terus menerus melingkupi dirinya sendiri dan alam, maka kehidupannya berada dalam realitas mistik terus menerus. Manusia *oriental*[1090] menekankan kesatuan (*unity*) di atas segala-galanya. Hal ini berimplikasi terhadap perilaku manusia oriental dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam cara berhukum. Banyak penelitian membuktikan bahwa meskipun beberapa bagian dari bangsa oriental telah menjadi kebarat-baratan (*westernized*), namun secara esensial mereka tetap menggunakan cara Oriental dalam menyikapi kehidupan yang muncul sebagai kearifan-kearifan lokal (*local wisdom*) dalam menyelesaikan problematika hidup, baik *privat* atau pun *publik*.[1091]

Cara berhukum di Indonesia tidak tepat apabila digunakan pendekatan positivistik seperti negara asal hukum Indonesia (khususnya Eropa) tanpa melihat

---

[1089] Barda Nawawi Arief,2008,*RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana*,Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.2.

[1090] Oriental adalah mengenai dunia timur atau negara-negara Timur (dilihat dr Eropah),KBBI,hlm.989.

[1091] Suteki,*Op.Cit*.,hlm.258- 259.

aspek moral/ religion atau pun *ethic* serta pertimbangan aspek *socio legal*-nya. Watak liberal individualistik hukum modern di Indonesia mesti dibongkar untuk disesuaikan dengan basis sosialnya, yakni masyarakat Indonesia dengan karakter orientalnya. Watak liberal dan individualitas hukum modern mesti diimbangi dengan watak arif bijaksana serta watak welas asih, kesatuan dan rasa keadilan dalam masyarakat yang tercermin dalam *the living law*-nya sehingga hukum mampu menghadirkan keadilan paripurna yang menjadi tujuan penegakan hukum progresif. [1092]

Kebijakan politis mengenai pembinaan hukum dengan pendekatan kultural akhirnya masuk dalam GBHN. Dimensi budaya dimasukkan oleh MPR sebagai sub sistem dari pembangunan hukum. Pertama, pembangunan dan pengembangan budaya hukum diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara sesuai dengan nilai dan norma Pancasila agar budaya hukum lebih dihayati dalam kehidupan masyarakat, sehingga kesadaran, ketaatan serta kepatuhan hukum makin meningkat dan hak asasi manusia makin dihormati dan dijunjung tinggi. Kedua, kesadaran untuk makin menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945 diarahkan pada pencerahan harkat dan martabat manusia serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, pembangunan dan pengembangan budaya hukum ditujukan untuk terciptanya ketenteraman serta ketertiban dan tegaknya hukum

[1092] *Ibid.*,hlm.275-276.

yang berintikan kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan disiplin nasional. Kelima, kesadaran hukum penyelenggara negara dan masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus menerus melalui pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, keteladanan dan penegakan hukum untuk menghormati, mentaati dan mematuhi hukum dalam upaya mewujudkan suatu bangsa yang berbudaya hukum.[1093]

Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan budaya hukum yaitu antara lain: [1094]

1. Merubah model pendidikan hukum yang selama ini hanya mempelajari undang-undang saja.
2. Membuat hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup/ hukum yang hidup dalam masyarakat dan diyakini kebenarannya, sehingga tidak akan menimbulkan penolakan dari masyarakat terhadap berlakunya hukum tersebut.
3. Memperbaiki cara pembangunan budaya hukum yaitu dengan cara memulai membangun budaya hukum melalui dari keluarga.

Budaya hukum positivis oleh aparat penegak hukum belakangan ini telah bergeser, kepada nilai keadilan dan kemanfaatan, Kepolisian,Kejaksaan dan Pengadilan mulai menggunakan *restorative justice* sebagaimana dalam SE KAPOLRI 8/2018, PERJA No.15 Thn 2020 dan Putusan MARI Nomor 1600 K/Pid/2009.

Dalam SE KAPOLRI 8/2018 disebutkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan

[1093] Muh.Sudirman Sesse, *Op.Cit.*,hlm.176.
[1094] Anyismayawati *Op.Cit.*, hlm.65-66.

tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian.[1095]

Terbitnya PERJA No.15 Thn 2020 didasarkan pertimbangan antara lain:

1. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;[1096]
2. Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan Mengingat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan

[1095]Angka 2 Huruf e SE KAPOLRI 8/2018.
[1096]Huruf b Konsiderans ”Menimbang” PERJA No.15 Thn 2020.

menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[1097]

MARI melalui Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009, tanggal 24 Nopember 2009 mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan dan menyatakan penuntutan Perkara Nomor: 317/Pid.B/2008 atas nama Terdakwa Ismayawati tidak dapat diterima menggunakan keadilan restoratif dalam pertimbangan hukumnya.

Walaupun pencabutan pengaduan telah melewati 3 (tiga) bulan, yang menurut Pasal 75 KUHP telahwat waktu, menurut MARI, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih. Pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh pelapor yang *nota bene* mertua terdakwa, adalah merupakan tindakan untuk memaafkan menantu yang dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara ini diteruskan. Menurut MARI ajaran keadilan restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih induvidu di dalam hubungan kemasyarakatan dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih.

4.2.3. Struktur Hukum

[1097]Huruf c Konsiderans ”Menimbang” PERJA No.15 Thn 2020.

Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Rekonstruksi struktur hukum pada kaitan hak korban dalam penuntutan terdakwa belum berbasis nilai keadilan dan kemnafaatan adalah tidak adanya pengaturan dalam hukum positif di Indonesia yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh informasi tentang segala sesuatu jalannya persidangan, yakni berupa risalah persidangan dan dokumen-dokumen persidangan, khususnya melalui sarana informasi teknologi elektronik. Informasi dan komunikasi menurut Jimly Assiddiq merupakan salah satu komponen sistem hukumIndonesiayangsebaiknyadibangunkedepan yang berhubungan dengan struktur hukum.[1098]

Dalam banyak kesempatan, gagasan untukmenjadikansisteminformasidankomunikasihukumsebagai komponen baru yang tersendiri dalam konsepsi tentang sistem hukum diutarakan Jimly untuk meyakinkan orang mengenai pentingnya ICT (*Information and Communication Technology*) dewasa ini dan pengaruh revolusionernya terhadap dunia hukum. Kesadaran mengenai pentingnya ICT ini juga sudah meluas di kalangan para ahli hukum di semuanegara.[1099] Sistem informasi dan komunikasi ini harus dijadikan salah satu komponen utama dalam sistem hukum Indonesia yang hendak dibangun. Alat-alat elektronik (*e-law*) dan internet di dunia hukum(i-*law*) dimanfaatkan. [1100]

[1098]Jimly Asshiddiqie., *Op.Cit.*Hlm.26
[1099] *Ibid* .hlm.36
[1100] *Ibid*, hlm.37

Abdullah, Kepala Biro Hukum dan Humas MARI tahun 2017, mengemukan bahwa revolusi teknologi informasi akan mengubah paradigma, konsep dan teori, meskipun tidak mengubah filosofi. Semua bidang termasuk hukum dituntut untuk beradaptasi. Siapapun dan apapun yang tidak beadaptasi secara evolutif maka akan menjadi korban. Selanjutnya Abdullah mengemukakan bahwa Mahkamah Agung juga mulai beradaptasi dengan gelombang "*online*" atau elektronik. Disadari atau tidak Mahkamah Agung dan semua Pengadilan tingkat banding dan pertama sudah memiliki website. Mahkamah Agung melakukan perpindahan kinerja berbasis manual ke sistem elektronik atau *online*, yaitu antara lain Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Tata Persuratan, Sistem Informasi Perpustakaan, Sistem Informasi Portal, Direktori Putusan, Info Perkara, New Direktori Putusan, Gugatan *on Line*, dan Bantuan Panggilan Sidang Elektronik. Pada saatnya semua kegiatan akan menggunakan sarana Teknologi Informasi termasuk menggunakan *Tele conference* dan penilaian/ akreditasi pengadilan serta e-monitoring dan evaluasi.[1101]

MA melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan, namun dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi MA dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses

[1101]https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2830/gelombang-on-line-dalam-perkembangan-hukum, diakses tanggal 23 April 2020,Pukul 17.02

pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.[1102]

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.[1103]

Saat ini dokumen-dokumen persidangan dalam bentuk dakwaan, tuntutan dan putusan telah dapat diakses oleh korban melalui sarana teknologi informasi. Menurut Penulis, seluruh dokumen persidangan seperti eksepsi, tanggapan jaksa

---

[1102]Mahkamah Agung Republik Indonesia,2010. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*,Jakarta:Mahamah Agung RI, hlm.11.

[1103]Mahkamah Agung Republik Indonesia,2010.Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035,Jakarta:Mahamah Agung RI, hlm.16-17.

atas eksepsi, bukti-bukti tertulis, keterangan ahli dan keterangan terdakwa minimal satu hari setelah pencatatan dalam risalah persidangan dapat diakses oleh korban. Keterangan saksi baru dapat diakses setelah seluruh saksi diperiksa di persidangan. Pemenuhan hak korban atas informasi dimaksud harus didukung dengan fasilitas alat rekam yang dapat langsung merubah suara menjadi tulisan.

Kelemahan struktur hukum pada pemenuhan hak korban perseorangan dalam penuntutan terdakwa adalah ketiadaan sarana teknologi elektronik yang dapat merekam seluruh kegiatan persidangan dalam bentuk suara yang dapat langsung diubah menjadi tulisan. Hal ini merupakan penghambat bagi korban untuk secara lengkap dan cepat mengetahui jalannya persidangan berikut fakta-faktanya yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi korban dalam mengajukan berat/ringannya tuntutan kepada terdakwa.

BAB V
REKONSTRUKSI HAK KORBAN PERSEORANGAN DALAM PENUNTUTAN TERDAKWA BERBASIS NILAI KEADILAN DAN KEMANFAATAN

5.1. Hak Korban dan Tatacara Pemenuhannya di Beberapa Negara

5.1.1. Hak Korban dan Tatacara Pemenuhannya di Amerika[1104]

Ketentuan prosedur pidana di Amerika Serikat mendefiniskan korban kejahatan sebagai orang yang menjadi sasaran pelanggaran negara atau, jika orang itu terbunuh atau tidak mampu, anggota keluarga orang tersebut atau perwakilan sah lainnya.[1105] Istilah korban kejahatan berarti seseorang yang secara langsung dan kurang-lebih dilukai sebagai akibat dari pelanggaran Federal atau pelanggaran di Distrik Columbia.[1106]

Dalam kasus korban kejahatan yang berusia di bawah 18 tahun, tidak kompeten, lumpuh, atau meninggal dunia, wali sah korban kejahatan atau perwakilan dari harta warisan korban kejahatan , anggota keluarga, atau orang lain yang ditunjuk sebagai yang sesuai oleh pengadilan, dapat mengambil hak korban kejahatan di bawah bab ini, tetapi dalam hal apa pun terdakwa tidak akan disebut sebagai wali atau perwakilan tersebut.[1107]

Hak-hak Korban di Amerika Serikat diatur pada Bagian 2 Prosedur Pidana, yakni dalam Bab 237 Pasal 3771 ayat (a) angka 1 s.d 10, sebagaimana diurakan di bawah ini:

[1104]Hak Korban dan Implementasinya dalam Praktek di Amerika dalam Bahasa Inggris dikutip dari https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18,diakses tanggal 06 Juni 2020,Pukul 16.45.
[1105]Pasal 3771 Ayat (b) Paragraf 2 Huruf D Hukum Acara Pidana (HAP) Amerika.
[1106]Pasal 3771 Ayat (e) Paragraf 2 Huruf A HAP Amerika.
[1107]Pasal 3771 Ayat (e) Paragraf 2 Huruf B HAP Amerika.

1. Hak untuk dilindungi secara wajar dari terdakwa;
2. Hak untuk pemberitahuan yang masuk akal, akurat, dan tepat waktu dari setiap proses pengadilan umum, atau proses pembebasan bersyarat, yang melibatkan kejahatan atau pembebasan atau pelarian diri dari terdakwa;
3. Hak untuk tidak dikecualikan dari proses pengadilan publik semacam itu, kecuali pengadilan, setelah menerima bukti yang jelas dan meyakinkan, menentukan bahwa kesaksian oleh korban akan diubah secara material jika korban mendengar kesaksian lain pada persidangan tersebut;
4. Hak untuk didengar secara wajar pada setiap proses publik di pengadilan distrik yang melibatkan pembebasan, pembelaan, hukuman, atau proses pembebasan bersyarat apa pun.
5. Hak yang wajar untuk berunding dengan pengacara untuk Pemerintah;
6. Hak untuk restitusi penuh dan tepat waktu;
7. Hak untuk proses bebas dari keterlambatan yang tidak masuk akal;
8. Hak untuk diperlakukan dengan adil dan dengan menghormati martabat dan privasi korban;
9. Hak untuk diberi tahu secara tepat waktu atas tawar-menawar pembelaan atau perjanjian penuntutan yang ditangguhkan;
10. Hak untuk diberitahu tentang hak-hak di bawah bagian ini dan layanan yang dijelaskan dalam bagian 503 (c) dari Hak Korban dan *Restitusi Act of* 1990 (42 USC 10607 (c)) [1]dan memberikan informasi kontak untuk Kantor Ombudsman Hak Korban di Departemen Kehakiman.

Dalam setiap persidangan yang melibatkan pelanggaran terhadap korban kejahatan, pengadilan harus memastikan bahwa korban kejahatan diberikan hak-hak yang dijelaskan dalam Pasal 3771 Ayat (a). Sebelum membuat keputusan yang diuraikan dalam Pasal 3771 Ayat (a) Paragraf3, pengadilan harus melakukan segala upaya untuk mengizinkan kehadiran yang sepenuhnya mungkin oleh korban dan harus mempertimbangkan alternatif yang masuk akal untuk mengesampingkan korban dari proses pidana. Alasan untuk setiap keputusan yang menolak pemberian pertolongan dalam bab ini harus secara jelas dinyatakan dalam catatan.[1108]

Dalam persidangan *Habeas Corpus Federal* yang timbul dari hukuman negara, pengadilan harus memastikan bahwa korban kejahatan diberi hak yang dijelaskan dalam paragraf (3), (4), (7), dan (8) dari ayat (a).[1109] Hak-hak ini dapat ditegakkan oleh korban kejahatan atau perwakilan sah korban kejahatan dengan cara yang dijelaskan dalam Paragraf (1) dan (3) ayat (d).[1110]Dalam kasus yang melibatkan banyak korban, ayat (d) (2) juga berlaku.[1111]

Pejabat dan karyawan Departemen Kehakiman dan departemen serta badan lain di Amerika Serikat yang terlibat dalam deteksi, investigasi, atau penuntutan kejahatan harus melakukan upaya terbaik mereka untuk memastikan bahwa korban kejahatan diberitahu, dan diberi, hak-hak yang dijelaskan dalam Pasal 3771 ayat (a).[1112] Jaksa penuntut akan memberi tahu korban kejahatan bahwa korban kejahatan dapat meminta nasihat dari pengacara sehubungan

[1108]Pasal 3771 Ayat (b) Paragraf 1 HAP Amerika.
[1109]Pasal 3771 Ayat (b) Paragraf 2 Huruf A HAP Amerika.
[1110]Pasal 3771 Ayat (b) Paragraf 2 Huruf B ke- I HAP Amerika.
[1111]Pasal 3771 Ayat (b) Paragraf 2 Huruf B ke- ii HAP Amerika.
[1112]Pasal 3771 Ayat (c) Paragraf 1 Amerika.

dengan hak-hak yang diuraikan dalam Pasal 3771 ayat (a).[1113]Pemberitahuan pembebasan yang disyaratkan sesuai dengan bab ini tidak akan diberikan jika pemberitahuan tersebut dapat membahayakan keselamatan siapapun.[1114]

Korban kejahatan atau perwakilan sah korban kejahatan, dan pengacara untuk pemerintah dapat menyatakan hak yang dijelaskan dalam Pasal 3771 ayat (a). Seseorang yang dituduh melakukan kejahatan tidak dapat memperoleh bantuan dalam bentuk apapun.[1115]

Dalam kasus dimana pengadilan menemukan bahwa jumlah korban kejahatan membuatnya tidak praktis untuk memberikan semua korban kejahatan hak-hak yang dijelaskan dalam Pasal 3771 Ayat (a), pengadilan harus membuat prosedur yang masuk akal untuk memberikan efek pada bab ini yang tidak terlalu menyulitkan atau memperpanjang proses.[1116]

Hak-hak yang diuraikan dalam Pasal 3771 Ayat (a), harus ditegaskan di pengadilan distrik di mana seorang terdakwa dituntut atas kejahatan tersebut, atau, jika tidak ada penuntutan yang sedang berlangsung, di pengadilan distrik di distrik tempat kejahatan itu terjadi. Pengadilan distrik akan mengambil dan memutuskan mosi apa pun yang menyatakan hak korban segera. Jika pengadilan distrik menyangkal bantuan yang dicari, pemindahan dapat mengajukan petisi kepada pengadilan bandinguntuk surat perintah mandamus.pengadilan banding dapat mengeluarkan surat perintah pengadilan atas perintah hakim tunggal sesuai dengan aturan sirkuit atau *Federal Rules of Appellate*

[1113]Pasal 3771 Ayat (c) Paragraf 2 HAP Amerika.
[1114]Pasal 3771 Ayat (c) Paragraf 3 HAP Amerika.
[1115]Pasal 3771 Ayat (d) Paragraf 1 HAP Amerika.
[1116]Pasal 3771 Ayat (d) Paragraf 2 HAP Amerika.

Procedure.Pengadilan banding akan mengambil dan memutuskan permohonan tersebut segera dalam waktu 72 jam setelah permohonan diajukan, kecuali para penuntut, dengan persetujuan pengadilan, telah menetapkan periode waktu yang berbeda untukdipertimbangkan.Dalam memutuskan permohonan semacam itu, pengadilan banding akan menerapkan standar biasa pemeriksaan banding. Dalam keadaan apapun, persidangan tidak akan ditahan atau dikenakan kelanjutan lebih dari lima hari untuk tujuan menegakkan bab ini. Jika pengadilan banding menolak bantuan yang dicari, alasan penolakan harus secara jelas dinyatakan pada catatan dalam pendapat tertulis.[1117]Dalam setiap banding dalam kasus pidana, Pemerintah dapat menyatakan sebagai kesalahan pengadilan distrik tentang hak korban kejahatan dalam persidangan yang terkait dengan banding tersebut.[1118]

Dalam kasus apapun kegagalan untuk tidak mampu memberikan hak berdasarkan bab ini memberikan dasar untuk persidangan baru.Seorang korban dapat membuat mosi untuk membuka kembali permohonan atau hukuman hanya jika:[1119]

a. Korban telah menegaskan hak untuk didengar sebelum atau selama persidangan yang dipermasalahkan dan hak tersebut ditolak;
b. Korban mengajukan petisi kepada pengadilan banding untuk surat perintah mandamus dalam waktu 14 hari; dan
c. Dalam kasus pembelaan, terdakwa belum mengajukan tuntutan tertinggi.

[1117]Pasal 3771 Ayat (d) Paragraf 3 HAP Amerika.
[1118]Pasal 3771 Ayat (d) Paragraf 4 HAP Amerika.
[1119]Pasal 3771 Ayat (d) Paragraf 5 HAP Amerika.

Berdasarkan Hukum Acara Pidana Amerika, maka ketentuan-ketentuan yang dijadikan rujukan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Hak-hak Korban di Amerika Serikat diatur pada Bagian 2 Prosedur Pidana, yakni dalam Bab 237 Pasal 3771 ayat (a) angka 1 s.d 10, yang antara lain:
    a. Hak untuk pemberitahuan yang masuk akal, akurat, dan tepat waktu dari setiap proses pengadilan umum, atau proses pembebasan bersyarat, yang melibatkan kejahatan atau pembebasan atau pelarian diri dari terdakwa;
    b. Hak untuk didengar secara wajar pada setiap proses publik di pengadilan distrik yang melibatkan pembebasan, pembelaan, hukuman, atau proses pembebasan bersyarat apa pun.
    c. Hak untuk diberitahu secara tepat waktu atas tawar-menawar pembelaan atau perjanjian penuntutan yang ditangguhkan;
2. Dalam setiap persidangan yang melibatkan pelanggaran terhadap korban kejahatan, pengadilan harus memastikan bahwa korban kejahatan diberikan hak-hak yang dijelaskan dalam Pasal 3771 Ayat (a). Sebelum membuat keputusan yang diuraikan dalam Pasal 3771 Ayat (a) Paragraf3, pengadilan harus melakukan segala upaya untuk mengizinkan kehadiran yang sepenuhnya mungkin oleh korban dan harus mempertimbangkan alternatif yang masuk akal untuk mengesampingkan korban dari proses pidana. Alasan untuk setiap keputusan yang menolak pemberian pertolongan dalam bab ini harus secara jelas dinyatakan dalam catatan.[1120]

[1120]Pasal 3771 Ayat (b) Paragraf 1 HAP Amerika.

5.1.2. Hak Korban Tata Cara Pemenuhannya di China [1121]

Hak-hak Korban di China ditentukan dalam Hukum Acara Pidana China (1996) dan Undang-undang Hukum Pidana China (1997), sebagai berikut:

1. Korban menjadi pihak, dan berhak atas semua jenis hak sebagai pihak (Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Hukum Acara Pidana)
2. Seorang korban memiliki hak untuk mempercayakan seorang kuasa (Pasal 40 Undang-undang Hukum Acara Pidana)
3. Seorang korban dapat melakukan penuntutan secara pribadi (Pasal 170 Undang-undang Hukum Acara Pidana).
4. Ganti rugi sipil kepada korban sebelum denda atau penyitaan harta benda (Pasal 36 Undang-undang Hukum Pidana China).
5. Properti sah para korban harus segera dikembalikan kepada korban (Pasal 64 Undang-undang Hukum Pidana).
6. Tidak ada batasan waktu untuk melakukan penuntutan hak setelah korban mengajukan tuntutan dalam periode penuntutan (Pasal 88 Undang-Undang Hukum Pidana).

Perlindungan dan pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan di China meliputi:

1. Langkah-langkah untuk melindungi korban kejahatan
2. Partisipasi aktif para korban dalam proses peradilan pidana
3. Pemberian informasi kepada korban kejahatan

[1121]Hak Korban dan Tata Cara Pemenuhannya di China dalam tulisan ini dikutip dari tulisan Gao-Feng Jin,"The Protection and Remediesfor Victims of Crime and Abuse of Power in China,"Resource Material Series No. 70, https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No70/No70_15PA_Jin.pdf,dikases\ pada tanggal 12 Mei 2020,Pukul11.32

Langkah-langkah untuk melindungi korban kejahatan meliputi:

1) Sistem pemulihan
2) Sistem ganti rugi korban kejahatan
3) Perlindungan korban dan saksi
4) Metode kesaksian untuk melindungi korban dan saksi

Sistem pemulihan keadilan restoratif adalah istilah baru di China. Tidak sampai pada perbaikan istilah yang dilakukan oleh masyarakat di tahun 2003, istilah itu pun diperkenalkan. Sistem pemulihan korban di Tiongkok tidaklah sempurna. Pendekatan keadilan restoratif dilakukan untuk menyelesaikan konflik antar pihak yang digunakan untuk memulihkan secara damai:

a. Prosedur konsiliasi dalam tindakan sipil insidentil (Pasal 96, 97 tentang Penafsiran Yudisial tentang Hukum Acara Pidana Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok)
b. Rekonsiliasi antara korban dengan pelaku kejahatan
c. Mediasi yang dilakukan oleh polisi
d. Mediasi Pengadilan Rakyat (Pasal 172 Hukum Acara Pidana)

Menurut Interpretasi Yudisial tentang Hukum Acara Pidana Rakyat Tertinggi Pengadilan Tiongkok, pengadilan rakyat dapat melakukan konsiliasi sesuai dengan prinsip kesukarelaan dan keabsahan kecuali untuk kasus penuntutan publik. Apbila upaya konsiliasi tidak efektif, tindakan sipil insidentil akan dilakukan yang dilakukan bersamaan dengan kasus kriminal.

Rekonsiliasi antara korban dengan pelaku bentuknya adalah korban tidak memanggil polisi setelah insiden kejahatan. Konflik diselesaikan sendiri antara

korban dengan pelaku. Korban setuju untuk menyelesaikan masalah sendiri dikarenakan korban merasa terancam oleh pelaku, takut kehilangan reputasi dan takut kehilangan untuk mengajukan gugatan dan konsekuensi keuangan.Rekonsiliasi ini memiliki ciri-ciri di bawah ini:

a. Sering terjadi dalam kasus pemerkosaan, kekerasan seksual, pembunuhan, kecelakaan, pencurian, penipuan, dan sebagainya.
b. Ini sering terjadi di daerah pedesaan
c. Korban dan pelaku memiliki hubungan sosial tertentu
d. Ilegal dan tidak ada prosedur hukumnya
e. Menguntungkan korban dan pelaku

Untuk menghindari konflik yang berulang dan viktimisasi, polisi sering memediasi dengan membawa pelaku dan korban bersama dalam pertemuan secara tatap muka mencari jalan secara rekonsiliasi. Hal ini bertujuan adanya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat.Menurut Pasal 172 Hukum Acara Pidana China, Pengadilan Rakyat dapat melakukan mediasi dalam kasus penuntutan pribadi; jaksa penuntut swasta dapat mengatur penyelesaian dengan terdakwa atau menarik penuntutannya sebelum putusan diucapkan. Mediasi tidak akan dilakukan untuk kasus-kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 170 Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem ganti rugi untuk korban kejahatan di China mendukung restitusi oleh pelanggar korban. Sangat disayangkan bahwa negara tidak menawarkan ganti rugi apapun. Ketentuan yang berkaitan dengan restitusi oleh pelanggar kepada korban tercantum dalam Hukum Acara Pidana China (1996) dan Hukum Pidana

China (1997), yaitu: Pasal 36, 64, 88 dari Hukum Pidana,Pasal 77, 78 Hukum Acara Pidana (Bab VII Aksi Sipil Insidental) dan Peraturan tentang Aksi Sipil Insidental di Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok. (2000-12-13).

Dalam sistem hukum Tiongkok, restitusi dilakukan pelaku kejahatan kepada korban yang direalisasikan dengan prosedural aksi sipil. Prosedur tindakan sipil insidentil dikondisikan oleh:

a. Alasan memulai tindakan pidana, atau hanya memulai tindakan dalam gatni rugi sipil oleh korban
b. Seorang korban menderita kerugian materi akibat kejahatan, termasuk:

   1) korban langsung;
   2) kuasa atau wali yang tidak memiliki kapasitas untuk tindakan sipil;
   3) ahli waris sah dari korban yang meninggal; dan
   4)Jika kerugian telah terjadi pada properti Negara atau properti kolektif, *Peoples*Kejaksaan dapat mengajukan tindakan sipil insidentil saat memulai penuntutan publik. apa yanglebih dari itu, korban dapat menjadi warga negara (perorangan), perusahaan, perusahaan, lembaga, negara, organ, atau organisasi.

c. Seorang korban menderita kerugian materi sebagai akibat dari kejahatan terdakwa. Bahan kerugian termasuk kerugian aktual yang diderita korban dan kerugian yang tak terhindarkan, namun ganti rugi untuk cedera mental tidak termasuk. Jika seorang korban menderita cedera mental sebagai akibatnya tindak pidana terdakwa, dan mengajukan tindakan sipil insidentil selamaproses pidana, Pengadilan Rakyat akan menolak untuk menerimanya
d. Durasi waktu pengajuan tindakan sipil insidentil: dari mengajukan kasus pidana hingga ke pengadilanprosedur contoh pertama diucapkan
e. Cara tindakan sipil insidentil diajukan: menulis surat pengaduan atau mengajukan pengaduan secara lisan

Tindakan restitusi sangat cepat dilakukan di China. Di satu sisi, harta benda milik korban yang secara ilegal dikuasai oleh pelaku atau dialihkan kepada orang lain akan segera dikembalikan. Di sisi lain, tindakan sipil insidentil harus dilakukan secara bersamaan dengan kasus tindak pidana. Untuk mencegah keterlambatan dalam proses persidangan kasus pidana, maka setelah menyelesaikan persidangan kasus pidana selanjutnya akan dilakukan tindakan sipil insidentil. Ganti rugi atau pengembalian harta benda milik korban oleh pelaku dapat dianggap sebagai bentuk hukuman.

Di Cina, sistem perlindungan saksi telah dikembangkan sejak 1979, dan ada beberapa peraturan untuk keamanan saksi dan untuk melarang pembalasan terhadap saksi dalam hukum saat ini. Menurut Hukum Acara Pidana China (1996) dan Hukum China (1997), perlindungan terhadap saksi yang terlibat

a. Memastikan keamanan reporter, pengadu dan informan serta kerabat dekat mereka. Jika para reporter, pengadu, atau informan ingin tidak menyebutkan nama dan tindakan mereka melaporkan, mengeluh atau menginformasikan yang diketahui publik, ini harus dirahasiakan.(Pasal 85.3 Hukum Acara Pidana)
b. Memastikan keamanan saksi dan kerabat dekat mereka. (Pasal 49.1 PidanaHukum Acara)
c. Tanggung jawab pidana atas pelanggaran keamanan publik, jika ada yang mengintimidasi, menghina, memukuli atau membalas terhadap saksi atau kerabat dekatnya. (Pasal 49.2 Hukum Acara Pidana)
d. Tanggung jawab pidana karena menghalangi saksi untuk memberikan kesaksian. (Pasal 307 PidanaHukum)

e. Tanggung jawab pidana untuk pembalasan terhadap seorang saksi. (Pasal 308 Hukum Pidana)

Peraturan perlindungan saksi ini semuanya lebih umum dan abstrak. Secara umum masalah utama dari sistem untuk perlindungan saksi adalah:

a. Kurangnya cara untuk memberikan perlindungan saksi
b. Korban dan kerabat dekat mereka tidak dilindungi
c. Kurangnya prosedur untuk perlindungan saksi
d. Tidak ada ketentuan konkret tentang bagaimana melindungi saksi, yang mengimplementasikan perlindungan, batas waktu perlindungan dan tingkat perlindungan, dan lain-lain

Perlindungan saksi dieksplorasi di beberapa kejaksaan dan orang-orang setempat di pengadilan. Sebagai contoh, kejaksaan di Distrik Bao'an kota Shenzhen di Provinsi Guangdong menerapkan peraturan yang memasukkan program perlindungan saksi, namun sangat disayangkan bahwa korban diabaikan. Sementara itu, kasus perlindungan saksi terjadi di Pengadilan Tinggi Rakyat Guangzhou. Selama seminar tentang merevisi isu-isu hangat dari tiga undang-undang hukum acara, Wakil Presiden Mahkamah Agung Yudisial Huang Songyou mengajukan proposal bahwa negara harus membuat dana khusus untuk memberikan ganti rugi yang diperlukan dari saksi yang bersaksi. Apalagi Hukum Pembuktian Pidana akan diadopsi.

Metode kesaksian untuk melindungi korban dan saksi Menurut Pasal 42 Hukum Acara Pidana, kesaksian para saksi dan pernyataan korban adalah bukti

hukum. Metode kesaksian untuk melindungi korban dan saksi adalah sebagai berikut:

a. Jika para reporter, pengadu, atau informan tidak ingin menyebutkan nama dan tindakan mereka melaporkan, mengeluh, atau memberi tahu yang diketahui publik, ini harus dirahasiakan dari mereka. (Pasal 85.3 Hukum Acara Pidana)
b. Mempertanyakan korban atau saksi di unit atau tempat tinggalnya. Bila perlu, mereka juga bisaberi tahu saksi untuk memberikan kesaksian di Kejaksaan Rakyat atau organ keamanan publik.(Pasal 97.1 Hukum Acara Pidana)
c. Mempertanyakan korban atau saksi oleh lebih dari dua penyelidik, kejaksaan atau hakim
d. Saksi akan diperiksa secara individual. (Pasal 97.2 Hukum Acara Pidana)
e. Ketika seorang saksi di bawah usia 18, Ia dapat diwakilkan oleh orang lain (Pasal 98.2 Hukum Acara Pidana)
f. Dilarang keras meminta pengakuan dengan penyiksaan dan mengumpulkan bukti dengan ancaman, bujukan, tipu daya atau cara melanggar hukum lainnya. Bukti yang dikumpulkan oleh cara-cara yang melanggar hukum tersebut di atas tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan kasus. (Pasal 43 dari Hukum Acara Pidana; Pasal 61 Interpretasi Yudisial tentang Beberapa Masalah Hukum Acara Pidana di Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok)
g. Urusan pribadi yang terlibat sebagai korban atau saksi harus dirahasiakan untuk mereka

h. Para korban harus diperlakukan dengan baik: (1) Saat menginterogasi para korban, Jaksa atau hakim harus memberi tahu para korban atas hak mereka untuk memulai tindakan sipil insidentil, (2) Memastikan keselamatan korban
i. Saat memeriksa suatu kasus, Kejaksaan Rakyat harus memperhatikan pendapat korban dan dari orang-orang yang dipercayakan oleh korban pada bukti, ganti rugi dan pelepasan kasus.(Pasal 139 Hukum Acara Pidana)
j. Korban dapat mengajukan pernyataan tentang kejahatan yang dituduhkan dalam RUU penuntutan di pengadilan, dan korban serta kuasa dapat menyatakan pandangan mereka tentang bukti dankasus. (Pasal 155.160 Hukum Acara Pidana)

Mengenai partisipasi aktif para korban dalam proses peradilan pidana dalam Hukum Acara Pidana China, korban adalah salah satu pihak yang terlibat, namun seorang korban mungkin bisa bertindak dalam semua jenis peran, yang mana sebagai berikut:

a. Seorang jaksa dalam kasus penuntutan pribadi. (Pasal 170 Hukum Acara Pidana)
b. Penggugat dalam aksi sipil insidentil
c. Para pihak ikut dalam proses persidangan
d. Peran yang mirip dengan saksi
e. Gugatan
f. Hak untuk menuntut meminta kembali haknya
g. Berpartisipasi dalam penyelidikan di pengadilan dan debat pengadilan

h. Menyajikan petisi untuk penilaian yang efektif secara hukum. (Pasal 204 Prosedur Pidana Hukum).

Korban dalam persidangan menikmati hak-hak khusus sebagai berikut:

a. Hak untuk mempercayakan kepada seorang kuasa. (Pasal 40 Hukum Acara Pidana)
b. Hak untuk melaporkan atau mengajukan pengaduan ketika hak pribadi atau harta benda korban dilanggar. (Pasal 84.2 Hukum Acara Pidana)
c. Hak untuk membawa masalah ke lembaga keamanan publik, tidak mengajukan kasus ke kejaksaan rakya tuntuk meminta organ keamanan publik untuk menyatakan alasan untuk tidak mengajukan kasus
d. Hak untuk mengajukan petisi kepada Kejaksaan Rakyat di tingkat yang lebih tinggi berikutnya dan meminta terakhir untuk memulai penuntutan publik, jika korban menolak untuk menerima keputusan untuk tidak memulai suatupenuntutan. (Pasal 145 Hukum Acara Pidana)
e. Hak untuk meminta Kejaksaan Rakyat untuk mengajukan banding jika korban atau menurut hukum Perwakilan menolak untuk menerima keputusan tingkat pertama yang dibuat oleh Pengadilan Rakyat setempat tingkat
f. Hak untuk membawa gugatan langsung ke Pengadilan Rakyat untuk kasus penuntutan pribadi. Jika korban sudah mati, kuasanya dan kerabat dekat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Rakyat. (Pasal 88.170 Hukum Acara Pidana).

Korban atau kerabat dekat mereka dapat mengajukan gugatan atas ganti rugi atas kerugian materi ke pengadilan rakyat. Dengan demikian korban dapat

menikmati hak untuk mengajukan gugatan atas ganti rugi terhadap pelaku kejahatan.

Menurut Hukum Acara Pidana Tiongkok, seorang korban dapat berbagi semua jenis informasi tentang proses pada setiap tahap proses peradilan pidana, dan penyidik, kejaksaan atau hakim harus memberikan informasi tentang hak prosedural, hasil dan alasan untuk korban kejahatan

a. Menurut Hukum Acara Pidana Tiongkok, seorang korban dapat berbagi semua jenis informasi tentang proses pada setiap tahap proses peradilan pidana, dan penyidik, kejaksaan atau hakim harus memberikan informasi tentang hak prosedural, hasil dan alasan untuk korban kejahatan.
b. Jika korban melaporkan atau membawa pengaduan ke organ keamanan publik, kejaksaan orang atau pengadilan rakyat, dan kasus ini tidak diajukan, mereka akan memberi tahu korban alasannya. Jika korban tidak setuju dengan keputusan tersebut, ia dapat meminta pertimbangan ulang. (Pasal 86 Hukum Acara Pidana)
c. Jika Kejaksaan Rakyat memutuskan untuk tidak memulai penuntutan sehubungan dengan kasus yang melibatkan seorang korban, ia harus mengirimkan keputusan secara tertulis kepada korban. Jika korban menolak untuk menerima keputusan, dalam waktu tujuh hari setelah menerima keputusan tertulis, korban dapat mengajukan petisi kepada Kejaksaan Rakyat di tingkat yang lebih tinggi berikutnya dan meminta untuk memulai penuntutan publik.Kejaksaan Rakyat harus memberi tahu korban keputusan yang diambil setelah pemeriksaan ulang. (Artikel 145 Hukum Acara Pidana)

d. Jika korban atau kuasa hukumnya menolak untuk menerima keputusan tingkat pertama yang dibuat oleh Pengadilan Rakyat di tingkat mana pun, dalam waktu lima hari sejak tanggal menerima keputusan tertulis, korban memiliki hak untuk meminta Kejaksaan Rakyat untuk menyampaikan protes. Dalam waktu lima hari sejak tanggal menerima permintaan yang dibuat oleh korban atau hukumnyamewakili, memutuskan apakah akan memprotes atau tidak dan memberinya jawaban. (Pasal 185 dariHukum Acara Pidana)
e. Korban harus diberitahu tentang segala jenis hak pada setiap tahap proses peradilan pidana.

Berdasarkan Hukum Acara Pidana China, maka ketentuan-ketentuan yang dijadikan rujukan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif para korban dalam proses peradilan pidana dalam Hukum Acara Pidana China, korban adalah salah satu pihak yang terlibat, namun seorang korban mungkin bisa bertindak dalam semua jenis peran, antara lain sebagai berikut:
    a. Seorang jaksa dalam kasus penuntutan pribadi. (Pasal 170 Hukum Acara Pidana);
    b. Para pihak ikut dalam proses persidangan;
    c. Hak untuk menuntut meminta kembali haknya;
    d. Berpartisipasi dalam penyelidikan di pengadilan dan debat pengadilan;
    e. Menyajikan petisi untuk penilaian yang efektif secara hukum. (Pasal 204 Prosedur Pidana Hukum).
2. Korban dalam persidangan menikmati hak-hak khusus sebagai berikut:

a. Hak untuk mempercayakan kepada seorang kuasa. (Pasal 40 Hukum Acara Pidana);
b. Hak untuk melaporkan atau mengajukan pengaduan ketika hak pribadi atau harta benda korban dilanggar. (Pasal 84.2 Hukum Acara Pidana);
c. Hak untuk membawa masalah ke lembaga keamanan publik, tidak mengajukan kasus ke kejaksaan rakya tuntuk meminta organ keamanan publik untuk menyatakan alasan untuk tidak mengajukan kasus;
d. Hak untuk mengajukan petisi kepada Kejaksaan Rakyat di tingkat yang lebih tinggi berikutnya dan meminta terakhir untuk memulai penuntutan publik, jika korban menolak untuk menerima keputusan untuk tidak memulai suatupenuntutan. (Pasal 145 Hukum Acara Pidana);
e. Hak untuk meminta Kejaksaan Rakyat untuk mengajukan banding jika korban atau menurut hukum Perwakilan menolak untuk menerima keputusan tingkat pertama yang dibuat oleh Pengadilan Rakyat setempat tingkat;
f. Hak untuk membawa gugatan langsung ke Pengadilan Rakyat untuk kasus penuntutan pribadi. Jika korban sudah mati, kuasanya dan kerabat dekat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Rakyat. (Pasal 88.170 Hukum Acara Pidana).

3. Menurut Hukum Acara Pidana Tiongkok, seorang korban dapat berbagi semua jenis informasi tentang proses pada setiap tahap proses peradilan pidana, dan penyidik, kejaksaan atau hakim harus memberikan informasi tentang hak prosedural, hasil dan alasan untuk korban kejahatan;

4. Korban dalam persidangan menikmati hak-hak khusus, antara lain sebagai berikut:
    a. Jika korban melaporkan atau membawa pengaduan ke organ keamanan publik, kejaksaan orang atau pengadilan rakyat, dan kasus ini tidak diajukan, mereka akan memberi tahu korban alasannya. Jika korban tidak setuju dengan keputusan tersebut, ia dapat meminta pertimbangan ulang. (Pasal 86 Hukum Acara Pidana);
    b. Jika Kejaksaan Rakyat memutuskan untuk tidak memulai penuntutan sehubungan dengan kasus yang melibatkan seorang korban, ia harus mengirimkan keputusan secara tertulis kepada korban. Jika korban menolak untuk menerima keputusan, dalam waktu tujuh hari setelah menerima keputusan tertulis, korban dapat mengajukan petisi kepada Kejaksaan Rakyat di tingkat yang lebih tinggi berikutnya dan meminta untuk memulai penuntutan publik.Kejaksaan Rakyat harus memberi tahu korban keputusan yang diambil setelah pemeriksaan ulang. (Artikel 145 Hukum Acara Pidana);
    c. Jika korban atau kuasa hukumnya menolak untuk menerima keputusan tingkat pertama yang dibuat oleh;Pengadilan Rakyat di tingkat mana pun, dalam waktu lima hari sejak tanggal menerima keputusan tertulis, korban memiliki hak untuk meminta Kejaksaan Rakyat untuk menyampaikan protes. Dalam waktu lima hari sejak tanggal menerima permintaan yang dibuat oleh korban atau hukumnyamewakili, memutuskan apakah akan

memprotes atau tidak dan memberinya jawaban. (Pasal 185 dariHukum Acara Pidana);

d. Korban harus diberitahu tentang segala jenis hak pada setiap tahap proses peradilan pidana..

5. Perlindungan dan pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan di China meliputi:
   a. Langkah-langkah untuk melindungi korban kejahatan
   b. Partisipasi aktif para korban dalam proses peradilan pidana
   c. Pemberian informasi kepada korban kejahatan

5.1.3. Hak Korban Tatacara Pemenuhannya di Saudi Arabia [1122]

Korban atau wakilnya dan ahli warisnya dapat melakukan tindakan pidana sehubungan dengan semua kasus yang melibatkan hak tindakan pribadi, dan akan menindaklanjuti kasus tersebut di hadapan pengadilan yang kompeten. Pengadilan yang kompeten harus melayani panggilan untuk memberi tahu jaksa.[1123]

Tidak ada tindakan kriminal yang akan dimulai atau proses investigasi yang dilakukan dalam kejahatan yang melibatkan hak tindakan pribadi, kecuali melalui pengaduan oleh korban atau wakilnya atau ahli warisnya, diajukan kepada pihak yang berwenang, kecuali Biro Investigasi dan Penuntutan menganggap bahwa pengajuan tindakan semacam itu dan penyelidikan atas kejahatan-kejahatan itu akan melayani kepentingan umum.[1124]Jika nampak ke pengadilan

[1122]Hak Korban dan Implementasinya dalam Praktek di Saudi Arabia dalam Bahasa Inggris dikutip dari http://hrlibrary.umn.edu/research/saudiarabia/criminal_proceedure.html tanggal 13 Juni 2020,Pukul 24.00.
[1123]Pasal 17 Hukum Acara Pidana (HAP) Saudi Arabia.
[1124]Pasal 18 HAP Saudi Arabia.

bahwa ada konflik antara kepentingan korban atau ahli warisnya dan kepentingan perwakilan korban, perwakilan tersebut harus dikecualikan dari melanjutkan persidangan dan wakil lain harus ditunjuk.[1125]

Jika nampak ke pengadilan dalam kasus apa pun yang tertunda sebelum itu bahwa kasus seperti itu melibatkan orang-orang yang dituduh selain dari yang dituntut atau fakta-fakta yang terkait dengan dakwaan yang dipersoalkan, itu harus memberitahu pengadu sesuai untuk menyelesaikan apa yang diperlukan untuk pertimbangan yang tepat dan ajudikasi kasus dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prosedur ini akan berlaku untuk Pengadilan Banding bila perlu.[1126]

Sebuah tindakan kriminal pribadi hilang dalam dua kasus berikut: (1) Penerbitan putusan akhir dan (2) Pemberian grasi oleh korban atau ahli warisnya, namun pemberian grasi oleh korban atau ahli warisnya tidak akan menghalangi proses tindakan pidana publik.[1127]

Keluhan yang diajukan oleh orang yang dirugikan karena kejahatan harus dianggap sebagai klaim hak tindakan pribadi, kecuali jika ia secara tegas melepaskan hak tersebut di depan Penyelidik. Penyelidik harus memasukkan pengabaian semacam itu ke dalam catatan dan harus disaksikan. Dalam kasus pencemaran nama baik dan qisas, pengabaian tersebut harus disertifikasi oleh pengadilan yang kompeten.[1128]

[1125]Pasal 19 HAP Saudi Arabia.
[1126]Pasal 20 HAP Saudi Arabia.
[1127]Pasal 23 HAP Saudi Arabia.
[1128]Pasal 29 HAP Saudi Arabia.

Jika penyelidik menyimpulkan bahwa tidak ada alasan untuk melanjutkan kasus ini, ia harus merekomendasikan agar file kasus tersebut ditangguhkan. Perintah untuk efek ini dapat dikeluarkan oleh kepala departemen terkait.[1129] Jika perintah yang menangguhkan file kasus ini dikeluarkan, Penyelidik harus mengkomunikasikan perintah tersebut kepada korban dan kepada penggugat sehubungan dengan hak tindakan pribadi. Dalam hal kematian salah satu dari mereka, perintah harus dikomunikasikan secara kolektif kepada ahli waris di tempat kediamannya.[1130]

Siapa pun yang menderita kerugian akibat kejahatan dapat mengajukan klaim sehubungan dengan hak pribadinya atas tindakan selama penyelidikan atas tindakan tersebut.Penyelidik harus memutuskan apakah klaim tersebut dapat diterima dalam waktu tiga hari sejak tanggal pengajuan. Jika klaim ditolak, banding dapat diajukan ke kepala departemen terkait dalam waktu satu minggu sejak tanggal komunikasi keputusankepada pihak yang berkepentingan. Keputusan yang dikeluarkan oleh kepala departemen terkait harus bersifat final selama tahap investigasi.[1131]

Terdakwa, korban, penuntut sehubungan dengan hak tindakan pribadi, dan perwakilan atau pengacara mereka masing-masing dapat menghadiri semua proses penyelidikan. Penyelidik dapat, bagaimanapun, melakukan penyelidikan dengan tidak adanya semua atau sebagian dari yang disebutkan di atas, setiap kali

[1129]Pasal 62 HAP Saudi Arabia.
[1130]Pasal 63 HAP Saudi Arabia.
[1131]Pasal 68 HAP Saudi Arabia.

dianggap perlu untuk menentukan kebenaran. Segera setelah kebutuhan berakhir, ia harus mengizinkan mereka untuk meninjau penyelidikan.[1132]

Orang-orang yang berperkara akan diberi tahu waktu dan tempat proses investigasi.[1133] Korban dan penuntut hak tindakan pribadi harus menentukan tempat-tempat di kota pengadilan di mana tempat penyelidikan dilakukan jika mereka bukan penduduknya. Jika mereka gagal melakukannya, pemberitahuan apa pun yang diperlukan kepada mereka akan dianggap layak dengan pemberitahuan kepada administrasi pengadilan.[1134]Orang-orang yang berperkara dapat mengajukan permintaan mereka kepada Penyidik selama persidangan. Penyelidik harus memutuskan klaim semacam itu dan merinci alasan keputusannya.[1135]

Pakar harus menyerahkan laporannya secara tertulis dalam waktu yang ditentukan oleh Penyelidik. Jika ahli gagal menyerahkan laporannya pada batas waktu, atau jika ia menemukan pembenaran untuk itu, Penyelidik dapat menggantikannya dengan ahli lain. Setiap orang yang berperkara dapat mengajukan laporan yang disiapkan oleh pakar lain yang disimpan olehnya dalam kapasitas sebagai penasihat.[1136]

Jika penyelidik mendapatkan bukti bahwa seseorang tertentu memiliki barang-barang yang relevan dengan kejahatan yang ia selidiki, Penyelidik harus meminta kepala departemen terkait untuk mengeluarkan perintah untuk pengiriman barang-barang tersebut kepada Penyelidik untuk memungkinkannya

[1132]Pasal 69 HAP Saudi Arabia.
[1133]Pasal 71 HAP Saudi Arabia.
[1134]Pasal 72 HAP Saudi Arabia.
[1135]Pasal 73 HAP Saudi Arabia.
[1136]Pasal 77 HAP Saudi Arabia.

memeriksa barang-barang ini karena keadaan mungkin diperlukan.[1137] Suatu perintah dapat dikeluarkan bahwa setiap barang yang disita selama investigasi dikembalikan bahkan sebelum putusan diberikan, kecuali bila barang-barang ini diperlukan untuk proses persidangan atau dapat disita.[1138] Kiriman yang disita akan dikembalikan kepada orang yang kepemilikannya telah ditemukan. Jika kiriman-kiriman ini tunduk pada kejahatan atau kejahatan yang diakibatkannya, kiriman-kiriman tersebut akan dikembalikan kepada orang yang kehilangan kepemilikannya dengan alasan kejahatan itu, kecuali jika orang yang memiliki barang-barang itu ditemukan berhak untuk menyimpannya.[1139]Perintah untuk mengembalikan barang-barang yang disita akan dikeluarkan oleh Penyelidik atau hakim dari pengadilan yang kompeten di mana yurisdiksinya diselidiki;pengadilan yang kompeten dapat memerintahkan pengembalian barang-barang yang disita ini selama persidangan.[1140]

Penyelidik harus mendengar pernyataan para saksi yang dipanggil oleh pihak yang berperkara kecuali dia menganggap bahwa kesaksian mereka tidak akan berguna. Ia juga dapat mendengar pernyataan dari orang lain yang dianggap perlu sehubungan dengan fakta-fakta yang dapat mengarah pada bukti kejahatan, keadaannya, dan kaitannya dengan tertuduh atau tidak bersalah.[1141]

Seseorang yang dirugikan oleh kejahatan dan ahli warisnya, kapan saja selama persidangan kasus ini, berhak untuk mengajukan permintaan ke pengadilan persidangan mengenai hak pribadinya atas tindakan apa pun

[1137]Pasal 85 HAP Saudi Arabia.
[1138]Pasal 86 HAP Saudi Arabia.
[1139]Pasal 87 HAP Saudi Arabia.
[1140]Pasal 88 HAP Saudi Arabia.
[1141]Pasal 95 HAP Saudi Arabia.

berapapun jumlahnya, meskipun tindakannya memiliki ditolak selama investigasi.[1142] Jika orang yang dirugikan oleh kejahatan tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki wali atau wali, pengadilan di mana tindakan pidana telah diajukan harus menunjuk seseorang untuk mengejar hak pribadinya atas tindakan.[1143]

Penuntut hak tindakan pribadi harus menunjuk tempat di dalam kota tempat pengadilan itu berada, dan ini harus dimasukkan dengan administrasi pengadilan. Jika dia gagal melakukannya, dia akan diberitahu melalui administrasi pengadilan.[1144] Pengabaian hak tindakan pribadi tidak akan mempengaruhi hak atas tindakan kriminal publik.[1145] Jika penuntut hak tindakan pribadi meninggalkan aksinya dalam proses yang dimulai sebelum pengadilan menangani kasus pidana, ia dapat melanjutkan tindakan di depan pengadilan tersebut dan tidak berhak untuk memulai tindakan di depan pengadilan lain.[1146]

Jika orang yang dirugikan oleh kejahatan mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan yang kompeten, dan kemudian gugatan pidana diajukan, ia dapat meninggalkan aksinya di pengadilan itu dan mengajukannya ke pengadilan untuk mendengarkan gugatan pidana tersebut.[1147]

Berdasarkan Hukum Acara Pidana Saudi Arabia, maka ketentuan-ketentuan yang dijadikan rujukan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

[1142]Pasal 148 HAP Saudi Arabia.
[1143]Pasal 149 HAP Saudi Arabia.
[1144]Pasal 151 HAP Saudi Arabia.
[1145]Pasal 152 HAP Saudi Arabia.
[1146]Pasal 153 HAP Saudi Arabia.
[1147]Pasal 154 HAP Saudi Arabia.

a. Korban atau wakilnya dan ahli warisnya dapat melakukan tindakan pidana sehubungan dengan semua kasus yang melibatkan hak tindakan pribadi, dan akan menindaklanjuti kasus tersebut di hadapan pengadilan yang kompeten. Pengadilan yang kompeten harus melayani panggilan untuk memberi tahu jaksa.[1148]
b. Tidak ada tindakan kriminal yang akan dimulai atau proses investigasi yang dilakukan dalam kejahatan yang melibatkan hak tindakan pribadi, kecuali melalui pengaduan oleh korban atau wakilnya atau ahli warisnya, diajukan kepada pihak yang berwenang, kecuali Biro Investigasi dan Penuntutan menganggap bahwa pengajuan tindakan semacam itu dan penyelidikan atas kejahatan-kejahatan itu akan melayani kepentingan umum.[1149]
c. Sebuah tindakan kriminal pribadi hilang dalam dua kasus berikut: (1) Penerbitan putusan akhir dan (2) Pemberian grasi oleh korban atau ahli warisnya, namun pemberian grasi oleh korban atau ahli warisnya tidak akan menghalangi proses tindakan pidana publik.[1150]
d. Terdakwa, korban, penuntut sehubungan dengan hak tindakan pribadi, dan perwakilan atau pengacara mereka masing-masing dapat menghadiri semua proses penyelidikan. Penyelidik dapat, bagaimanapun, melakukan penyelidikan dengan tidak adanya semua atau sebagian dari yang disebutkan di atas, setiap kali dianggap perlu untuk menentukan kebenaran. Segera setelah kebutuhan berakhir, ia harus mengizinkan mereka untuk meninjau penyelidikan.[1151]

[1148]Pasal 17 Hukum Acara Pidana (HAP) Saudi Arabia.
[1149]Pasal 18 HAP Saudi Arabia.
[1150]Pasal 23 HAP Saudi Arabia.
[1151]Pasal 69 HAP Saudi Arabia.

e. Seseorang yang dirugikan oleh kejahatan dan ahli warisnya, kapan saja selama persidangan kasus ini, berhak untuk mengajukan permintaan ke pengadilan persidangan mengenai hak pribadinya atas tindakan apa pun berapapun jumlahnya, meskipun tindakannya memiliki ditolak selama investigasi.[1152] Jika orang yang dirugikan oleh kejahatan tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki wali atau wali, pengadilan di mana tindakan pidana telah diajukan harus menunjuk seseorang untuk mengejar hak pribadinya atas tindakan.[1153]

5.1.4. Hak Korban dan Tatacara Pemenuhannya diThailand[1154]

Menurut Hukum Acara Pidana di Negara Thailand, Orang-orang berikut dapat bertindak atas nama korban pelaku tindak pidana:

a. Perwakilan atau wali sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan terhadap anak di bawah umur ;[1155]
b. Anak, suami atau istri, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di mana yang menjadi korban telah meninggal atau tidak dapat bertindak sendiri;[1156]
c. Manajer atau perwakilan yang sah dari sebuah badan hukum sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan terhadap badan hukum tersebut;[1157]

[1152]Pasal 148 HAP Saudi Arabia.
[1153]Pasal 149 HAP Saudi Arabia.
[1154] Hak korban dan implementasinya dalam praktek di Thailand dikutip dari Hukum Acara Pidana Thailand dalam Bahasa Inggris diakses dari https://www.samuiforsale.com/law-texts/thai-criminal-procedure-code.html tanggal 13 Juni 2020,Pukul 18.30.
[1155]Pasal 5 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1156]Pasal 5 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1157]Pasal 5 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.

d. Dalam kasus pidana, dimana orang yang dirugikan adalah wanita yang sudah menikah, wanita tersebut memiliki hak untuk memilih tuntutan pidana yang diizinkan oleh suaminya.[1158]
e. Apabila korban adalah anak di bawah umur tanpa memiliki wali atau kuasanya, atau gila, atau jika wali tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan alasan tertentu kerabat dari orang tersebut atau orang yang berkepentingan dapat mengajukan mosi ke pengadilan untuk menunjuknya sebagai perwakilannya. Pengadilan akan menunjuk perwakilan untuk orang tersebut jika dianggap perlu. Apabila tidak ada orang yang bersedia menjadi wali atau perwakilannya, maka diangkat seorang pejabat administratif. Sehubungan dengan tindakan prosedural yang dilakukan untuk tujuan pengangkatan tersebut, tidak ada biaya yang dapat dipungut.[1159]

Orang-orang sebagaimana pada huruf a,b,c,d,e di atas memiliki kekuatan untuk bertindak atas nama orang yang dirugikan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan sebagai berikut:[1160]

- Untuk mengajukan pengaduan
- Untuk mengajukan penuntutan pidana bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan pidana
- Untuk mengajukan gugatan perdata sehubungan adanya dugaan tindak pidana
- Untuk mencabut tuntutan pidana atau gugatan perdata sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana;

[1158]Pasal 4 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1159]Pasal 6 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1160]Pasal 3 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.

Penyelidikan, pemeriksaan pendahuluan atau sidang harus dilakukan dalam bahasa Thailand. Jika perlu untuk menerjemahkan dialek Thai, bahasa sehari-hari atau bahasa asing ke dalam bahasa Thai atau sebaliknya, diperlukan seorang penerjemah, di mana korban, terdakwa, saksi tidak dapat berbicara atau memahami bahasa Thai atau hanya dapat berbicara atau mengerti dialek bahasa Thai atau bahasa sehari-hari dan belum diwakili oleh penerjemah mana pun, penyelidik, jaksa penuntut umum atau pengadilan harus segera menyediakan penerjemah untuknya.[1161]

Jika korban, terdakwa, terdakwa atau saksi menderita gangguan bicara atau gangguan pendengaran atau tidak dapat mengungkapkan makna dan belum diwakili oleh penerjemah bahasa isyarat, penyelidik, jaksa penuntut umum atau pengadilan harus menyediakan satu untuknya atau mungkin mengatur sarana pertanyaan lain yang sesuai. , menjawab atau ekspresi makna untuknya.[1162]

Jika penerjemah diharuskan untuk membuat terjemahan atau tafsir atas suatu pembelaan, kesaksian atau yang lainnya, dia harus membuatnya secara akurat dan akan mengambil sumpah atau membuat penegasan bahwa dia akan melakukan tugas dengan segala ketulusan tanpa menambahkan apapun atau mengurangi apapun dari terjemahan atau interpretasi. Penerjemah harus mengatur terjemahan atau interpretasi.[1163]Sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Thailand, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman, Kejaksaan Agung, atau Kantor Pengadilan, sesuai dengan kasusnya, dengan persetujuan Kementerian Keuangan, penyelidik, jaksa penuntut umum

[1161]Pasal 13 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1162]Pasal 13 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1163]Pasal 13 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.

atau pengadilan harus, atas perintah, membayar kepada penerjemah menurut bagian ini tunjangan, biaya perjalanan dan biaya tinggal.[1164]

Pihak yang dapat melakukan penuntutan pidana di pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum dan Korban. [1165]

Jika korban telah meninggal setelah melakukan penuntutan, orang tua, keturunan atau pasangan almarhum dapat melanjutkan kasus tersebut sebagai penggantinya. Jika korban masih di bawah umur, gila atau orang yang tidak cakap secara hukum meninggal setelah ditunjuk seorang seorang kuasa untuk mewakilinya, setelah tuntutan diajukan, maka tuntutan tersebut tetap dapat dilanjutkan.[1166]

Sehubungan dengan penuntutan publik, korban melalui pengajuan mosi, mengasosiasikan dirinya sebagai jaksa pada setiap tahap persidangan di hadapan pengadilan tingkat pertama selama sebelum adanya putusan.[1167]

Berkenaan dengan penuntutan individu terhadap pelanggaran yang bukan pelanggaran majemuk, jaksa penuntut umum, dengan mosi tertentu mengasosiasikan dirinya sebagai jaksa pada setiap tahap persidangan sebelum finalitas dan kemutlakan kasus.[1168]

Jika penuntut umum dan korban menjadi penuntut bersama dan penuntut umum berpendapat korban akan berbuat kelalaian dalam menjalani perkara tersebut apalagi berkaitan dengan proseduralnya, penuntut umum dapat

[1164]Pasal 13 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1165]Pasal 28 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1166]Pasal 29 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1167]Pasal 30 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1168]Pasal 31 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.

mengajukan ke pengadilan agar memerintahkan korban tidak melakukan tindakan tersebut.[1169]

Jika penuntutan terhadap kejahatan yang sama telah diajukan oleh penuntut umum atau korban ke pengadilan tingkat pertama yang sama atau berbeda, pengadilan tersebut dapat, baik secara *proprio motu* atau atas mosi yang diajukan oleh jaksa penuntut pada tahap apa pun tetapi sebelum keputusan diberikan dan jika tidak ada, perintah tersebut harus diberikan berdasarkan persetujuan pengadilan lain.[1170]

Perintah tidak adanya penuntutan tidak mengurangi hak korban untuk melakukan penuntutan sendiri. [1171]*A nolle prosequi* dapat diajukan kapan saja sebelum pengadilan memberikan putusan tingkat pertama. Pengadilan dapat mengabulkan atau menolaknya apabila dianggap perlu. Jika *nolle prosequi* dimasukkan setelah adanya tanggapan dari terdakwa, pengadilan akan menanyakan kepada terdakwa apakah ia akan mengajukan keberatan atas hal itu dan mencatat pernyataannya. *Nolle prosequi* harus diberhentikan jika ada keberatan dari tergugat. Sedangkan untuk kasus compoundable, *nolle prosequi* dapat dimasukkan atau dimusyawarhkan kapan saja sebelum putusan. *Nolle prosequi* harus diberhentikan jika ada keberatan dari Terdakwa . [1172]

Sebuah kasus yang telah dimasukkan dari pengadilan tidak dapat dikembalikan, kecuali:[1173]

[1169]Pasal 32 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1170]Pasal 33 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1171]Pasal 34 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1172]Pasal 35 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1173]Pasal 36 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.

1. Jika kasus yang tidak dapat digabung kemudian dibawa oleh jaksa penuntut umum kemudian ditarik kembali, hak korban untuk memulihkan hak pemulihan tidak serta merta hilang;
2. Jika kasus majemuk diajukan oleh jaksa penuntut umum kemudian ditarik kembali tanpa persetujuan tertulis dari korban, hak korban untuk mendapatkan untuk memulihkan dirinya serta merta tidak hilang;
3. Jika bukan kasus majemuk yang diajukan oleh korban ditarik, hak penuntut umum untuk pemulihan tidak serta merta hilang.

Kasus pidana berakhir dengan alasan:[1174]

1. Suatu kasus yang hanya dapat dikenakan denda akan berakhir ketika pelaku telah membayar denda maksimum yang ditentukan untuk pelanggaran tersebut kepada pejabat yang berwenang sebelum pengadilan berlangsung;
2. Kasus pelanggaran kecil, pelanggaran yang tingkat hukumannya tidak melebihi pelanggaran kecil, pelanggaran hanya dikenakan denda maksimum tidak lebih dari seratus ribu baht atau pelanggaran hukum atas pendapatan yang dikenakan denda maksimum tidak melebihi seratus ribu baht akan berakhir jika terdakwa membayar denda sejumlah yang ditetapkan oleh penyelidik;
3. Perkara delik kecil, delik yang dendanya melebihi pelanggaran kecil atau delik yang hanya dikenakan denda yang terjadi di dalam Krung Thep Mahanakhon akan berakhir apabila terdakwa membayar denda sebesar jumlah yang ditetapkan oleh petugas kepolisian. lokalitas yang menempati urutan dari

[1174]Pasal 37 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.

inspektur atau oleh pejabat polisi yang ditugaskan yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut;

4. Suatu kasus pelanggaran yang dapat diselesaikan sesuai dengan hukum lain akan berakhir jika terdakwa membayar denda dalam jumlah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Jika pejabat di bawah bagian berpendapat bahwa terdakwa tidak boleh dihukum dengan penjara, ia diberi wewenang untuk menyelesaikan kasusnya sebagai berikut:[1175]

- Pejabat tersebut dapat menetapkan jumlah denda yang harus dibayar oleh tersangka. Jika tersangka dan korban setuju, maka kasus tersebut akan berakhir setelah pembayaran denda oleh tersangka dalam jangka waktu yang wajar tetapi tidak lebih dari lima belas hari. Kasus akan dilanjutkan jika tersangka tidak setuju untuk penyelesaian atau, setelah kesepakatan tersebut, gagal membayar denda dalam jangka waktu sesuai dengan di atas.
- Sehubungan dengan kasus yang melibatkan klaim untuk kompensasi, jika korban dan tersangka setuju untuk menyelesaikan klaim, pejabat akan menetapkan jumlah kompensasi yang dianggap pantas olehnya atau yang disepakati oleh para pihak.

Hak untuk menuntut hilang karena:[1176]

2. Saat pelaku meninggal dunia;
3. Ketika, sehubungan aduan atau tuntutan atas perkara pelanggaran majemuk ditarik;

[1175]Pasal 38 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1176]Pasal 39 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.

4. Ketika kasus yang diatur dalam Pasal 37 diakhiri;
5. Kejahatan yang dituduhkan telah diputus;
6. Ketika pelanggaran yang dituduhkan kepada pelaku dihapuskan oleh undang-undang saat amnesti telah diberikan.

Mengenai kasus pencurian, perampasan, perampokan, pembajakan, pemerasan, penipuan, penyalahgunaan atau penerimaan barang curian, jika korban berhak untuk menuntut pengembalian harta benda yang telah dirampasnya melalui komisi tersebut. pelanggaran atau tuntutan atas nilai harta benda tersebut, penuntut umum, ketika melakukan penuntutan, juga akan mengajukan tuntutan pengembalian barang tersebut atas nama korban.[1177]

Sebuah klaim untuk ganti rugi harta benda dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum bersama dengan lembaga penuntutan atau dengan cara mengajukan mosi yang kemudian diajukan pada setiap tahap proses pidana pengadilan tingkat pertama, contoh:keputusan tentang tuntutan ganti rugi harta benda atau nilainya harus dijatuhkan sebagai bagian dari kasus pidana.[1178]

Mengenai tuntutan publik, korban berhak untuk menuntut kompensasi atas perbuatan terdakwa yang menyebabkan dirinya telah kehilangan nyawanya, atau mengalami cedera fisik atau mental, cedera kebebasan pribadi, penurunan reputasi atau kerusakan kepemilikan, ia dapat mengajukannya ke pengadilan dalam perkara pidana dengan mengajukan mosi agar secara paksa terdakwa memberikan kompensasi atas kerugian tersebut.Mosi harus diajukan sebelum pengambilan bukti atau di mana pengambilan bukti tidak diperlukan, sebelum kasus tersebut

[1177]Pasal 43 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1178]Pasal 44 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.

diadili. Mosi tersebut akan dianggap sebagai gugatan berdasarkan ketentuan KUHAP, dan korban sebagai penggugat. Dalam hal ini, mosi harus berisi merincikan kerugian kerugian dan jumlah kompensasi yang diklaim secara wajar. Mengingat bahwa setiap gravamen dalam mosi tidak memadai, pengadilan dapat memerintahkan petugas untuk memperbaiki mosi tersebut.Mosi tidak boleh memasukkan hal lain selain dari meminta terdakwa memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul atas perbuatannya, dan tidak boleh bertentangan atau tidak konsisten dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntutan publik sebelumnya, dengan syarat penuntut umum telah memenuhi ketentuan pasal 43, maka korban tidak lagi berhak untuk mengajukan mosi berdasarkan ayat 1 di atas yang menuntut pengembalian harta benda.[1179]

Setelah menerima mosi, pengadilan akan memberitahu tergugat tentang hal itu. Setiap pernyataan terdakwa harus dicatat. Jika terdakwa ingin menyampaikan pernyataan secara tertulis, pengadilan akan menetapkan jangka waktu yang dianggap tepat. Dan jika jaksa penuntut umum telah sepenuhnya memberikan bukti, pengadilan dapat mengizinkan korban untuk mengajukan bukti apa pun tentang kompensasi yang diperlukan, atau mungkin pertama-tama memberikan penilaian tentang bagian pidana dan kemudian menyerahkannya kepada bagian perdata.[1180]

Jika korban tidak memiliki pengacara karena tidak mampu, pengadilan akan diberi wewenang untuk menunjuk seorang pengacara untuknya. Pengacara yang ditunjuk berhak atas biaya atau honor berdasarkan biaya yang telah

[1179]Pasal 44 Ayat (1) Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1180]Pasal 44 Ayat (2) Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.

dikeluarkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Komisi Administrasi Yudisial.[1181]

Fakta bahwa penuntutan terhadap suatu pelanggaran telah diajukan tidak mengurangi hak korban untuk mengajukan tuntutan pidana atas dasar pelanggaran tersebut juga.[1182]Dalam mengadili bagian perdata, pengadilan berpegang pada fakta-fakta yang tertera dalam putusan pengadilan pidana.[1183]

Putusan atas perkara perdata harus diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur kewajiban perdata, terlepas dari apakah terdakwa telah dihukum.Nilai harta yang akan dibayarkan kepada korban oleh tergugat ditentukan sesuai dengan nilai sebenarnya dari harta tersebut, sedangkan besaran santunan yang akan diterima oleh korban ditetapkan sesuai dengan kerugian yang diderita, tidak boleh melebihi jumlah yang diklaim.[1184]

Harta benda, dimana keputusan untuk ganti rugi harta benda yang diberikan kepada pemiliknya yang belum diketahui, akan tetap menjadi milik pemerintah. Kapanpun pemiliknya diketahui, petugas dari penyimpanan tersebut akan harus mengembalikan harta benda tersebut kepadanya.Dalam hal pemilik diketahui, pengadilan, dalam memberikan putusan tersebut, akan memerintahkan petugas penyimpanan untuk mengembalikan properti kepadanya.Jika terjadi perselisihan, orang yang mengaku sebagai pemilik sebenarnya harus mengajukan tindakan di hadapan pengadilan.[1185]

[1181]Pasal 44 Ayat (2) Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1182]Pasal 45 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1183]Pasal 46 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1184]Pasal 47 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1185]Pasal 48 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.

Meskipun tidak ada tindakan pidana yang diajukan, pengadilan dapat, ketika memutuskan kasus pidana, memerintahkan barang bukti untuk dikembalikan kepada pemiliknya.[1186] Jika pengadilan memutuskan ada ganti rugi atas harta benda atau nilainya atau kompensasi kepada korban korban akan dianggap sebagai kreditur pengadilan.[1187]

Jika tidak ada penuntutan yang diajukan terhadap pelanggaran apa pun, hak korban untuk mengajukan tuntutan pidana atas dasar pelanggaran tersebut akan dihapus ketika jangka waktu yang ditetapkan oleh KUHP untuk penuntutan tersebut berakhir, jika tindakan tersebut akan dilakukan. Dimulai oleh orang di bawah umur atau orang gila atau diajukan secara terpisah dari penuntutan. Di mana penuntutan telah diajukan terhadap pelanggaran apa pun dan pelakunya telah dibawa ke pengadilan, tetapi kasusnya adalah Belum berakhir, ketentuan yang mengatur tentang hak korban untuk mengajukan tuntutan pidana atas dasar pelanggaran tersebut akan dihentikan berdasarkan pasal 95 KUHP .Jika penuntutan telah dimasukkan dan diputus akhir dan hukuman telah diberikan sebelum masuknya tuntutan pidana oleh korban, ketentuan yang mengatur hak korban untuk melakukan tindakan tersebut. Penuntutan telah diajukan dan putusan akhir pembebasan telah diberikan sebelum masuknya tuntutan pidana oleh korban, ketentuan tentang hak korban untuk mengajukan tindakan tersebut.[1188]

[1186]Pasal 49 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1187]Pasal 50 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1188]Pasal 51 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.

Penyelidik tidak boleh melakukan penyelidikan dalam acara-acara berikut:[1189]

1. Ketika korban meminta bantuan tetapi menolak untuk membuat pengaduan biasa.
2. Ketika korban melakukan penuntutan sendiri tanpa membuat pengaduan.
3. Ketika ada kecaman tertulis yang anonim, atau ketika orang yang membuat kecaman lisan menolak untuk mengungkapkan identitasnya atau untuk meletakkan tangannya dalam kecaman atau catatannya.

Seorang korban dapat mengadu kepada penyelidik. Pengaduan tersebut terdiri dari nama dan alamat pengadu, sifat pelanggaran, keadaan di mana kejahatan dilakukan, cedera yang diderita dan nama atau deskripsi pelaku sejauh mungkin. Keluhan tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Adapun yang tertulis, itu harus berisi tanggalnya dan tanda tangan pengadu. Sehubungan dengan lisan, penanya akan membuat catatan yang berisi tanggalnya dan ditandatangani oleh penanya dan pengadu.[1190]

Seorang korban dapat mengadu ke pejabat administrasi atau kepolisian yang memiliki posisi atau tugas sebagai bawahan atau atasan bagi penyelidik, dan dibebankan oleh hukum dengan tugas untuk menjaga perdamaian dan ketertiban. Menunda penerimaan pengaduan tertulis, pejabat yang disebutkan di atas harus segera meneruskannya ke penanya dan dapat mencatat informasi apa pun untuk kepentingan penanya. Setelah menerima pengaduan lisan, pejabat tersebut harus tanpa menunda membawa pengadu ke penyidik untuk tujuan membuat catatan

[1189]Pasal 122 HAP Thailand.
[1190]Pasal 123 HAP Thailand.

pengaduan sesuai dengan bagian sebelumnya. Dalam hal kebutuhan mendesak, petugas dapat membuat catatan sendiri, tetapi ia harus segera meneruskannya kepada penyelidik dan dapat mencatat informasi apa pun untuk kepentingan penyelidik.[1191]

Berdasarkan Hukum Acara Pidana Thailand, maka ketentuan-ketentuan yang dijadikan rujukan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

2. Pihak yang dapat melakukan penuntutan pidana di pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum dan Korban. [1192]
3. Sehubungan dengan penuntutan publik, korban melalui pengajuan mosi, mengasosiasikan dirinya sebagai jaksa pada setiap tahap persidangan di hadapan pengadilan tingkat pertama selama sebelum adanya putusan.[1193]
4. Sebuah kasus yang telah dimasukkan dari pengadilan tidak dapat dikembalikan, kecuali:[1194]
   a. Jika kasus yang tidak dapat digabung kemudian dibawa oleh jaksa penuntut umum kemudian ditarik kembali, hak korban untuk memulihkan hak pemulihan tidak serta merta hilang;
   b. Jika kasus majemuk diajukan oleh jaksa penuntut umum kemudian ditarik kembali tanpa persetujuan tertulis dari korban, hak korban untuk mendapatkan untuk memulihkan dirinya serta merta tidak hilang;
   c. Jika bukan kasus majemuk yang diajukan oleh korban ditarik, hak penuntut umum untuk pemulihan tidak serta merta hilang.

[1191]Pasal 124 HAP Thailand.
[1192]Pasal 28 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1193]Pasal 30 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1194]Pasal 36 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.

4. Mengenai tuntutan publik, korban berhak untuk menuntut kompensasi atas perbuatan terdakwa yang menyebabkan dirinya telah kehilangan nyawanya, atau mengalami cedera fisik atau mental, cedera kebebasan pribadi, penurunan reputasi atau kerusakan kepemilikan, ia dapat mengajukannya ke pengadilan dalam perkara pidana dengan mengajukan mosi agar secara paksa terdakwa memberikan kompensasi atas kerugian tersebut;[1195]
5. Fakta bahwa penuntutan terhadap suatu pelanggaran telah diajukan tidak mengurangi hak korban untuk mengajukan tuntutan pidana atas dasar pelanggaran tersebut juga.[1196]

5.2. Rekonstruksi Hak Korban Perseorangan dalam Penuntutan Terdakwa Berbasis Nilai Keadilan dan Kemanfataan

Hans Kelsen mengemukakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum atau sistem norma-norma.[1197] Sebagai suatu sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem, yaitu menyeluruh *(wholes),* memiliki beberapa elemen *(elements),* semua elemen saling terkait *(relations)* dan kemudian membentuk struktur *(structure).* Lawrence M. Friedman membaginya menjadi 3 elemen, yaitu elemen struktural *(structure),* substansi *(substance),* budaya hukum *(legal culture).* Pada bagian lain, Lawrence menambahkan satu elemen lagi yaitu dampak *(impact).* Pandangan Lawrence Friedman tentang sistem hukum dikelompokkan sebagai padangan yang luas yang memasukkan

[1195]Pasal 44 Ayat (1) Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1196]Pasal 45 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1197] Mudzakkir,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan…Op.Cit.,* hlm 153.

elemen-elemen lain yang '*non* hukum' sebagai elemen hukum.[1198]

Menurut Friedman, struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur yang baik. Selanjutnya struktur dan substansi kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat dengan baik pula.[1199] Dengan kata lain, hukum akan berperan dengan baik manakala ketiga aspek subsistem yang struktur, substansi dan budaya hukum itu saling berinteraksi dan memainkan peran sesuai fungsinya, sehingga hukum akan berjalan secara serasi dan seimbang, sesuai dengan fungsinya. Ibarat seekor ikan, ia akan hidup dengan baik manakala ditunjang oleh kualitas air kolam yang baik dan makanan yang baik pula. Apabila ketiga subsistem hukum tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul problem dalam upaya memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.[1200]

Lawrence M. Friedman memberikan konsep sistem hukum dalam arti yang luas, meliputi tiga elemen sistem hukum, yaitu elemen struktural (*structure*), substansi (*substance*), budaya hukum (*legal culture*), dan selanjutnya ia menambahkan elemen keempat yaitu dampak (*impact*). Relevansi dengan kajian penelitian ini akan dikaji dari tiga aspek, yaitu aspek substansi hukum pidana yakni peraturan perundang-undangan hukum pidana (materiil dan formil) dan lembaga peradilan (sistem peradilan pidana) sebagai elemen struktur serta

---

[1198] *Ibid*,hlm.153-154.
[1199] Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah,2012 *Op.Cit.*,hlm 312
[1200] *Ibid.*,hlm.312-313.

pandangan positivis sebagai kultur hukum. Sejalan dengan pemikiran Friedman tersebut, Soerjono Soekanto mempertegas ketiga komponen ini menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.[1201] Adanya ketiga komponen hukum tersebut, keterkaitan hukum dan masyarakat semakin terlihat jelas. Tidak ada budaya hukum (*legal culture*) bila tidak ditopang oleh substansi dan struktur hukum yang jelas. Hukum yang selama ini dipandang hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas dapat kemudian dihindari bila semua komponen hukum mampu mengartikan hukum dengan sebenar-benarnya, karenanya sudah menjadi kewajiban untuk melakukan review terhadap konsep *legal culture* dan berupaya merekonstruksinya menjadi kajian teoritik sebagai langkah yang sangat tepat dalam memahami secara utuh teori *legal system*.[1202]

Menurut Jimly, Sistem hukumIndonesiayangsebaiknyadibangunkedepanmencakuplima aspek atau komponen sekaligus, yaitu : 1. komponen instrumental yang mencakup semua jenis dokumen hukum dan hukum tidak tertulis, 2. komponen kelembagaan yang mencakup juga pengertian sarana dan prasarana dan semua aspekkeorganisasian, 3. komponen sumber daya manusia dan kepemimpinan, 4.

[1201]Soerjono Soekanto,1983,*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, hlm. 30.

[1202]Nur Rohim Yunus, 2015, *Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesian dalam Dimensi Hukim Progresif*,Supremasi Hukum, Volume 11, Nomor 1,Januari 2015, hlm.42.

komponen sistem informasi dan komunikasi, dan 5. komponen budaya hukum, pendidikan hukum dan sosialisasi hukum.[1203]

Pembaharuan hukum tidak identik dengan mengganti aturan hukum yang lama dengan aturan hukum yang baru, karena perubahan hukum yang tidak mengubah makna substantif dari hukum yang bersangkutan tidak berarti suatu perubahan atau pembaruan hukum, melainkan hanya mengganti rumusan kata-kata yang lama dengan rumusan kata-kata yang baru yang lebih baik atau mungkin nilai ubahan itu relatif kecil yang tidak menyentuh lapisan atasnya.[1204]Pembaharuan hukum yang membawa konsekuensi perubahan hukum adalah perubahan aspek nilai yang mendasari suatu sistem hukum (bagian atas atau nilai) dan membawa pengaruh kepada aspek substantif lainnya yang secara hierarkhi berkedudukan berada di bawahnya.[1205]Pembaharuan hukum yang memiliki karakter tersebut di atas dapat terjadi melalui dua kemungkinan; pertama, pembaruan hukum terjadi karena dipengaruhi oleh perubahan pada unsur masyarakat hukum atau perubahan dari elemen bawah ke atas (*bottom up*); kedua, pembaruan hukum karena adanya pergeseran nilai yang mendasari hukum itu sendiri atau elemen atas mempengaruhi ke bawah (*top down*).[1206] Kemungkinan lain perubahan itu terjadi melalui cara gabungan, yaitu dari keadaan yang pertama dan kedua mempengaruhi pemahaman terhadap hukum,

---

[1203]Jimly Asshiddiqie., *Op.Cit.*,Hlm.26

[1204] Mudzakkir,Maret 2001,*Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Jurnal Ilmu Hukm, Vol.14,No.1,hlm.34.

[1205] Soerjono Soekanto,1982,Kesadaran Hukum Masyarakat,Jakarta:Rajawali hlm.159

[1206] Mudzakkir,Maret 2001,*Kedudukan Korban Tindak Pidana…,Op.Cit.,*hlm.35.

yakni meskipun tidak secara langsung mengubah hukum tetapi hukum yang ada diberi perspektif baru yang berbeda dari perspektif sebelumnya.[1207]

Sasaran pokok pembangunan peraturan perundang-undangan meliputi Pertama, melanjutkan pembaharuan peraturan perundang-undangan dari masa kolonial. Kedua, memperbaharui petaturan perundang-undangan yang diberlakukan setelah merdeka dan telah ketinggalan atau tidak mencerminkan dasar dan arah politik hukurn menuju kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dernokratis, berdasarkan atas hukum, berkeadilan sosial dan satu pemerintahan yang bersih. Ketiga, menciptakan peraturan perundang-undangan baru yang diperlukan baik dalam rangka memperkuat dasar dan arah politik hukum maupun mengisi berbagai kekosongan hukum akibat perkembangan baru. Keempat, rnengadakan atau mengikuti berbagai persetujuan internasional baik dalam rangka ikut memperkokoh tatanan internasional maupun untuk kepentingan nasional. [1208]

5.2.1. Rekonsturksi Nilai

Penegakan hukum menuntut terpenuhinya tiga ranah keberlakuan yang oleh Gustav Radbruch disebut *triadism* yang meliputi tiga keberlakuan hukum yaitu keberlakuan hukum secara filosofis, dogmatis dan sosiologis. Tiap-tiap keberlakuan hukum tersebut didasarkan pada tiga nilai dasar yang berbeda. Ketiga nilai dasar tersebut adalah nilai keadilan (*justice*), nilai kepastian (*certainty*), dan nilai kemanfaatan (*utility*). Inti dari filosofi hukum Radbruch terdiri dari ajarannya

---

[1207] *Ibid.*

[1208] Bagir Manan,1999, *Reorientasi Politik Hukum Nasional*, makalah disampaikan pada Diskusi IKAPTISI di UGM, Yogyakarta dalam Anyismayawati,*Op.Cit.*,hlm.60.

tentang konsep hukum dan gagasan hukum. Radbruch mengatakan bahwa "*The idea of law is defined through a triad of justice, utility and certainty*." Nilai utilitas atau kemanfaatan muncul dari analisis tentang nilai keadilan.[1209]

Ketiga nilai dasar hukum memiliki hubungan ketegangan (*spanungsverhaltnis*) satu sama lainnya. Hubungan ketegangan tersebut dapat dimengerti oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berbeda dan antara yang satu dengan yang lainnya memiliki potensi untuk bertentangan. Apabila kepastian hukum kita tempatkan sebagai nilai yang diutamakan, maka kepastian hukum ini akan menggeser nilai kegunaan dan nila keadilan ke samping karena yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan memiliki kegunaan bagi masyarakatnya, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Oleh karena adanya nilai-nilai yang berbeda itulah, maka penilaian terhadap keabsahan hukum pun dapat bermacam-macam. [1210]

Tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut *uasas prioritas*" oleh Gustav Radbruch "pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum". Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya, dan terakhir baru kepastian hukumnya. Hanya dengan

---

[1209]. Suteki,*Op.Cit.*,hlm.270.

[1210]*Ibid*.,hlm.270-271.

menerapkan asas prioritas ini hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-intern yang dapat menghancurkannya.[1211]

Keadilan menjadi substansi dari penegakan hukum, sehingga dalam Al-Quran diajarkan, keadilan berlaku secara universal, tidak membedakan suku, rasa maupun agama. Keadilan menurut İslam mengutip pendapat imam Ali sekaligus sebagai "pemimpin Islam tertinggi di zamannya" beliau mengatakan bahwa prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka, sebaliknya penindasan, kezaliman dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.[1212]Hal ini sejalan dengan perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat As Syuura (42) Ayat 15, yang artinya:"Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintakan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-ama/ kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)."[1213]

[1211] Marwan Mas,*Op.Cit.*,hlm.74.

[1212] Ardiansyah,http//costomslawyer.wordpres.com,diunduh 1 Agustus 2018 dalam Ciptono, *Op.Cit.*,hlm. 32-33.

[1213]Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi menafsirkan Q.S. Syuura/42 :15, ,sebagai berikut: (Maka karena itu) karena ajaran tauhid itu (serulah) manusia, hai Muhammad (dan tetaplah) berpegang teguh kepada ajaran tauhid (sebagaimana

Dalam Q.S. Shadd/38:26, Allah berfirman, yang artinya :"Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan".[1214]

Eko Soponyono mengemukakan bahwa konsep adil dan hikmah Al-Qur'an adalah dalam semua urusan, Al-Qur'an mendistribusikan kewajiban sikap adil dalam beberapa hal,[1215] antara lain Penulis kutip: menetapkan hukum, memberikan hak orang lain dan mendamaikan perselisihan.

Konsep keadilan untuk "menetapkan hukum" dalam Al Quran sebagaimana dikemukakan Eko Soponyono merujuk pada Q,S. An- Nisa Ayat

---

diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka) yang membujukmu untuk meninggalkan ajaran tauhid (dan katakanlah, Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil) bersikap adil (di antara kalian) dalam masalah memutuskan hukum (Allahlah Rabb kami dan Rabb kalian. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian) masing-masing akan mendapatkan balasan amalnya sendiri-sendiri, (Tidak ada pertengkaran) persengketaan (antara kami dan kalian),Ayat ini diturunkan sebelum nabi diperintahkan untuk berjihad melawan mereka (Allah mengumpulkan antara kita) pada hari semua manusia dikembalikan kepada-Nya untuk menjalani peradilan di hadapan-Nya (dan kepada-Nyalah kembali kita) kita akan dikembalikan [Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi, *Op.Cit*.,,hlm.484].

[1214]Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi menafsirkan Q.S. Shadd/38:26, ,sebagai berikut:" (Hai Daud, sesunggunnya Kami menjaaikan kamu khalifah penguasa di muka dumi) yalru sepaga penguasa yang mengatur perkara manusia (maka berilan keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlan kamu mengikuti hawa nafsu) kemauan hawa nafsu (karena la akan menyesatkan kamu dari jalan Allah) dari bukti-bukti yang menunjukkan keesaan-Nya. (Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah) dari iman kepada Allah (mereka akan mendapat siksa yang berat karena mereka melupakan) artinya, disebabkan mereka lupa akan (hari perhitungan) hal ini ditunjukkan oleh sikap mereka yang tidak mau beriman, seandainya mereka beriman dengan adanya hari perhitungan itu, niscaya mereka akan beriman kepada Allah sewaktu mereka di dunia"*Ibid*..,hlm.454.

[1215] Eko Soponyono,*Op.Cit*.hlm.30-34

58, yang artinya :"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hükum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."

Konsep keadilan pada kaitan "memberikan hak orang lain",Eko Soponyono merujuk pada Q,S An Nahl Ayat 90, yang artinya:"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan. "

Konsep berlaku adil dalam mendamaikan perselisihanEko Soponyono merujuk pada Q,S.Al-Hujarat/49:9, yang artinya"Maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah…" [1216]

Keadilan dalam Konsep Islam menurut Mahmutarom berbeda dengan konsep barat dalam menempatkan manusia, dalam Islam tidak individu dan tidak

[1216]Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi menafsirkan dan menuliskan asbabun nuzul QS. Al-Hujarat/49:9,sebagai berikut: (Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin) hingga akhir ayat. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu masalah, yaitu bahwa Nabi Saw. pada suatu hari menaiki keledai kendaraannya, lalu ia melewati Ibnu Ubay. Ketika melewatinya tiba-tiba keledai yang dinaikinya itu kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, maka berkatalah Ibnu Rawwahah kepadanya, "Demi Allah, sungguh bau kencing keledainya jauh lebih wangi daripada bau minyak kesturimu itu," maka terjadilah antara kaum mereka berdua saling baku hantam dengan tangan, terompah dan pelepah kurma (berperang) Damir yang ada pada ayat ini dijamakkan karena memandang dari segi makna yang dikandung lafal Tā'ifatāni, karena masing-masing Taifah atau golongan terdiri dari sekelompok orang. Menurut suatu qiraat ada pula vang membacanya Iqtatalată, yakni hanya memandang dari segi lafal saja (maka damaikanlah antara keduanya) dan Damir pada lafal ini ditasniyahkan karena memandang dari segi lafal. (Jika berbuat aniaya) atau berbuat melewati batas (salah satu dari kedua golongan itu terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali) artinya, rujuk kembali (kepada perintah Allah) kepada jalan yang benar (jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil) yaitu dengan cara pertengahan (dan berlaku adillah) bersikap jangan memihaklah. (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.) Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi,*Op.Cit.*,hlm.516.

pula masyarakat yang dinomorsatukan, tetapi keseimbangan antara individu dan masyarakat.[1217]

Keadilan yang hendak diwujudkan dalam Islam menurut Ibn Jubayr sebagaimana dikutip Mahmutarom adalah keadilan yang sejalan dengan firman Allah, memenuhi prinsip-prinsip kepatutan, tidak merugikan orang lain, mampu menyelamatkan diri sendiri dan harus lahir dari itikad baik.[1218] Keadilan dalam Islam mendasarkan diri pada prinsip-prinsip moral-etis dan selalu berusaha untuk mewujudkan keadilan substansial dengan mewujudkan kebahagiaan individu maupun kelompok, kebahagiaan hidup lahir dan batin, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.[1219]

Dalam menentukan keadilan itu tidak semua harus ditangani oleh ahli agama saja, tetapi dapat diserahkan kepada lembaga atau pemerintah yang baik yang berdasarkan lima prinsip dasar, yaitu (1) prinsip Keesaan Tuhan (*ketauhidan*), (2) prinsip semua berdasar pada hukum (*Al 'Adalah*/ persamaan), (3) prinsip janji dan peringatan *(Al-wa 'd wa ala waid*)- yang dapat dipahami dengan prinsip legisme, (4) prinsip kesamaan keseimbangan (*al manzila byan al minzalatayn*), (5) prinsip menegakkan kebaikan dan mencegah/ menindak hal-hal yang tidak benar (*amar ma 'ruf nahi mungkar*).[1220]

Setiap bangsa memiliki suatu sistem nilai yang mengikat warganya. Pada awal negara merdeka, kita telah sepakat bahwa Pancasila ditempatkan sebagai

---

[1217] Mahmutarom, HR.,*Op.Cit.*,hlm 48.

[1218] Majid Khadduri,1984, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, hlm.7-8 dalam Mahmutarom, HR., 2009, *Op.Cit.*, hlm.52.

[1219] Mahmutarom, HR., *Ibid*., hlm.52.

[1220] Majid Khadduri,1960, *Islamic Jurisprodence*, Baltimoreand London: The Jonns Hopkins University Press, hlm.135 dalam Ciptono,*Op.Cit.*,hlm. 31.

kesepakatan luhur yang final (*modus vivendi*). Pancasila merupakan sistem nilai yang harus kita gunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan dan mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, perlu dilakukan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan bidang hukum. Sistem nilai kita jelas berbeda dengan sistem nilai masyarakat Eropa, tempat dimana *rule of law* dilahirkan.[1221]

Pancasila serbagai sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia. Pandangan keadilan dalam Pancasila, dimana sila kelimanya berbunyi ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”[1222]

Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup, dasar negara, dan sumber tertib hukum Indonesia yang menjiwai hukum Indonesia. Pancasila inilah yang menjadi landasan pembenar bagi pembangunan ilmu hukum di Indonesiaberdasarkan epistemologi rasio-empiris-intuisi-wahyu.[1223] Menurut Moch Koesnoe, di dalam Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945, terkandung nilai-nilai dasar tata hukum nasional kita yang merupakan *rechtsidee* hukum. Secara ringkas nilai dasar tersebut meliputi: (1) Nilai dasar pertama: hukum berwatak melindungi dan bukan sekedar memerintah begitu saja; (2) Nilai dasar kedua: hukum itu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bukan semata-mata tujuan. Akan tetapi, pegangan yang

---

[1221]Suteki,*Op.Cit*.,hlm.268.
[1222]. Ciptono,*Op.Cit*.,hlm.35.
[1223]Abdul Ghofur Anshori,2008, *Menggali Sistem Hukum dalam Rangka Pembangunan Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Nasional,* Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum UGM Ke-62,hlm.5 dalamMuhammad Khambali, Juni 2014, “Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”, Supremasi Hukum, Volume 3, No.1, , hlm. 11.

konkret dalam membuat peraturan hukum; (3) Nilai dasar ketiga: hukum itu adalah dari rakyat dan mengandung sifat kerakyatan; (4) Nilai dasar keempat: hukum adalah pernyataan kesusilaan dan moralitas yang tinggi baik dalam bentuk peraturan atau dalam pelaksanaannya sebagaimana yang diajarkan di dalam ajaran agama dan adat rakyat kita.[1224]

Jauh sebelum Proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, jadi masih di zaman kolonial Hindia Belanda, Carpentier Alting, seorang sarjana hukum Belanda menulis (sumber lupa, tetapi dikutip dalam disertasi Sahetapy, 1978: 334): ”*...om ten volle nationaal te kunnen worden genoemd, moet een strafwetboek niet enkel in zijn grondbeginselen den nationale geest ademen, maar het moet ook, in de aanwijzing en omschrijving der strafbare feiten, staan op den boden van het nationale volksleven, als onrecht aanduiden wat er in dat leven voor onrecht geschiedt*”. Artinya dialihbahasakan secara bebas: agar dapat sepenuhnya disebut nasional, suatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak saja harus bernafaskan jiwa nasional dalam asas-asas dasarnya, tetapi kitab undang-undang pidana itu dalam penentuan dan perumusan mengenai perbuatan-perbuatan pidana harus juga berlandaskan pada kehidupan nasional dari pada rakyatnya, (dan) menyatakan tidak adil terhadap tiap perbuatan yang dalam masyarakat itu dianggap tidak adil”. ”*voila*”, kalau orang asing bisa berpikir demikian, mengapa orang Indonesia juga tidak bisa demikian.[1225]

[1224]Abdul Ghofur Anshori,*Ibid.*, dalamMuhammad Khambali,*Ibid.*,hlm. 11-12.

[1225]J.E.Sahetapy,”Reformasi Hukum Harus Mengejahwantakan Pancasila” dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia,2010,*Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*,hlm.121.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum.Hal ini mengingat disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.[1226] Menurut Teori Hukum Progresif, hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya.[1227]

Muhammad Alim mengemukakan bahwa asas manfaat merupakan salah satu asas hukum dalam Al Quran.[1228]Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah beliau melihat para sahabat sedang minum khamar dan bermain judi. Kemudian para sahabat itu menanyakan mengenai khamar dan judi. Lalu turunlah firman Allah SWT sebagai jawaban atas pertanyaan mereka, yaitu: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah,"Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (Q.S. 2: 219[1229]). Ayat ini adalah tahap pertama mengenai isyarat

[1226] Sabian Usman,*Op.Cit.*,hlm.49- 50.
[1227]Satjipto Rahardjo,2008,*Op.Cit.*,hlm.ix
[1228] Muhammad Alim,Op.Cit.,hlm.159.
[1229]Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi menafsirkan Q.S. Al-Baqarah/2:219,sebagai berikut: (Mereka menanyakan kepadamu tentang minuman keras dan berjudi) apakah hukumnya? (Katakanlah) ke pada mereka (pada keduanya) maksudnya pada minuman keras dan berjudi itu terdapat (dosa besar). Menurut satu gira'at dibaca kašir (banyak) disebabkan keduanya banyak menimbulkan persengketaan,

pelarangan khamar dan judi. Tahap kedua yaitu Q.S. An-Nisaa ayat 43 yang melarang shalat kalau dalam keadaan mabuk, sehingga mengerti yang diucapkan, dan pada tahap ketiga Q.S. Al-Maidah ayat 90-91 yang menjelaskan bahwa meminum khamar, bermain judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan setan, jauhilah perbuatan itu supaya kamu beruntung ….. dan seterusnya. Apabila diperhatikan redaksi ayat di atas ternyata di dalam meminum khamar dan bermain judi tetap ada manfaatnya akan tetapi dosa atau mudharatnya lebih besar sehingga dilarang. Di sini kelihatan bahwa hukum Islam juga menganut asas manfaat.[1230]

Kemanfaatan dalam Hukum Islam ditemukan pada Q.S. Al-Maidah/5:45,yang artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af)

---

caci-mencaci, dan kata-kata yang tidak senonoh, (dan beberapa manfaatbagi manusia) dengan meminum-minuman keras akan menimbulkan rasa kenikmatan dan kegembiraan, dan dengan berjudi akan mendapatkan uang dengan tanpa susah payah, (tetapi dosa keduanya), maksudnya bencana-bencana yang timbul dari keduanya (lebih besar) artinya lebih parah (daripada manfaat keduanya). Ketika ayat ini diturunkan, sebagian sahabat masih suka meminum mìnuman keras, sedangkan yang lainnya sudah meninggalkannya hingga akhirnya diharamkan oleh sebuah ayat dalam surat Al-Maidah. (Dan mereka menanyakan kepadamu beberapa yang akan mereka nafkahkan), arti- nya berapa banyaknya. (Katakanlah), Nafkahkanlah (kelebihan) maksudnya yang lebih dari keperluan dan janganlah kamu nafkahkan apa yang kamu butuhkan dan jangan kamu sia-siakan dirimu. Menurut satu qira'at dibaca al-'afwu sebagai khabar dari mubtada' yang tidak disebutkan dan diperkirakan berbunyi, "huwa .". (Demikianlah), artinya sebagaimana dijelaskan-Nya kepadamu apa yang telah disebutkan itu (dijelaskan-Nya pula bagimu ayat- ayat agar kamu memikirkan).[Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi,*Op.Cit.*,hlm.34.]

[1230] Muhammad Alim,*Op.Cit.*,hlm.158-159

membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih".[1231]

Pada dasarnya, hukuman *qishas* dan *diyat* bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dengan mengabaikan keadaan pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperhatikan pribadi dan kondisi pelaku kecuali jika korban atau walinya memberikan ampunan.[1232]

Bersamaan dengan ditetapkannya pidana qisas bagi pelaku pembunuhan, Allah mensyari'atkan juga pemaafan kepada pelaku. Hal ini berarti qisas bukanlah pidana yang bersifat mutlak, namun sebaliknya bersifat relatif dengan bergantung padapemaafan dari pihak keluarga korban. Dengan demikian syari'at Islam sangatmemperhatikan eksistensi pihak keluarga korban sebagai pemutus ada tidaknya qishas.[1233]

[1231]Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi menafsirkan Q.S. Al-Maidah/5:4,sebagai berikut: (Dan telah Kami tetapkan terhadap mereka di dalam- nya) maksudnya di dalam Taurat (bahwa jiwa) dibunuh (karena jiwa) yang dibunuhnya (mata) dicongkel (karena mata, hidung) dipancung (karena hidung, telinga) dipotong (karena telinga, gigi) dicabut (karena gigi) menurut satu qiraat dengan marfu'-nya keempat anggota tubuh tersebut (dan luka-luka pun) manşub atau marfu' (berlaku qisas) arti- nya dilaksanakan padanya hukum balas jika mungkin; seperti tangan, kaki, kemaluan dan sebagainya. Hukuman ini walaupun diwajibkan atas mereka tetapi ditaqrirkan atau diakui tetap ber- laku dalam syariat kita. (Siapa menyedekahkannya) maksudnya menguasai dirinya dengan melepas hak qisas itu (maka itu menjadi penebus dosanya) atas kesalahannya (dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah) seperti qisas dan lain-lain (merekalah orang-orang yang aniaya). [Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi,*Op.Cit*.,hlm.115].

[1232]Abdul Qodir Audah,*Op.Cit*.,hlm.23

[1233]https://www.researchgate.net/publication/315693779_Memahami_Keadilan_Hukum_Tuhan_dalam_Qisas_dan_Diyat,*Op.Cit*.

Pengampunan dapat melakukan tugas hukuman dan mewujudkan hasil yang tidak dapat dilaksanakan oleh hukuman itu sendiri. Inilah sisi praktis pemberian hak pengampunan. Adapun dari sisi logika, tindak pidana pembunuhan dan pelukaan bersifat perseorangan yang berasal dari motif perseorangan. Tindak pidana ini lebih banyak menyentuh kehidupan dan fisik korban daripada menyentuh masyarakat. Oleh karena itu, selama suatu tindak pidana memiliki keterkaitan dengan perseorangan korban, penjatuhan hukumannya menjadi hak korban.[1234]

Hukum Islam mengakui sistem pengampunan (hak korban dalam memberikan pengampunan), prinsip ini diakui oleh hukum modern pada masa kini sehingga hukum Islam tetap lebih unggul daripada hukum konvensional karena memilih logika penerapan pengampunan tersebut dengan baik. Alasannya, penetapan hak pengampunan bagi tindak pidana pembunuhan akan menghasilkan perdamaian dan kerukunan serta menghi!angkan kedengkian dan rasa dendam.[1235]

Asas kemanfaatan juga dapat disimpulkan dari larangan berbuat mubazzir, menyianyiakan sesuatu, bahkan dalam penekanan akan larangan memboroskan sesuatu dipersamakan dengan bersaudara dengan setan, sesuai dengan firman Allah SWT: "….. dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemborospemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya" (Q.S. 17: 26-27). Larangan memboroskan harta itu pada hakikatnya adalah agar harta itu dipergunakan secara

[1234] Abdul Qodir Audah,*Op.Cit.*,hlm.70
[1235] Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm.122.

hemat dan cermat supaya bermanfaat betul yang biasa disebut berhasilguna dan berdayaguna.[1236]

Asas kemanfaatanjuga pernah disampaikan Rasulullah Muhammad S.A,W, yang mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia",[1237]

Penegak hukum telah mengutamakan kepastian hukum (peraturan hukum) belaka sehingga meminggirkan nilai keadilan substantif yang berarti bahwa perilaku penegak hukum tersebut tidak sesuai konsep Gustav Radbruch khususnya tentang pengutamaan nilai keadilan di atas *statutory law*. Ke depan harus terus dipikirkan agar apabila terjadi benturan antara kepastian hukum dengan nilai keadilan, maka nilai keadilanlah yang harus diutamakan. Dengan demikian arogansi watak hukum modern yang liberal dan individualistik secara pelan tetapi pasti dapat direduksi dengan nilai keadilan dan keseimbangan sebagai cermin watak bangsa oriental.[1238]

Di Indonesia lebih diunggulkan "*supremacy of moral/ justice*" daripada "*supremacy of law*". Dengan meletakkan asas dan filsafat besar seperti itu kita membuka suatu perspektif baru dalam membangun hukum di Indonesia, atau setidak-tidaknya memberikan tekanan yang istimewa terhadap aspek moral daripada aspek perundang-undangan semata. [1239]

[1236]https://media.neliti.com/media/publications/113753-ID-none.pdf, *Op.Cit*.
[1237] HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami' No:3289.
[1238]Suteki,*Op.Cit*.,hlm.278.
[1239]*Ibid.,* hlm. 269.

Transformasi dari yang satu kepada yang lain dicoba untuk dituangkan ke dalam matriks berikut ini:[1240]

Tabel 11 Transformasi *Rule* of Law ke *Rule of* Moral

No.	RULE OF LAW	RULE OF MORAL
1.	Penyelesaian konflik	Perdamaian
2.	Perundang-undangan	Moral, Keadilan
3.	Prosedur	Empati
4.	Kebenaran hukum (*legal justce*)	Kebenaran substansial
5.	Birokrasi	Komitmen

Gagasan/ide besar yang telah dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut akan lebih operasional apabila ditindak lanjuti melalui penerjemahan lebih lanjut melalui konsensus yang bersifat nasional. Gagasan tersebut harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum Indonesia yang ada, baik pada tataran substansial, struktural maupun tataran kultural. Tanpa komitmen dari pembuat undang-undang, pelaksana undang-undang serta masyarakat, amat sulit gagasan besar tersebut dapat direalisasikan.[1241]

Stan Ross dalam buku *Politics of Law Reform*,seorang ahli hukum Australia mengatakan bahwa pembaruan hukum adalah sebuah proses dimana hukum diubah ke arah hukum yang berisikan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat. Perubahan dan pembaruan itu berisikan kemajuan dan perbaikan

[1240]Satjipto Rahardjo,Jun 1995,*Transformasi Nilai-nilai dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum Nasional*, Jakarta: Seminar BPHN, hlm.23-24 dalam Suteki, *Ibid.*, hlm.269-270.
[1241]Suteki, *Ibid.*, hlm270.

dalam hukum serta masalah-masalah dimana hukum harus menyelesaikannya. Ross mengatakan bahwa tujuan pembaruan hukum mempunyai dua tujuan utama: a) menjaga hubungan esensial antara hukum dan aspirasi masyarakat; b) agar hukum menjadi efektif, lebih pasti, lebih ditemukan dan dimengerti oleh anggota masyarakat.[1242]

Menurut tujuan kebijakan strategis, yang penting adalah sejauhmana lembaga perumus kebijakan dan penyusun peraturan hukum secara konsisten tetap mengacu kepada sistem nilai yang filosofis itu agar setiap garis kebijakan dan aturan hukum yang tercipta dinilai akomodatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, secara adil dengan perhatian yang merata. Kearifan politis dengan pendekatan kultural seperti ini menjadi tuntutan konstitusional seluruh rakyat Indonesia yang struktur sosialnya penuh keanekaragaman, pluralis dan heterogen, beragam-ragam sub etnik, agama, adat istiadat dan unsur-unsur kulturalnya.[1243]

5.2.2. Rekonsturksi Norma

Menurut Jimly aspek atau komponen sistem hukumIndonesiayangsebaiknyadibangunkedepan yang berhubungan dengan substansi hukum adalah komponen instrumental yang mencakup semua jenis dokumen hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang bernilai hukum atau bersifat normatif. Instrumen hukum yang bersifat normatif dimaksud dapat dibedakan dalam empat kelompok, yaitu (i) bentuk dokumen pengaturan

[1242]Albert Hasibuan,"Pembaruan Substansi Hukum di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyona" dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia,2010,*Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*,hlm.129.
[1243] Muh.Sudirman, Sesse *Op.Cit*., hlm.175-176.

yangmeliputi: a. undang-undang dasar, (b) undang-undang, (c) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bersifat delegasian, (d) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bersifat sub-delegasian, (e) peraturan daerah, (f) konvensi dan perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi menjadi hukum nasional, (g) praktik-praktik hukum internasional yang mengikat, dan (h) hukum adat yang tidak tertulis atau pun yang dituangkan secara tertulis dalam peraturan desa.[1244]

Rekonstruksi norma dalam hal ini adalah pembaharuan beberapa ketentuan dalam hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan hak korban dalam penentuan tuntutan/hukuman terdakwa yang lama. Ketentuan-ketentuan dimaksud adalah mengenai:

1. Hak korban perseorangan mencabut pengaduan;
2. Peran korban dalam membuat surat dakwaan dan tuntutan oleh penuntut umum;
3. Hak korban atas informasi pemeriksaan perkara.

Ketentuan-ketentuan hukum positif di Indonesia terhadap ketiga *point* di atas tidak memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan. Allah SWT dalamQ,S. An- Nisa Ayat 58,berfirman, yang artinya:"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hükum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Pada ayat lain Allah, yang artinya:"Sesungguhnya

[1244] Jimly Asshiddiqie.,*Op.Cit.*Hlm.27

Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan "(Q,S An Nahl Ayat 90).

5.2.2.1. Rekonstruksi Hak Korban Perseorangan Mencabut Pengaduan

Jika terjadi suatu peristiwa pidana, maka pemerintah yang diwakili oleh polisi, kejaksaan dan kehakiman, tanpa permintaan dari yang kena peristiwa pidana itu segera bertindak melakukan pemeriksaan, penuntutan dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang bersalah. Akan tetapi dari banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis, hampir semuanya kejahatan, yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa semacam ini biasa disebut delik aduan.[1245] Dalam delik aduan maka diadakan atau tidaknya tuntutan digantungkan pada ada/tidaknya persetujuan dari yang dirugikan (korban tindak pidana). Selama korban belum memasukkan aduan, maka jaksa tidak dapat mengadakan tuntutan.[1246]

Delik aduan terbagi atas delik aduan absolut (tetap) dan delik aduan relatif (nisbi). Delik aduan absolut adalah tiap kejahatan yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan,[1247]atau delik (*peristiwa pidana*) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan.[1248] Pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi: “saya

[1245]R.soesilo *Op.Cit.,*hlm.87.
[1246] E.Utrecht,*Op.Cit.,*hlm257
[1247]*Ibid.,* hlm.260.
[1248]R. Soesilo, *Loc.Cit.*

minta agar peristiwa ini dituntut."[1249] Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkut paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah.[1250] Ketentuan dalam KUHP yang termasuk dalam delik aduan absolut adalah:

a. Pasal 284:

b. Pasal 287;

c. Pasal 293;

d. Pasal 310 s.d.321,322,332; dan

e. Pasal 369.

Delik aduan relatif adalah tiap kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan,biasanya kejahatan itu bukan delik aduan.[1251] Delik-delik yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan.[1252] Dalam delik aduan relatif, pengaduan bukan untuk menuntut peristiwanya akan tetapi untuk menuntut orang-orang yang bersalah dalam peristiwa itu.[1253]

[1249] *Ibid.*

[1250] *Ibid.*

[1251] E.Utrecht, *Op.Cit.*,hlm.260-261.

[1252] Pasal 367KUHP menentukan :

(1). Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dan orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika pelaku kejahatan adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

[1253] R. Soesilo,*Loc.Cit.*

Delik aduan relatif ini dapat dibelah terhadap pelaku kejahatan yang mana saja diadukan apabila kejahatan dilakukan lebh dari satu orang, namun masih memiliki hubungan keluarga sebagaimana ditentukan Pasal 367 KUHP. Delik aduan relatif dalam KUHP ditentukan dalam:

a. Pasal 362 s.d. 366 *Jo* Pasal 367;

b. Pasal 368, 369,371 *Jo* Pasal 370, 367;

c. Pasal 372 s.d.375,377 *Jo* Pasal 370, 367;

d. Pasal 378 s.d 393,395 bis *Jo* 394, 367;

e. Pasal 404 *Jo* Pasal 367; dan

f. Pasal 406 s.d. 410,412 *Jo* 411, 367.

Penarikan kembali pengaduan oleh korban, baik dalam delik aduan relatif maupun absolut ditentukan dalam Pasal 75 KUHP, yang berbunyi: ”Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.” Ketentuan Pasal 75 KUHP ini tidak berlaku dalam pengaduan tindak pidana Pasal 284 KUHP, yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
    1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
       b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
    2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
       b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/ istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Dari ketentuan Pasal 75 dan 284 KUHP, maka untuk segala delik aduan kecuali tindak pidana Pasal 284 KUHP, daluarsa bagi korban untuk dapat mencabut pengaduan adalah lewat waktu waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Untuk tindak pidana Pasal 284 KUHP pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Daluarsa pengaduan yang ditentukan dalam KUHPi disimpangi oleh MARI dalam Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009. Menurut MARI walaupun pencabutan pengaduan telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih. Pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh pelapor merupakan tindakan untuk memaafkan, dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara diteruskan.[1254]

Substansi hukum dalam hukum pidana materil tentang hak korban mencabut pengaduan, baik pada delik aduan relatif maupun delik aduan absolut dalam penyusunan KUHP ke depan seharusnya tidak membatasi jangka waktu pencabutan pengaduan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Meskipun hukum pidana materil saat ini ada menentukan daluarsa pencabutan pengaduan, Putusan MARI Nomor 1600 K/Pid/2009 dapat menjadi rujukan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan korban agar penuntutan

[1254] Putusan MARI Nomor 1600 K/Pid/2009, hlm.23.

perkara delik aduan dihentikan. Menurut E. Utrecht dan R. Soesilo[1255]Dalam beberapa hal bagi orang yang bersangkutan lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara daripada keutungan bagi pemerintah (masyarakat) jika dilakukan penuntutan.

Untuk delik aduan, baik relatif maupun absolut, apabila telah terjadi perdamaian antar pelaku dan korban kejahatan dan korban kejahatan meminta agar tidak lagi dilakukan penuntutan kepada pelaku kejahatan, maka dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan keadilan restoratif terhadap perkara dimaksud harus dihentikan penuntutan perkara baik di tingkat pengadilan negeri sampai pada proses upaya hukum kasasi. Dalam hal ini Putusan MARI Nomor 16000/K/Pid/2009 dapat menjadi rujukan hukum.

Munculnya konsep *restorative justice* pada prinsipnya telah lebih dahulu diperkenalkan oleh *fiqh jinayah* sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 178: "Maka barangsiapa yang mendapat suatu permaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula."[1256]

Hakikat yang terkandung dalam konsep pidana *diyat* adalah adanya prinsip pembalasan terhadap kejahatan, prinsip perlindungan terhadap korban atau keluarganya, dan prinsip perdamaian dan pemaafan yang sangat ditekankan antara terpidana dan keluarga korban.[1257]

[1255]E.Utrecht,1986,*Op.Cit.*,hlm.257.dan R. Soesilo, *Ibid.*
[1256]Rocky Marbun,*Op.Cit.*,hlm.202.
[1257]H.C.Najmuddin,HS, *Op.Cit.*,hlm. 120.

Padanan kata ”perdamaian” dalam Al Quran adalah ”Islah”. Iṣlāḥ yang berarti perdamaian merupakan salah satu term atau lafadz yang ditemui dalam al-Qur’an.Kata aṣliḥū terambil dari kata aṣlaḥa yang asalnya adalah ṣaluḥa sebagai antonim dari kata fasada (rusak).[1258] Dengan demikian kata ṣaluḥa berarti tidak ada atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat.Kata Iṣlāḥ dari ayat di atasdikaitkan dengan kata adil, artinya setiap orang yang menjadi penengah kelompok atau orang yang bertikai harus berbuat adil.[1259]

Di dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat-ayat menyangkut iṣlāḥ di antaranya adalah:

1. Q.S. Al-Baqarah/2: 182,Allah berfirman yang artinya:

> ”Tetapi barangsiapa khawatir bahwa pemberi wasiat (berlaku) berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

2. Q.S. Al-Baqarah/2:224,Allah berfirman yang artinya:

> ”Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

3. Q.S. Annisa/4: 35,Allah berfirman yang artinya:

> ”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

[1258]Abdul Wahid Haddade,*Op.Cit*.,hlm.13.

[1259] Al-Asfahani, Al-Raghib,,t.th,*Mu’jam al-Mufradat al-Qur’an*,Beirut: dar al-Fikr dalam Abdul Wahid Haddade,*Ibid.,* hlm.14-15.

4. Q.S. Annisa/4: 114,Allah berfirman yang artinya:

”Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”

5. Q.S. Annisa/4: 128, Allah berfirman yang artinya:

”Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.”

6. Q.S. Annisa/4: 129,Allah berfirman yang artinya:

”Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

7. Q.S. Al-A’raf/7: 35,Allah berfirman yang artinya:

”Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barangsiapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

8. Q.S. Al-A’raf/7: 142,Allah berfirman yang artinya:

”Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.”

9. Q.S. Al-Anfal/8:1,Allah berfirman yang artinya:

”Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman."

10. Q.S. Al-Hujurat/49: 9,Allah berfirman yang artinya:

”Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zhalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zhalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

11. Q.S. Al-Hujurat/49: 10,Allah berfirman yang artinya:

”Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Dalam kesebelas ayat Al Quran di atas, ”Ishlah” diterjemahkan dengan ”damaikan” dan ”perbaiki”.Di kalangan ulama tafsir, M. Quraish Shihab dalam Tafsir al- Misbaḥ,[1260]misalnya, menyingkap makna iṣlāḥ kaitannya dengan dimensi perdamaian. Di dalam al-Qur’an secara universal iṣlāhmenurut*lugawi*, diartikan perdamaian. Di samping itu, iṣlāḥ secara luas juga dapat dimaknai perdamaian termasuk menciptakan perdamaian dan mencegah konflik setiap fenomena atau realitas dalam masyarakat yang dipertautkan dengan teks (ayat) untuk menemukan solusi terhadap berbagai problematika kehidupan.

Menurut Hukum Acara Pidana Saudi Arabia sebuah tindakan kriminal pribadi hilang dalam dua kasus, yang salah satu di antaranyaadalah pemberian

[1260]M. Quraish Shihab,2009, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al_Qur’an*, (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, hlm. 596 dalam Abdul Wahid Haddade,*Ibid*.

grasi oleh korban atau ahli warisnya, namun pemberian grasi oleh korban atau ahli warisnya tidak akan menghalangi proses tindakan pidana publik.[1261]

Menurut Penulis orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali selama putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga ketentuan Pasal 75 KUHP yang menggariskan bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan dan Pasal 284 ayat (3) KUHP yang mengatur bahwa untuk tindak pidana perzinahan daluarsa pencabutan pengaduan sebelum dimulainya pemeriksaan persidangan harus direkonstruksi, sehingga mengatur sebagai berikut:

Tabel 11.Rekonstruksi Ketentuan KUHP tentang Pencabutan Pengaduan

KUHP	**NORMA**	
	Hukum Positif	**Rekonstruksi**
Pasal 75	Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.	**Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali selama putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap.**
Pasal 284	(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;	1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

[1261]Pasal 23 HAP Saudi Arabia.

	2.a.seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.	2.a.seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
	(2).Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.	(2).Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
	(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.	(3)**Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72 dan 73.**
	(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.	**Dihapus**
	(5)Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.	(4) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

5.2.2.2. Rekonstruksi Hak Korban dalam Pembuatan Surat Tuntutan dan Dakwaan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.[1262] Penuntutuan dilakukan oleh Penuntut Umum, yakni jaksa yang diberi wewenang dalam KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penentapan hakim.[1263] Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan' melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.[1264] Penuntutan merupakan agenda persidangan perkara pidana setelah selesainya agenda pembuktian.

Pasal 14 KUHAPmenentukan bahwa penuntut umum memiliki wewenang:

a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
d. membuat surat dakwaan;
e. melimpahkan perkara ke pengadilan;

[1262] Pasal 1 Angka 7 KUHAP.
[1263] Pasal 1 Angka 6 Huruf b KUHAP.
[1264] Pasal 137 KUHAP.

f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
g. melakukan penuntutan;
h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
i. mengadakan tindakan lain dalam Iingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
j. melaksanakan penetapan hakim.

Kewenangan penuntut umum untuk membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan sebagaimana pada huruf d dan huruf gPasal 14 KUHAP menjadi objek pembahasan untuk direkonstruksi berkaitan dengan hak korban perseorang untuk:

1. Memberikan masukan dalam pembuatan dakwaan;

2. Dituntut/tidaknya terdakwa;

3. Menentukan berat/ringannya tuntutan terdakwa.

Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal-tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, pertama, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang direpresentasikan oleh instrumen demokratik negara dan, kedua, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri. Konsep yang pertama

dilandasi oieh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*) dan konsep yang kedua pada konsep keadilan restoratif (*restorativc justice*).[1265]

Konsep pertama memberikan landasan pemikiran bahwa kepentingan yang dilanggar adalah kepentingan publik atau negara, maka dapat ditarik suatu konklusi bahwa negaralah yang dirugikan apabila terjadi suatu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. Konsep ini dibangun, menurut sejarahnya, adalah untuk menghindari tindakan balas dendam dari orang perseorangan. Negara kemudian memperoleh legitimasinya sebagai wakil sah dari representasi kepentingan publik dan basis pelampiasan balas dendam personal yang bersifat emosional dan subjektif tersebut kemudian direkonstruksi dalam penyelenggaraan peradilan pidana sebagai rasionalisasi atau objektivikasi balas dendam kepada pelanggar hukum pidana.[1266] Konsep tersebut dominan hingga akhir abad ke - 18.[1267]

Menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat.[1268] Oleh sebab itu, administrasi

---

[1265] Mudzakir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan…Op.Cit.,* , hlm 207.
[1266]*Ibid*., hlm.208.
[1267]*Ibid*., hlm.209.
[1268]Marc Groenhuijsen,1996, "Conflict of Victims Interests and Offender's Rights in the Criminal Justice System" di dalam Cris Summer, et al., eds.,*International Victimology: Selected Papers from the 8th International Symposium*(Camber) hlm. 175. Lihat juga Randy E. Barnet dan John Hagel III,Ibid, hlm.7. dalam Mudzakkir,Maret 2011,*Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14,No.1, hlm.36.

peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh negara (memonopoli penuntutan dan penegakkannya). [1269]

Konsep kejahatan melanggar negara mulai digugat dan dinilai tidak sesuai dengan kenyataan hidup sehari-hari. Fiksi atau anggapan bahwa negara menjadi korban tunggal tersebut sulit untuk diterima dalam situasi nyata dan objektif.[1270] John O. Haley sebagaimana dikutip Mudzakir mengatakan bahwa negara dan sistem peradilannya tidak dapat berdiri sebagai wakil hayalan bagi orang yang nyata yang secara personal telah menderita kejahatan. Dosa pelanggar sendiri adalah bukan entitas yang abstark yang disebut negara, tetapi adalah korbannya dan komunitas yang aktual dan nyata.[1271]

Keadilan restoratif memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri.[1272] Di antara ketiga kelompok tersebut, kepentingan korban kejahatan sebagai bagian yang utama, karena kejahatan itu, menurut Andrew Ashworth, *"primarily an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state".* [1273]

Teori keadilan restoratif menempatkan sejumlah nilai yang lebih tinggi pada keterlibatan langsung oleh pihak-pihak. Daniel W. Van Ness menyatakan

---

[1269] Mudzakkir,Maret 2011,*Ibid.*

[1270] Mudzakir, 2001, *Posisi Hukum Korban…Op.Cit.,* hlm.209.

[1271]Jhon O.Haley,1966,*Crime Prevention Through Restorative Justice Lessons from* Japan di dalam Joe Hudson dan Burt Galaway (1996) dalam Mudzakir, *Ibid.*, hlm.209.

[1272]Daniel W. Van Ness, 1993, "New Wine in Old Wineskins: Four, Challendes of Restorative Justice." Criminal Law Forum, No. 4, hlm. 251-276 dalam Mudzakkir,Maret 2011,*Loc.Cit.* hlm.36.

[1273]Andrew Ashworth,Agustus 1993, "Victim Impact Statements and Sentencing", *The Criminal Law Review*, hlm. 503 dalam Mudzakkir,Maret 2011, *Ibid.*

bahwa keadilan restoratif hendak mencapai beberapa nilai melalui penyelenggaraan peradilan pidana, yaitu; pertama, penyelesaian konflik (*conflict solution*) yang mengandung muatan pemberian ganti kerugian (*recompens*e) dan pemulihan nama baik (*vindicatio*n); dan, kedua, rasa aman (*safety*) yang mengandung muatan perdamaian (*peace*) dan ketertiban (*order*).[1274]

Perubahan konseptual ini memiliki konsekuensi yang jauh. Ketika kejahatan dipandang sebagai gangguan tertib publik, secara alamiah bahwa negara ¾ (tiga perempat) wakil dari sebagian masyarakat ¾ (tiga perempat) sebagai pihak yang dirugikan adalah dasar pandangan polisi untuk menindak pelanggar undang-undang dan selanjutnya konsep tersebut dijadikan basis untuk merumuskan tujuan dan jenispemidanaan. Ketika kejahatan dipandang sebagai suatu perbuatan permusuhan oleh satu anggota masyarakat kepada anggota masyarakat yang lain, korban kejahatan menjadi bagian yang penting dalam proses pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana. Korban berkepentingan dalam setiap pengambilan keputusan oleh otoritas sistem peradilan pidana. Posisi hukum korban kejahatan, sebagai pihak yang dirugikan, menjadi sentral dalam penyelesaian perkara dan restitusi yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban kejahatan masuk menjadi bagian dari hukum pidana dan pemidanaan, tidak lagi menjadi bagian dari hukum perdata (*civil law*) yang digabungkan dengan hukum pidana.[1275]

[1274]Daniel W. Van Ness, 1996, "Restorative Justice and International Human Rights", di dalam Joe Hudson dan Burt Galaway, 1996,*Restorative Justice,*Illonis:Charles C.Thomas Publihser, hlm. 17-36 dalam Mudzakkir,Maret 2011,*Ibid.*, hlm.36-37

[1275] M.S. Groenhuijsen, 1988, "Recent Development in the Dutch Criminal Justice System Concerning Victims of Crime" 6th International Symposium on Victimology, Jerusalem, hlm. 196-219 dalam Mudzakkir,Maret 2011,*Ibid.*,hlm.37.

Jadi perubahan perspektif dari keadilan retributif kepada keadilan restoratif adalah perubahan pada level filsafah keadilan yang mendasari peraturan perundang-undangan hukum positif ¾ (tiga perempat) sebagai asas hukum materiil ¾ (tiga perempat) di bidang hukum pidana dan sistem peradilan pidana, maka perubahan tersebut akan membawa cara pandang yang baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Pertama, keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban dan terdakwa bertanggung-jawab terhadap akibat perbuatannya. Kedua, kejahatan adalah pelanggaran antar perseorangan, maka,ketiga, yang menjadi korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum pidana), yaitu korban, masyarakat, negara, dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri.Keempat, penyelenggaraan peradilan pidana sebagai sarana penyelesaian konflik dan,kelima, pidana dan jenis pidana yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar adalah bagian dari penyelesaian konflik dan tanggung jawab pelanggar terhadap akibat perbuatannya. Keenam, korban, masyarakat, negara dan pelanggar dalam proses peradilan pidana bersifat aktif [1276]

Keadilan substantif dapat dikatakan sebagai sebenar keadilan (*true justice*) yang pencariannya, penegakannya dibutuhkan substansi, pemikiran dan tindakan progresif serta sebuah keberanian untuk keluar dari kungkungan kotak sistem (*out of the box*). Karakter-karakter tersebut terpenuhi dalam teori hukum progresif. Teori hukum progresif merupakan bagian dari proses searching *for the truth* (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti. Satjipto Rahardjo sebagai

[1276]*Ibid.*

penggagas hukum progresif mengatakan bahwa *rule breaking* sangat penting dalam sistem penegakan hukum.[1277]

Dalam perspektif hukum progresif seharusnya kita tidak boleh terus terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktik menunjukkan banyak kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan substansial. Dalam formalisme, hukum dan penegakannya dengan mata tertutup pun, akan berjalan sistematis ibarat rumusan matematika yang jelas, tegas dan pasti. Tidak ada kekeliruan di dalamnya. Seolah hukum itu seperti mesin automat, tinggal pencet tombol maka keadilan begitu saja akan diciptakan pula. Formalisme telah melahirkan gejala spiral pelanggaran hukum yang tak berujung pangkal dan memasukkan kita ke dalam kerangkeng hipokrisi penegakan hukum. [1278]

Konsep kejahatan menurut konsep *restorative justice* diberi pengertian yang lebih nyata, bahwa kejahatan adalah konflik antar orang perseorangan. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran, pertama dan terutama melanggar hak perseorangan dan juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik), kepentingan negara, dan juga sesunguhnya secara tidak langsung melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri.[1279]

Konsep *restorative justice* tidak hanya menghadirkan pelaku dalam sistem peradilan pidana melainkan juga di dalamnya melibatkan peran korban dan

---

[1277] Suteki,*Op.Cit.*,hlm.277.

[1278]Suteki,*Ibid.*,hlm.278.

[1279] Mudzakir, 2001, *Posisi Hukum Korban…Op.Cit.,* hlm 210.

masyarakat.[1280] Pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran.[1281]

Konsep hukum pidana menurut keadilan restoratif; orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang terlanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban); pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban); korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/ pelanggaran hukum pidana, yaitu orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), masyarakatt negara, dan juga pelanggar itu sendiri; sistem peradilan pidana dan penjatuhan pidana sebagai bentuk penyelesaian konflik bukan untuk membalas; pidana dan pemidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat (dampak) perbuatan melanggar hukum pidana; dan orang yang dirugikan secara langsung akibat kejahatan (korban) bersifat aktif untuk rnenyelesaikan konflik.[1282]

Keterlibatan korban dalam proses *restorative justice* meliputi perbaikan material, memperbaiki emosi termasuk harapan, perbaikan harga diri dan kehormatan, serta yang terpenting adalah partisipasi penuh dalam penanganan kasus.[1283]

[1280].Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm.194.

[1281]John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, hlm. 54, dalam Rena Yulia, *Ibid.*, hlm. 194.

[1282]Mudzakir, 2005, *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia…,Op.Cit.,*hlm.28-29.

[1283] Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm.193-194.

Dalam rangka pemberdayaan korban dalam sistem peradilan pidana, maka secara mendasar dikenal dua model:[1284]

1. Model Hak-hak Prosedural (*The Procedural Rights*) dan
2. Model Pelayanan (*The Servis Model*)

Model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan yang kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pernasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Pendekatan semacam ini melihat si korban sebagai seorang subjek harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.[1285]

Selanjutnya, pada Model Pelayanan (*The Services Model*), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku hagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana

[1284]Muladi & Barda Nawawi Arief,2007,*Op.Cit.*,hlm.85.
[1285] Rena Yulia, *Op.Cit*., hlm.159-160.

dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.[1286]

Kedua model di atas sebetulnya dapat dijalankan dalam *restorative justice*, mengingat dalam *restorative justice* ada 3 isu utama, pertama memperbaiki dan memuaskan korban dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Kedua, memperbaiki dan memuaskan pelaku, Ketiga, memperbaiki dan memuaskan masyarakat setelah proses sistern peradilan pidana.[1287]

Dengan demikian terlihat bahwa dua model pemberdayaan korban pararel dengan tiga isu utama dari konsep *restorative justice*. *Restorative justice* adalah wahana untuk memperbaiki korban, pelaku dan masyarakat akibat adanya kejahatan, *restorative justice* berbeda dengan cara bekerjanya kriminologi yang hanya memperhatikan kejahatan tetapi melupakan korban sehingga *restorative justice* ini bekerja keras untuk terjaminnya keadilan, restorasi kehormatan, menumbuhkan budaya malu, penyembuhan terhadap korban, dan hal-hal lain. Dengan demikian, *restorative justice* adalah program yang menjanjikan dalam strategi mereduksi kejahatan. *Restorative justice* itu harus dibangun secara dinamis dan menciptakan tatanan yang dipergunakan sebagai pedoman.[1288]

Keterlibatan korban dalam penuntutan perkara pidana, yakni ada atau tidaknya pengaduan korban, diatur dalam beberapa ketentuan KUHP dikelompokkan dalam delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik Aduan Absolut merupakan delik aduan murni, yang penuntutnya bergantung pada adanya pengaduan korban. Delik aduan relatif adalah tindak pidana biasa yang

[1286]*Ibid*., hlm.160.
[1287]. *Ibid*., hlm.161.
[1288]*Ibid*.

penuntutnya tanpa diperlukan pengaduan korban, namun dikarenakan pelakunya memiliki hubungan keluarga dengan korban sebagaimana dimaksud Pasal 367 KUHP, maka korban dapat meminta tidak dilakukannya penuntutan kepada pelaku kejahatan. Tindak pidana dalam delik biasa yang dapat menjadi delik aduan relatif adalah:

1. Tindak pidana pencurian (Pasal 362 s.d. 366 KUHP);[1289]
2. Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman (Pasal 368, 369 dan 371 KUHP);[1290]
3. Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 s.d 375, dan 377 KUHP) ;[1291]
4. Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 s.d 393 dan 395 KUHP);[1292]
5. Tindak Pidana Pasal 404 ayat (1) KUHP berada dalam Bab XXVI tentang Merugikan Penagih Utang atau Orang Yang Berhak;[1293]
6. Tindak Pidana Menghancurkan atau Merusakkan Barang (Pasal 406 s.d 410 dan 412 KUHP).[1294]

Keseluruhan tindak pidana dalam delik aduan relatif yang semulanya merupakan delik biasa merupakan kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan harta benda. Alasan kejahatan-kejahatan di atas menjadi delik aduan dikarenakan menurut Utrecht dan Soesilo[1295]dalam beberapa hal bagi orang yang bersangkutan

[1289] Pemberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHP diatur pada Pasal 367 KUHP yang merupakan satu Bab dengan Pasal 362 s.d. 366 KUHP (Bab XXII tentang Pencurian).
[1290] Pemberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHP diatur pada Pasal 370 KUHP yang merupakan satu Bab dengan Pasal 368,369, dan 371 (Bab XXIII tentang Pemerasan dan Ancaman).
[1291] Pemberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHP diatur pada Pasal 376 KUHP yang merupakan satu Bab dengan Pasal 372 s,d 375 dan 377 (Bab XXIV tentang Penggelapan).
[1292] Pemberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHP diatur pada Pasal 394 KUHP yang merupakan satu Bab dengan Pasal 378 s,d 393 dan 395 (Bab XXIV tentang Penipuan).
[1293] Pemberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHP diatur pada Pasal 404 Ayat (2) KUHP.
[1294] Pemberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHP diatur pada Pasal 411 KUHP.
[1295]E.Utrecht,1986,*Op.Cit.*,hlm. 257.dan R. Soesilo,*Op.Cit.*,hlm.87.

lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu daripada keuntungan bagi pemerintah (masyarakat) jika dilakukan penuntutan.

Meskipun pasal-pasal pidana dalam delik aduan relatif di atas, pelakunya bukan keluarga korban sebagaimana dimaksud Pasal 367 KUHP, dalam praktek hukumnya untuk kejahatan-kejahatan dimaksud sering kali tidak berlanjut pada persidangan perkara pidana. Korban dan pelaku kejahatan telah melakukan perdamaian, sehingga perkara-perkara demikian dihentikan penyidikan dan penuntutanya tanpa merujuk kepada ketentuan KUHP tentang delik aduan relatif maupun ketentuan KUHAP tentang surat penghentian penyidikan dan surat penghentian penuntutan.

Dalam perkara delik biasa, yang korbannya perseorangan, ke depan diharapkan adanya hak bagi korban untuk menentukan tidak ada lagi tuntutan hukum seperti dalam kasus pencurian mesin bulu ayam di Ruli Danau Merah, Batuaji Batam tahun 2013, Korban Taufik meminta kepada majelis hakim agar Terdakwa AS dibebaskan, dengan alasan pelaku bukanlah pelaku utama dan AS telah mengakui perbuatannya sebelum kasus diproses.[1296] Dalam pemeriksaan Terdakwa Iwan Adranacus Ayah korban Eko Prasetyo, Suharto memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Solo agar membebaskan terdakwa kasus pembunuhan, Iwan Adranacus yang dituntut hukuman pidana selama lima tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).[1297]

[1296]https://batampos.co.id/2020/01/17/korban-minta-terdakwa-pencurian-dibebaskan-oleh-majelis-hakim/,diakses 18 April 2020 Pkl 11.55.

[1297]https://timlo.net/baca/18471/ayah-korban-mintaiwan-adranacus-dibebaskan/,diakses pada tanggal 18 April 2020 Pkl 12.05.

Dalam Model hak-hak prosedural (*The procedural rights model*) dalam perlindungan bagi korban kejahatan, Muladi mengemukakan bahwa korban diberi hak untuk memainkan peranan aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa atau hak untuk didengarkan pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara dimana kepentingannya terkait didalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diberikan pelepasan bersyarat, juga hak untuk mengadakan perdamaian. [1298]

Atas terjadinya sebuah tindak pidana, yang secara langsung mengalami penderitaan adalah korban tindak pidana. Peran aktif korban dalam menentukan berat/ ringannya tuntutan adalah bentuk pemenuhan keadilan dalam ketentuan hukum yang dicita-citakan. Sangat berkeadilan dalam tuntutan jaksa dimuat juga permintaan korban tentang masa hukuman terdakwa beserta apa yang menjadi alasan korban dalam meminta masa lamanya terdakwa menjalani pidana.

Dalam Hukum Acara Pidana Amerika,Korban berhak untuk didengar secara wajar pada setiap proses publik di pengadilan distrik yang melibatkan pembebasan, pembelaan, hukuman, atau proses pembebasan bersyarat apa pun.[1299]Dalam setiap persidangan yang melibatkan pelanggaran terhadap korban kejahatan, pengadilan harus memastikan bahwa korban kejahatan diberikan hak-hak yang dijelaskan dalam Pasal 3771 Ayat (a). Sebelum membuat keputusan yang diuraikan dalam Pasal 3771 Ayat (a) Paragraf3, pengadilan harus melakukan segala upaya untuk mengizinkan kehadiran yang sepenuhnya mungkin oleh

[1298]Muladi, 1997, *Op.Cit.*,hlm.178.

[1299]Hukum Acara Pidana Amerika Bagian 2 Prosedur Pidana, yakni dalam Bab 237 Pasal 3771 ayat (a) angka 4.

korban dan harus mempertimbangkan alternatif yang masuk akal untuk mengesampingkan korban dari proses pidana. Alasan untuk setiap keputusan yang menolak pemberian pertolongan dalam bab ini harus secara jelas dinyatakan dalam catatan.[1300]

Hukum Acara Pidana China menentukan bahwa partisipasi aktif para korban dalam proses peradilan pidana dalam Hukum Acara Pidana China, korban adalah salah satu pihak yang terlibat, namun seorang korban mungkin bisa bertindak dalam semua jenis peran, antara lain sebagai berikut:

a. Seorang jaksa dalam kasus penuntutan pribadi. (Pasal 170 Hukum Acara Pidana),
b. Para pihak ikut dalam proses persidangan;
c. Berpartisipasi dalam penyelidikan di pengadilan dan debat pengadilan.

Hukum Acara Pidana Saudi Arabia menggariskan bahwa korban atau wakilnya dan ahli warisnya dapat melakukan tindakan pidana sehubungan dengan semua kasus yang melibatkan hak tindakan pribadi, dan akan menindaklanjuti kasus tersebut di hadapan pengadilan yang kompeten. Pengadilan yang kompeten harus melayani panggilan untuk memberi tahu jaksa.[1301]Tidak ada tindakan kriminal yang akan dimulai atau proses investigasi yang dilakukan dalam kejahatan yang melibatkan hak tindakan pribadi, kecuali melalui pengaduan oleh korban atau wakilnya atau ahli warisnya, diajukan kepada pihak yang berwenang, kecuali Biro Investigasi dan Penuntutan menganggap bahwa pengajuan tindakan

[1300]Pasal 3771 Ayat (b) Paragraf 1 HAP Amerika.
[1301]Pasal 17 Hukum Acara Pidana (HAP) Saudi Arabia.

semacam itu dan penyelidikan atas kejahatan-kejahatan itu akan melayani kepentingan umum.[1302] Selanjutkan Hukum Acara Pidana Saudi Arabia menentukan bahwa sebuah tindakan kriminal pribadi hilang dalam dua kasus berikut: (1) Penerbitan putusan akhir dan (2) Pemberian grasi oleh korban atau ahli warisnya, namun pemberian grasi oleh korban atau ahli warisnya tidak akan menghalangi proses tindakan pidana publik.[1303]Terdakwa, korban, penuntut sehubungan dengan hak tindakan pribadi, dan perwakilan atau pengacara mereka masing-masing dapat menghadiri semua proses penyelidikan. Penyelidik dapat, bagaimanapun, melakukan penyelidikan dengan tidak adanya semua atau sebagian dari yang disebutkan di atas, setiap kali dianggap perlu untuk menentukan kebenaran. Segera setelah kebutuhan berakhir, ia harus mengizinkan mereka untuk meninjau penyelidikan.[1304]Seseorang yang dirugikan oleh kejahatan dan ahli warisnya, kapan saja selama persidangan kasus ini, berhak untuk mengajukan permintaan ke pengadilan persidangan mengenai hak pribadinya atas tindakan apa pun berapapun jumlahnya, meskipun tindakannya memiliki ditolak selama investigasi.[1305] Jika orang yang dirugikan oleh kejahatan tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki wali atau wali, pengadilan di mana tindakan pidana telah diajukan harus menunjuk seseorang untuk mengejar hak pribadinya atas tindakan.[1306]

Hukum Acara Pidana Thailand, mengatur bahwa pihak yang dapat melakukan penuntutan pidana di pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum dan

[1302]Pasal 18 HAP Saudi Arabia.
[1303]Pasal 23 HAP Saudi Arabia.
[1304]Pasal 69 HAP Saudi Arabia.
[1305]Pasal 148 HAP Saudi Arabia.
[1306]Pasal 149 HAP Saudi Arabia.

Korban. [1307]Sehubungan dengan penuntutan publik, korban melalui pengajuan mosi, mengasosiasikan dirinya sebagai jaksa pada setiap tahap persidangan di hadapan pengadilan tingkat pertama selama sebelum adanya putusan.[1308]

Menurut Penulis, apabila dalam persidangan ditemukan fakta bahwa korban perseorangan atau keluarga korban perseorangan menyatakan agar terdakwa dihukum seringan-ringannya, maka Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan seringan-ringannya sebagaimana dalam Kasus Pembunuhan Rezky Eviena Syamsul di Pengadilan Negeri Makasar, tanggal 30 April 2018.[1309] Pada saat pembacaan tuntutan terhadap terdakwa, keluarga korban tidak keberatan terdakwa dituntut hukuman 1 tahun 4 bulan dengan salah satu dasar pertimbangan jaksa penuntut umum, bahwa adanya pernyataan damai dari orang tua korban.

Kewenangan yang dimiliki Penuntut Umum pada Pasal 14 huruf d dan huruf g KUHAP,yakni wewenang membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan, harus direkonstruksi sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 12.Rekonstruksi Ketentuan KUHAP tentang Kewenangan Penuntut Umum (Pasal 14 KUHAP)

NORMA		**PENJELASAN**
Hukum Positif	**Rekonstruksi**	
Penuntut umum mempunyai wewenang:	(1). Penuntut umum memiliki wewenang:	4. Pasal 14 KUHAP yang semulatanpa ayat ditambah satu

[1307]Pasal 28 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1308]Pasal 30 Hukum Acara Pidana (HAP) Thailand.
[1309] Sidang Kasus Pembunuhan Rezky Eviena Syamsul di Pengadilan Negeri Makasar,30 April 2018 (Lebih lanjut: http://news.rakyatku.com/read/99044/2018/04/30/alasan-jpu-tuntut-ringan-tiga-terdakwa-kematian-rezky-evienia-syamsul, dibaca :tanggal 25 November 2018, Pukul.20.16 WIB).

a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; d. membuat surat dakwaan; e. melimpahkan perkara ke pengadilan; f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; g. melakukan penuntutan; h. menutup perkara demi kepentingan hukum; i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum	k. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu l. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; m. ..... emberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; n. membuat surat dakwaan; o. melimpahkan perkara ke pengadilan; p. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; q. melakukan penuntutan; r. menutup perkara demi kepentingan hukum; s. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan	ayat sehingga menjadi dua ayat (Ayat (1) dan (2)). 5. Rekonstruksi dalam bentuk penambahan materi pasal, pada ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan hak bagi korban perseorangan atau ahli warisnya untuk terlibat dalam proses penyusunan dakwaan. 6. Rekonstruksi dalam bentuk penambahan materi pasal, pada ayat (3) dimaksudkan untuk memberikan hak bagi korban perseorangan atau ahli warisnya untuk terlibat dalam menentukan tuntutan hukuman kepada terdakwa

menurutketentuan undang-undang ini; j. melaksanakan penetapan hakim.;	tanggung jawab sebagai penuntut umum menurutketentuan undang-undang ini; t. melaksanakan penetapan hakim.; (2). Apabila korban tindak pidana merupakan korban perseorangan, maka dalam hal penuntut umum membuat surat dakwaan terlebih dahulu penuntut umum memberikan hak kepada korban atau ahli warisnya untuk menyampaikan pendapat atau saran. (3). Apabila korban tindak pidana merupakan korban perseorangan, maka dalam hal penuntut umum mengajukan tuntutan hukum, jumlah hukuman yang dituntut kepada terdakwa adalah sama dengan yang diinginkan korban perseorangan atau ahli warisnya.	

Rekonstruksi norma kewenangan JPU membuat surat dakwaan pada tabel 12 di atas terkait pula tentang ketentuan penerimaan turunan berita acara pemeriksaan dan upaya hukum yang diatur dalam KUHAP.

Peran korban dalam membuat surat dakwaan yakni berupa hak menyampaikan pendapat atau saran harus didasari pengetahan korban tentang

seluruh berkas perkara yang dilimpahkan JPU ke pengadilan. Pasal 72 KUHAP menentukan bahwa atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.Untuk memberikan keadilan bagi korban Pasal 72 KUHAP harus direkonstruksi sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 13. Rekonstruksi Ketentuan KUHAP tentang Hak Menerima Turunan Berita Acara Pemeriksaan Kewenangan Penuntut Umum (Pasal 72 KUHAP)

NORMA		**PENJELASAN**
Hukum Positif	**Rekonstruksi**	
Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.	(1). Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan. (2). Dalam hal koban perseorangan, atas permintaan korban atau atau ahli warisnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan.	7. Pasal 72 KUHAP yang semula tanpa ayat ditambah satu ayat sehingga menjadi dua ayat (Ayat (1) dan (2)). 8. Rekonstruksi dalam bentuk penambahan hak korban perseorangan atau ahli warisnya atas penerimaan turunan berita acara pemeriksaan.. 9. Rekonstruksi dimaksudkan dalam hubungan rekonstruksi Pasal 14 KUHAP yakni peranan korban perseorangan atau ahli warisnya dalam penyusunan dakwaan oleh JPU (Tabel 13).

Rekonstruksi norma kewenangan JPU melakukan penuntutan pada tabel 13di atas terkait pula tentang ketentuan mengajukan upaya hukum yang diatur dalam KUHAP.

Peran korban dalam penuntutan terdakwa yakni berupa hak mengajukan berat/ringannya tuntutan terdakwa atau bahkan meminta terdakwa tidak dituntut terkait pula dengan hak mengajukan upaya hukum. Hal ini dikarenakan meskipun keinginan korban dalam menuntut sanksi pidana terhadap terdakwa telah dilaksanakan JPU, namun putusan pidana merupakan hak mutlak hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sehingga putusan hakim sangat mungkin tidak bersesuaian dengan keinginan korban. Dengan demikian kewenangan JPU mengajukan upaya hukum dalam tindak pidana korban perseorangan merupakan hak korban,sehingga ketentuan tentang hak mengajukan upaya hukum banding (Pasal 67 KUHAP) dan upaya hukum kasasi (Pasal 244 KUHAP) harus direkonstruksi sebagaimana dalam tabel 14 dan tabel 15.

Tabel 14 Rekonstruksi Ketentuan KUHAP tentang Hak Mengajukan Banding (Pasal 67 KUHAP)

NORMA		**PENJELASAN**
Hukum Positif	**Rekonstruksi**	
Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang	(1). Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan	7. Pasal 67 KUHAP yang semula tanpa ayat ditambah satu ayat sehingga menjadi dua ayat (Ayat (1) dan (2)) 8. Rekonstruksi dalam bentuk penambahan

menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.	hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. (2). Dalam hal koban perseorangan,korban perseorangan atau ahli warisnyaberhak untukminta banding terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).	hak korban perseorangan atau ahli warisnya dalam mengajukan banding. 9. Rekonstruksi dimaksudkan dalam hubungan rekonstruksi Pasal 14 KUHAP yakni peranan korban perseorangan atau ahli warisnya dalam mengajukan tuntutan hukum terhadap terdakwa (Tabel 13).

Tabel 15Rekonstruksi Ketentuan KUHAP tentang Hak Mengajukan Kasasi (Pasal 244 KUHAP)

NORMA		**PENJELASAN**
Hukum Positif	**Rekonstruksi**	
Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.	(1).Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. (2).Dalam hal koban perseorangan, korban perseorangan atau ahli warisnya berhak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi	8.Pasal .,.. KUHAP yang semula tanpa ayat ditambah satu ayat sehingga menjadi dua ayat (Ayat (1) dan (2)) 9. Rekonstruksi dalam bentuk penambahan hak korban perseorangan atau ahli warisnya dalam mengajukan kasasi. 10.Rekonstruksi dimaksudkan dalam hubungan rekonstruksi Pasal 14 KUHAP yakni peranan korban

	kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.	perseorangan atau ahli warisnya dalam mengajukan tuntutan hukum terhadap terdakwa (Tabel 13).

Hukum pidana materil (KUHP) maupun pidana formil (KUHAP) secara tekstual tidak mengatur adanya hak korban berperan untuk menuntut berat/ringannya sanksi pidana kepada terdakwa, namun bila melihat Pasal 197 KUHAP tersirat peran korban untuk menuntut berat/ringannya sanksi pidana kepada terdakwa.

Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP menentukan:

(1). Surat putusan pemidanaan memuat :

a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar

hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka putusan hakim berakibat batal demi hukum salah satu penyebabnya adalah tidak dimuatnya pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Fakta dan keadaan yang harus dipertimbangkan hakim dalam

menjatuhkan putusan pidana, menurut Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di dalam sidang oleh pihak dalam proses, antara lain oleh saksi korban. Selanjutnya salah satu penyebab lain yang menjadikan batal demi hukum putusan hakim adalah tidak adanya pasal yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.[1310]

Merujuk Pasal 197 KUHAP, maka putusan hakim batal demi hukum apabila tidak memuat:

a. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
b. Fakta dan keadaan, yakni segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain saksi korban.

Dalam penerapan hakim pada putusan pemidanaan pemenuhan ketentuan Pasal 97 KUHAP dapat ditemukan pada Putusan PN Gunungsitoli No. 08/Pid.B/2013/PN. GS dan Putusan PN Jakarta Timur Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN Jkt. Tim.

Putusan PN Gunungsitoli No. 08/Pid.B/2013/PN GS yang menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa Yusman Telambanua karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, memuat pertimbangan keadaan memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa sadis, keji dan tidak berperikemanusiaan;

[1310] Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP.

- Perbuatan terdakwa diikuti dengan perbuatan lain, mengambil uang korban, membakar mayat korban dan memenggal kepala korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan mendalam pada keluarga korban;
- Motivasi terdakwa menunjukan sikap atau karakter kurang dapat memberi penghargaan terhadap kehidupan manusia;[1311]

Putusan PN Jakarta Timur Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN Jkt. Tim., dalam perkara Terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa, yang menjatuhkan pidana percobaan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka dan kerusakan barang, dengan pertimbangan keadaan meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus mahasiswa;
- Terdakwa maupun keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, terdakwa dan/ atau keluarganya memberikan perhatian yang begitu besar kepada para korban dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban, memberikan santunan dan biaya pemakaman, mengganti kerugian kendaraan yang rusak, membiayai perawatan korban yang sakit dan membiayai pendidikan anak korban yang meninggal dunia;
- Terdakwa aktif memberikan pertolongan kepada korban.[1312]

[1311]Dwi Hananta,*Pertimbangan Keadaan-keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018 : 87 – 108,hlm.94.

[1312]Dwi Hananta,*Pertimbangan Keadaan-keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018 : 87 – 108,hlm.97.

Dalam kedua putusan di atas, maka hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berat/ringannya pidana terkait dengan segala fakta dan keaadan korban yang ditemukan dalam persidangan. Adanya fakta berupa kesedihan yang mendalam keluarga korban menjaidi pertimbangan hukum Mejelis Hakim PN Gunungsitoli dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Yusman Telambanua (terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana).

M. Rasyid Amrullah Rajasa, Terdakwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka dan kerusakan barang oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN Jkt. Tim dipidana percobaan dengan pertimbangan antara lain: terdakwa maupun keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan perhatian yang begitu besar kepada para korban dengan mengunjungi keluarga korban.

Ringannya hukuman bagi terdakwa pelaku kejahatan, sebagaimana yang diminta oleh korban harus pula dilihat dari dua hal. Pertama, apakah terhadap terdakwa telah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan. Kedua, apakah terdakwa adalah pelaku kejahatan berulang. Apabila terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka hukuman seringan-ringannya adalah selama masa tahanan terdakwa hingga putusan pengadilan. Apabila terdakwa tidak pernah ditangkap atau ditahan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman minimal selama dua puluh empat jam kepada terdakwa atau juga hukuman percobaan.[1313]

[1313] Hukuman percobaan atau pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau

Apabila dalam persidangan ditemukan fakta bahwa korban perseorangan atau keluarga korban perseorangan menyatakan agar terdakwa dihukum seberat-beratnya sebagaimana pada saat pembacaan tuntutan terdakwa kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada tanggal 24 April 2018,[1314] maka jaksa penuntut umum yang mewakili korban untuk mengajukan tuntutan pidana harus menuntut hukuman maksimal kepada terdakwa. Apabila korban atau keluarga korban meminta agar terdakwa dihukum seringan-ringannya, maka hukum positif yang berlaku memberi hak kepada hakim untuk memenuhi permintaan korban atau keluarganya menghukum terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya (hukuman penjara minimal)[1315] sebagaimana diatur dalam KUHP.Majelis hakim yang mengadili harus sangat mempertimbangkan permintaan keluarga korban sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHAP. Apabila hakim tidak mempertimbangkan

---

karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

Pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim disertai dengan syarat umum dan dapat ditambahkan dengan syarat khusus. Syarat umum tersebut ialah bahwa terpidana tidak boleh melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis. Syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti seluruh atau sebagaian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Syarat umum tersebut wajib ditentukan oleh hakim dalam setiap penjatuhan pidana bersyarat, sedangkan syarat khusus tersebut bersifat alternatif dalam arti kata tidak wajib ditetapkan. (Adil Lugianto, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-hak Korban Tindak Pidana*, MMH, Jilid 43 No.4, Oktober 2014, hlm.556-557).

[1314] Kericuhan terjadi karena keluarga korban menilai tuntutan jaksa terlalu ringan langsung mengamuk. Sidang yang mendudukkan DY (23) warga Tambirejo, UP (23) warga Tunggak dan DA (25) warga Pilang Payung sebagai terdakwa atas kasus pembunuhan terhadap Anang Tri Hidayat (24) dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum awalnya berjalan lancar, namun setelah mendengar tuntutan JPU yang menuntut terdakwa 8 tahun penjara, keluarga korban langsung protes dan berusaha menorobos pengamanan polisi. Lebih lanjut https://grobogannews.com/2018/04/sidang-kasus-pembunuhan-jl-mt-haryono.html,dibaca : tanggal 10 Juli 2018, Pukul.10.20 WIB.

[1315]Pasal 12 Ayat (1) KUHP menentukan Lama hukuman penjara menurut KUHP adalah seumur hidup atau untuk sementara. Pada ayat (2) digariskan bahwa hukuman sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut. Satu hari menurut ketentuan Pasal 97 KUHP, yaitu masa yang lamanya dua puluh empat jam,sedangkan sebulan masa yang lamanya tiga puluh hari.

permintaan keluarga korban agar terdakwa dihukum seberat-beratnya, maka putusan hakim tersebut dapat batal demi hukum.

Menurut Penulis, Pasal 197 KUHAP dapat menjadi dasar hukum adanya hak korban untuk menentukan berat/ringannya hukuman terdakwa. Meskipun dalam hukum positif tidak secara tegas mengatur adanya pengaruh keterangan/ permintaan korban menjadi dasar ringan/ beratnya tuntutan Jaksa, pada prakteknya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya juga memuat pertimbangan yang menjadi dasar menuntut ringan/beratnya tuntutan pidana kepada terdakwa. Dalam ketentuan hukum acara pidana yang akan datang, permintaan korban tentang berat atau ringannya tuntutan terdakwa harus diakomodir oleh jaksa dalam pengajuan tuntutan pidana.

1.2.2.3. Rekonstruksi Hak Korban Atas Informasi Pemeriksaan Perkara

Adanya hak korban dalam menentukan berat/ringannya hukuman terdakwa dan dituntut/tidaknya terkait pula dengan adanya hak korban atas informasi tentang perkembangan pemeriksaan perkara.

KUHAP tidak mengatur adanya hak korban atas informasi perkembangan penaganan perkara pidana. Hak korban atas informasi ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UULPSK, yang menentukan bahwa korban berhak:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

d. Mendapat penerjemah;[1316]

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;[1317]

g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;[1318]

h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;[1319]

i. Dirahasiakan identitasnya;

j. Mendapat identitas baru;

k. Mendapat tempat kediaman sementara;

l. Mendapat tempat kediaman baru;

m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

n. Mendapat nasihat hukum;

o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau

p. Mendapat pendampingan.[1320]

Dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) UULPSK, Hak Korban atas informasi penanganan perkara adalah mengenai: 1. Informasi mengenai perkembangan kasus;[1321] 2. Informasi mengenai putusan pengadilan;[1322] dan Informasi dalam hal

[1316]Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak menguasai bahasa Indonesia (Penjelasan Pasal 5 Huruf d UU Nomor 31 Tahun 2014).
[1317]Yang dimaksud dengan ”informasi” adalah dalam bentuk keterangan lisan dan tertulis. (Penjelasan Pasal 5 Huruf f UU Nomor 31 Tahun 2014).
[1318]Yang dimaksud dengan ”informasi” adalah dalam bentuk keterangan lisan dan tertulis. (Penjelasan Pasal 5 Huruf g UU Nomor 31 Tahun 2014).
[1319]Yang dimaksud dengan ”informasi” adalah dalam bentuk keterangan lisan dan tertulis. (Penjelasan Pasal 5 Huruf h UU Nomor 31 Tahun 2014.
[1320] Pasal 5 Ayat (1) huruf p UU Nomor 31 Tahun 2014.
[1321] Penjelasan Pasal 5 Huruf f UULPSK.
[1322] Penjelasan Pasal 5 Huruf g UULPSK.

terpidana dibebaskan.[1323] Dalam penjelasan ketentuan tentang hak atas informasi ini, hanya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan informasi adalah dalam bentuk keterangan lisan dan tertulis. Menurut Penulis, Informasi mengenai perkembangan kasus dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f UULPSK harus dimaknai pula informasi tentang segala sesuatu jalannya persidangan, yakni berupa dokumen-dokumen persidangan dan risalah persidangan.

Ha-hak Informasi di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UULPSK diberikan kepada korban dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Pada Penjelasan Pasal 5 ayat (2) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "tindak pidana dalam kasus tertentu" antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Dalam Hukum Acara Pidana Amerika, korban berhak untuk pemberitahuan yang masuk akal, akurat, dan tepat waktu dari setiap proses pengadilan umum, atau proses pembebasan bersyarat, yang melibatkan kejahatan atau pembebasan atau pelarian diri dari terdakwa.[1324] Korban juga berhak untuk diberitahu secara tepat waktu atas tawar-menawar pembelaan atau perjanjian

[1323] Penjelasan Pasal 5 Huruf h UULPSK.
[1324] Hukum Acara Pidana Amerika Bagian 2 Prosedur Pidana, yakni dalam Bab 237 Pasal 3771 ayat (a) angka 2

penuntutan yang ditangguhkan.[1325]Dalam setiap persidangan yang melibatkan pelanggaran terhadap korban kejahatan, pengadilan harus memastikan bahwa korban kejahatan diberikan hak-hak dimaksud, sebelum membuat keputusan, pengadilan harus melakukan segala upaya untuk mengizinkan kehadiran yang sepenuhnya mungkin oleh korban dan harus mempertimbangkan alternatif yang masuk akal untuk mengesampingkan korban dari proses pidana. Alasan untuk setiap keputusan yang menolak pemberian pertolongan harus secara jelas dinyatakan dalam catatan.[1326]

Hukum Acara Pidana China menggariskan bahwa seorang korban dapat berbagi semua jenis informasi tentang proses pada setiap tahap proses peradilan pidana, dan penyidik, kejaksaan atau hakim harus memberikan informasi tentang hak prosedural, hasil dan alasan untuk korban kejahatan.

Menurut Penulis seharusnya KUHAP memuat hak-hak informasi sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (2) UULPSK. Ketentuan dimaksud dapat dimasukan dalam Bab VI setelah Pasal 68 KUHAP,sehingga Bab VI yang semula memiliki judul bab ”Tersangka dan Terdakwa” diubah menjadi ”Tersangka,Terdakwa dan Korban”.Ketentuan tambahan tentang hak korban dalam pasal setelah Pasal 68 KUHAP, adalah sebagai berikut:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

[1325] Hukum Acara Pidana Amerika Bagian 2 Prosedur Pidana, yakni dalam Bab 237 Pasal 3771 ayat (a) angka 9

[1326]Pasal 3771 Ayat (b) Paragraf 1 HAP Amerika.

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Memperoleh dokumen hukum terkait perkara;
g. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan proses pemeriksaan perkara;
h. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
i. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
j. Dirahasiakan identitasnya;
k. Mendapat identitas baru;
l. Mendapat tempat kediaman sementara;
m. Mendapat tempat kediaman baru;
n. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
o. Mendapat nasihat hukum;
p. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
q. Mendapat pendampingan.

BAB VI

PENUTUP

10.1 Simpulan

Setelah dilakukan pengkajian atas permasalahan penelitian sebagaimana termuat dalam Bab III, Bab IV dan Bab V, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan korban dalam penyelidikan/penyidikan, penuntutan dan pengadilan berdasarkan KUHAP, tidak lebih hanya sebagai alat bukti (keterangan saksi).Ketika keterangan yang diberikan oleh korban dianggap telah mencukupi, maka selesai juga kedudukan dan peranan korban dalam mekanisme peradilan pidana.Korban tidak lagi berhak untuk ikut campur dalam menentukan sanksi yang setimpal yang akan dituntutkan atau dijatuhkan kepada pelaku, karena semua itu telah menjadi monopoli birokrasi pengadilan, bahkan ketika sanksi telah dijatuhkan dan harus dijalankan oleh pelaku, kewenangan untuk menentukan cara bagaimana sanksi itu dijalankan oleh pelaku, diputuskan tanpa meminta pendapat korban.Kedudukan korban kejahatan dalam praktek hukum acara pidana di Indonesia merupakan pihak yang paling tidak diuntungkan karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. KUHAP lebih menitikberartkan perlindungan atas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa dibandingkan kedudukan dan hak-hak korban sehinga tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap

korban kejahatan. Hukum Islam mengakui sistem pengampunan (hak korban dalam memberikan pengampunan), prinsip ini diakui oleh hukum modern pada masa kini sehingga hukum Islam tetap lebih unggul daripada hukum konvensional karena memilih logika penerapan pengampunan tersebut dengan baik.Korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni hukuman *qishash*. Apabila ia memaafkannya, gugurlah hukuman *qishash* tersebut.*Restorative justice* adalah wahana untuk memperbaiki korban, pelaku dan masyarakat akibat adanya kejahatan paralel dengan Model Hak-hak Prosedural (*The Procedural Rights*).Model Hak-hak Prosedural penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan yang kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pernasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Pendekatan semacam ini melihat si korban sebagai seorang subjek harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

2. Hak korban dalam penuntutan terdakwa saat ini belum berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan disebabkan oleh substansi hukum, kultur hukum dan struktur hukum yang ada di Indonesia.

Substansi hukum positif menentukan bahwa posisi korban kejahatan hanya sebagai saksi (Pasal 108 Ayat (1) KUHAP *Jo* Pasal 184 KUHAP) dan sebagai penuntut atau penggugat ganti-kerugian (perdata) yang digabungkan dalam prosedur pidana (Pasal 98-101 KUHAP).Kewenangan membuat surat dakwan dan melakukan penuntutan berdasarkan Pasal 14 KUHAP hanya dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum.KUHAP.Pencabutan pengaduan dalam hukum positif yang memiliki batas waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP),dikecualikan untuk delik aduan zina (Pasal 284 KUHP) yang pencabutan pengaduannya sebelum dimulainya pemeriksaan perkara di persidangan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan tidak memiliki manfaat hukum.

Kultur Positivisme pada penegakan hukum telah melahirkan hukum dalam skesta matematika, menyelesaikan hukum yang terjadi dalam masyarakat berdasar apa yang tertulis dalam teks undang-undangHukum bukan hanya bangunan peraturan biasa, namun disadari juga sebagai bangunan ide, kultur dan cita-citaHukum bukan hanya bangunan peraturan biasa, Keterpurukan hukum di Indonesia lebih dikarenakan penyingkatan hukum sebagai *rule of law* tanpa melihat sebagai *rule of morality*. Akibatnya hukum hanya dilihat sebagai peraturan prosedur yang lekat dengan kekuasaan. Padahal di balik hukum juga sarat dengan nilai, gagasan untuk membangun kultur baru yang lebih kontekstual pada rasa keadilan masyarakat.

Kelemahan struktur hukum pada pemenuhan hak korban perseorangan dalam penuntutan terdakwa adalah ketiadaan sarana teknologi elektronik yang dapat

merekam seluruh kegiatan persidangan dalam bentuk suara yang dapat langsung diubah menjadi tulisan. Hal ini merupakan penghambat bagi korban untuk secara lengkap dancepat mengetahui jalannya persidangan berikut fakta-faktanya yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi korban dalam mengajukan berat/ringannya tuntutan kepada terdakwa.

3. Rekonstruksi hak korban perseorangan dalam penuntutan terdakwa berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma. Dalam rekonstruksinilai disimpulkan bahwa apabila kepastian hukum ditempatkan sebagai nilai yang diutamakan, maka kepastian hukum ini akan menggeser nilai kegunaan dan nila keadilan ke samping karena yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan memiliki kegunaan bagi masyarakatnya, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Ketiga nilai dasar tujuan hukum diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya, dan terakhir baru kepastian hukumnya.

   Rekonstruksi norma dalam hal ini adalah pembaharuan beberapa ketentuan dalam hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan hak korban dalam penentuan tuntutan/hukuman terdakwa. Ketentuan-ketentuan dimaksud adalah mengenai: hak korban perseorangan mencabut pengaduan, peran korban dalam membuat surat dakwaan dan tuntutan serta hak korban atas iniformasi pemeriksaan perkara.

Tabel Rekonstruksi Ketentuan KUHP tentang Pencabutan Pengaduan

KUHP	NORMA	
	Hukum Positif	**Rekonstruksi**
Pasal 75	Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.	**Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali selama putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap.**
Pasal 284	(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 2.a.seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.	1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 2.a.seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
	(2).Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang	(2).Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang

	arena alasan itu juga.	karena alasan itu juga.
	(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.	(3)**Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72 dan 73.**
	(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.	**Dihapus**
	(5)Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.	(4) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Rekonstruksi Ketentuan KUHAP tentang Kewenangan Penuntut Umum (Pasal 14 KUHAP)

NORMA		**PENJELASAN**
Hukum Positif	**Rekonstruksi**	
Penuntut umum mempunyai wewenang: a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; c. memberikan perpanjangan	(1). Penuntut umum memiliki wewenang: a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; c. memberikan perpanjangan	1. Pasal 14 KUHAP yang semulatanpa ayat ditambah satu ayat sehingga menjadi tiga ayat (Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)). 2. Rekonstruksi dalam bentuk penambahan materi pasal, pada ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan hak bagi korban perseorangan atau ahli warisnya untuk terlibat dalam proses penyusunan dakwaan. 3. Rekonstruksi dalam bentuk penambahan materi pasal, pada ayat (3) dimaksudkan untuk memberikan hak bagi korban perseorangan

penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; d. membuat surat dakwaan; e. melimpahkan perkara ke pengadilan; f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; g. melakukan penuntutan; h. menutup perkara demi kepentingan hukum; i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurutketentuan undang-undang ini; j. melaksanakan penetapan hakim.;	penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; d. membuat surat dakwaan; e. melimpahkan perkara ke pengadilan; f.menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; g. melakukan penuntutan; h. menutup perkara demi kepentingan hukum; i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurutketentuan undang-undang ini; j. melaksanakan penetapan hakim.; (2).Apabila korban tindak pidana merupakan korban perseorangan, maka dalam hal penuntut umum membuat surat dakwaan terlebih dahulu penuntut umum memberikan hak kepada korban atau ahli warisnya untuk	atau ahli warisnya untuk terlibat dalam menentukan tuntutan hukuman kepada terdakwa

	menyampaikan pendapat atau saran. (3). Apabila korban tindak pidana merupakan korban perseorangan, maka dalam hal penuntut umum mengajukan tuntutan hukum, jumlah hukuman yang dituntut kepada terdakwa adalah sama dengan yang diinginkan korban perseorangan atau ahli warisnya.	

Rekonstruksi Ketentuan KUHAP tentang Hak Menerima Turunan Berita Acara Pemeriksaan Kewenangan Penuntut Umum (Pasal 72 KUHAP)

NORMA		**PENJELASAN**
Hukum Positif	**Rekonstruksi**	
Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.	(1). Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan. (2). Dalam hal koban perseorangan, atas permintaan korban atau atau ahli warisnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan.	1. Pasal 72 KUHAP yang semula tanpa ayat ditambah satu ayat sehingga menjadi tiga ayat (Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)). 2. Rekonstruksi dalam bentuk penambahan hak korban perseorangan atau ahli warisnya atas penerimaan turunan berita acara pemeriksaan.. 3. Rekonstruksi dimaksudkan dalam hubungan rekonstruksi Pasal 14 KUHAP yakni

		peranan korban perseorangan atau ahli warisnya dalam penyusunan dakwaan oleh JPU (Tabel 13).

Rekonstruksi Ketentuan KUHAP tentang Hak Mengajukan Banding (Pasal 67 KUHAP)

NORMA		**PENJELASAN**
Hukum Positif	**Rekonstruksi**	
Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.	(1). Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. (2). Dalam hal koban perseorangan,korban perseorangan atau ahli warisnyaberhak untukminta banding terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).	1. Pasal 67 KUHAP yang semula tanpa ayat ditambah satu ayat sehingga menjadi dua ayat (Ayat (1) dan (2)) 2. Rekonstruksi dalam bentuk penambahan hak korban perseorangan atau ahli warisnya dalam mengajukan banding. 3. Rekonstruksi dimaksudkan dalam hubungan rekonstruksi Pasal 14 KUHAP yakni peranan korban perseorangan atau ahli warisnya dalam mengajukan tuntutan hukum terhadap terdakwa (Tabel 13).

Rekonstruksi Ketentuan KUHAP tentang Hak Mengajukan Kasasi (Pasal 244 KUHAP)

NORMA		PENJELASAN
Hukum Positif	**Rekonstruksi**	
Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.	(1).Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. (2).Dalam hal koban perseorangan, korban perseorangan atau ahli warisnya berhak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.	1. Pasal 244 KUHAP yang semula tanpa ayat ditambah satu ayat sehingga menjadi dua ayat (Ayat (1) dan (2)) 2. Rekonstruksi dalam bentuk penambahan hak korban perseorangan atau ahli warisnya dalam mengajukan kasasi. 3. Rekonstruksi dimaksudkan dalam hubungan rekonstruksi Pasal 14 KUHAP yakni peranan korban perseorangan atau ahli warisnya dalam mengajukan tuntutan hukum terhadap terdakwa (Tabel 13).

.

Hak korban atas iniformasi pemeriksaan perkara sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (2) UULPSKdimasukan dalam Bab VI setelah Pasal 68 KUHAP,**sehingga Bab VI KUHAP** yang semula memiliki judul bab ”Tersangka dan Terdakwa” **diubah menjadi ”Tersangka,Terdakwa dan Korban.”Ketentuan tambahan tentang hak korban dalam pasal setelah Pasal 68 KUHAP, adalah sebagai berikut**:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Memperoleh dokumen hukum terkait perkara;
g. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan proses pemeriksaan perkara;
h. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
i. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
j. Dirahasiakan identitasnya;
k. Mendapat identitas baru;
l. Mendapat tempat kediaman sementara;
m. Mendapat tempat kediaman baru;
n. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
o. Mendapat nasihat hukum;
p. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
q. Mendapat pendampingan.

6.2 Implikasi Teoritis dan Praktis

6.2.1 Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Menemukan gagasan pemikiran baru dalam pemenuhan hak-hak korban untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dan hukum acara pidana.
2. Mampu merubah paradigma pengembangan ilmu hukum pidana, baik ilmu hukum materil maupun formil yang berkaitan dengan hak-hak korban kejahatan.

6.2.2 Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah:

1. Sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait pada proses peradilan pidana dalam pemenuhan hak korban kerjahatan.
2. Dapat menjadi rujukan pada proses peradilan pidana, khususnya dalam penyusunan tuntutan pidana kepada terdakwa.
3. Dapat menjadi rujukan pertimbangan hakim dalam memutus berat/ringan hukuman terdakwa atau meniadakan tuntutan terdakwa.

6.3 Saran

1. Kentuan tentang Pencabutan Pengaduan Pasal 75 dan Pasal 284 KUHP harus diubah sehingga pencabutan pengaduan oleh korban untuk seluruh delik aduan daluarsa waktunya adalah setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

2. KUHAP yang berlaku pada saat ini harus dilakukan perubahan karena kedudukan dan hak-hak korban kejahatan sangat sedikit diatur dibandingkan hak-hak dari pada pelaku tindak pidana. Dalam KUHAP yang baru nanti diharapkan terdapat keseimbangan antara hak-hak korban dengan hak-hak pelaku tindak pidana. Ketentuan yang disarankan diubah adalah Pasal 14 KUHAP dan penambahan norma hak-hak korban atas informasi perkara.
3. PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme harus diubah dikarenakan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantas Tindak Pidana Teroris Menjadi Undang-undang yang dijadikan konsiderans"Mengingat" angka 2 pada PP No. 24 Tahun 2003, telah diubah oleh UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003. PP No. 24 Tahun 2003 harus menyesuaikan tambahan/perubahan ketentuan yang ada pada UU Nomor 5 Tahun 2018.
4. PP No.44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban harus diubah dikarenakan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dijadikan konsiderans"Mengingat" angka 2 pada PP No.44 Tahun 2008 telah diubah oleh UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006. PP No.44 Tahun 2008 harus menyesuaikan tambahan/perubahan ketentuan yang ada pada UU Nomor 31 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A Sukris Sarmadi,2009, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*,Tanpa Cetakan, Bandung: CV Mandar Maju.

Abdussalam & Sitompul,2013,*Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung

---------,2007, Sistem Peradilan Pidana, Jakarta:Restu Agung.

Abdul Salam dan Adri Desasfuryanto,2016,*Victimology (Ilmu Tentang Korban)*,Jakarta:PTIK.

Abdul Qodir Audah,2007,A*t-Tasyri al-Jina I al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*,Edisi Indonesia,Penerjemah Tim Tsalisah,Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jakarta :PT. Kharisma Ilmu.

Agus Yudah Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Prporsionalitas dalam Kontak Komersial,* Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2004, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi,* Cetakan Pertama, Jakarta:Kencana.

Ahmad Mujahidin,2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Refika Aditama.

Albert Hasibuan,2010,"Pembaruan Substansi Hukum di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyona" dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*.

Ali Murthado,Mustafa Kamal Rokan, 2008,*Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Medan:Wal Ashri Publishing.

Amiruddin,Zainal Asikin, 2016,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo, Jakarta.

Andi Hamzah,1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Ghalia Indonesia.

---------,1993, *Sitem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta:Pradnya Paramita,

---------,1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Edisi Revisi, Jakarta: CV. Satpa Artha Jaya.

Arief Gosita, 1983 *Masalah Korban Kejahatan,* Cetakan Pertama, Jakarta: CV Akademika Pressindo

---------, 2004, *Masalah Korban Kejahatan [Kumpulan Karangan],* Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

Bambang Waluyo, 2014,*Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi,* Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief,1998,*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana,* Bandung: Citra Aditya.

---------,2008,*RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana,*Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

---------,2011,*Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Edisi Revisi, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Chaerudin & Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam,* Jakarta:Grhadika Press.

Ciptono,2018, *Rekontruksi Kebijakan Sanksi Pidana Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan Pancasila*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Dardji Darmodihardjo dan Sidaharta,1999, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Pendidikan Nasional,2008,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Edisi Keempat,Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Dewi Meta Lutfian,2018,*Kewajiban Jaksa Penuntut Umum dalam pemenuhan Hak-hak Korban pada Tahap Penuntutan*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Dikdik M Arief Mansyur, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom,Tanpa Tahun, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma Dan Realita*, Jakarta:Rajawali Press.

Dey Ravena, 2004, *Kebijakan Kriminal (Pemberdayaan Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Lentera menuju Perubahan),* Bandung: tanpa penerbit,

Djoko Prakoso,1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama,Jakarta: Bina Aksara.

Ediwarman,2015,*Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Pelulisan Skripsi,Tesis dan Disertasi*,Medan:PT. Sofmedia,

Eko Soponyono,2011,*Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi pada Korban*, Disertasi, Progrom Doktor limu Hukum, Semarang:UNDIP.

E. Utrecht,1986,*Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas.

---------,1962, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta:Balai Buku Ichtiar.

Esmi Warassih Pujirahayu,2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama.

Eva Achjani, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Faisal , 2015, *Pemaknaan Hukum Progresif Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Yogyakarta:Thafa Media.

---------, 2014, *Memahami Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.

Fence M. Wantu, 2011," Peranan Hakim dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Peradilan Perdata," Unversitas Gadjah Mada.

G.Widiartana,*Viktimologi & Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan pertama,Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Guntur Purwanto Joko Lelino,2004, *Peranan Pengadilan Negeri*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Guntur.

H.C.Najmuddin HS.,2001,*Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam*,Tesis,Universitas Islam Bandung,Bandung.

H.Jaja Ahmad Jayus, 2010,"Pengaruh Hukum Kolonial pada Budaya Hukum Masyarakat" dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*.

Hamka, 1983,, *Tafsir Al-azhar Jus V*, Jakarta: Putaka Panji Mas.

Hilman Hadikusuma, I986, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung :Alumni.

J.E. Sahetapy,2010, "Reformasi Hukum Harus Mengejahwantakan Pancasila" dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia,*Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara.*

---------, 1965,*Bunga Rampai Viktimasi*, Kumpulan Karangan, Bandung:Eresco.

---------., 1987, *Viktimologi sebuah bunga rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi, 2017, *Tafsir Jalalain Lengkap dan Disertai Asbabun Nuzul*,Cetakan Pertama, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar

Jimly Asshiddiqie, 2010, "Struktur Hukum dan Hukum StrukturalIndonesia" dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia,*Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*.

Jonaedy Efendy,Johnny Ibrahim,2016,*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,Depok:PrenadamedIa Group

Juhaya S. Praja,1995, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung:P2U LPPM Unisba.

Kamil, *Viktimologi & Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan pertama,Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Kuat Puji Prayitno,2011, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Pidana Yang Integral*,Disertasi,Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Lamintang, PA.F. 1984, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru

Lawrence M. Friedman, 2017, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu* Sosial, Nusa Media, Bandung, halaman 15-16, terjemahan M. Khozim dari buku Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal Systeme A Social Science* Perspective,New York; Russel Sage Foundation.

---------,2001, *American Law an Introduction (Hukum Amerika sebuah pengantar)*, penerjemah Wisnu Basuki,Jakarta: PT. Tatanusa

Liek Wilardjo,1990, *Realita dan Desiderata*,Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan.

Lilik Mulyadi,2004,*Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Djambatan

Lili Rasjidi dan L.B. Wyasa Putra,2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung:Mandar Maju.

M. Yahya Harahap, 1996, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta:Sinar Grafika.

M. Quraish Shihab,2009, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al_Qur'an*, (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati,

Madjid Khadduri,199,*Teologi Keadilan (Perspektf Islam)*, Surabaya: Risalah Gusti.

Mahkamah Agung Republik Indonesia,2010.*Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*,Jakarta:Mahkamah Agung RI.

Mahmutarom HR., 2009, *Rekokonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tidak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)*, Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mardjono Reksodiputro,1994, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: UniversItas Indonesia.

---------, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.

Maradut Tampubolon,2014,*Membedah Profesi Advokat*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Marwan Effendy, 2014,*Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Hamonisasi Hukum Pidana*, Ciputat:Refrensi (Gaung Persada Press Group).

Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moch Faisal Salam,2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*, Cetakan Pertama, Bandung: Mandar Maju.

Moh., Mahfudz MD.,2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES* Indonesia.

Mudzakkir,1992, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,Jakarta.

---------,2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pasacasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

---------,2001,*Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Jurnal Ilmu Hukm, Vol.14,No.1,Maret 2011,hlm.36.

Muhammad, Muslehuddin,1997, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Penerjemah Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Muh.Sudirman Sesse,"Budaya Hukum dan Implikasinya terhadap Pembangunan Hukum Nasional,"Jurnal Hukum Diktum,Volume 11, Nomor 2.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang:BP UNDIP.

---------,1997,*Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang :Badan Penerbit Undip.

---------, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang:BP Undip.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1997, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

---------,2007, *Bunga Rampah Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Mulyana W. Kusumah,2002, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung PTL:. Remaja Rosdakarya.

Mumpuni Moelatiningsih,2013, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum UNDIP,Semarang.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, *Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Undip.

Oemar Seno Adji,1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Erlangga.

Otje Salman, 2012, *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung: PT Refika Aditama.

Otje Salman S. H. R., dan Anthon F. Susanto,2013, *Teori Hukum (Mengingat, mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung :Refika Aditama.

PA.F. Lamintang, 1984, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.

Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Unissula,2017,*Buku Pedoman Penyusunan Disertasi*, Semarang.

R.Abdusalam, 2003, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta : PTIK Press.

R. Soeparmono, 2003, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHP,* Mandar Maju, Bandung.

R. Soesilo,1996, *Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) (serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal),* Bogor:Politeia.

Rena Yulia, 2013,*Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan,* Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Romli Atmasasmita,1996,*Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abosionisme*, Bandung:Putra Bardin.

---------,2017,*Rekontruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta:PT. Gramedia

---------, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konterporer,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

---------,2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Cetakan Pertama,Yogyakarta: UII Press.

Sabian Usman,2009,*Dasar-dasar Sosiologi Hukum,* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni,

---------,1995,"Transformasi Nilai-nilai dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum Nasional," Seminar BPHN,Jakarta,Juni 1995,

---------,1996, *Ilmu Hukum*, Bandung:Alumni.

---------,2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

---------,2007,"Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum," Jakarta:Penerbit Buku Kompas.

---------,2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

---------,2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta:Genta Publishing,

Sayyid Sabiq, 1984, *Fiqih Sunnah*, Cetakan Pertama,Bandung: Al-Ma'arif.

Sidik Sunaryo,2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Malang: UMM Press.

---------,2004, *Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Malang: UMM Press.

Siti Malikhatun Badriyah, 2016, *Sitem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*, Cetakan Pertama, Jakarta:Sinar Grafika.

Soebekti,2011, *Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang*, sebagaimana Dikutip oleh Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press.

Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Akademika Pressindo.

Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme,dalam sistem peradilan pidana*, Bandung: Refika Aditama.

Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*,UI-Press, Jakarta.

---------,1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

---------,1982,Kesadaran Hukum Masyarakat,Jakarta:Rajawali

Sri Endah Wahyuningsih,2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa,* Fastindo, Semarang.

Sudarto,1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung:Alumni.

Suteki, 2010,"Budaya Oriental dan Implikasinya Terhadap Cara Berhukum danalm Perspektif Hukum Progresif, dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*.

Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok:PT. Raja Grafindo.

Teguh Prasetyo,2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*,Bandung:Nusa Media.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah,2009, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum,Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Jaman,* Cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

---------,2012, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Maju Menuju Masayarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat,* Depok:Rajawali Pers.

Theo Van Boven, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta

Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: Gema Insani.

Widiartana, *Viktimologi & Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

WP. Djatmiko,2019, *Dikonstruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok di Masyarakat Madura Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal*, Disertasi, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Yahya Harahap,1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*,Jakarta: Pustaka Kartini, cet. Ke-3, Jilid II.

---------, 1996, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta:Sinar Grafika.

B. PeraturanPerundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang:Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomr 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 20017 tentang Pengesahan *Asean Convention Againts Trafficking in Persons Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Peremepuan dan Anak).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang tanggal 21 Juni 2018. UU Nomor 5 Tahun 2018.

Hukum Acara Pidana Amerika

Hukum Acara Pidana Republik Rakyat China.

Hukum Acara Pidana Saudi Arabia.

Hukum Acara Pidana Thailand

Hukum Pidana Republik Rakyat China.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang tata Cara perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tatacara Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1600/K/Pid/2009.

D. Jurnal/Artikel

A.Sukris Sarmadi,2012,"Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)", Jurnal Dinamika Hukum, Vo. 12 No.2.

Abdul Hakim, November 2017"Menakar Rasa Keadilan pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila, Jurnal Hukum dan Peradilan," Volume 6 Nomor 3.

Abdul Wahid Haddade,2016, *Konsep Al-Ishlah dalam Al-Quran, Tafsere*,

Volume 4 Nomor 1

Adil Lugianto, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-hak Korban Tindak Pidana*, MMH, Jilid 43 No.4, Oktober 2014.

Ahmad Bahiej,2005,*Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qisas dan Diyat*,As-Syi'rah,Vol.39,No.I

Anyismayawati, Januari 2011 "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembanguanan Hukum di Indomesia (Kritik terhadap Leahnya Budaya Hukum di Indonesia)," Pranata Hukum, Volume 6 Nomor 1.

Arinanto Satya,2006,"Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi," Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, Fakultas Hukum UI, Jakarta.

Bagir Manan, 1999," Reorientasi Politik Hukum Nasional," makalah disampaikan pada Diskusi IKAPTISI di UGM, Yogyakarta .

---------,,2007,"Hakim Sebagai Pembaharu Hukum," Varia Peradilan, No.254 Januari 2007, IKAHI, Jakarta.

Bismar Nasution,2003,"Peranan Birokrasi dalam Mengupayakan Good Governnance : Suatu Kajian dari Pandangan Hukum dan Moral ", disampaikan pada Diseminasi Policy Paper Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Medan, tanggal I-2 Oktober 2003

Darmono,2011, "Komitmen Kejaksaan RI Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban Tindak Pidana", *Jurnal Saksi dan Korban*, Edisi No.1, Vol.1.

Dwi Hananta,*Pertimbangan Keadaan-keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018 : 87 – 108.

Eko Soponyono, 9 September 2017,*Hikmah Al Qura'n dalam Pembaharuan Hukum PidanaDemi Mewujudkan Keadilan Religius*,Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,

Erwin,2007 "Upaya Mereformasi Hukum Sebagai Akibat Dominasi Positivisme

dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum Progresif Vol.1, No.1, Juni 2007, Semarang : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Faisal, September 2008,"Menggagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis", Jurnal Ultimatum,Edisi II, STIH IBLAM, Jakarta.

---------,,"Menggugat Dominasi Positvisme Hukum", hlm.16,diakses dari https://adoc.tips/queue/menggugat-dominasi-positivisme-hukum.html,tanggal 20 Mei 2020,Pkl14.29

Gao-Feng Jin,"The Protection and Remediesfor Victims of Crime and Abuse of Power in China,"Resource Material Series No. 70.

Herdis Herdiansyah, 2007, *Kemiskinan dan Distribusi Keadilan* , www. kompas. com diakses tanggal 13 des 2007.

Jazim Hamidi, Februari 2006,"Kedududukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indoesia,"Jurnal Konstitusi, Vol, 3 Nomor 1, Mahakamah Konstitusi RI, Jakarta.

Lilik Mulyadi,2012, "Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 1,Nomor 1.

Lintong O. Siahaan, 2006,"Peran Hakim Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 36 N0.1 Januari 2006, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

M. Muslih,2013, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", Legalitas,Volume IV Nomor 1.

Mardjono Reksodiputro,1993: *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi).* Pidato Pengukuhan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Melani, 2005,"Membangun Hukum Pidana dari Retributif ke Restroratif," Litigasi, Volume 6.

Mudzakir, Maret 2005,"*Viktimologi Studi Kasus di Indonesia,"* Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI, Surabaya.

Muhammad Alim,01 Juni 2010,*Asas-asas Hukum Modern dalam Hukum Islam,*Volume 17,Jurnal Media Hukum.

Muhammad Khambali,Juni 2014, "Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", Supremasi Hukum, Volume 3, No.1.

Muhammad Yusuf Siregar,dkk.,"Analisis Putusan Hakim Peradilan Pidana Terhadap Pencabutan Perkara Delik Aduan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nmor No. 1600 K/PID/2009)"USU Law Journal, Vol.II-No.1 (Feb-2014).

Muladi,2004, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang,* Pidato Pengukuhan Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Mumpuni Moelatiningsi, Desember 2013,*Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum UNDIP*,Semarang.

Nur Rohim Yunus, 2015, *Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesian dalam Dimensi Hukim Progresif,*Supremasi Hukum, Volume 11, Nomor 1.

P. M. Hadjon,1994," Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normative)," Majalah Yuridika, Fakultas Hukum UNAIR, No. 6 Tahun IX November-Desember, 1994.

Rusli Muhammad,2006,"Kajian Kritis Terhadap Teori Hukum Positif (Positivisme)", Jurnal Hukum Respublica, Vol. 5, No. 2,Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning (Unilak).

Rocky Marbun,Juli 2017,*Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi FenomenaOvercapacity Lembga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 2

Satya Arinanto,2006, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, Fakultas Hukum UI, Jakarta, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 3

Ucuk Agiyanto, *Penegakan Hukum di Indonesia:Eksplorasi Konsep dan Keadilan Berdimensi Ketuhanan*,Hukum Rensendental, Universitas Muhammadiyah Ponorgo.

United Nations,2003, *Convention Against Corruption*. Merida

---------,1991,The United Nations and Crime Prevention, New York : United Nations

Yusriyadi,2004,"Paradigma Positivisme dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal hukum, Vol. 14, No. 3, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Yusuf Qardhawi dalam Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, 2014 Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya, dalam *digilib. unila. ac. id*, diakses tanggal 01 Desember 2018.

E. Publikasi Elektronik

http://news. rakyatku. com/ read/ 99044/2018/04/30/alasan-jpu-tuntut-ringan-tiga-terdakwa-kematian-rezky-evienia-

https://bengkulueksрress. com/ keluarga-minta-pembunuh-adik-dihukum-ringan/, dibaca : tanggal 25 November 2018, Pukul. 20. 20 WIB syamsul, dibaca : tanggal 25 November 2018, Pukul. 20. 16 WIB

https://grobogannews. com/2018/04/sidang-kasus-pembunuhan-jl-mt-haryono. html,dibaca : tanggal 10 Juli 2018, Pukul. 10. 20 WIB

https:// kepaniteraan. mahkamahagung. go. id/ index. php/ statistik-perkara/ 35-landmark-decision/ perkara-pidana23/ 141-nomor-1600-kpid2009-*restorative-justice*

https://ejournal. undip. ac. id/ index. php/ mmh/ article/ view/ 11087

http://jurnal. unissula. ac. id/ index. php/ PH/ article/ view/ 1434/ 1107

https://ejournal. undiksha. ac. id/ index. php/ jkh/ article/ view/ 5006/ 3774

https://batampos. co. id/ 2020/ 01/ 17/ korban-minta-terdakwa-pencurian-dibebaskan-oleh-majelis-hakim/ ,diakses 18 April 2020 Pkl 11. 55

https:// timlo. net/ baca/ 18471/ ayah-korban-minta-iwan-adranacus-dibebaskan/ ,diakses pada tanggal 18 April 2020 Pkl 12. 05

https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2830/gelombang-on-line-dalam-perkembangan-hukum, diakses tanggal 23 April 2020,Pukul 17.02

http://legalstudies71.blogspot.com/2016/04/pengertian-definisi-dan-macam-macam.html,diakses 21 Juni 2020,Pkl.14.29)

https://www.scribd.com/document/393051269/Definisi-stipulatif,diakses 21 Juni 2020,Pkl.14.26)

http://peunebah.blogspot.com/2011/02/hapusnya-hukuman-terhadap-pelaku.html?m=1, Tinjauan Hukum Islam terhadap Bentuk-bentuk Perlidungan Korban Tindak Pidana Yang Terdapat dalam Hukum Positif,hlm.3 diakses tanggal 11 Mei 2020, Pukul 12.10

http;//people.virginia.edu/rjby3v/latin.html,10 Jul 2011

https://www.samuiforsale.com/law-texts/thai-criminal-procedure-code.html tanggal 13 Juni 2020,Pukul 18.30

http://hrlibrary.umn.edu/research/saudiarabia/criminal_proceedure.html tanggal 13 Juni 2020,Pukul 24.00

https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No70/No70_15PA_Jin.pdf,dikases\ pada tanggal 12 Mei 2020,Pukul11.32

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18,diakses tanggal 06 Juni 2020,Pukul 16.45

https://infobatanghari.wordpress.com/2017/04/20/tata-cara-praktek-persidangan-perkara-pidana/,diakses pada tanggal 19 Maret 2020, Pukul 08.00

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : IKHWALUDDIN SIMATUPANG,SH.M.Hum

Tempat / Tgl Lahir : Medan, 06 Januari 1972

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Menikah

Istri : Eka Herawaty, SH.,M.Kn

Nama Orang Tua

Bapak : Alm.Sori Muda Simatupang

Ibu : Hj.Achwani Tanjung

Anak : 1. Ahmad Syahmuddin Rahmatul Ula Simatupang

2. Miftahul Jannah Rahmatus Sani Simatupang

Alamat : Jalan Harapan Pasti, No. 30, Kelurahan Binjai,
Kecamatan : Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

PENDIDIKAN FORMAL :

1. SD Negeri No.064029 Medan, Lulus Tahun 1985
2. SMP Negeri 13 Medan, Lulus Tahun 1988
3. SMA Negeri 6 Medan, Lulus Tahun 1992
4. S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, Lulus Tahun 1998

5. S2 Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Lulus Tahun 2004
6. S3 Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang

PENDIDIKAN NON FORMAL, DIKLAT, SEMINAR :

1. Pendidikan Magang LBH Medan 2013-2014, Tahun 2013 di Medan (Narasumber)
2. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan I, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia-DPN PERADI, Tahun 2013 di Medan (Pembicara).
3. Dialog Nasional Menuju Pemilu Elektronik di Indonesia, Tahun 2011 di Jakarta (Peserta).
4. *Focus Group Discussion* KOMPOLNAS dan Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI)"Penerapan Pemolisian Demokratik Pada POLDA Sumatera Utara, Tahun 2008 di Medan (Peserta).
5. *A Training Workshop Economic, Social And Cultural Rights,* YLBH'S PIRD, Tahun 2001 di Bogor (Peserta).
6. *Human Rights Training Rights Of The Child,AusAID-Ministry Of Justice and Human Rights Affairs-SAGRIC International Pty.Ltd*, Tahun 2001 di Medan (Peserta).
7. Lokalatih Monitoring Kekerasan Terhadap Anak,Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Anak - UNICEF, Tahun 2001 di Jakarta (Peserta).
8. Kursus HAM untuk Pengacara Angkatan ke-3, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Tahun 2000 di Jakarta.
9. *Training on International Human Rights and UN System*, YLBHI-PIRD South Asia Human Rights Documentation (SAHRDC), Tahun 2000 di Jakarta (Peserta).
10. *Effective Communication Skills at Elementary Level, The British Council*, Tahun 2000 di Jakarta (Peserta).

11. Komisi Ombudsman Nasional"Rancangan Undang-undang Ombudsman Nasional, Tahun 2000 di Medan (Peserta).
12. Seminar Politik Pekan MIPA II 2000" Penerapan Sistem Perundang-undangan dalam Penegakan HAM di Indonesia, FMIPA Universitas Pakuan Bogor, Tahun 2000 di Bogor.

PENGALAMAN KERJA :

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Propinsi Sumatera Utara, Tahun 2008 s/d 2009
2. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan, Tahun 2006 s/d 2009
3. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, Tahun 2003 s/d 2008
4. Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Sejak Tahun 1998
5. Advokat, Sejak Tahun 1998